



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BANDUNG  
TAHUN 2020





**WALIKOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 030 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas ...



8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
11. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB ...

## BAB II

## RKPD

## Pasal 2

RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2020.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2020 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
  - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
  - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 4

RKPD Tahun 2020 dijadikan:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2020 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perubahan ...

(2) Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan menjadi dasar bagi penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

#### Pasal 6

Penambahan program/kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Bappelitbang menyampaikan laporan kepada Wali Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
- (2) Kepala Bappelitbang melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

#### Pasal 8

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2020.

BAB ...

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2019

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina, IV/a  
NIP. 19650715 198603 1 027

# KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu tahapan perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan

Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam penyusunannya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan partisipatif, (3) Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom Up*, (4) dan Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi.

Salah satu proses yang harus dilalui dalam penyusunan RKPD adalah Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan ruh dari pendekatan partisipatif, pada proses tersebut rancangan RKPD akan mendapatkan masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir, untuk kebutuhan tersebut disusun rancangan RKPD yang menjadi bahan dasar bagi peserta Musrenbang untuk memberi masukan.

RKPD menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan sehingga upaya untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang dituangkan dalam perencanaan jangka menengah akan dapat diimplementasikan apabila terdapat konsistensi antara perencanaan strategis dengan target kinerja dalam RKPD yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan alokasi anggaran untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga konsistensi dokumen perencanaan tahunan dengan perencanaan 5 (lima) tahunan menjadi krusial poin dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG



ODED MOHAMAD DANIAL

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
 BAB 1    PENDAHULUAN .....	 I - 1
1.1    Latar Belakang .....	I - 1
1.2    Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 6
1.3    Hubungan Antar Dokumen .....	I - 11
1.3.1    Hubungan Rancangan RKPD Kota Bandung dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 .....	I - 12
1.3.2    Hubungan Rancangan RKPD Kota Bandung dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 .....	I - 13
1.3.3    Hubungan Rancangan RKPD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 .....	I - 14
1.3.4    Hubungan Rancangan RKPD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung 2011-2031 .....	I - 15
1.3.5    Hubungan Rancangan RKPD Kota Bandung dengan Renja Perangkat Daerah .....	I - 16
1.4    Maksud dan Tujuan .....	I - 17
1.5    Sistematika Dokumen Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 .....	I - 17
 BAB 2    GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	 II - 1
2.1    Kondisi Umum Daerah.....	II - 1
2.1.1    Aspek Geografi dan Demografi .....	II - 1
2.1.1.1    Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Bandung.....	II - 1
1)    Luas dan Batas Wilayah Administrasi ....	II - 1
2)    Letak dan Kondisi Geografis .....	II - 2
3)    Kondisi Topografi .....	II - 2
4)    Kondisi Geologi .....	II - 3
5)    Kondisi Hidrologi .....	II - 3
6)    Kondisi Klimatologi .....	II - 4



7)	Penggunaan Lahan .....	II - 5
8)	Potensi Pengembangan Wilayah .....	II - 6
9)	Wilayah Rawan Bencana .....	II - 11
2.1.1.2	Demografi .....	II - 13
1)	Distribusi Jumlah Penduduk .....	II - 15
2)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	II - 17
3)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja .....	II - 19
4)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II - 20
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II - 21
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II - 21
1)	Pertumbuhan PDRB.....	II - 21
2)	PDRB Per Kapita.....	II - 26
3)	Pengeluaran Per Kapita.....	II - 28
4)	Laju Inflasi.....	II - 29
5)	Indeks Gini.....	II - 30
6)	Indeks Pembangunan Manusia.....	II - 32
7)	Tingkat Kemiskinan.....	II - 36
8)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	II - 37
9)	Aspek Kesempatan Kerja.....	II - 39
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II - 40
1)	Aspek Pendidikan .....	II - 40
2)	Aspek Kesehatan .....	II - 42
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	II - 42
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum .....	II - 44
2.1.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II - 44
1)	Pendidikan .....	II - 44
2)	Kesehatan .....	II - 45
3)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang...	II - 46
4)	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II - 48
5)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	II - 50
6)	Sosial.....	II - 52
7)	Tenaga Kerja.....	II - 53

8)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II - 54
9)	Pangan.....	II - 55
10)	Pertanahan.....	II - 55
11)	Lingkungan Hidup.....	II - 56
12)	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II - 57
13)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II - 57
14)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II - 59
15)	Perhubungan.....	II - 59
16)	Komunikasi dan Informatika .....	II - 60
17)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.....	II - 61
18)	Penanaman Modal.....	II - 62
19)	Kepemudaan dan Olah Raga.....	II - 63
20)	Statistik .....	II - 64
21)	Persandian.....	II - 64
22)	Kebudayaan.....	II - 64
23)	Perpustakaan .....	II - 65
24)	Kearsipan.....	II - 65
2.1.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II - 66
1)	Kelautan dan Perikanan.....	II - 66
2)	Pariwisata .....	II - 67
3)	Pertanian .....	II - 67
4)	Perdagangan .....	II - 68
5)	Perindustrian.....	II - 68
6)	Transmigrasi.....	II - 69
2.1.3.3	Fungsi Penunjang Lainnya.....	II - 70
1)	Perencanaan Pembangunan.....	II - 70
2)	Keuangan .....	II - 70
3)	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan .....	II - 71
4)	Penelitian dan Pengembangan .....	II - 72
5)	Pengawasan .....	II - 73
6)	Fungsi Penunjang Lainnya.....	II - 73
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah .....	II - 75
2.1.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II - 75
2.1.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II - 75
2.1.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi .....	II - 78

2.1.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia .....	II - 83
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II - 84
2.3	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ...	II - 144
BAB 3	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....	III - 1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III - 1
3.1.1	Kondisi Ekonomi .....	III - 1
3.1.1.1.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global .....	III - 1
3.1.1.2.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional .....	III - 3
3.1.1.3.	Kondisi Ekonomi Jawa Barat .....	III - 4
3.1.1.4.	Kondisi Ekonomi Kota Bandung .....	III - 12
3.2	Asumsi Dasar Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 25
3.2.1	Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bandung Tahun 2020.....	III - 25
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 28
3.2.3	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan...	III - 30
3.2.3.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III - 30
3.2.3.2.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III - 40
3.2.3.3.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III - 50
BAB 4	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV - 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV - 4
4.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.	IV - 4
4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....	IV - 5
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bandung.....	IV - 9
4.2	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020.....	IV - 11
4.2.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi .....	IV - 15
4.2.1.1	Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional .....	IV - 15
4.2.1.2	Sinkronisasi Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi .....	IV - 18
4.2.2	Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020.....	IV - 19
BAB 5	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V - 1
5.1	Ringkasan Anggaran Perangkat Daerah .....	V - 3

5.1.1	Ringkasan Anggaran Belanja Langsung.....	V - 3
5.1.2	Ringkasan Anggaran Belanja Tidak Langsung.....	V - 24
5.2	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 .....	V - 27
BAB 6	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....	VI - 1
BAB 7	PENUTUP .....	VII - 1
LAMPIRAN RENJA PERANGKAT DAERAH		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 4
Tabel 2.2	Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 5
Tabel 2.3	Kelembapan Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 5
Tabel 2.4	Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kota Bandung .....	II – 12
Tabel 2.5	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2014-2018 .....	II – 15
Tabel 2.6	Distribusi Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014-2018 .....	II – 15
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Bandung Tahun 2017 .....	II – 17
Tabel 2.8	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013–2017.....	II – 22
Tabel 2.9	PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013–2017.....	II – 23
Tabel 2.10	Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung, Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah) .....	II – 28
Tabel 2.11	Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2014-2018 .....	II – 29
Tabel 2.12	IPM Kota Bandung Tahun 2014-2018 .....	II – 32
Tabel 2.13	Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2017-2018 .....	II – 36
Tabel 2.14	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 .....	II – 38
Tabel 2.15	Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2014-2018 .....	II – 41
Tabel 2.16	Rata-rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2014-2018 .....	II – 41
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2014-2018.....	II – 41
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2014-2018.....	II – 42
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2014-2018.....	II – 42
Tabel 2.20	Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2015-2017.....	II – 43
Tabel 2.21	Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2016-2017.....	II – 43
Tabel 2.22	Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II – 45
Tabel 2.23	Persentase Guru Berpendidikan $\geq$ S1 di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 45
Tabel 2.24	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 46

Tabel 2.25	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017 .....	II – 46
Tabel 2.26	Indikator Pekerjaan Umum di Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II – 47
Tabel 2.27	Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II – 48
Tabel 2.28	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II – 48
Tabel 2.29	Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Bandung Tahun 2014-2018 .....	II – 48
Tabel 2.30	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018 .....	II – 51
Tabel 2.31	Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II – 52
Tabel 2.32	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung Tahun 2017-2018 .....	II – 52
Tabel 2.33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013-2017 .....	II – 53
Tabel 2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II – 54
Tabel 2.35	Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 54
Tabel 2.36	Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 55
Tabel 2.37	Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 56
Tabel 2.38	Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 57
Tabel 2.39	PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 58
Tabel 2.40	Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017 .....	II – 58
Tabel 2.41	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017..	II – 59
Tabel 2.42	Indikator Perhubungan di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 59
Tabel 2.43	Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 60
Tabel 2.44	Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2018...	II – 61
Tabel 2.45	Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 62
Tabel 2.46	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 62
Tabel 2.47	Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II – 63
Tabel 2.48	Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2014-2018 .....	II – 63
Tabel 2.49	Statistik di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 64
Tabel 2.50	Persandian Kota Bandung Tahun 2014-2018.....	II – 64
Tabel 2.51	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 65
Tabel 2.52	Indikator Perpustakaan di Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II – 65
Tabel 2.53	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 66
Tabel 2.54	Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II – 67

Tabel 2.55	Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2013-2018.....	II - 67
Tabel 2.56	Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2013-2017.	II - 68
Tabel 2.57	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2013-2016.....	II - 68
Tabel 2.58	Nilai Ekspor Kota Bandung Tahun 2013-2018 .....	II - 68
Tabel 2.59	Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2018.....	II - 69
Tabel 2.60	Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2018.....	II - 69
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014-2018.....	II - 70
Tabel 2.62	Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.....	II - 71
Tabel 2.63	Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013 - 2018.....	II - 71
Tabel 2.64	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013-2017.....	II - 72
Tabel 2.65	Perkembangan Pengawasan Tahun 2014-2018 .....	II - 73
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya Tahun 2017-2018.....	II - 74
Tabel 2.67	Capaian Realisasi AKIP Kota Bandung Tahun 2015-2018 .....	II - 74
Tabel 2.68	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung Periode 2013-2016 (Rp Juta).....	II - 75
Tabel 2.69	Jumlah Penginapan/Hotel.....	II - 76
Tabel 2.70	<i>Liveable City Index</i> Tahun 2017-2018.....	II - 78
Tabel 2.71	Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	II - 80
Tabel 2.72	Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	II - 82
Tabel 2.73	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2013-2017.....	II - 83
Tabel 2.74	Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2013-2016 (dalam Persen).....	II - 84
Tabel 2.75	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2018.....	II - 85
Tabel 2.76	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	II - 144
Tabel 3.1	Indikator dan Proyeksi Perekonomian Dunia Tahun 2017 - 2020.....	III - 2
Tabel 3.2	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pengeluaran dan Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (dalam Persen).....	III - 3
Tabel 3.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Barat Tahun 2016-2018 (Juta Orang).....	III - 11
Tabel 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (dalam Persen).....	III - 18
Tabel 3.5	Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (dalam Persen).....	III - 21
Tabel 3.6	Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013 - 2017 (dalam Juta Rupiah Per Kapita).....	III - 23
Tabel 3.7	Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2014 - 2018.....	III - 24
Tabel 3.8	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung Tahun 2020	III - 27
Tabel 3.9	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung.....	III - 31
Tabel 3.10	Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandung.....	III - 32
Tabel 3.11	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung.....	III - 33



Tabel 3.12	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bandung.....	III - 35
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.....	III - 36
Tabel 3.14	Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kota Bandung.....	III - 37
Tabel 3.15	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Bandung.....	III - 42
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Daerah Kota Bandung.....	III - 42
Tabel 3.17	Rincian Proyeksi Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun 2020.....	III - 43
Tabel 3.18	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.....	III - 45
Tabel 3.19	Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bandung.....	III - 47
Tabel 3.20	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.....	III - 51
Tabel 3.21	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.....	III - 53
Tabel 4.1	Indikator Pembangunan Tahun 2020 .....	IV - 5
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	IV - 7
Tabel 4.3	Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020.....	IV - 9
Tabel 4.4	Skoring Prioritas Pembangunan Tahun 2020.....	IV - 14
Tabel 4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020.....	IV - 16
Tabel 4.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs.....	IV - 17
Tabel 4.7	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.....	IV - 19
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2020.....	IV - 19
Tabel 4.9	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	IV - 23
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun 2020.....	V - 4
Tabel 5.2	Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung pada Anggaran Tahun 2020.....	V - 24
Tabel 6.1	Proyeksi Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2020.....	VI - 2
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2020.....	VI - 2
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung.....	VI - 4



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rancangan RKPD.....	I - 2
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen Rencana.....	I - 11
Gambar 1.3	Hubungan Rancangan RKPD Kota Bandung 2020 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I - 15
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Bandung.....	II - 2
Gambar 2.2	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung Tahun 2014 – 2018.....	II - 14
Gambar 2.3	Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014-2018....	II - 17
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 – 2018.....	II - 18
Gambar 2.5	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015, dan 2017-2018.....	II - 19
Gambar 2.6	Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2014-2018.....	II - 21
Gambar 2.7	Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Berlaku).....	II - 24
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional (Metode Tahun Dasar 2010).....	II - 26
Gambar 2.9	PDRB Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013-2017.....	II - 27
Gambar 2.10	Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung, Tahun 2013-2017 (dalam ribu rupiah) .....	II - 28
Gambar 2.11	Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2014-2018.....	II - 30
Gambar 2.12	Inflasi Tahun 2018 Kota di Jawa Barat.....	II - 30
Gambar 2.13	Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014 – 2018 .....	II - 31
Gambar 2.14	IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2018 .....	II - 34
Gambar 2.15	Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.....	II - 35
Gambar 2.16	Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung Periode 2013-2015 dan 2017-2018.....	II - 40
Gambar 2.17	Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN Tahun 2013-2017 .....	II - 77
Gambar 2.18	<i>Liveable City Index</i> Kota Bandung Tahun 2017-2018 .....	II - 78
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2018 (dalam Persen).....	III - 5
Gambar 3.2	Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan 7 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 - 2018 (dalam Persen).....	III - 6
Gambar 3.3	Angka Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 (dalam Persen).....	III - 7

Gambar 3.4	Pangsa Aset Perbankan Jawa Barat Per Kelompok Bank Triwulan IV Tahun 2018.....	III - 8
Gambar 3.5	Proporsi Dana Pihak Ketiga Jawa Barat Triwulan IV Tahun 2018.....	III - 9
Gambar 3.6	Proporsi Kredit Menurut Jenis Penggunaan Triwulan IV Tahun 2017.....	III - 10
Gambar 3.7	Perkembangan Kredit Kota/Kabupaten Triwulan IV Tahun 2017.....	III - 10
Gambar 3.8	Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017.....	III - 12
Gambar 3.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013-2017 dan Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%).....	III - 13
Gambar 3.10	Kontribusi Kota Bandung pada Ekonomi Nasional.....	III - 14
Gambar 3.11	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, BMA, Jawa Barat dan Nasional.....	III - 15
Gambar 3.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 (dalam Persen).....	III - 16
Gambar 3.13	Kontribusi Ekonomi Kota Bandung Tahun 2017 (dalam Persen).....	III - 19
Gambar 3.14	Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 (dalam Trilyun Rupiah).....	III - 20
Gambar 3.15	Inflasi Tahunan Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 (dalam Persen).....	III - 23
Gambar 3.16	Inflasi Bulanan Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 (dalam Persen).....	III - 24

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Rancangan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (Rancangan RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, Rancangan RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Rancangan RKPD disusun melalui tahapan panjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang terdiri dari persiapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang Rancangan RKPD, perumusan Rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan siklus yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1  
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rancangan RKPD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam gambar tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- penyusunan Rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- orientasi mengenai RKPD;
- penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

### 2. Penyusunan Rancangan awal RKPD

Penyusunan Rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

- a. Tahap penyusunan Rancangan RKPD, mencakup:
    - 1) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
    - 2) analisis Rancangan kerangka ekonomi Daerah;
    - 3) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
    - 4) penelaahan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
    - 5) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
    - 6) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
    - 7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
    - 8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
    - 9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
    - 10) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
    - 11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
  - b. Dalam penyusunan Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPELITBANG berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
  - c. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPELITBANG dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
- Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:
- a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan

- b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

  - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
  - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
  - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
5. Perumusan Rancangan akhir RKPD

Perumusan Rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perwal RKPD.
6. Penetapan Rancangan RKPD

Rancangan Perwal tentang Rancangan RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPELITBANG kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang Rancangan RKPD dijadikan sebagai:

  - a. pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
  - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan Rancangan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *Pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun kedua dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji walikota/wakil walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektifitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2020;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

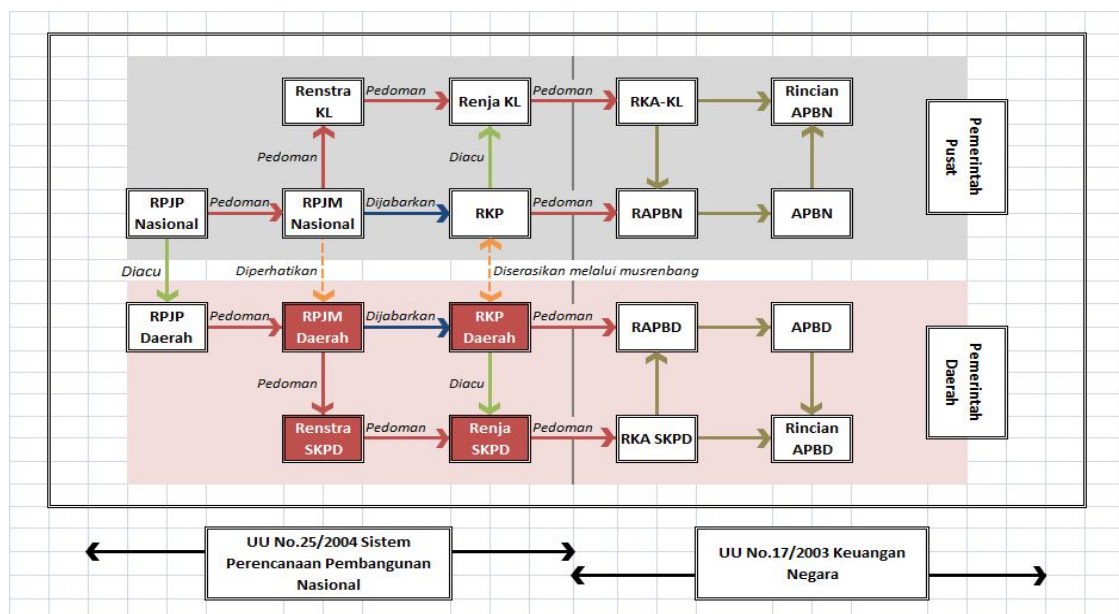
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
39. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 Tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 disusun untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Rancangan RKPD Kota Bandung tahun 2020 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025) dan jangka menengah (RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023), sehingga keberadaannya tidak dapat terpisahkan.

Penyusunan Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, serta RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Agar Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Dokumen Rencana**



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### **1.3.1. HUBUNGAN RANCANGAN RKPD KOTA BANDUNG DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020**

Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional Tahun 2020, Pemerintah Pusat telah menetapkan **Tema RKP 2020** adalah: **"Pembangunan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Berkualitas"**.

Penjabaran dari tema pembangunan tersebut dalam bentuk prioritas pembangunan. Pada dokumen RKP Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

#### **1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.**

Prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan dan pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa.

#### **2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**

Prioritas infrastruktur dan pemerataan wilayah dilaksanakan melalui perluasan infrastruktur dasar, penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana, peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur perkotaan dan perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja**

Prioritas nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja dilaksanakan melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri, serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

#### **4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan**

Prioritas ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan energi baru dan terbarukan (EBT), peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan, serta penguatan ketahanan bencana.

#### **5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**

Prioritas stabilitas pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui penguatan kemampuan pertahanan, peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional, penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi, penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber dan penguatan keamanan laut, serta penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

#### **1.3.2. HUBUNGAN RANCANGAN RKPD KOTA BANDUNG DENGAN RANCANGAN RKPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020**

Penyusunan Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 wajib mengacu pada dokumen Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Proses penyusunan Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Akses pendidikan untuk Semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan bangun desa (Gerbang Desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah
9. Inovasi Pelayanan publik dan penataan daerah (reformasi birokrasi)

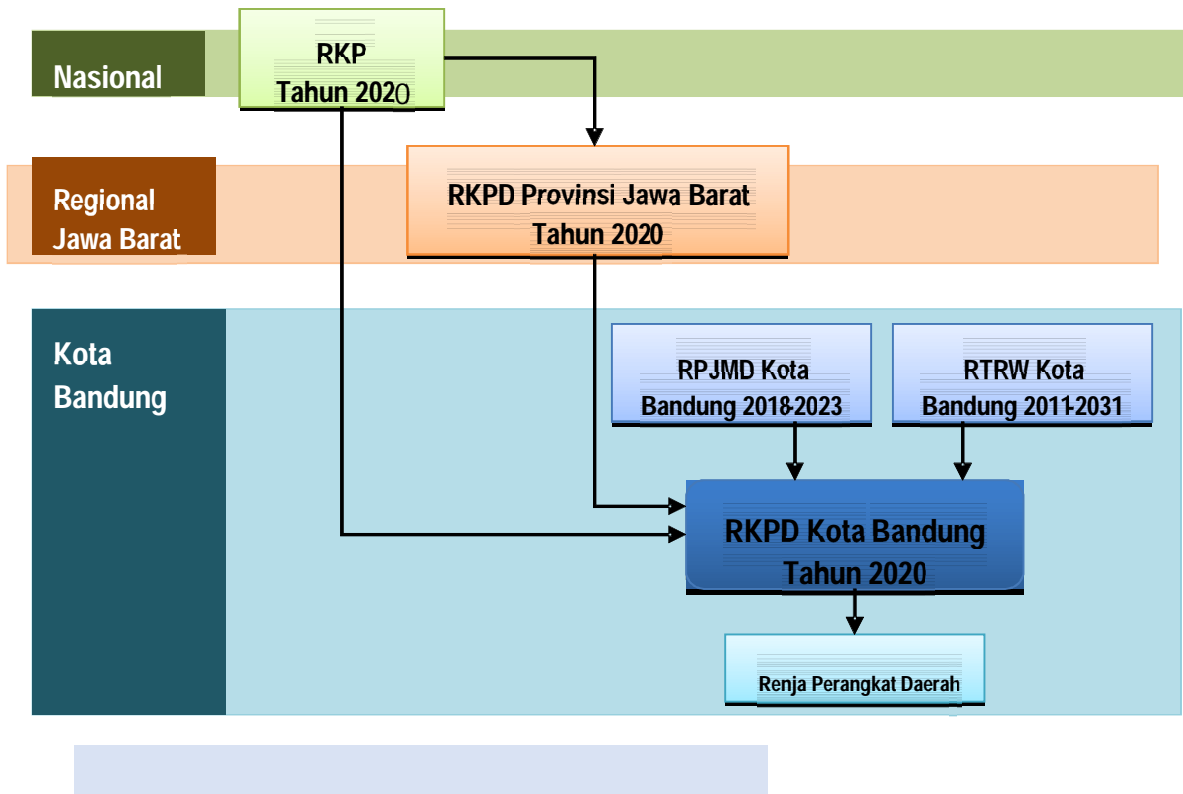
### **1.3.3. HUBUNGAN RANCANGAN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2020 DENGAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2018-2023**

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan tahun kedua RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

RKPD Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Sasaran daerah dengan indikator dan target yang telah ditetapkan pada Tahun ke dua RPJMD secara otomatis menjadi kinerja yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2020. Perangkat Daerah tidak diperkenankan untuk melaksanakan program yang tidak tercantum dalam RPJMD, sebaliknya seluruh program, indikator dan target yang tercantum dalam RPJMD harus dilaksanakan dalam RKPD. Secara umum hubungan antara RPJMD dengan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1.3**  
**Hubungan Rancangan RKPD Kota Bandung 2020 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

#### **1.3.4. HUBUNGAN RANCANGAN RKPD KOTA BANDUNG DENGAN RTRW KOTA BANDUNG 2011-2031**

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memperhatikan RTRW Kota Bandung dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan

pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

Dalam menyusun RKPD juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **1.3.5. HUBUNGAN RANCANGAN RKPD KOTA BANDUNG DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rancangan RKPD kabupaten/kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan Rancangan RKPD. Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rancangan RKPD.

## 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung tahun 2020 adalah:

1. Melakukan penjabaran terhadap RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dan Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020 adalah:

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun 2020.

## 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RANCANGAN RKPD KOTA BANDUNG TAHUN 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD sebagai berikut:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

## **BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan aspek kondisi umum daerah (aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah (yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyelenggaraan urusan pemerintah daerah).

## **BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang: (1) Arah kebijakan ekonomi daerah, yang memuat arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP, kebijakan ekonomi dalam dokumen RPJMD; (2) Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan mengenai arah kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah serta belanja daerah.

## **BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2020.

## **BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana kerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan kedudukan kinerja Tahun 2020 dalam RPJMD.

## **BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB 7 PENUTUP**

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

## BAB 2

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran kondisi umum Kota Bandung yang mencakup 4 (empat) aspek sebagai berikut:

- (i) aspek geografi dan demografi;
- (ii) aspek kesejahteraan;
- (iii) aspek pelayanan umum; dan
- (iv) aspek daya saing daerah.

## 2.1 KONDISI UMUM DAERAH

### 2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1.1. KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH KOTA BANDUNG

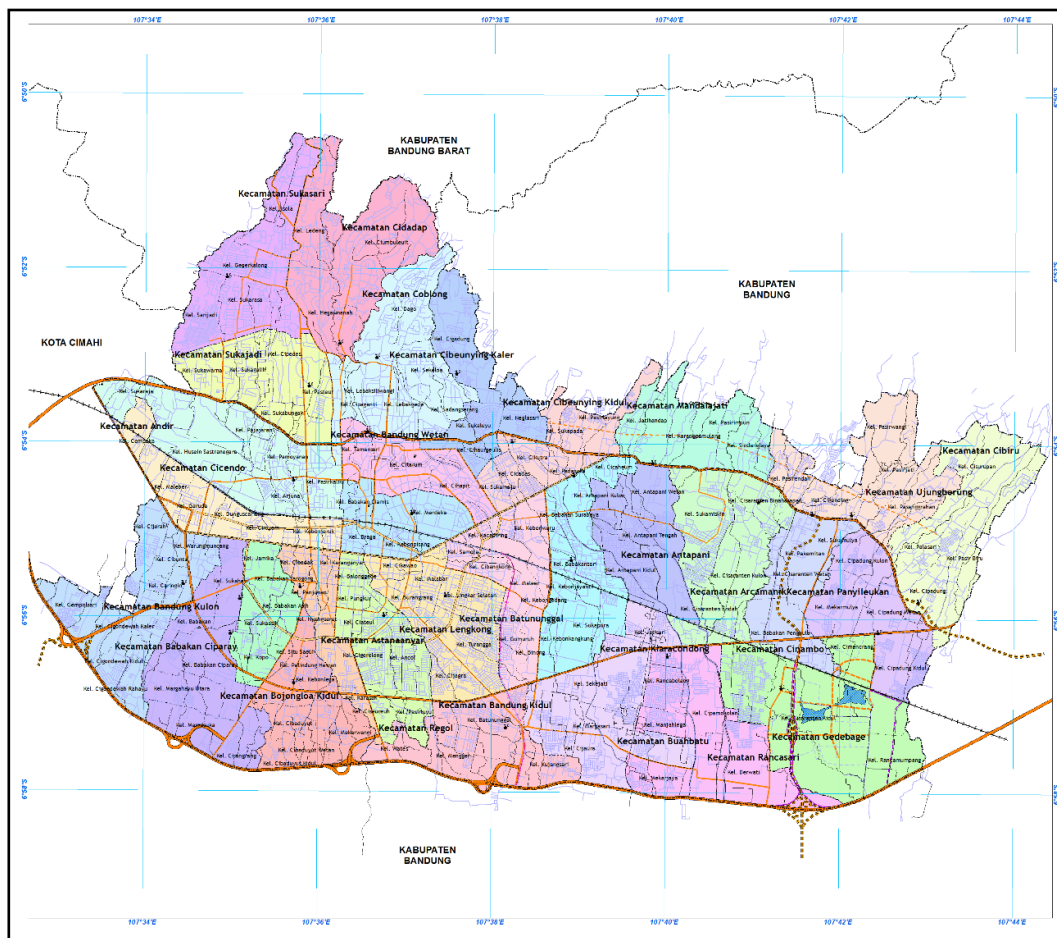
##### 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, luas wilayah Kota Bandung adalah 16.729,65 ha. Secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi;
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.584 Rukun Warga (RW) dan 9.873 Rukun Tetangga (RT).

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Bandung**



Sumber: Pemerintah Kota Bandung, 2018

## **2) Letak dan Kondisi Geografis**

Secara astronomis, Kota Bandung berada pada 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Bandung terletak di bagian tengah “Cekungan Bandung” dengan dimensi luas 233.000 ha. Cekungan ini terletak di lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

## **3) Kondisi Topografi**

Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api memiliki permukaan tanah relatif datar, sedangkan wilayah kota bagian utara memiliki topografi berbukit.

Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada Cekungan Bandung (*basin*) yang dikelilingi oleh gunung api dengan ketinggian 650 m sampai lebih dari 2.000 m. Pada dasar cekungan mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), mengalir ke Waduk Saguling dan bermuara di Pantai Utara Jawa. Sebagian besar wilayah cekungan Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 – 8%), 21% merupakan daerah landai (kemiringan 8% – 15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%).

#### **4) Kondisi Geologi**

Keadaan geologis Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial yang merupakan hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, sedangkan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Pada bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Secara geologis, Kota Bandung berada pada Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik.

#### **5) Kondisi Hidrologi**

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh 16 sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cikapundung Kolot, Sungai Citepus, Sungai Cibuntu, Sungai Cikendal, Sungai Cipanjal, Sungai Cibiru, Sungai Cibeunying, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Ciharalang, Sungai Cicadas, Sungai Cikiley, dan Sungai Cinambo, Sungai Cisaranten, dan Sungai Ciparumpung. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan mandi cuci kakus (MCK).

Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, pertanian, dan lainnya. Saat ini, kondisi sebagian besar sungai di Kota

Bandung telah mengalami pencemaran. Regulasi yang tidak tegas terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai yang ada. Selain itu, penurunan kualitas sungai disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini telah banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

## 6) Kondisi Klimatologi

Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di sekitarnya, sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembap. Pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan suhu, serta musim hujan yang lebih panjang dari biasanya.

### a. Curah Hujan

Pada tahun 2017, tingkat curah hujan Kota Bandung bervariasi dari 39,1 mm sampai dengan 442,2 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 442,2 mm dan curah hujan terendah pada bulan Juli sebesar 39,1 mm. Kondisi curah hujan rata-rata, hari hujan, dan lama penyinaran matahari Kota Bandung pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Curah Hujan Rata-Rata, Hari Hujan, dan Lama Penyinaran Matahari**  
**di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

Tahun	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	LPM (%)
2017	191,54	19,75	56,25
2016	295,80	30	52
2015	184,74	17,42	67
2014	198,80	18,8	60,3
2013	223,45	20	59

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

### b. Suhu

Pada tahun 2017, suhu di Kota Bandung tercatat suhu tertinggi 24,2°C pada bulan Januari dan suhu terendah 23°C pada bulan Februari. Secara alamiah, Kota Bandung tergolong daerah yang cukup sejuk. Rata-rata temperatur di Kota Bandung pada tahun 2017 mencapai 23,48°C. Kondisi temperatur rata-rata Kota Bandung dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.2**  
**Temperatur Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017**

Tahun	Temperatur (°C)		
	Rata-rata	Maksimum	Minimum
2017	23,48	29,17	20,07
2016	23,8	24,4	23,1
2015	23,6	29,9	19,5
2014	23,4	29,1	19,8
2013	23,5	29,0	19,9

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

### c. Kelembapan Udara

Selama periode 2013–2017, kelembapan udara rata-rata di Kota Bandung berfluktuasi. Kelembapan udara rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 80%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 56,25%. Kondisi kelembapan udara rata-rata Kota Bandung dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Kelembapan Rata-rata Kota Bandung Tahun 2013-2017**

Tahun	Rata-rata (%)
2017	56,25
2016	80
2015	74
2014	77,17
2013	77

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

## 7) Penggunaan Lahan

### a. Kawasan Budidaya

**Kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Bandung terdiri atas:

- Kawasan perumahan,
- Kawasan pertanian,
- Kawasan perdagangan dan jasa,
- Kawasan industri dan pergudangan,
- Kawasan wisata buatan,
- Kawasan hankam,
- Kawasan perkantoran.

Penggunaan lahan di Kota Bandung didominasi oleh lahan permukiman, jumlahnya meningkat sangat signifikan terutama pertumbuhan perumahan di bagian timur dan utara Kota Bandung. Persentase luas lahan pertanian basah di tahun 2014 tercatat hanya sekitar 6,75% berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan penggunaan lahan untuk perdagangan dan jasa mencapai 2,35% dan penggunaan lahan untuk industri sebesar 5,36% dari total lahan yang ada.

#### **b. Kawasan Lindung**

**Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Kota Bandung terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya,
- Kawasan perlindungan setempat,
- Kawasan RTH,
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya,
- Kawasan eks industri,
- Kawasan rawan bencana,
- Kawasan lindung lainnya.

Luasan kawasan RTH di Kota Bandung terdiri atas RTH privat dan RTH Publik. Data tahun 2017 sesuai LKPJ AMJ, RTH Kota Bandung sebesar 12,20% dari luas total Kota Bandung. RTH publik, terdiri atas: taman kota, kebun bibit, RTH pemakaman, sempadan tegangan tinggi/sutet, sempadan sungai, jalur hijau jalan, sempadan kereta api, serta RTH yang merupakan PSU perumahan formal yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. RTH privat, terdiri atas: RTH kawasan permukiman, RTH sarana pelayanan umum pendidikan, RTH sarana pelayanan umum kesehatan, RTH kawasan militer, RTH kawasan perdagangan industri, dan RTH perkantoran dan perdagangan.

#### **8) Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.

### **a. Pengembangan Kawasan Perumahan**

Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi, direncanakan di Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Bandung Kulon, Bojongloa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Astana Anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul.

Perumahan kepadatan sedang, yaitu di Kecamatan Bandung Wetan, Bandung Kidul, Cibeunying Kaler, Mandalajati, Arcamanik, Rancasari, dan Cibiru. Perumahan kepadatan rendah, yaitu di Kecamatan Cidadap, Ujung Berung, Gedebage, Cinambo, dan Panyileukan. Kepadatan perumahan yang direncanakan ini untuk rata-rata per wilayah dan kecamatan dengan pengembangan secara horizontal yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang untuk pengembangan perumahan.

Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan di kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan *slum area* (daerah kumuh) dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang mendekati 80% - 90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Pada daerah kumuh ini akan dilakukan *urban renewal* dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik, dengan cara optimalisasi aset Pemerintah Kota Bandung pada zona perumahan, pembangunan rumah susun, kampung wisata, kampung kreatif, dan perbaikan infrastruktur pemukiman. *Urban renewal* dan *redevelopment* direncanakan pada beberapa daerah kumuh, antara lain di Kelurahan Taman Sari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara Condong di atas tanah milik pemerintah daerah.

### **b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa**

Berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031, kawasan jasa meliputi kegiatan berikut ini:

1. Jasa keuangan, meliputi bank, asuransi, keuangan non bank, dan pasar modal;
2. Jasa pelayanan, meliputi komunikasi, konsultan, dan kontraktor;
3. Jasa profesi, meliputi pengacara, dokter, dan psikolog;
4. Jasa perdagangan, meliputi ekspor-impor dan perdagangan berjangka; dan
5. Jasa pariwisata, meliputi agen dan biro perjalanan dan penginapan.

Kawasan jasa direncanakan untuk dikembangkan sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur;
2. Pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya;
3. Pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.

Untuk kawasan perdagangan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko. Pengembangan kawasan pasar tradisional akan dilakukan di pusat kegiatan yang akan dijadikan sebagai pusat sekunder. Bentuk pasar ini dapat berupa pasar modern (*shopping mall*), ataupun pasar tradisional namun dengan penataan dan pengaturan yang ketat agar terjaga lingkungannya (sebaiknya berupa pasar tertutup/dalam gedung). Rencana pengembangan fasilitas pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pasar Induk Gedebage yang terpadu dengan pengembangan PPK Gedebage;
2. Pembangunan kembali (*redevelopment*) kawasan Pasar Andir, Pasar Kiaracondong, Pasar Ciroyom, Pasar Ujung Berung, dan pasar-pasar khusus lainnya;
3. Pengaturan dan penataan pasar yang masih sesuai dengan peruntukannya dan relokasi pasar lingkungan kelurahan/kecamatan dan sekitarnya yang sudah tidak sesuai lagi peruntukannya di 30 kecamatan;
4. Pengaturan kegiatan perdagangan grosir di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk Pasar Induk Caringin dan Gedebage.

Arahan pengembangan kawasan pusat perbelanjaan adalah sebagai berikut:

1. pengendalian pusat belanja di wilayah Bandung Barat;
2. pengembangan pusat belanja ke wilayah Bandung Timur;
3. pengendalian perkembangan pusat belanja dan pertokoan yang cenderung linier sepanjang jalan arteri dan kolektor.

### **c. Pengembangan Kawasan Perkantoran**

Konteks pengembangan kawasan perkantoran yang dimaksud adalah pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan. Pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah

berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

#### **d. Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan**

Rencana pengembangan kawasan industri non polutan dan pergudangan adalah sebagai berikut:

1. Relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;
2. Mempertahankan industri kecil dan rumah tangga ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
3. Pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;
4. Pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Bandung Barat dan diarahkan untuk dikembangkan ke wilayah Bandung Timur.

Rencana pengembangan kawasan industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan industri kecil yang ada di lingkungan perumahan pada kawasan strategis ekonomi Kota Bandung;
2. Mengembangkan industri kecil dan menengah ke Kecamatan Ujung Berung, Cibiru, dan Gedebage.

Kawasan pergudangan diarahkan ke pinggiran kota yang ditunjang oleh akses yang memadai akan dikembangkan ke lokasi yang memiliki akses jalan arteri primer dan/atau akses peti kemas Gedebage.

Sedangkan pengembangan kawasan industri rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga, yang terdiri atas: sentra kaos Surapati, sentra tekstil dan konveksi Cigondewah, sentra boneka Sukamulya (dihapus), sentra rajutan Binongjati, sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut; serta sentra industri potensial lainnya yang dikembangkan;
2. Pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga; dan
3. Revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.

#### **e. Pengembangan Kawasan Wisata Buatan**

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;

2. Pengembangan obyek wisata di wilayah Bandung Timur;
3. Mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
4. Pengembangan sarana konferensi ke arah wilayah Bandung Timur;
5. Pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

**f. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)**

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau, terdiri atas RTNH Publik dan RTNH Privat. RTNH publik meliputi lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas. RTNH privat adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**g. Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal**

Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
2. Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10% untuk kegiatan sektor informal;
3. Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan; dan
4. Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.

**h. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana**

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;
2. Pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan *Sport Centre Jawa Barat* di Kecamatan Arcamanik;
3. Pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;

4. Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar, seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
5. Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

#### **i. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya**

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung, terdiri atas kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan pelayanan umum pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

##### **1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kondisi eksisting dari kawasan kegiatan militer adalah terkonsentrasi di Kota Bandung bagian barat, yaitu berada di SWP Cibeunying dan SWP Karees. Pengembangan kawasan kegiatan militer ini direncanakan sebagai berikut:

- Mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan, meliputi Kawasan Pangkalan Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung;
- Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

##### **2. Kawasan Pertanian**

Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung, dan Cibiru, serta menetapkan menjadi Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)

#### **9) Wilayah Rawan Bencana**

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) sumber gempa bumi Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) sumber gempa bumi Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) sumber gempa bumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi pula sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Ancaman bencana geologis bagi Kota Bandung sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/*fault*) dari 3 (tiga) penjuru, setiap sesar menyimpan potensi kegempaan. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjung Sari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Daerah rawan banjir, diantaranya: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
2. Daerah rawan bencana gempa bumi, diantaranya: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracondong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
3. Daerah rawan longsor, diantaranya: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.
4. Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Cibiru.
5. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi, diantaranya: Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Coblong, dan Cibeunying Kaler.

Tabel berikut merupakan rencana penanganan kawasan bencana di Kota Bandung.

**Tabel 2.4**  
**Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kota Bandung**

No	Rencana Penanganan Kawasan Bencana	
1	Rencana penanganan rawan bencana kebakaran.	a. Pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan b. Peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.
2	Rencana penanganan rawan bencana gerakan tanah.	a. Relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor dan b. Pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah.



No	Rencana Penanganan Kawasan Bencana	
3	Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir.	a. Rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan; b. Peningkatan kapasitas saluran drainase jalan; c. Pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan d. Peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis.
4	Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi.	Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.
5	Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi.	Pengendalian pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

Sumber: RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031

#### 2.1.1.2. DEMOGRAFI

Perubahan demografis merupakan salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

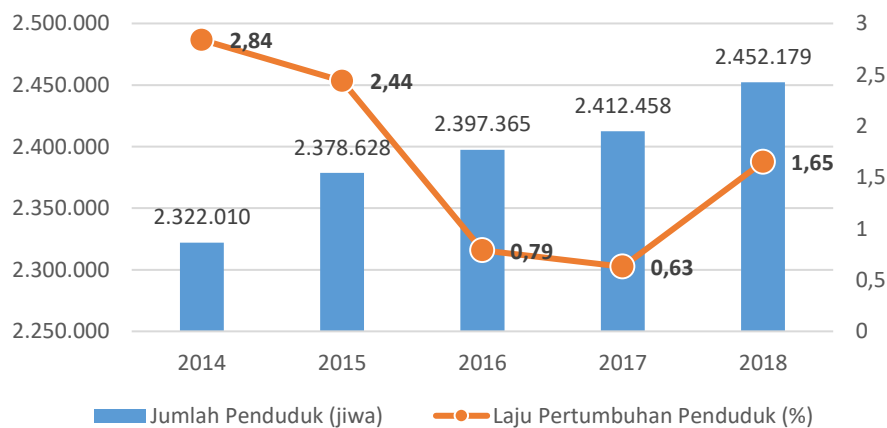
Penduduk atau masyarakat merupakan titik sentral dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Selain akibat pertumbuhan penduduk secara alami (fertilitas), adanya migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif) menyebabkan jumlah penduduk Kota Bandung terus bertambah setiap tahunnya. Tidak dapat

dipungkiri bahwa geliat perkembangan aspek sosial ekonomi Kota Bandung yang terus meningkat hingga saat ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk daerah lain untuk mengadu nasib. Ditambah lagi peran Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang menjadikan magnet penarik bagi penduduk dari daerah lain untuk datang ke Kota Bandung, dinamika ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan pelayanan publik (*public services*) secara layak dan menyeluruh bagi masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2014-2018, terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.322.010 jiwa, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.452.179 jiwa, dan pertahun mengalami tren pertumbuhan yang terus mengecil. Dalam hal ini rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung periode 2014-2018 mencapai 1,67%. Berdasarkan tren yang ada, maka bila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk, maka Kota Bandung termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 1% atau kurang 1%.

**Gambar 2.2**  
**Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Bandung**  
**Tahun 2014 – 2018**



Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

**Tabel 2.5**  
**Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.322.010	2.378.628	2.397.365	2.412.458	2.452.179
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	13.879	14.218	14.330	14.420	14.765
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,84	2,44	0,79	0,63	1,65
Komposisi Penduduk, menurut:					
a. Jenis Kelamin					
– Laki - Laki (orang)	1.182.714	1.202.025	1.211.803	1.218.143	1.233.357
– Perempuan (orang)	1.139.296	1.176.603	1.185.562	1.194.315	1.218.822
b. Angkatan Kerja (orang)	1.192.770	1.192.521	N/A	1.219.398	1.204.451
– Jumlah yang Bekerja (orang)	1.096.799	1.084.989	N/A	1.116.529	1.107.986
– Jumlah Pengangguran (orang)	95.971	107.532	N/A	102.869	96.465
– Tingkat Pengangguran (%)	8,05	9,02	N/A	8,44	8,01
c. Pendidikan (penduduk usia > 10 tahun dan ijazah tertinggi).					
– Tidak Mempunyai Ijazah (%)	12,39	13,82	12,11	11,70	12,36
– SD/MI/Sederajat (%)	16,39	17,01	15,56	15,46	14,96
– SMP/MTs/Sederajat (%)	17,11	16,77	16,64	16,72	16,04
– SLTA/Sederajat (%)	36,20	34,37	37,57	37,70	37,51
– Perguruan Tinggi (%)	17,90	18,03	18,11	18,41	19,13

Sumber: BPS dan Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

### 1) Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Distribusi Penduduk Per Kecamatan dan Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	Kepadatan 2018
1	Sukasari	71.280	70.136	72.456	74.029	76.256	12.162
2	Coblong	108.468	128.238	110.803	111.247	112.337	15.283
3	Babakan Ciparay	123.277	119.886	130.470	132.497	137.077	18.400
4	Bojongloa Kaler	116.140	110.888	121.107	120.851	122.927	40.570
5	Andir	97.793	104.807	101.975	99.085	98.790	26.627
6	Cicendo	91.330	93.132	93.745	94.048	94.998	13.848

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	Kepadatan 2018
7	Sukajadi	96.218	91.893	98.998	99.672	100.784	23.439
8	Cidadap	49.856	47.497	52.092	52.044	53.011	8.676
9	Bandung Wetan	29.406	38.076	30.957	29.774	28.793	8.494
10	Astana Anyar	71.893	68.047	73.643	73.236	73.696	25.501
11	Regol	77.109	93.926	81.753	80.314	79.470	18.482
12	Batununggal	114.164	114.486	116.707	117.515	119.959	23.849
13	Lengkong	70.759	79.205	71.575	70.943	70.504	11.950
14	Cibeunying Kidul	106.377	101.646	109.045	109.149	111.140	21.169
15	Bandung Kulon	127.498	120.501	130.562	130.831	131.842	20.408
16	Kiaracondong	118.888	123.778	122.312	124.255	128.574	21.009
17	Bojongloa Kidul	81.286	78.173	83.289	84.079	84.836	13.552
18	Cibeunying Kaler	67.727	67.727	67.913	68.316	69.077	15.351
19	Sumur Bandung	34.800	41.406	35.538	35.919	36.233	10.656
20	Antapani	71.493	68.715	74.008	75.209	77.490	20.446
21	Bandung Kidul	54.692	51.173	56.909	57.732	58.967	11.723
22	Buah Batu	93.103	100.711	96.696	97.857	99.461	12.542
23	Rancasari	76.706	81.951	79.229	80.701	82.029	11.191
24	Arcamanik	67.476	65.494	70.667	72.424	74.780	12.739
25	Cibiru	69.378	81.614	70.200	71.612	72.010	11.766
26	Ujungberung	76.757	74.806	79.600	81.271	84.552	13.211
27	Gedebage	36.091	35.425	37.504	38.169	39.640	4.138
28	Panyileukan	36.193	35.778	37.401	37.882	38.633	7.575
29	Cinambo	23.186	22.385	23.871	24.145	24.812	6.742
30	Mandalajati	62.666	67.128	66.340	67.652	69.501	10.420
<b>JUMLAH</b>		<b>2.322.010</b>	<b>2.378.628</b>	<b>2.397.365</b>	<b>2.412.458</b>	<b>2.452.179</b>	<b>14.765</b>

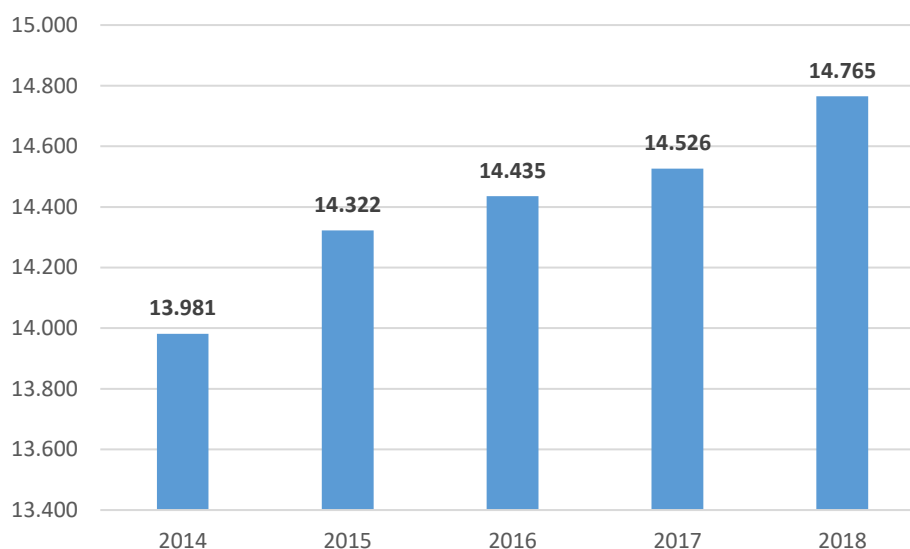
Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kota Bandung dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar pula. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

Besaran jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,31 km<sup>2</sup>, sehingga rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2018 adalah 14.765 jiwa per km<sup>2</sup>. Dalam tataran regional Jawa Barat ataupun nasional, tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dari grafik berikut terlihat bahwa kepadatan

penduduk Kota Bandung terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk ini juga berimplikasi pada makin terbatasnya pemanfaatan lahan di Kota Bandung.

**Gambar 2.3**  
**Kepadatan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2014-2018**



Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

## 2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2017 yang mencapai 72,24% (1.804.494 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Secara rinci, jumlah dan persentase penduduk kelompok umur tahun 2017, tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Bandung Tahun 2017**

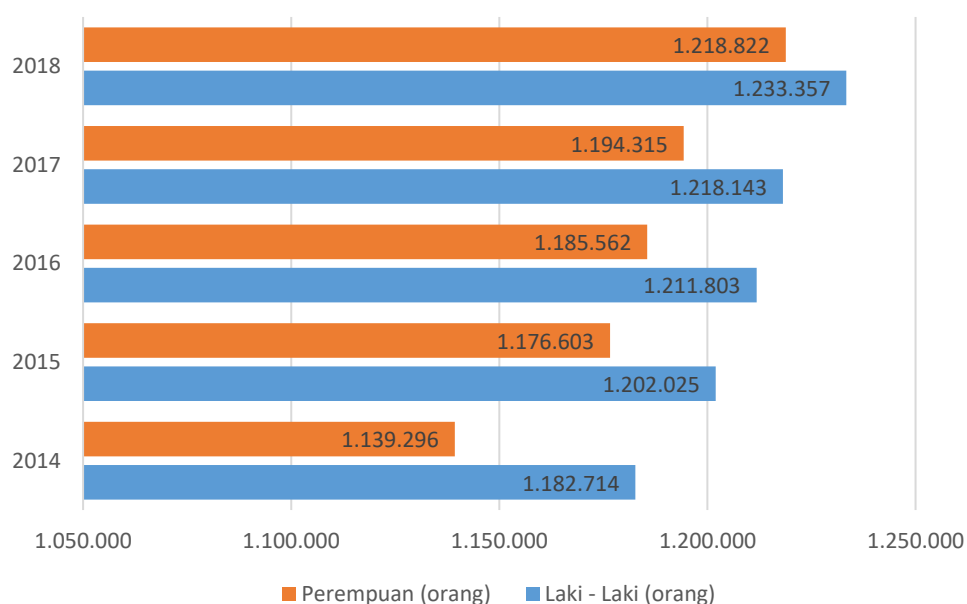
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
0-4	103.395	99.363	202.758	8,12
5-9	98.225	93.070	191.295	7,66
10-14	87.936	84.752	172.688	6,91
15-19	108.881	111.143	220.024	8,81
20-24	133.509	125.321	258.830	10,36
25-29	119.219	109.698	228.917	9,16

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
30-34	109.736	101.912	211.648	8,47
35-39	98.859	97.470	196.329	7,86
40-44	93.020	92.975	185.995	7,45
45-49	81.692	83.777	165.469	6,62
50-54	71.057	72.357	143.414	5,74
55-59	57.880	59.402	117.282	4,70
60-64	38.847	37.739	76.586	3,07
65-69	26.682	28.172	54.854	2,20
70-74	16.750	18.112	34.862	1,40
75+	14.516	22.471	36.987	1,48

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

**Gambar 2.4**  
**Komposisi Penduduk Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin**  
**Tahun 2014 – 2018**



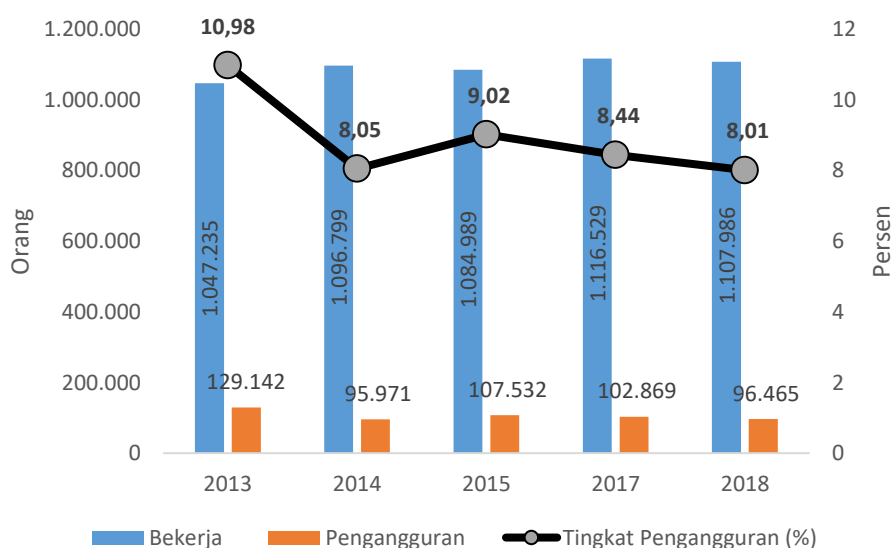
Sumber: Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Komposisi penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin selama periode tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak daripada penduduk perempuan, namun rata-rata peningkatan jumlah penduduk perempuan sebesar 1,71% atau lebih besar daripada penduduk laki-laki sebesar 1,05%.

### 3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,21% selama periode tahun 2014-2018. Pada tahun 2014, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.192.770 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.204.451 tenaga kerja di tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2014-2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 tingkat pengangguran mencapai 8,05%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 8,01% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional sebesar 5,34% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 8,17% maka TPT Kota Bandung berada pada posisi lebih tinggi daripada TPT Nasional dan lebih rendah dari TPT Provinsi Jawa Barat.

**Gambar 2.5**  
**Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung**  
**Tahun 2013-2015, dan 2017-2018**



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2018

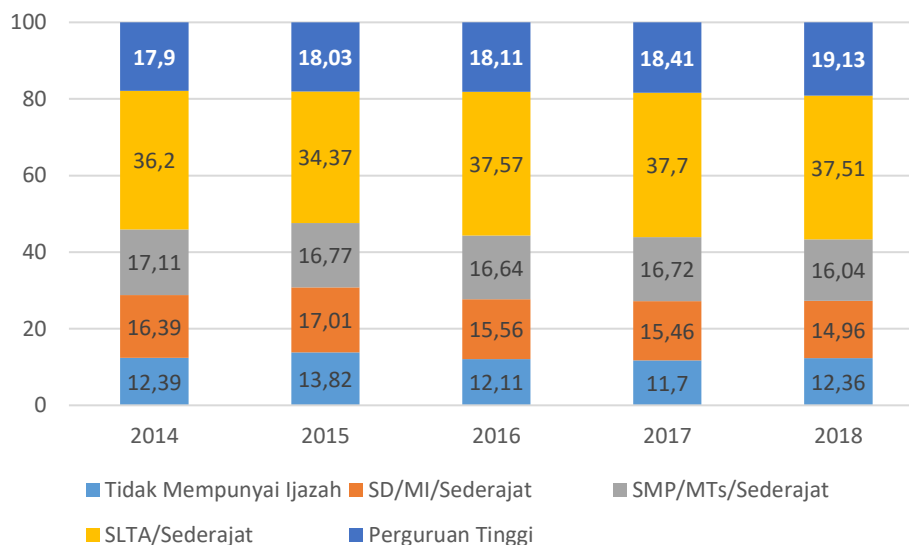
#### **4) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang merupakan proses yang berkesinambungan membutuhkan lembaga pendidikan formal sistem persekolahan yang merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan, serta melatih kemampuan, keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Selain itu, proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Bandung dalam jangka panjang.

Pada tahun 2014, penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 12,39% dan kemudian mengalami penurunan menjadi 12,36%, pada tahun 2018. Di sisi lain, penduduk usia di atas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SLTA/ sederajat, dan Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi, sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi SLTA/ sederajat mengalami peningkatan dari 36,2% di tahun 2014 menjadi 37,51% pada tahun 2018. Kenaikan terus menerus terjadi pada persentase penduduk yang lulus perguruan tinggi dari diploma hingga doktoral, yaitu dari semula pada tahun 2014 sebesar 17,9%, terus meningkat menjadi 19,13% pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung setiap tahunnya telah cukup mengalami peningkatan kesadaran (*awareness*) atas arti penting pendidikan bagi peningkatan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif.



**Gambar 2.6**  
**Perkembangan Komposisi Penduduk Kota Bandung Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018**



Sumber: *Disdukcapil Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD 2018*

## **2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.1.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI**

Dalam tata kelola pembangunan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berkualitas menjadi *ultimate goal* yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah agar dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi ditangan segelintir golongan. Hal ini kelak akan turut menimbulkan kestabilan dalam upaya membangun atau menumbuhkan kesejahteraan.

#### **1) Pertumbuhan PDRB**

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara, PDRB Atas Dasar Harga Konstan

berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Nilai dan kontribusi sektoral (lapangan usaha) PDRB Kota Bandung tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013–2017**

KBL I	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	80.669,42	180.982,18	184.106,23	176.341,00	188.927,66
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	29.371.304,16	30.755.949,25	31.968.181,17	33.249.092,63	34.753.930,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	138.004,83	145.553,91	150.726,82	160.823,06	165.363,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	247.170,73	260.825,38	269.975,16	279.883,24	278.409,85
F	Konstruksi	11.480.053,10	12.260.690,81	13.224.753,36	14.141.570,29	15.238.956,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37.550.557,04	40.412.177,42	43.307.804,29	46.451.124,92	49.410.000,07
H	Transportasi dan Pergudangan	9.502.247,92	10.315.596,63	11.498.477,22	12.618.047,71	13.331.526,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.900.296,92	6.552.047,68	7.091.232,14	7.900.173,63	8.715.422,04
J	Informasi dan Komunikasi	12.155.505,10	13.947.533,24	16.244.007,58	18.774.381,73	21.245.090,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.801.283,93	7.320.270,77	7.772.481,69	8.429.764,67	8.994.224,74
L	Real Estate	1.777.794,51	1.880.435,39	1.956.856,28	2.041.429,60	2.188.004,24
M,N	Jasa Perusahaan	940.255,71	1.039.534,08	1.122.114,35	1.217.219,57	1.334.194,37
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.985.218,53	4.022.538,11	4.063.849,09	4.103.285,65	4.135.291,28
P	Jasa Pendidikan	3.777.642,18	4.074.172,98	4.389.017,34	4.734.861,96	5.157.685,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.149.454,58	1.274.376,79	1.422.891,18	1.564.364,77	1.707.983,97
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4.048.003,22	4.518.256,84	4.913.905,03	5.385.467,54	6.006.950,49
	<b>PDRB</b>	<b>129.005.461,88</b>	<b>138.960.941,47</b>	<b>149.580.378,93</b>	<b>161.227.831,96</b>	<b>172.851.960,77</b>

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

Ket: \*Angka Sementara  
\*Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (2013- 2017), struktur perekonomian Kota Bandung didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; konstruksi; serta jasa keuangan dan asuransi. Secara serentak keenam kategori tersebut memiliki peranan sebesar 82,16 persen terhadap total PDRB Kota Bandung tahun 2017.

**Tabel 2.9**  
**PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013–2017**

KBL I	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	219.108,54	236.522,06	266.413,55	258.769,06	286.222,02
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	33.136.006,61	37.095.553,31	40.314.207,91	43.335.237,91	46.404.982,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	128.446,01	137.945,41	168.553,20	201.844,34	237.643,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	291.785,04	332.943,60	362.908,52	409.965,23	448.010,00
F	Konstruksi	13.657.347,15	15.542.877,75	17.632.271,56	19.244.245,34	21.275.805,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	43.172.759,14	47.982.312,20	53.770.990,71	58.434.424,88	63.777.426,91
H	Transportasi dan Pergudangan	12.932.830,47	15.966.907,79	20.837.641,53	24.390.912,95	27.395.577,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.785.257,71	7.986.461,20	8.925.149,88	10.282.633,55	11.761.828,92
J	Informasi dan Komunikasi	13.608.490,11	15.627.204,47	18.197.267,51	21.064.357,80	24.270.353,06
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.687.069,45	10.016.160,81	11.181.554,01	12.613.090,39	14.145.708,63
L	Real Estate	1.961.795,21	2.139.831,98	2.275.164,75	2.410.798,87	2.639.101,52
M,N	Jasa Perusahaan	1.153.164,83	1.328.737,41	1.480.912,31	1.636.892,02	1.830.372,66
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.781.209,94	5.129.943,93	.521.871,65	5.806.555,43	6.426.695,55
P	Jasa Pendidikan	4.912.216,57	5.624.665,47	6.305.998,39	6.973.897,03	7.964.887,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.421.210,08	1.734.019,17	2.012.776,11	2.322.079,53	2.590.047,51
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4.945.669,24	5.815.782,89	6.520.702,98	7.477.935,29	8.654.962,31
	<b>PDRB</b>	<b>151.794.366,11</b>	<b>172.697.869,44</b>	<b>195.774.384,58</b>	<b>216.863.639,62</b>	<b>240.109.626,72</b>

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

Ket: \*Angka Sementara

\*Angka Sangat Sementara

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bandung pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor yaitu mencapai 26,56 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,33 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,41 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 10,11 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 8,86 persen serta lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,89 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Gambar 2.9 menggambarkan kontribusi kategori PDRB di Kota Bandung tahun 2017 yang diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar (kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) hingga nilai kontribusi terkecil (kategori pengadaan listrik dan gas) dengan menggunakan harga berlaku.

**Gambar 2.7**  
**Persentase PDRB Kota Bandung Berdasarkan Lapangan Usaha**  
**Tahun 2017 (Atas Dasar Harga Berlaku)**



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

Apabila melihat tren dari tahun 2013–2017, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan merupakan dua lapangan usaha yang memberikan peranan tertinggi terhadap total PDRB Kota Bandung. Namun meskipun peranannya tinggi, selama 2013-2017 kedua lapangan usaha tersebut cenderung menunjukkan peranan yang menurun. Sebaliknya, lapangan usaha

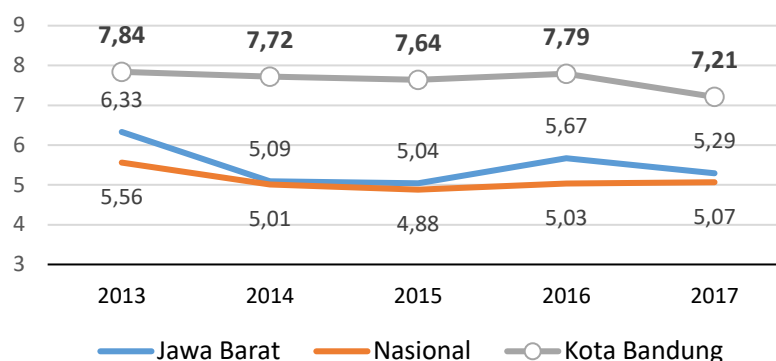
transportasi dan pergudangan peranannya berangsur-angsur meningkat. Sementara lapangan usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan dan asuransi peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat menggambarkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kota Bandung ke kategori jasa-jasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2017 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2013, perekonomian Kota Bandung yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 7,84%, kemudian melambat menjadi 7,72% dan 7,64% pada tahun 2014 dan 2015 yang selanjutnya pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,79%, serta mengalami perlambatan menjadi 7,21% pada tahun 2017.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan karena melambatnya beberapa lapangan usaha seperti pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu, penurunan pertumbuhan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga turut memberikan andil perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2017.

Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional. Selama periode 2013-2017, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,64%, sedangkan rerata LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 2013-2017 masing-masing sebesar 5,48% dan 5,11%.

**Gambar 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017 dan**  
**Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional**  
**(Metode Tahun Dasar 2010)**



*Keterangan:*

*LPE Kota Bandung dan Jawa Barat (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2018)*

*LPE Nasional (Sumber: BPS Pusat, 2018)*

Potret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung dapat dilihat dari dimensi yang lebih luas lagi. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dan berinteraksi dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

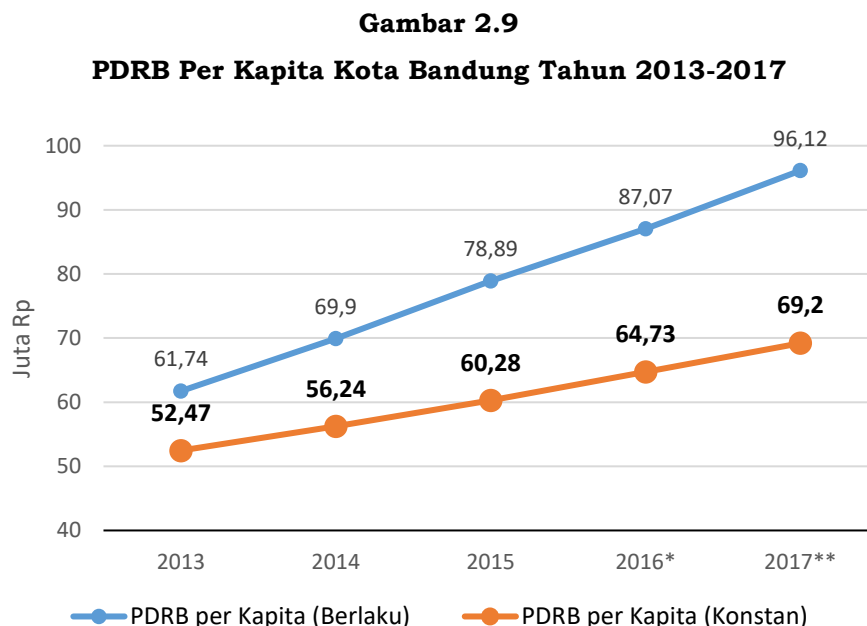
## 2) PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Bandung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun

2013, PDRB per kapita tercatat sebesar 61,74 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 96,12 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota Bandung juga mengalami kenaikan sejak tahun 2013 hingga 2017, masing-masing sebesar 52,47 juta rupiah dan 69,20 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena sudah tidak ada pengaruh inflasi. Selengkapnya, nilai PDRB perkapita dapat dilihat pada gambar berikut.



*\*Angka Sementara*

*\*\* Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

Pada tahun 2017, seluruh kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya mengalami peningkatan PDRB per kapita dibandingkan tahun 2016. Jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 37,18 juta rupiah pada tahun 2017, maka PDRB per kapita Kota Bandung adalah lebih tinggi. Berdasarkan analisis *Klassen Typology*, Kota Bandung termasuk ke dalam kategori Daerah Maju dan Tumbuh Cepat (*Rapid Growth Region*) yaitu daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi.

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat diketahui bahwa Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan daerah yang memiliki nilai PDRB per kapita lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat, sementara Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat masih di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 2.10**  
**Perbandingan PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Bandung,**  
**Wilayah Bandung Raya dan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017**  
**(Dalam Juta Rupiah)**

Kabupaten / Kota	2013	2014	2015	2016*	2017**
<b>Kota Bandung</b>	<b>61,74</b>	<b>69,9</b>	<b>78,89</b>	<b>87,07</b>	<b>96,12</b>
Kabupaten Bandung	19,93	22,01	24,23	26,29	28,26
Kabupaten Sumedang	18,01	19,75	21,83	23,65	25,85
Kabupaten Bandung Barat	17,24	19,06	20,86	22,47	24,14
Kota Cimahi	32,2	35,52	38,61	41,35	44,14
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>27,77</b>	<b>30,11</b>	<b>32,65</b>	<b>34,88</b>	<b>37,18</b>

\*Angka Sementara

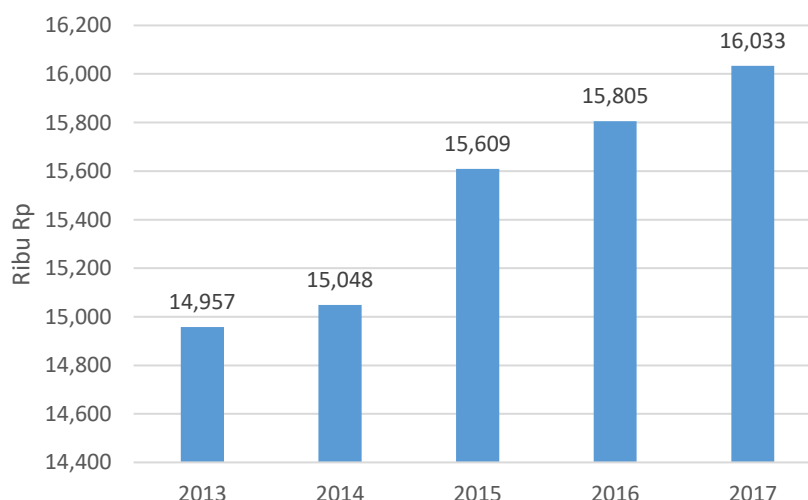
\*\* Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

### 3) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan indikator yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak. Pada tahun 2013, pengeluaran per kapita Kota Bandung sebesar Rp14.957 ribu per tahun yang setiap tahunnya mengalami tren peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,67%. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.10**  
**Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung,**  
**Tahun 2013-2017 (dalam ribu rupiah)**



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah)



#### 4) Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Selama periode 2014-2018, Kota Bandung mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2014, tingkat inflasi Kota Bandung pada posisi 7,76%, sedangkan pada tahun 2015, inflasi Kota Bandung sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 3,93% serta mengalami penurunan menjadi 2,93% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan menjadi 3,46% pada tahun 2017 dan 3,76% pada tahun 2018.

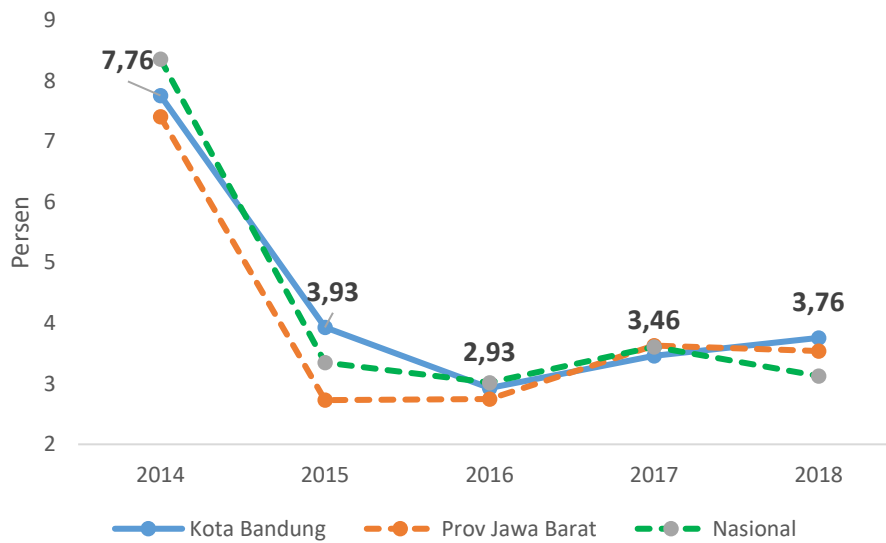
**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional Periode 2014-2018**

No	Cakupan	Laju Inflasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Bandung	7,76	3,93	2,93	3,46	3,76
2	Prov. Jawa Barat	7,41	2,73	2,75	3,63	3,54
3	Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Pusat, dan Bank Indonesia

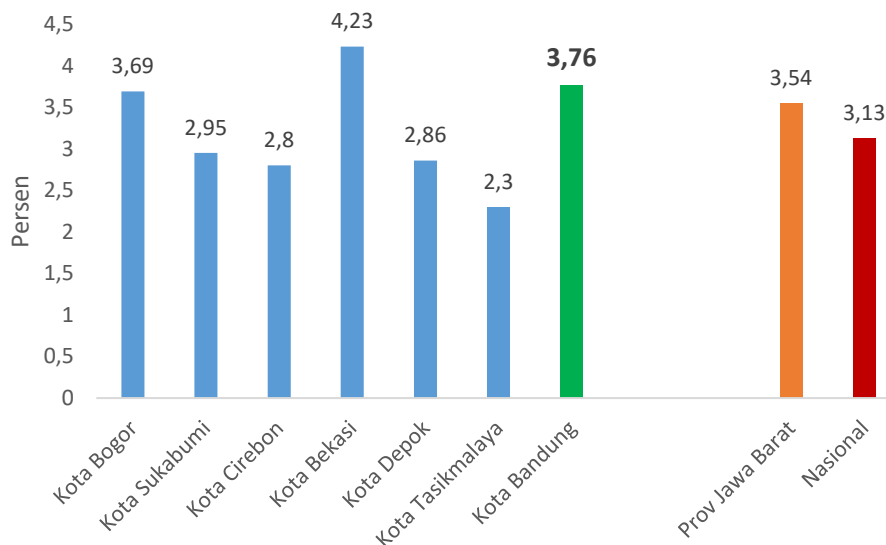
Apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi di level nasional dan regional Jawa Barat, besaran inflasi di Kota Bandung pada tahun 2018 memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat dan Nasional serta lima kota di regional Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Cirebon, Depok, dan Tasikmalaya). Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk mengimplementasikan kebijakan yang tepat agar dapat menekan laju inflasi dengan langkah-langkah yang sistematis dan penuh dengan kecermatan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target inflasi pada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebesar <10%, maka realisasi indikator kinerja inflasi telah mencapai target yang ditetapkan karena realisasinya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bernilai dibawah 10%.

**Gambar 2.11**  
**Inflasi Tahunan Kota Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional**  
**Periode 2014-2018**



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat

**Gambar 2.12**  
**Inflasi Tahun 2018 Kota di Jawa Barat**



Sumber: BPS yang dikelola dalam SIPD, 2018

## 5) Indeks Gini

Tujuan pembangunan adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jika peningkatan tidak diiringi dengan pemerataan, akan menimbulkan fenomena ketimpangan wilayah. Indikator yang sering digunakan

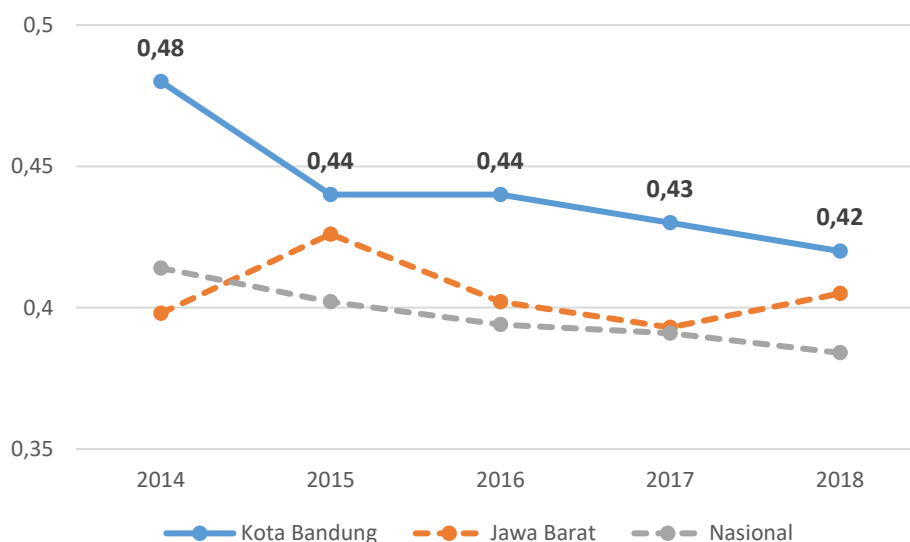
untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio, Indeks Williamson, dan Kriteria Bank Dunia.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna. Semakin besar nilai indeks gini, maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi. Indeks gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan gini ratio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- $GR < 0,4$  dikategorikan sebagai ketimpangan rendah,
- $0,4 < GR < 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat),
- $GR > 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.

**Gambar 2.13**  
**Perbandingan Gini Ratio Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional**  
**Tahun 2014 –2018**



Sumber: BPS Kota Bandung dan BPS Provinsi Jawa Barat yang dikelola dalam SIPD, 2018

Gini ratio di Kota Bandung lebih besar daripada Provinsi Jawa Barat dan nasional, artinya tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Bandung termasuk tinggi. Namun demikian, gini ratio Kota Bandung menunjukkan tren penurunan dari 0,48 pada tahun 2014 menjadi 0,42 pada tahun 2018. Angka gini ratio Kota Bandung menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat tergolong 'sedang'. Situasi ini membutuhkan upaya penurunan ketimpangan dan agar tidak terjadi tingkat ketimpangan 'tinggi'.

## 6) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian kesejahteraan penduduk secara umum, berbasis komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, antara lain: 1) mencakup umur panjang dan sehat; 2) pengetahuan, dan 3) kehidupan yang layak. Pengukuran dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Untuk dimensi pengetahuan, digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

**Tabel 2.12**  
**IPM Kota Bandung Tahun 2014-2018**

Indikator Satuan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Pendidikan</b>						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,63	13,89	13,90	14,18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,51	10,52	10,58	10,59	10,63
<b>Kesehatan</b>						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,80	73,82	73,84	73,86	74
<b>Standar Hidup Layak</b>						
Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah/ Orang/ Tahun	15.048	15.609	15.805	16.033	16.630
Indeks Pembangunan Manusia		78,98	79,67	80,13	80,31	81,06

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

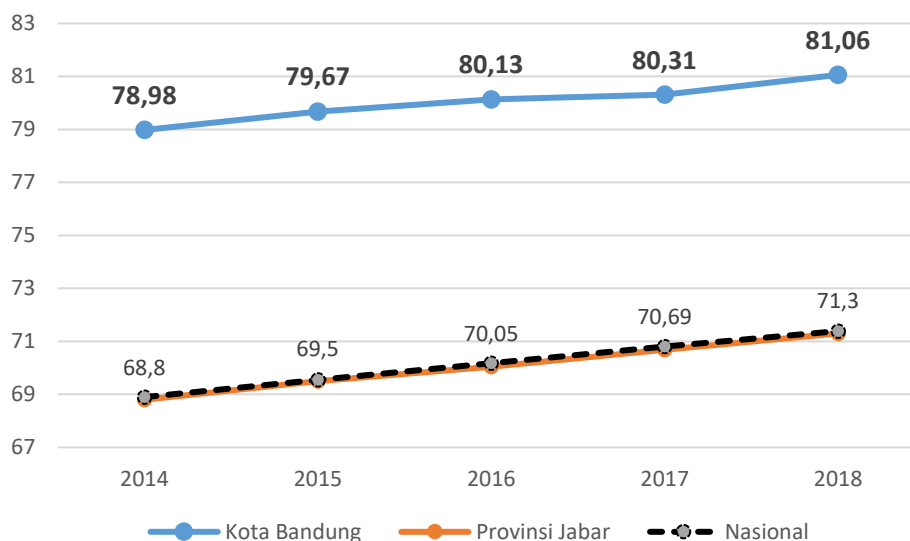
IPM Kota Bandung mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai 2018. Peningkatan IPM per tahun berkisar antara 0,17-0,69 poin. Kenaikan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,69, kenaikan IPM tersebut dikarenakan keempat indikator pembentuknya mengalami kenaikan dan 2 (dua) diantaranya mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (+0,3 tahun) dan pengeluaran per kapita (+561 ribu rupiah/ orang/ tahun).

Kenaikan IPM ini hendaknya menjadi pemacu peran serta yang nyata dari segenap komponen masyarakat Kota Bandung agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi. Akan tetapi perlu disadari bahwa investasi ini hasilnya tidak berdampak langsung secara instan karena investasi pembangunan manusia merupakan pembangunan jangka panjang.

Namun demikian, capaian kinerja indikator IPM dan kompositnya, belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 kecuali Umur Harapan Hidup yang terealisasi sebesar 74 tahun dari target sebesar 73,84 tahun pada tahun 2018. Realisasi IPM pada tahun 2018 sebesar 81,06 poin dari target 82,02 yang menunjukkan terdapatnya gap sebesar 0,96 poin. Rata-rata Lama Sekolah dari target sebesar 12 tahun terealisasi sebesar 10,63 tahun. Adanya perubahan metode penghitungan IPM diduga menjadi penyebab ketidaktercapaian target. Hal ini perlu dicermati pada periode mendatang agar lebih akurat dalam menetapkan target kinerja disertai dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal lainnya.

IPM sebagai indikator makro pembangunan selain memiliki makna yang positif untuk mengukur seberapa besar kinerja pembangunan daerah, juga memiliki makna penting untuk melihat disparitas wilayah. Penelaahan komparatif atas disparitas dapat dilihat dengan perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, maupun dengan kabupaten/kota secara nasional.

**Gambar 2.14**  
**IPM Kota Bandung, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2018**

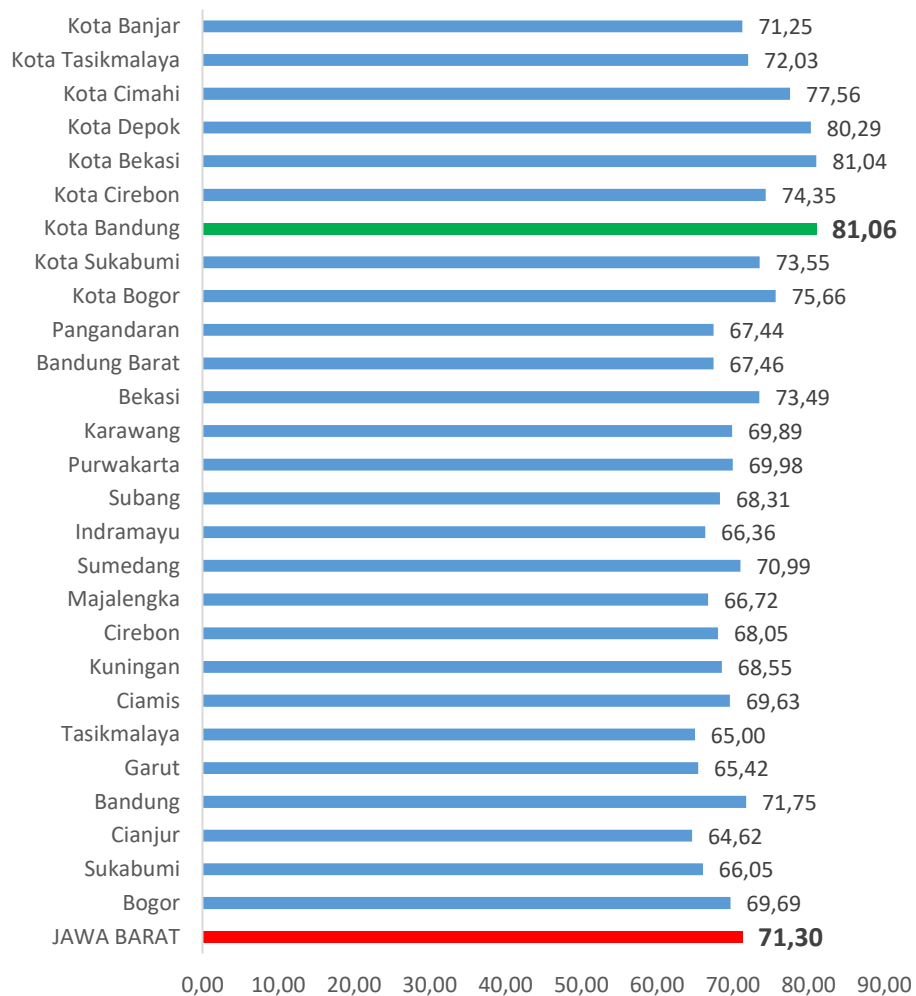


Sumber :

- *IPM Kota Bandung (Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018)*
- *IPM Nasional dan Provinsi Jawa Barat (Sumber: BPS Pusat, 2018)*

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Bandung mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Bandung berada di atas level provinsi dan nasional.

**Gambar 2.15**  
**Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018**



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD dan BPS Jawa Barat, 2018

Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2018 yaitu 81,06. Peringkat kedua diduduki oleh Kota Bekasi dengan nilai IPM sebesar 81,04 dan kemudian disusul oleh Kota Depok sebesar 80,29. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus terus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing (*competitiveness*) yang semakin dinamis di era global saat ini.

## 7) Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk, dimana jumlah penduduk semakin bertambah namun tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.
2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana hal ini berpengaruh pada kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja.
4. Distribusi yang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan menjadi timpang.

Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung tak lepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Bandung, jumlah penduduk miskin terbilang signifikan karena mencapai lebih dari 10 persen dari jumlah warga Kota Bandung. Berikut adalah tabel rincian jumlah rumah tangga miskin setiap kecamatan di Kota Bandung.

**Tabel 2.13**  
**Basis Data Terpadu Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan**  
**di Kota Bandung Tahun 2017 - 2018**

No	Kecamatan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%
1	Andir	5.452	3,93%	5.244	3,86%
2	Antapani	2.785	2,01%	2.768	2,04%
3	Arcamanik	3.887	2,80%	3.831	2,82%
4	Astanaanyar	3.823	2,76%	3.638	2,67%
5	Babakan Ciparay	9.811	7,07%	9.707	7,14%
6	Bandung Kidul	3.857	2,78%	3.755	2,76%
7	Bandung Kulon	8.344	6,01%	8.231	6,05%
8	Bandung Wetan	1.044	0,75%	1.020	0,75%
9	Batununggal	8.672	6,25%	8.578	6,31%
10	Bojongloa Kaler	11.405	8,22%	11.340	8,34%
11	Bojongloa Kidul	6.031	4,35%	5.927	4,36%
12	Buahbatu	5.653	4,07%	5.453	4,01%
13	Cibeunying Kaler	2.924	2,11%	2.851	2,10%
14	Cibeunying Kidul	6.094	4,39%	5.743	4,22%



No	Kecamatan	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%
15	Cibiru	4.491	3,24%	4.479	3,29%
16	Cicendo	3.968	2,86%	3.960	2,91%
17	Cidadap	1.903	1,37%	1.883	1,38%
18	Cinambo	1.560	1,12%	1.509	1,11%
19	Coblong	6.265	4,52%	6.096	4,48%
20	Gedebage	1.936	1,40%	1.909	1,40%
21	Kiaracondong	8.589	6,19%	8.408	6,18%
22	Lengkong	2.658	1,92%	2.612	1,92%
23	Mandalajati	3.853	2,78%	3.799	2,79%
24	Panyileukan	1.651	1,19%	1.610	1,18%
25	Rancasari	3.138	2,26%	3.096	2,28%
26	Regol	4.264	3,07%	4.170	3,07%
27	Sukajadi	5.469	3,94%	5.376	3,95%
28	Sukasari	2.596	1,87%	2.560	1,88%
29	Sumur Bandung	1.046	0,75%	987	0,73%
30	Ujungberung	5.564	4,01%	5.479	4,03%
<b>Jumlah</b>		<b>138.733</b>	<b>100,00%</b>	<b>136.019</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: *Dinsosnangkis Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Berdasarkan data pada tabel tersebut, pada tahun 2018, Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan wilayah dengan jumlah rumah tangga miskin terbesar yaitu sebanyak 11.340 KK atau 8,34% dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Bandung yang mencapai 136.019 KK. Wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berada di daerah pusat kota dengan kondisi lingkungan yang kurang tertata baik.

Tingginya jumlah keluarga miskin di kecamatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya aksesibilitas warga miskin terhadap sistem sumber yang ada, ketidakberdayaan warga miskin dalam pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya sistem perlindungan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang berbasis masyarakat. Sementara Kecamatan Sumur Bandung merupakan kecamatan di Kota Bandung dengan jumlah rumah tangga miskin terendah yaitu sebanyak 987 KK atau 0,73%.

## **8) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahana Kemiskinan (P2)**

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk miskin dari garis kemiskinan. Bila dilihat perkembangannya selama periode 2014 – 2018, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi. Akan tetapi, bila dilihat perkembangannya selama periode tahun 2014 – 2018, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Bandung berfluktuasi, pada tahun 2014-2015 indeks kedalaman kemiskinan mengalami kenaikan.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),**  
**Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung**  
**Tahun 2014 - 2018**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Dlm 000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2014	115,00	4,65	0,69	0,17	353.423
2015	114,12	4,61	0,72	0,19	376.311
2016	107,58	4,32	0,55	0,12	400.541
2017	103,98	4,17	0,68	0,18	420.579
2018	89,38	3,57	0,48	0,11	448.902

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

Indeks kedalaman kemiskinan naik dari 0,69 pada tahun 2014 menjadi 0,72 pada tahun 2015. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan. Sementara itu selama periode 2015-2016 mengalami penurunan menjadi 0,55, ini artinya bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekat garis kemiskinan. Dan selama periode 2016-2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,68 serta mengalami penurunan pada periode 2017-2018 menjadi 0,48.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Bandung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014, Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,17 yang selanjutnya meningkat menjadi 0,19 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, mengalami penurunan menjadi 0,12 dan meningkat menjadi 0,18 pada tahun 2017 serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 menjadi 0,11. Hal ini menunjukkan semakin rendahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Bandung.

Persentase Angka Kemiskinan mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, angka kemiskinan sebesar 4,65% mengalami penurunan menjadi

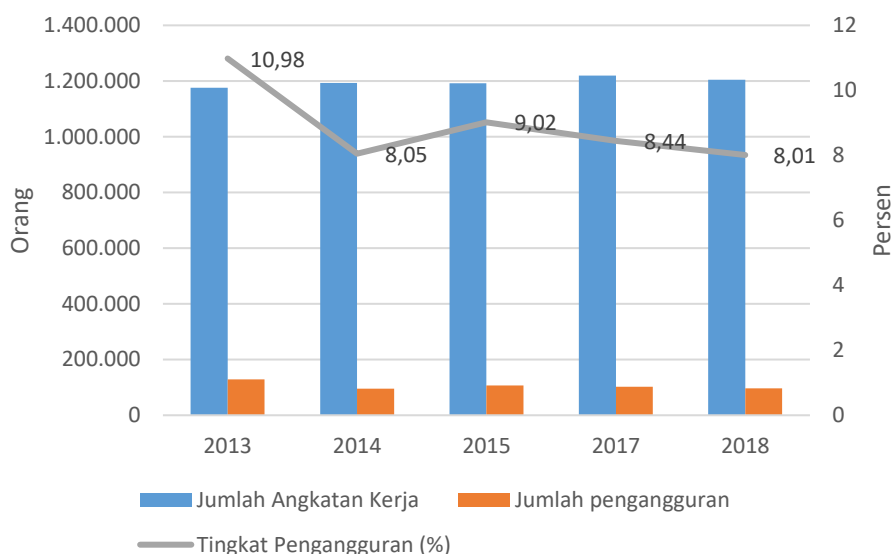
3,57% pada tahun 2018. Capaian kinerja pada tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 yaitu sebesar 3,71%.

#### **9) Aspek Kesempatan Kerja**

Jumlah angkatan kerja Kota Bandung setiap tahun mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,21% selama periode tahun 2013-2018. Pada tahun 2013, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.176.377 tenaga kerja dan meningkat menjadi 1.204.451 tenaga kerja di tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2013-2018 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 tingkat pengangguran mencapai 10,98%, kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 8,44% di tahun 2017 dan menjadi 8,01% pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan angkatan kerja mampu diserap oleh peningkatan jumlah lapangan kerja yang ada. Apabila dibandingkan dengan target dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai target karena memiliki nilai dibawah 10%.

Tingkat pengangguran merupakan fenomena multi-dimensional, terutama fenomena ekonomi dan sekaligus fenomena sosial. Dampak dari tingkat pengangguran akan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Bandung setiap tahunnya ke depan, maka secara simultan dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meminimalisasi tingkat pengangguran yang ada. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Kota Bandung yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Perkembangan tenaga kerja dan pengangguran Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 2.16**  
**Perkembangan Tenaga Kerja dan Pengangguran Kota Bandung**  
**Tahun 2013-2015 dan 2017-2018**



Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

## 2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

### 1) Aspek Pendidikan

Analisis kinerja atas aspek pendidikan dilakukan terhadap indikator Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang Ditamatkan, dan Angka Partisipasi Murni.

#### a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator baru pengganti Angka Melek Huruf (AMH). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS Kota Bandung terus mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 13,33 tahun pada tahun 2014, menjadi 14,18 tahun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 6,38%.

**Tabel 2.15**  
**Harapan Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	13,33	13,63	13,89	13,90	14,18

Sumber: BPS Kota Bandung

**b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kota Bandung terus mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, mulai dari 10,51 tahun pada tahun 2014, menjadi 10,63 tahun pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 1,14%.

**Tabel 2.16**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)– tahun	10,51	10,57	10,58	10,59	10,63

Sumber: BPS Kota Bandung

**c. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Bandung pada tahun 2018 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs melampaui 100%, yaitu 102,12% untuk APK SD/MI dan 106,81% untuk APK SMP/MTs. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN, BOS Provinsi, dan BOS Kota.

**Tabel 2.17**  
**Angka Partisipasi Kasar Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	%	109,13	108,71	110,13	106,19	102,12
2	SMP/MTs	%	108,19	105,87	104,17	104,80	106,81
3	SMA/SMK/MA (khusus Kota Bandung)	%	99,31	104,25	102,81	109,66	NA

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

#### d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bandung pada tahun 2018 secara umum untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/Mts mencapai 100%.

**Tabel 2.18**  
**Angka Partisipasi Murni Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI/Paket A	104,3%	102,01%	101,11%	100%	100,12%
2	SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100,01%	100%	100,15%
3	SMA/SMK/MA/Paket C	94,04%	94,86%	95,69%	95,71%	NA

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

#### 2) Aspek Kesehatan

Analisis kinerja atas aspek kesehatan dilakukan terhadap indikator angka kematian bayi dan angka usia.

##### Usia Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak 0 tahun yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk. Usia Harapan Hidup pada tahun 2014 sebesar 73,8 tahun dan pada tahun 2018 menjadi 74 tahun. Hal ini berarti menunjukkan penambahan sebesar 0,2 poin atau terjadi peningkatan sebesar 0,27%.

**Tabel 2.19**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bandung Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,8	73,82	73,84	73,86	74

Sumber: BPS Kota Bandung

#### 2.1.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kota Bandung selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya.

**Tabel 2.20**  
**Rekapitulasi Potensi Seni Budaya di Kota Bandung Tahun 2015-2017**

No	Gedung Seni dan Budaya	2015	2016	2017
1	Lembaga Pendidikan Seni	13	13	13
2	Galeri	27	27	27
3	Gedung Pertunjukan	13	13	16
4	Museum	7	7	8
5	Gedung Bersejarah	371	371	371
JUMLAH		431	431	435

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kota Bandung, dan pemangku kepentingan lainnya. Diketahui bahwa hasil rekapitulasi di tahun 2015 untuk potensi seni budaya di Kota Bandung berjumlah 431. Uraian secara lebih detail mengenai potensi seni budaya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Jenis sanggar seni dan lingkung seni yang ada di Kota Bandung juga cukup beragam. Uraian detail terkait jenis sanggar seni dan lingkungan seni dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.21**  
**Jenis Sanggar Seni dan Lingkung Seni di Kota Bandung Tahun 2016-2017**

Sanggar dan Lingkung Seni		2016	2017
<b>a</b>	Lingkung Seni Kampus	13	13
<b>b</b>	Lingkung Seni Masyarakat Umum	565	565
<b>c</b>	Tembang Sunda Cianjuran	11	11
<b>d</b>	Degung	25	25
<b>e</b>	Kacapian	87	87
<b>f</b>	Wayang Golek	19	19
<b>g</b>	C a l u n g	33	33
<b>h</b>	T e a t e r	183	183
<b>i</b>	Tari Klasik	96	96
<b>j</b>	A n g k l u n g	6	6
<b>k</b>	R e o g	39	39
<b>l</b>	Kuda Lumping	2	2
<b>m</b>	Kuda Renggong	6	6
<b>n</b>	Celepungan	1	1
<b>o</b>	Seni Terebang	4	4
<b>p</b>	Seni Pantun	2	2
<b>q</b>	Pencak Silat	144	144
<b>r</b>	Barongsay	-	-
<b>s</b>	Benjang	23	23
<b>t</b>	Reak	16	16
<b>u</b>	Komunitas Sastra Sunda	9	9
Jumlah (Total)		1284	1284

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

### **2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

#### **2.1.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB**

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Adapun urusan wajib non pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

##### **1) Pendidikan**

Urusan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan, mengingat melalui sektor pendidikan inilah modal sumber daya manusia berkualitas yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dibentuk. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator berikut:

##### **a. Angka Putus Sekolah**

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data yang tersedia menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Bandung pada periode 2013 sampai dengan 2018 cukup rendah ( $< 1\%$ ). Misalnya pada tahun 2018, angka putus sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan diperoleh persentase sebagai berikut, SD/MI sebesar 0,01%, SMP/MTs sebesar 0,02%, dan SMA/SMK/MA sebesar 0,02%. Kecilnya angka putus sekolah tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya program sekolah gratis, meningkatnya fasilitas pendidikan, kemampuan pendidik, serta peningkatan anggaran pendidikan yang berasal dari daerah maupun pusat. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai angka putus sekolah Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan selama kurun waktu 2013–2018.



**Tabel 2.22**  
**Angka Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Bandung**  
**Tahun 2013-2018**

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
3	SMA/MA/SMK	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

#### **b. Persentase Guru Berpendidikan > S1**

Tenaga pendidik/guru mulai jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/MA/SMK sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 1-6 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, harus mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana (S1).

**Tabel 2.23**  
**Persentase Guru Berpendidikan  $\geq$  S1 di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	75%	80%	85%	90%	92,15%	92,26%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandung

## **2) Kesehatan**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Bahkan Untuk mendapatkan penghidupan yang layak di bidang kesehatan, amandemen kedua UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) menetapkan: "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak". Di era otonomi daerah amanat amandemen dimaksud, mempunyai makna penting bagi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa ada diskriminasi sosial, budaya, ekonomi dan politik.

#### **a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)**

Strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada ibu dan anak yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak, secara pengalaman empirik di beberapa tempat dapat dilakukan pada tingkatan Posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat

lebih tercapai. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai ketersediaan posyandu selama kurun waktu 2013-2017.

**Tabel 2.24**  
**Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Posyandu	1.959	1.967	1.973	1.978	1.978
2	Rasio Posyandu per Satuan Balita	0,91	0,88	0,92	0,92	0,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung

#### **b. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk**

Puskesmas, poliklinik, dan pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Secara lengkap mengenai rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.25**  
**Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	0,88	0,85	0,88	0,88	0,90

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandung

### **3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **a. Persentase Minimal Ruas Jalan dalam Kondisi Baik**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan jaringan jalan yang baik. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan, terbagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu: baik, sedang, rusak sedang, rusak dan rusak berat. Berikut gambaran proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik serta indikator pekerjaan umum lainnya selama kurun waktu 2013-2018.

**Tabel 2.26**  
**Indikator Pekerjaan Umum di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>1</b>	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	72,49	81,3	91,22	100,0	100,0	100,0
	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)	840,00	943,73	918,53	1160,8	1172,78	1172,78
	Panjang seluruh jalan kota (km)	1158,8	1160,8	1160,8	1160,8	1172,78	1172,78
<b>2</b>	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,471	0,469	0,468	0,466	0,469	0,462
<b>3</b>	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	0,202	0,214	0,238	0,248	0,268	0,276
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	234,18	248,05	276,47	288,74	314,33	323,37
	Panjang seluruh jalan kota (km)	1158,8	1160,8	1160,8	1160,8	1172,78	1172,78
<b>4</b>	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	NA	57,36	81,24	91,22	0	0
	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	NA	300,629	425,789	478,092	0	0
	Panjang seluruh drainase (km)	NA	524,114	524,114	524,114	524,114	524,114
<b>5</b>	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	NA	NA	45,01	30,04	3,18	0
	Luasan daerah yang tergenang	NA	NA	15,01	10,02	1,06	0
	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	NA	33,35 Ha	33,35 Ha	33,35 Ha	33,35 Ha	33,35 Ha

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung

#### **b. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Penyediaan air minum di Kota Bandung berupa pelayanan perpipaan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Wening. Adapun cara mengukur cakupan layanan air minum adalah persentase konversi golongan konsumen air minum terhadap jumlah penduduk Kota Bandung. Golongan konsumen air minum terdiri atas: a) sosial biasa, b) sosial khusus, c) rumah tangga, dan d) niaga/komersil. Untuk lokasi yang belum terlayani oleh perpipaan PDAM, pelayanan air minum dilakukan oleh DPKP3 melalui non perpipaan yang bersifat komunal.

**Tabel 2.27**  
**Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Penduduk berakses air Minum	70%	70%	70,65%	72,15%	75,75%	84,50%

Sumber: DPKP3 dan PDAM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

Dalam hal penataan ruang, indikator penilaian difokuskan pada Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dengan perkembangan capaian realisasi dari tahun 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.28**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	12,14%	12,14%	12,15%	12,17%	12,20%	12,20%
	Luas ruang terbuka hijau	2.030,24	2.030,24	2.032,21	2.035,89	2.040,70	2.041,49
	Luas wilayah ber HPL/HGB	16.729,65	16.729,65	16.729,65	16.729,65	16.729,65	16.729,65

Sumber: DPKP3 Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

#### 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Bandung berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.29**  
**Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio rumah layak huni	0,14	0,14	0,14	0,14	0,22
	Jumlah rumah layak huni	336.254	335.700	336.523	336.361	547.809
	Jumlah penduduk	2.322.010	2.378.628	2.397.396	2.412.458	2.452.179
2	Rasio permukiman layak huni	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Luas pemukiman layak huni	8.146,34	8.145,18	8.141,92	8.141,68	8.145,95

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	Luas wilayah permukiman	9.601,46	9.601,46	9.596,47	9.596,47	9.596,47
<b>3</b>	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96,08%	96,10%	9,60%	96,29%	98,04%
	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	335.638	335.700	33.523	336.361	547.809
	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	349.334	349.334	349.334	349.334	558.746
<b>4</b>	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	N/A	N/A	N/A	71,21	72,41
	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	N/A	N/A	N/A	74.047	75.297
	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	115.000	114.120	107.580	103.980	103.980
<b>5</b>	Persentase pemukiman yang tertata	99,98	99,98	99,98	99,98	99,99
	Luas area permukiman tertata	9.600.002,55	9.600.002,55	9.595.012,55	9.595.012,55	9.595.607,15
	Luas area permukiman keseluruhan	9.601.460	9.601.460	9.596.470	9.596.470	9.596.470
<b>6</b>	Persentase lingkungan permukiman kumuh	N/A	N/A	8,71%	8,71%	5,16%
	Luas lingkungan permukiman kumuh	N/A	N/A	1.457,45	1.457,67	862,85
	Luas wilayah	16.729,65	16.729,65	16.729,65	16.729,65	16.729,65
<b>7</b>	Persentase luasan permukiman kumuh di	N/A	N/A	N/A	20,10%	34,96%

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	kawasan perkotaan					
	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani	N/A	N/A	N/A	292,95	301,65
	Luas pemukiman kumuh	N/A	N/A	N/A	1.457,67	862,85
8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	3,38%
	Jumlah lingkungan yang didukung pada kurun waktu	19	19	19	19	20
	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	591	591	591	591	591

Sumber: DPKP3 Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

## 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

### a. Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan, dan lain-lain.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan. Keindahan adalah hasil dari sinergi antara

ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparat daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

**Tabel 2.30**  
**Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**  
**Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	100	82,71	75,53	100	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	33,37	33,37	50,06	83	83
3	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	90	89	87	91	89,4
4	Persentase Penegakan Perda (%)	70	84	90,35	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan DKPB Kota Bandung

#### **b. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran**

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kotaperlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK. Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK.

*Respon time* (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama periode 2014-2018 berada dalam rentang 87%-91%, dengan rata-rata sebesar 89,28%. Kesadaran masyarakat/khususnya pengguna jalan meningkat dalam memberikan akses yang seluas-luasnya di ruas jalan tertentu ketika terjadi TK 65 (kejadian kebakaran) maupun ketika tiba di lokasi kebakaran. Untuk mencapai SRT < 15 menit, perlu

didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, hydrant, dan peran serta masyarakat/satwankar.

## 6) Sosial

### **Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi**

Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dan lain sebagainya yang terdapat di suatu daerah. Adapun jumlah sarana sosial di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.31**  
**Sarana Sosial di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Sarana Sosial	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah	60 buah

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Adapun perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32**  
**Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung Tahun 2017-2018**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2017	2018
1. Anak Jalanan	172	117
2. Penderita Sakit Jiwa	0	0
3. Gepeng (Gembel Dan Pengemis)	128	88
4. Penderita HIV/AIDS	82	40
5. Pecandu Narkoba	0	121
6. Fakir Miskin	61.467	480.939
7. Bayi Terlantar	0	132
8. Anak Terlantar	592	408
9. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	0	21
10. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	0	
11. Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat	0	
12. Anak Korban Kekerasan Seksual	0	
13. Lanjut Usia Terlantar	2.287	4.299
14. Komunitas Adat Terpencil	0	0
15. Penyandang Tuna Netra	625	597
16. Penyandang Tuna Rungu	359	339
17. Penyandang Tuna Wicara	229	224
18. Penyandang Tuna Wicara-Rungu	184	180



<b>Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
19. Penyandang Tuna Daksa	1.376	1.342
20. Penyandang Tuna Grahita	1.131	1.101
21. Penyandang Buta Aksara	0	0
22. Penyandang Cacat Fisik	0	607
23. Tuna Susila	69	60
24. Bekas Narapidana	0	214
25. Korban Penyalahgunaan NAPZA	182	121
26. Penyandang LGBT	83	0
27. Korban LGBT	0	0

Sumber: Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

## 7) Tenaga Kerja

### a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Pada kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai TPAK di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017.

**Tabel 2.33**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1</b>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63,55%	63,04%	62,52%	62,52%	63,11%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

### b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Gambaran tingkat pengangguran terbuka

dan indikator ketenagakerjaan lainnya di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.34**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,98%	8.05%	9.02%	N/A	8,44%	8,01%
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	61,32%	55%	56%	57%	58%	58%
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	14,05%	41,92%	51,96%	53,16%	44,68%	50,96%
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	28,73%	25,96%	13,25%	21,46%	41,37%	43,83%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

## 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan diperlukan dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender. Indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.35**  
**Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	6%	6%	6%	6%	6%	6%
2	Rasio KDRT	0,000156	0,000186	0.000087	0,00001	0,000078	N/A
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	98%	100%	94%	97%	97%	N/A
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	13%	17%	19%	25%	23%	N/A
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DP3APM Kota Bandung

## 9) Pangan

### Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kota Bandung. Ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk. Secara lebih lengkap mengenai ketersediaan pangan utama Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.36**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Ketersediaan Pangan Utama	87,7 kg/kapita/thn	87,3 kg/kapita/thn	197,171 kg/kapita/thn	197,423 kg/kapita/thn	217,255 kg/kapita/thn
2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	N/A	100%	99,6%	99,8%	100%

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

## 10) Pertanian

### Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Dalam hal pertanian, indikator penilaian difokuskan pada persentase konflik pertanian yang terfasilitasi dan sertifikat tanah milik pemerintah kota. Pada tahun 2015 terdapat 10 kasus yang terdaftar, terdiri atas 4 kasus yang dimenangkan oleh Pemerintah Kota Bandung (gugatan TUN atas tanah mata air Cikareo, gugatan perdata atas tanah mata air Cikareo, gugatan perdata tanah lapang lodaya, gugatan perdata atas tanah puskesmas ledeng), 1 kasus yang dimenangkan oleh penggugat (gugatan perdata atas tanah jalan Cibadak), serta 5 proses perkara dalam proses

perkara (gugatan perdata atas tanah jalan Cihampelas No. 93A, gugatan perdata atas tanah akses Tol. KM.149, gugatan perdata atas tanah jalan Stasiun Barat, gugatan perdata atas tanah Ruang dagang/kios pasar balubur, gugatan perdata atas hak-hak sewa tanah masyarakat kawasan Kiaracondong). Tidak tercapainya target (kasus terselesaikan) karena dari 10 kasus yang masuk, 5 kasus masih dalam proses. Sedangkan sertifikat tanah milik pemerintah kota dari target sebanyak 150 dokumen, dapat terealisasi sebanyak 71 dokumen. Penyerahan hasil pengadaan tanah tahun 2017 dari target 11.654 sertifikat hanya 7.972 sertifikat melalui PTSL.

## 11) Lingkungan Hidup

### a. Persentase Penanganan Sampah

Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kota Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbunan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Berikut adalah kondisi penanganan persampahan di Kota Bandung secara lengkap dalam kurun waktu 2013-2017.

**Tabel 2.37**  
**Persentase Penanganan Sampah di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Pananganan Sampah	74%	87,23%	87,41%	90,4%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung

### b. Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sasaran yang ingin dicapai oleh DLH Provinsi Jawa Barat yang sejalan dengan sasaran DLHK Kota Bandung.

IKLH pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan trend pencapaian tujuan berkelanjutan di Indonesia. ILH difokuskan kepada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan.

Adapun permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Kota Bandung terkait IKLH meliputi :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas air (air permukaan dan air tanah)

Ada lima titik sungai di Kota Bandung yang sudah memiliki status cemar ringan melalui metode analisis indeks Storet dari 46 anak sungai yang ada di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas dan kuantitas air menjadi perhatian Bersama yang harus dituntaskan.

2. Rendahnya kualitas tutupan lahan kota Bandung dengan luasan RTH sebesar 12.67 % memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara.

Luasan RTH yang rendah mengakibatkan serapan air menurun dan berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara semakin memburuk.

3. Menurunnya kualitas udara, Hal ini merupakan konsekuensi rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi dan bertambahnya jumlah penduduk kota Bandung beserta aktivitasnya.

## 12) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

### Persentase Jumlah Penduduk yang sudah Terdaftar dalam Catatan Sipil

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kepemilikan administrasi kependudukan dengan fokus kepemilikan KTP selama kurun waktu 2013-2017.

**Tabel 2.38**  
**Persentase Jumlah Penduduk yang Sudah Terdaftar Dalam Catatan Sipil di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Penduduk memiliki KTP	95,5 %	99,05%	89,05%	95,38%	96,75%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

## 13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur,

sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK maka dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Adapun perkembangan PKK Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.39**  
**PKK Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat*

#### **b. Posyandu Aktif**

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Adapun perkembangan Posyandu Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.40**  
**Posyandu Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Dinas Kesehatan Kota Bandung*

## 14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif adalah perbandingan antara jumlah peserta KB aktif dengan Pasangan Usia Subur. Cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara Pasangan Usia Subur. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebesar 70,18%. Selama 5 tahun terakhir, cakupan peserta KB aktif terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.41**  
**Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Peserta KB Aktif	68,10%	68,75%	70,10%	70,60%	73,35%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung

## 15) Perhubungan

Isu perhubungan yang terjadi di Kota Bandung adalah masalah macet serta penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat masih sangat dominan, sehingga pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Bandung perlu menyediakan sistem angkutan publik yang aman, nyaman, dan terjangkau untuk masyarakat. Yang perlu diperhatikan adalah penyediaan akses bagi pejalan kaki untuk menuju dan dari tempat penyediaan angkutan umum serta keterjangkauan pelayanan angkutan umum yang dapat diakses oleh masyarakat.

Indikator perhubungan di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.42**  
**Indikator Perhubungan di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (orang)	6.156.085	6.217.646	6.341.999	6.468.839	6.576.653	6.686.264
2	Jumlah uji kir angkutan umum	9.413	9.601	9.793	9.989	10.991	10.566
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2 unit terminal bis	2 unit terminal bis	2 unit terminal bis	2 unit terminal bis	2 unit terminal bis	2 unit terminal bis
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	5%	<4,5%	<4%	<3,5%	<3%	<3%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung

## 16) Komunikasi dan Informatika

### Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Gambaran mengenai sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang tersedia di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2018 dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.43**  
**Sarana/Prasarana Komunikasi dan Informatika di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Website Milik Pemerintah Kota Bandung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan (%)	100	100	410	450	500	503
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (%)	58,22	58,22	42,88	38,31	N/A	N/A
4	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	100	100	100	100	100	100
5	Prosentase penduduk yang menggunakan HP/Telephone (% HP/% Telephone)	96,01/19,69	96,01/22,50	96,96/15,81	76,71/11,71	77,75 (Pengguna HP)*	N/A
6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (%)	63,59	66,15	47,38	49,62	57,74	N/A

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

\*Keterangan : persentase penduduk yang menggunakan HP adalah 77,75% dari jumlah penduduk laki-laki 79,2% dan perempuan 76,28%.



## 17) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

### a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2018.

**Tabel 2.44**  
**Persentase Koperasi Aktif di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Koperasi Aktif	81,14%	81,76%	83,50%	84,67%	86,24%	88,85%

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

### b. Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah Binaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

#### 1)) Usaha Mikro

Kriteria Kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

#### 2)) Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

#### 3)) Usaha menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2018 berada pada kisaran 4.400-5.700 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.45**  
**Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	94,23%	94,42%	94,65%	94,76%	95,13%	97,93%
	Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah	4.316	4.094	4.970	5.084	5.517	5.719
	Jumlah Seluruh UKM	4.581	4.336	5.251	5.365	5.799	5.840

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

## 18) Penanaman Modal

### a. Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Bandung. Gambaran mengenai jumlah investor PMDN/PMA di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2017 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.46**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PMA	40	51	142	212	200
2	PMDN	13	20	60	94	109
3	Total	53	71	202	306	309

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

#### **b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Jumlah realisasi investasi PMDN/PMA di Kota Bandung kurun waktu 2013-2017 dibuktikan pada tabel jumlah investasi PMDN/PMA di Kota Bandung berikut ini.

**Tabel 2.47**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA (Miliar) di Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	PMA	183,8	190,5	321	780,2	1.082,9
2	PMDN	1.578,4	3.420,6	4.957	6.388,9	11.617,5
3	Total	1.762,2	3.611,1	5.278	7.169,2	12.700,4

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

#### **19) Kepemudaan dan Olah Raga**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Indikator kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.48**  
**Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	N/A	N/A	22,68 %	16,49 %	9,27 %
2	Persentase wirausaha muda	1,43%	9,29%	15,94%	49,43%	22,86%
3	Cakupan pembinaan olahraga	30,00%	100,00%	38,1%	100,00%	47,6%
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	N/A	N/A	N/A	36%	53%
5	Cakupan pembinaan atlet muda	25,00%	39,16%	24,10%	42,13%	26,13%
6	Jumlah atlet berprestasi	N/A	N/A	N/A	33	56

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

## 20) Statistik

### Dokumen Statistik (Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota)

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2018.

**Tabel 2.49**  
**Statistik di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Buku Bandung Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Bandung	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum ada	Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

## 21) Persandian

**Tabel 2.50**  
**Persandian Kota Bandung Tahun 2014-2018**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	100	100	100	17,46	33,33

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

## 22) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Berikut gambaran indikator kinerja kebudayaan di Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2018.

**Tabel 2.51**  
**Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya serta Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	96	102	146	160	176	92
2	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	2	2	2	4	4
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	100	371	371	371	1.759	1.759

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

### 23) Perpustakaan

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kota Bandung tercatat sebanyak 69.441 orang, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 2.52**  
**Indikator Perpustakaan di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun	0,0022	0,0029	0,0069	0,0257	0,0433	0,0330
2	Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,4463	0,4201	0,3954	0,3652	0,3591	0,4083
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	378	501	1.210	4.515	7.607	11574
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	23,466	27,216	29.406	32.079	39.079	39.279
5	Rasio jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100,00%	60,00%	60,00%	75,00%	75,00%	37,50%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung

### 24) Kearsipan

#### Pengelolaan Arsip Secara Baku

Kearsipan (*filing*) adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Pengertian arsip menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip, pada pokoknya dikenal 4 (empat) macam sistem penyimpanan arsip yaitu:

1. Penyimpanan arsip menurut abjad
2. Penyimpanan menurut wilayah
3. Penyimpanan menurut nomor
4. Penyimpanan menurut tanggal

Dalam hal pengelolaan arsip secara baku ini, baru sebagian Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakannya. Pada tahun 2018, terdapat 45,57% dari seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku. Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.53**  
**Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	36,71%	45,57%	58,23%	72,15%	86,08%	45,57%
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	22	27	35	43	52	27
	Jumlah Perangkat Daerah	60	60	60	60	60	60
2	Peningkatan SDM Pengelola Kerasipan (jumlah Kegiatan)	1	2	2	2	2	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung

### **2.1.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN**

#### **1) Kelautan dan Perikanan**

##### **Produksi Perikanan**

Sektor perikanan di Kota Bandung, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dilakukan dalam skala kecil. Namun demikian, produksi ikan konsumsi masih cukup besar bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, produksi ikan konsumsi mencapai 100,02% dari target yang ditetapkan.

**Tabel 2.54**  
**Produksi Perikanan Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produksi Perikanan	103%	106,3%	101%	101,16%	100,02%	100,02%
2	Konsumsi ikan	100,3%	101,34%	102,28%	102,53%	106,08%	N/A
3	Peningkatan Produksi Ikan Konsumsi	NA	2.764,09 ton	2.877 ton	2.965 ton	2.970,7 ton	N/A

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

## 2) Pariwisata

### Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kota Bandung semakin mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin meningkatnya infrastruktur kota dan peningkatan promosi pariwisata. Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung dan indikator pariwisata lainnya dalam kurun waktu 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.55**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kunjungan wisata	102,85%	108,19%	110,59%	121,92%	100,98%	108,98%
	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata	3.897.429	5.807.565	6.061.094	6.899.582	6.960.512	7.585.346
	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan	3.789.544	5.367.894	5.480.821	5.658.874	6.899.582	6.960.512
	Lama kunjungan wisata	2,06	2,06	2,07	2,08	2,16	2,21
	PAD sektor pariwisata	25,57%	25,19%	27,27%	30,38%	25,57%	27,80%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

## 3) Pertanian

### a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu, termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi masih berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian seperti padi dan palawija. Dari data di lapangan, diketahui bahwa sentra produksi padi di Kota Bandung adalah Kecamatan Ujung Berung, Rancasari, Cibiru, Cinambo, Gedebage, Buah Batu, dan Arcamanik.

Produktivitas tanaman padi pada tahun 2017 sebanyak 6808 ton/ha, mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 2.56**  
**Produktivitas Padi Per Hektar Kota Bandung Tahun 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Produktivitas padi per hektar (ton/ha)	6,295	6,503	6,505	6,805	6,808

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

#### **b. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**

Mengingat Kota Bandung bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan, maka kontribusi sektor tersebut terhadap pencapaian PDRB Kota Bandung pun nilainya cukup kecil, hanya berada pada kisaran 0,12 %. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2016.

**Tabel 2.57**  
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Bandung Tahun 2013-2016**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	0,14%	0,14%	0,13%	0,12%

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

#### **4) Perdagangan**

Nilai ekspor perdagangan Kota Bandung pada tahun 2018 didapat sebesar US\$ 465 juta, dihitung berdasarkan atas penerbitan surat keterangan asal komoditi yang merupakan rekomendasi yang menyatakan barang tersebut diproduksi di Bandung. Berikut gambaran mengenai nilai ekspor Kota Bandung selama kurun waktu 2013-2018.

**Tabel 2.58**  
**Nilai Ekspor Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ekspor bersih perdagangan (\$ juta)	601,5	603	635	609	465	465

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

#### **5) Perindustrian**

Kota Bandung memiliki potensi industri, baik industri skala besar, menengah, dan kecil. Dari data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, pada tahun 2017, berdasarkan nilai investasi terdapat 253 industri besar, 835 industri



menengah, 2.932 industri kecil formal, dan 6.828 industri kecil non formal di Kota Bandung. Di kelompok industri kecil dan mikro, industri sandang merupakan industri dengan jumlah unit usaha terbesar sebanyak 1.237 unit usaha.

**Tabel 2.59**  
**Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2018**

No	Uraian	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Besar	253	31.767
2	Industri Menengah	835	27.263
3	Industri Kecil Formal	2.932	46.540
4	Industri Kecil Non Formal	6.828	20.572

Sumber: *Disdagin Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa industri kecil formal dan non formal di Kota Bandung merupakan sektor industri terbesar dalam jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Adapun data rinci sekor industri kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.60**  
**Potensi Sektor Industri di Kota Bandung Tahun 2018**

No	Uraian	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri Kecil Pangan	516	2.210
2	Industri Kecil Sandang	1.237	6.253
3	Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan	36	124
4	Industri Kecil Logam dan Elektronika	222	451
5	Industri Kecil Kerajinan	711	3.762

Sumber: *DKUMKM Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018*

## 6) Transmigrasi

Pada implementasi urusan transmigrasi, Kota Bandung berperan sebagai daerah pengirim calon transmigran ke daerah-daerah tujuan transmigrasi melalui pelaksanaan penyuluhan dan pendaftaran calon transmigran. Pada tahun 2014-2015 telah dilaksanakan penyuluhan transmigrasi dengan jumlah peserta sebanyak 180 orang, selanjutnya pada tahun 2017 dilaksanakan penyuluhan transmigrasi kepada 140 orang calon transmigran dari Kota Bandung. Adapun jumlah transmigrasi pada tahun 2013 sebanyak 3 KK (10 orang), bertambah menjadi 5 KK (24 orang) pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3 KK (12 orang).

### 2.1.3.3. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

#### 1) Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**Tabel 2.61**  
**Capaian Indikator Kinerja Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan**  
**Tahun 2014-2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	2 dok	4 dok	6 dok	8 dok	10 dok
4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

#### 2) Keuangan

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 termasuk predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tahun 2018 untuk pertama kalinya Pemerintah Kota Bandung meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam hal penetapan APBD, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 termasuk kategori Tidak Tepat Waktu, dan seiring dengan adanya perbaikan dan perubahan sistem pendukung penganggaran maka pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan kategori menjadi Tepat Waktu. Indikator keuangan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.62**  
**Indikator Keuangan Kota Bandung Tahun 2013 – 2018**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Realisasi)	33,30%	34,64%	36,48%	37,87%	44,96%	43,29%
	PAD (realisasi) Rp.M	1.442,8	1.716,1	1.859,7	2.152,8	2.578,5	2.571,6
	Jumlah Pendapatan Daerah (realisasi)	4.332,1	4.953,9	5.098,1	5.685,1	5.735,0	5.939,9
2	Hasil Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3	Persentase SILPA	17,63%	27,35%	19,11%	9,13%	10,86%	3,82%
	Total SILPA Rp.M	710,2	1.213,0	994,1	532,1	601,8	233,8
	Total APBD (realisasi) Rp.M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7	6.114,4
4	Persentase belanja pendidikan (20%) (realisasi)	36,81%	37,53%	33,79%	28,93%	21,53%	23,69%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (realisasi) Rp.M	1.482,7	1.664,5	1.757,7	1.686,6	1.193,1	1.448,6
	Total APBD (realisasi) Rp.M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7	6.114,4
5	Persentase belanja kesehatan (realisasi)	8,59%	8,83%	10,18%	10,82%	16,10%	18,93%
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan (realisasi) Rp.M	346,0	391,5	529,6	630,8	892,1	1.157,6
	Total APBD (realisasi) Rp.	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7	6.114,4
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (realisasi)	47,46%	47,24%	54,18%	56,16%	51,48%	50,09%
		52,54%	52,76%	45,82%	43,84%	48,16%	49,91%
	Jumlah Belanja Langsung (realisasi) Rp.M	1.911,5	2.095,6	2.818,3	3.274,3	2.852,9	3.063,0
	Total APBD (realisasi)	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7	6.114,4
	Jumlah Belanja Tidak Langsung (realisasi) Rp.M	2.116,0	2.340,0	2.383,6	2.556,1	2.668,9	3.051,4
	Total APBD (realisasi) Rp.M	4.027,5	4.435,6	5.201,9	5.830,4	5.541,7	6.114,4
7	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: BPKA Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

### 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Penempatan SDM Aparatur Sipil Negara Sesuai Formasi dan Kompetensi merupakan salah satu indikator kepegawaian yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.63**  
**Capaian Indikator Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013 – 2018**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0,13	0,09	0,05	0,11	0,13	11,51

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	63,55%	67,91%	69,05%	88,34%	95,53%	109%
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	76,27%	81,24%	86,98%	102,15%	95,25%	93,99%
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	35	35	35	33	34
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	212	212	212	208	220	1711
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	13.637	13.468	13.558	9.770	9.603	9.236

Sumber: BKPP Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

#### 4) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah. Indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti telah mencapai 70% pada tahun 2017.

**Tabel 2.64**  
**Perkembangan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2013 – 2017**

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	N/A	30%	50%	50%	50%
2	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	70,00	44,44	90,91
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	-	-	-	-
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	-	-	-	-
5	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	N/A	100	100	100	100
6	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	N/A	N/A	10	9	11
7	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

## 5) Pengawasan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, aspek pengawasan mutlak diimplementasikan secara komprehensif sebagai alat evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Persentase tindak lanjut temuan menunjukkan hasil peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, sebanyak 11,50% menjadi 108,87% pada tahun 2018. Sementara jumlah temuan BPK berfluktuasi, namun pada tahun 2018 memperoleh hasil yang positif dengan nihilnya rekomendasi jumlah temuan BPK. Perkembangan indikator pengawasan di Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.65**  
**Perkembangan Pengawasan Tahun 2014 – 2018**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase tindak lanjut temuan	11,50%	15,14%	67,52%	97,15%	108,87%
	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	26	61	291	409	491
	Jumlah total temuan (Rekomendasi)	226	403	431	421	451
2	Jumlah temuan BPK (Rekomendasi)	11	27	3	25	0

Sumber: Inspektorat Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD

## 6) Fungsi Penunjang Lainnya

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang lainnya, salah satu indikator yang diukur adalah persentase perangkat daerah dengan nilai IKM Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Kategori Perangkat Daerah dengan IKM yang "Baik" di Kota Bandung diukur dari hasil survey kepuasan atau IKM yang memperoleh nilai minimal 75.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Bandung juga telah mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2013-2018 yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat kota pada seluruh unit layanan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil Survey IKM, berikut merupakan data Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik.

**Tabel 2.66**  
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya**  
**Tahun 2017-2018**

No	Indikator	2017	2018
1	Persentase Perangkat Daerah dengan IKM Baik	96.67%	100%

Sumber: *Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP. Capaian realisasi AKIP Kota Bandung selama periode tahun 2015-2018 menunjukkan hasil yang positif dengan rata-rata nilai AKIP sebesar 80,31 yang termasuk tingkat akuntabilitas kinerja dengan kategori A. Berikut rincian penilaian evaluasi AKIP periode tahun 2015 sampai dengan 2018.

**Tabel 2.67**  
**Capaian Realisasi AKIP Kota Bandung Tahun 2015-2018**

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2015	2016	2017	2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,96	24,82	25,41	25,57
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,70	20,67	19,96	20,01
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,78	11,89	12,60	12,61
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,04	7,47	7,00	7,02
5.	Capaian Kinerja	20	15,74	15,76	15,40	14,84
	Nilai Hasil Evaluasi	100	80,22	80,61	80,37	80,05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A	A	A

Sumber: *Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD*

## 2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.1.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

#### Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian di Kota Bandung.

**Tabel 2.68**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung**  
**Periode 2013-2016 (Rp Juta)**

Harga Berlaku (Rp. Juta)	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	812,568,323.76	881,109,398.50	983,714,226.82	1,083,451,790.11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	8,518,791.37	9,189,585.86	8,908,646.21	9,564,959.72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	73,717,544.96	81,202,692.40	98,292,764.94	105,727,585.26
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	301,400,003.83	346,009,578.17	382,985,600.09	412,295,910.95
5. Perubahan Inventori	58,549,693.39	64,617,769.57	59,421,457.85	68,495,050.07
6. Ekspor Barang dan Jasa	440,292,657.25	504,250,137.96	559,711,664.37	609,399,248.37
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	436,057,685.79	500,554,085.97	568,202,158.76	636,345,101.30
Produk Domestik Regional Bruto	<b>1,258,989,328.78</b>	<b>1,385,825,076.49</b>	<b>1,524,832,201.52</b>	<b>1,652,589,443.18</b>

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, PDRB Menurut Penggunaan Kota Bandung 2013-2016

### 2.1.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

#### 1) Luas Wilayah Terkena Banjir/Genangan

Berkaitan dengan penanganan lokasi banjir dan genangan di Kota Bandung, pada tahun 2013 masih terdapat 48 lokasi banjir yang belum teratasi. Sekarang di daerah kota diperkirakan sebesar 75% dan di Kawasan Bandung Utara sebesar 60%. Tingginya air larian menyebabkan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga di musim kemarau mengalami kekeringan. Sebaliknya, tingginya air larian tersebut menimbulkan banjir/genangan di musim hujan. Pada tahun 2017 luas area yang terkena banjir/genangan di Kota Bandung di setiap tempat bervariasi antara 0,05 Ha sampai 1,60 Ha di 68 titik. Total luas lahan yang terkena banjir

tahun 2017 mencapai 33,35 Ha dengan frekuensi/lama genangan kurang dari 2 jam. Rusaknya fungsi resapan di Kota Bandung dan daerah sekitarnya, khususnya di wilayah Kawasan Bandung Utara dapat terlihat dari indikasi tingginya selisih debit maksimum dengan debit minimum sungai-sungai yang ada atau melintas Kota Bandung.

Topografi Kota Bandung, serta perkembangannya secara horizontal dan vertikal sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan teknologi drainase yang baik. Banjir cileuncang yang merugikan masyarakat dapat direduksi bahkan bisa diarahkan menjadi asupan bagi air tanah dengan teknik biopori dan sumur resapan serta perbaikan drainase.

## 2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Kota Bandung terdapat 472 restoran dan 14 bar yang tersebar di beberapa kawasan dengan beragam variasi masakan dan minuman. Keberagaman kuliner yang dimiliki Kota Bandung merupakan salah satu potensi terbesar untuk menarik wisatawan serta daya tarik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

## 3) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata memiliki cukup banyak sarana akomodasi. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah hotel bintang dan non bintang di Kota Bandung sebanyak 336 unit, atau mengalami penurunan sebesar 14,29 persen dibanding tahun 2015 yang jumlahnya mencapai 392 unit hotel. Adanya penurunan jenis hotel tersebut dikarenakan banyaknya hotel-hotel khususnya hotel non bintang yang beralih fungsi menjadi kost-kostan. Jumlah rincian jenis hotel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.69**  
**Jumlah Penginapan/Hotel**

Uraian	2014	2015	2016	2017
Hotel Bintang 5	10	9	9	9
Hotel Bintang 4	28	32	32	32
Hotel Bintang 3	40	41	42	42
Hotel Bintang 2	25	25	25	25
Hotel Bintang 1	9	10	10	10
Hotel Non Bintang	270	275	218	218

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD, 2018

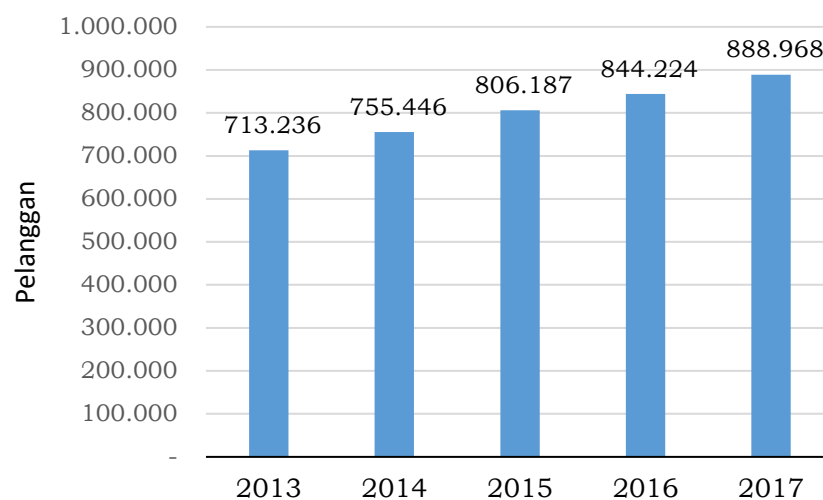


Meskipun secara keseluruhan jumlah hotel pada tahun 2016 dan 2017 menurun dibanding tahun 2015, ternyata jumlah kamar yang disewakan justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, jumlah kamar hotel yang disewakan ada sebanyak 16.821 kamar dan meningkat menjadi sebanyak 16.951 kamar pada tahun 2016 dan 2017 (naik 0,77 persen). Kenaikan jumlah kamar tersebut ternyata terjadi pada jumlah kamar hotel non bintang dan hotel bintang 3. Pada hotel non bintang, naik dari sebanyak 6010 kamar menjadi sebanyak 6041 kamar. Untuk hotel bintang 3, naik dari 3408 kamar menjadi 3507 kamar.

#### 4) Rumah Tangga/Pelanggan yang Menggunakan Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat area Bandung, jumlah pelanggan yang menggunakan listrik pada tahun 2017 sebanyak 888.968 pelanggan. Pengguna listrik di Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,66%. Data perkembangan jumlah pelanggan listrik di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.17**  
**Jumlah Pelanggan yang menggunakan Listrik PLN Tahun 2013-2017**



#### 5) Liveable City Index

Untuk menggambarkan kondisi infrastruktur Kota Bandung dapat digunakan *Livable City Index (LCI)*. *Livable City* adalah gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). *Livable City Index* Kota Bandung terdiri dari tujuh aspek dengan nilai sebagai berikut.

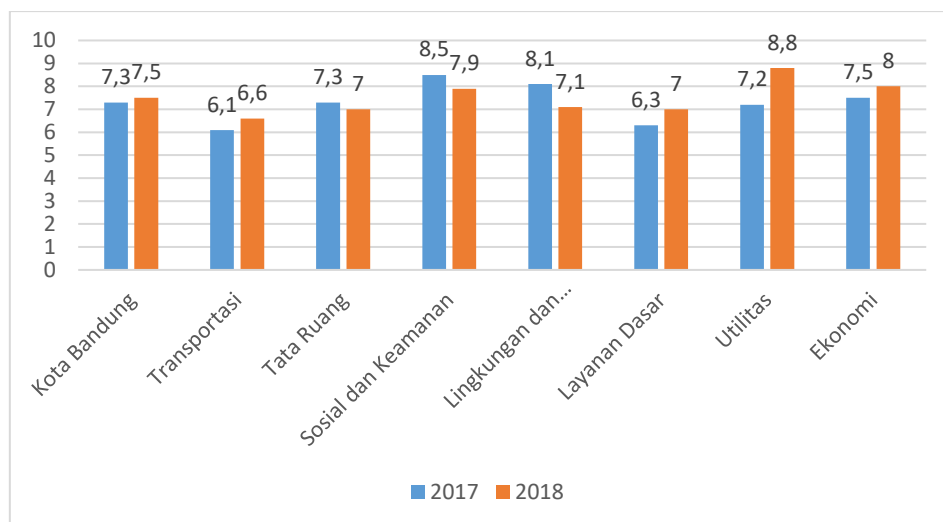
**Tabel 2.70**  
**Liveable City Index Tahun 2017-2018**

No	Aspek	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Transportasi	6,1	6,6
2	Tata Ruang	7,3	7,0
3	Sosial dan Keamanan	8,5	7,9
4	Lingkungan dan Kesehatan	8,1	7,1
5	Layanan Dasar	6,3	7,0
6	Utilitas	7,2	8,8
7	Ekonomi	7,5	8,0
	<i>LCI Kota Bandung</i>	7,3	7,5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh gambaran gambaran bahwa sasaran investasi swasta perlu diarahkan pada aspek dengan skor yang masih dibawah rata-rata yaitu aspek transportasi dan layanan dasar.

**Gambar 2.18**  
**Liveable City Index Kota Bandung Tahun 2017-2018**



### 2.1.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

#### 1) Investasi dan Perijinan

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi atau penanaman modal. Daerah yang menarik sebagai tujuan penanaman modal akan memiliki kesempatan yang besar untuk semakin bertumbuh. Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dijadikan tempat menanam modal.

Kota Bandung memiliki peluang investasi yang luas dalam berbagai sektor sesuai dengan karakteristik kota metropolitan. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Fokus Investasi Kota Bandung di dorong untuk mendukung Kota Bandung sebagai destinasi wisata dunia berdasarkan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bandung, selain itu investasi juga dilandaskan kepada semangat ekonomi kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan warga dapat terwujud di Kota Bandung.

Kota Bandung terpilih menjadi kota nomor satu terbaik se-Indonesia dalam ajang penghargaan Indonesia's Attractiveness Award (IAI) pada tahun 2017. Penghargaan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran dan observasi terhadap daya tarik setiap daerah di Indonesia di sektor investasi, layanan publik, infrastruktur dan pariwisata oleh Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group. Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Bandung masih memiliki daya tarik untuk menarik investor dan pelaku bisnis di berbagai sektor. Hal ini akan berimplikasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan menaikkan tingkat konsumsi masyarakat sehingga dapat menggairahkan ekonomi setempat baik sektor perdagangan, transportasi, akomodasi, dan lainnya.

Sektor yang berpotensi untuk meningkatkan penanaman modal di Kota Bandung adalah : industri kreatif (seperti e-commerce, iklan, fashion dan pakaian, desain, dll), telekomunikasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan dan properti, kesehatan, barang dan jasa, sektor industrial, dan serta perdagangan.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Pada ayat (5) disebutkan bahwa izin yang dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan ini berarti pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan. Sejak tahun 2015, telah diresmikan Aplikasi Baru berbasis elektronik atau yang terkenal dengan *Online Services System*, bertajuk *HAYU bandung!* sebuah aplikasi perizinan berbasis website, *full online, full paperless services*. Inovasi ini memberikan kepastian waktu, kepastian biaya, dan

kepastian proses. Dengan aplikasi ini, petugas dan pemohon perizinan tidak perlu lagi untuk tatap muka. Terdapat 3 langkah mudah dalam penggunaan pelayanan ini, yaitu mendaftar, membayar untuk 3 izin yang berbayar (Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mempekerjakan Orang Asing dan Izin Trayek), serta menunggu izin diantar lewat pos ke alamat tujuan pemohon.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menghadirkan layanan Perizinan berbasis smartphone dengan nama "GAMPIL" (Gadget Mobile Application for License), yang merupakan sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses secara mudah di mana pun dan kapan pun sistem perizinan online. Inovasi ini bermanfaat terutama perizinan bagi UKM dengan cara mudah dan persyaratan minimal.

## 2) Pajak dan Retribusi Daerah

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah, merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan *taxing power* kepada daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah adalah 16 jenis, meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11 jenis.

**Tabel 2.71**  
**Perincian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bandung**  
**Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017
1	Pajak Hotel	295.385.661.260
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan	278.760.056.903
3	Pajak Hiburan	85.094.874.308
4	Pajak Reklame	12.844.048.144
5	Pajak Penerangan Jalan	193.033.914.175
6	Pajak Parkir	40.137.159.581
7	BPHTB	695.876.761.086
8	Pajak Bumi dan Bangunan	543.210.584.172
9	Pajak Air Bawah Tanah	30.520.721.234
	<b>Jumlah</b>	<b>2.174.863.780.863</b>

Sumber: *Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2017 yang dikelola dalam SIPD*

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah Kota Bandung, jenis-jenis pajak tersebut meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak parkir; Pajak Bumi Bangunan (PBB); Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan pajak air tanah. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) komponen pajak daerah, terdapat 5 (lima) komponen pajak yang capaiannya melebihi target, sedangkan 4 (empat) komponen lainnya belum mencapai target. Realisasi pajak yang melampaui target pada tahun 2017, adalah (i) pajak restoran, (ii) pajak hiburan, (iii) pajak penerangan jalan, (iv) pajak parkir dan (v) pajak BPHTB.

Kewenangan untuk memungut retribusi bagi pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut aturan tersebut bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki dua prinsip, yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetary*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan di Kota Bandung pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman (Dinas Tata Ruang);
2. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan);
3. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (Dinas Perhubungan);
4. Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran (Diskar PB);
5. Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi (Diskominfo);
6. Retribusi pelayanan tera/tera ulang (Disdagin)
7. Retribusi terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum (Dinas Perhubungan)
8. Retribusi tempat rekreasi (DPKP3);
9. Retribusi rumah potong hewan (Dispangtan)
10. Retribusi TMB (Dinas Perhubungan)
11. Retribusi izin mendirikan bangunan (DPMPTSP);
12. Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi (DPMPTSP);
13. Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan (DPMPTSP);

14. Retribusi pemberian izin trayek kepada Orang Pribadi (DPMPTSP);
15. Retribusi pemberian izin trayek kepada Badan (DPMPTSP);
16. Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing - LRA (DPMPTSP)

Rincian pendapatan dari retribusi daerah pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.72**  
**Perincian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bandung**  
**Tahun Anggaran 2017 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017	
		Realisasi Pendapatan	Perangkat Daerah
1	Retribusi pelayanan penguburan/pemakaman	3.750.547.000	Distaru
2	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	5.995.581.500	Dinas Perhubungan
3	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	4.468.409.300	Dinas Perhubungan
4	Retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran	1.054.113.900	Diskar PB
5	Retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi (Diskominfo)	0	Diskominfo
6	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	549.579.650	Disdagin
7	Retribusi terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum	4.458.543.900	Dinas Perhubungan
8	Retribusi tempat rekreasi	543.633.600	DPKP3
9	Retribusi rumah potong hewan	1.580.700.000	Dispangtan
10	Retribusi TMB	1.479.501.000	Dinas Perhubungan
11	Retribusi izin mendirikan bangunan	19.194.470.768	DPMPTSP
12	Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi);	519.193.452	DPMPTSP
13	Retribusi izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan	4.327.840.464	DPMPTSP
14	Retribusi pemberian izin trayek kepada Orang Pribadi	1.150.000	DPMPTSP

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017	
		Realisasi Pendapatan	Perangkat Daerah
15	Retribusi pemberian izin trayek kepada Badan	127.500.000	DPMPTSP
16	Retribusi perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing - LRA	2.013.792.800	DPMPTSP
	<b>Jumlah</b>	<b>50.064.557.334</b>	

Sumber: *Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun 2017 yang dikelola dalam SIPD*

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa total perolehan retribusi daerah Kota Bandung pada tahun 2017 hanya terealisasi sebesar Rp50.064.557.334,00 atau 19.06% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp262.678.023.845,00. Dari 16 (enam belas) komponen retribusi yang dipungut, terdapat 3 (tiga) komponen retribusi yang melebihi target, 1 (satu) komponen tidak ditarget tapi memberi pemasukan, 11 (sebelas) komponen tidak mencapai target, dan 1 (satu) komponen tidak menghasilkan retribusi.

#### 2.1.4.4. FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

##### 1) Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM nya.

**Tabel 2.73**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Bandung Periode 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	261.402	325.865	391.328	368.896	372.191
2	Jumlah Penduduk	2.483.977	2.470.802	2.481.469	2.490.622	2.499.809
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3	10,52 %	13,19%	15,77%	14,81%	14,89%

Sumber: *BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah)*

Data dari tabel di atas, menunjukkan rasio pendidikan sarjana dan pasca sarjana masyarakat Kota Bandung masih rendah walaupun menunjukkan kecenderungan meningkat.

##### 2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak

produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tingginya persentase *dependency ratio*, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk tidak produktif.

**Tabel 2.74**  
**Rasio Ketergantungan di Kota Bandung Periode 2013-2016**  
**(dalam Persen)**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Ketergantungan Penduduk Laki-Laki	38,9	38,6	38,4	38,9
2	Rasio Ketergantungan Penduduk Perempuan	39,8	39,5	39,2	39,8
3	Rasio Ketergantungan Total	39,3	39	38,8	39,4

Sumber: BPS Kota Bandung yang dikelola dalam SIPD (diolah)

Selama periode tahun 2013 – 2016, rasio ketergantungan penduduk Kota Bandung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 – 2015, rasio ketergantungan penduduk terus mengalami penurunan yaitu dari sebesar 39,3 persen menjadi 38,8 persen. Namun rasio ketergantungan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 menjadi 39,4 persen. Besar kecilnya rasio ketergantungan sangat dipengaruhi oleh proporsi penduduk usia anak- anak dan proporsi penduduk usia kerja.

## **2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2018, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.



**Tabel 2.75**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2018**

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar										
1.1	Urusan Pendidikan										
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tingkat kualitas manajemen pelayanan pendidikan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Tingkat Ketepatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
2	Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN	Persentase penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	%	100,31	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	79,54	71.26	79.57	111.66%	79.57%	79.57%	100%	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	%	46,92	40.72	46.94	115.28%	-	-	-	
4	Program Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan Paket A	%	100	88	96.79	109.99%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Angka Kelulusan Paket B	%	100	92	98.49	107.05%	-	-	-	
		Angka Partisipasi kasar PAUD Non Formal	%	32,63	30.54	32.64	106.88%	-	-	-	
		Angka Melek Huruf Pendudukan > 15 Tahun	%	N/A	99,95	N/A	-	-	-	-	
		Angka Rata -Rata Lama Sekolah	Tahun	10,59	12	N/A	-	-	-	-	
		Persentase satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi secara lokal	%	11,02	12	12.28	102.33%	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar Kesetaraan	%	-	-	-	-	100 %	100 %	100%	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S-1	%	36,28	38	38.02	100.05%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Persentase Guru PAUD Non Formal yang memiliki kualifikasi S-1	%	37,19	39	39.03	100.08%	-	-	-	
		Persentase Guru SD yang memiliki kualifikasi S-1	%	92,1	95	95.03	100.03%	-	-	-	
		Persentase Guru SMP yang memiliki kualifikasi S-2	%	10,02	11	11.02	100.18%	-	-	-	
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	%	-	-	-	-	51,75%	51,75%	100%	
6	Program Inovasi Pendidikan	Terciptanya Inovasi Bidang pendidikan	%		80	100	125.00%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
7	Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis	Angka Putus Sekolah SD	%	0,01	0.01	0.01	100.00%	0.01%	0.01%	100%	Dinas Pendidikan
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0,02	0.01	0.02	50.00%	0.02%	0.02%	100%	
		Angka Melanjutkan siswa SD	%	92,95	92.75	92.76	100.01%	-	-	-	
		Angka Melanjutkan Siswa SMP	%	94,64	90.6	94.67	104.49%	-	-	-	
		Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
		Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
8	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SD	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI/SDLB/Paket A	%	0	100	100.12	100.12%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Persentase satuan SD yang terakreditasi	%	0	65	65.04	100.06%	-	-	-	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan SMP	Jumlah Sekola Hujau (Adiwiyata) SD	Sekolah	0	22	28	127.27%	-	-	-	Dinas Pendidikan
		Rata-rata Nilai Ujian Nasioanal/ Ujian SD	Indeks	0	76	76.72	100.95%	-	-	-	
		Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SD	Sekolah	0	32	37	115.63%	-	-	-	
		Persentase satuan SMP yang terakreditasi	%	0	55	55.24	100.44%	-	-	-	
		Jumlah Sekolah Hijau (Adiwiyata) SMP	Sekolah	0	20	38	190.00%	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	%	0	103.3	106.81	103.40%	103.11%	103.11%	100%	
		Angka Partisipasi murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs/SMPLB/Paket B)	%	0	100	100.15	100.15%	-	-	-	
		Jumlah Rintisan Sekolah Inklusif SMP	Sekolah	0	17	24	141.18%	-	-	-	
10	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	%	106,19	-	-	-	102.13%	102.13%	100%	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar SMP	%	104,80	-	-	-	103.11%	103.11%	100%	
		Presentasi Inovasi Pendidikan yang Dimanfaatkan Untuk Pelayanan Pendidikan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
		Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
1.2	<b>Urusan Kesehatan</b>										
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan upaya kesehatan masyarakat	%	113.11	100	97.51	97.51%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase pencapaian pelayanan kesehatan pada bayi, balita, anak, remaja, ibu dan lansia	%	102.7	85	105.23	123.80%	85%	85%	100%	
		Menurunnya persentase gizi buruk	%	0.39	0.42	0.38	90.48%	-	-	-	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Persentase penanganan masalah gizi buruk	%	-	-	-	-	95%	95%	100%	
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penerapan promosi kesehatan di rumah sakit	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan promosi kesehatan Fasilitas Kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Purnama dan Mandiri	%	-	-	-	-	8.74%	8.74%	100%	
		Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga	%	-	-	-	-	8.74%	8.74%	100%	
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penderita penyakit menular	%	111.74	100	105.56	105.56%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) < 24 jam	%	100	100	100	100.00%	100%	100%	100%	
		Persentase penanganan penderita penyakit tidak menular	%	100	100	100	100.00%	100%	100%	100%	
		Universal Child Immunization (UCI)	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tenaga dan sarana kesehatan yang bersertifikat	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
5	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase puskesmas yang telah memenuhi rasio jumlah puskesmas dibanding jumlah penduduk	%	93.38	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
6	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	Persentase dokumen evaluasi pembangunan kesehatan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	%	80	-	-	-	100%	100%	100%	
		Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan dan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		evaluasi pembangunan kesehatan									
		Cakupan pengembangan smart city pada fasilitas kesehatan tingkat pertama	%	-	100	86.25	86.25%	-	-	-	
		Penilaian LKIP PD	%	75.8	80	79.9	99.88%	-	-	-	
7	Program Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Khusus	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus ditangani FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan)	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Cakupan pelayanan kesehatan mobilitas	%	100	100	106.05	106.05%	-	-	-	
8	Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Cakupan Fasilitas Kesehatan primer yang Dibina	%	-	-	-	-	65%	65%	100%	Dinas Kesehatan
		Cakupan Fasilitas Kesehatan rujukan yang Dibina	%	-	-	-	-	80%	80%	100%	
9	Program Pembiayaan dan Regulasi Kesehatan	Cakupan warga miskin yang dilayani kesehatannya	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase rancangan produk hukum bidang kesehatan berdasarkan prosedur	%	0	100	100	100.00%	-	-	-	
		Cakupan perizinan kesehatan sesuai dengan prosedur/SOP	%	0	100	100	100.00%	-	-	-	
10	Program Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kesehatan	Persentase dokumen rancangan kebijakan dan peraturan yang tersusun	%	-	-	-	-	40%	40%	100%	Dinas Kesehatan
11	Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya	Cakupan pengadaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, pangan dan bahan berbahaya	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan pembinaan sarana kefarmasian dan PIRT yabf memiliki sertifikat	%	102,04	100	100	100.00%	-	-	-	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Persentase Fasilitas Kesehatan melaksanakan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan sesuai standar	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
		Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang melaksanakan produksi sesuai standar Kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
12	Program Kefarmasian dan Alat kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Instalasi RS yang memenuhi standar kefarmasian dan alat kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga	Cakupan institusi yang memiliki sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	%	0	75	86.36	115.15%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan penduduk mengakses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	%	0	80	74.81	93.51%	-	-	-	
		Persentase Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar	%	-	-	-	-	75%	75%	100%	
		Persentase sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	%	-	-	-	-	40%	40%	100%	
14	Program SDM Kesehatan	Persentase sumber daya manusia bidang kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	-	80	100	125.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	%	100	-	-	-	-	-	-	
15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan BLUD	%	-	100	100	100.00%	40,30%	40,30%	100%	Dinas Kesehatan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
16	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan penerapan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	-	100	100	100.00%	37.50%	37.50%	100%	Dinas Kesehatan
19	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Unit Pelayanan Kesehatan milik pemerintah yang memenuhi standar pelayanan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
20	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100.00%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan akibat dampak asap rokok	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan Rumah Sakit	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
23	Program Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan	Persentase puskesmas dengan tatalaksana BLUD yang sehat	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
24	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
25	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang ditangani	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Persentase RW Siaga Aktif	%	-	-	-	-	47.64 %	47.64 %	100%	
26	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Cakupan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
27	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	Cakupan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	%	-	-	-	-	1,30%	1,30%	100%	Dinas Kesehatan
28	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
29	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk sesuai WHO (1:30.000 penduduk)	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
30	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	-	-	-	-	96%	96%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
31	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	%	-	-	-	-	15%	15%	100%	Dinas Kesehatan
32	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai kesehatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
33	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
		Persentase Lingkungan Sosial yang Memenuhi Standar Alat Kesehatan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
34	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
35	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penerapan promosi kesehatan di rumah sakit	%	0	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Penerapan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit	%	100	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
		Cakupan Penerapan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	%	100	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
36	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	%		100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
37	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan sarana prasarana rumah sakit yang memadai	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
38	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
39	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarnya Layanan Rumah Sakit Terstandarisasi	%	N/A	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
40	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan ketersediaan pelayanan yang memadai Rumah Sakit	%	99.11	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan
41	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kesehatan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata										
42	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit khusus gigi dan mulut	%		3,1	3.8	108.57%	-	-	-	Dinas Kesehatan
1.3	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
1	Program Perencanaan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen acuan pelaksanaan pekerjaan	Dokumen	0	170	214	125.88%	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Dokumen acuan pekerjaan Pelaksanaan di implemmentasikan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
2	Program Pemeliharaan Pekerjaan Umum	Sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik	%	0	100	100	100.00%	78%	78%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
3	Program Pembangunan Pekerjaan Umum	Cakupan sarana dan prasarana pekerjaan umum terbangun	%	0	100	100	100.00%	100%	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum
4	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	Dok.RTBL	2	2	2	100.00%	-	-	-	Dinas Penataan Ruang
		Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Rinci Pada Pusat-Pusat Pelayanan Kota	Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
		Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Ditindaklanjuti	%	35	-	-	-	-	-	-	
5	Program Penataan Ruang	Pembangunan gedung LPTQ	Unit	0	1	N/A	-	-	-	-	Dinas Penataan Ruang
6	Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan serta	Terwujudnya kualitas tata bangunan dan keandalan bangunan		8 SWK di Kota Bandung	Semua SWK di Kota Bandung	N/A	-	-	-	-	Dinas Penataan Ruang

Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018								Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019			
No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	Perangkat Daerah
	Pembangunan Bangunan										
7	Program Pemanfaatan Ruang Tata Kota	Dokumen Detail Engineering Design (DED)	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Penataaan Ruang
		Terwujudnya tertib pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Prosentase Bangunan Gedung Umum Yang Memenuhi RTH Privat Sesuai Peraturan Yang Berlaku	%	-	-	-	-	0%	0%	100%	
8	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	Tingkat penertiban pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan	%	0	85	85	100.00%	-	-		Dinas Penataaan Ruang
		Persentase Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	%	-	-	-	-	76%	76%	100%	
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman										
1	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana areal pemakaman	%	0	100	100	100.00%	-	-		Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
		Persentase Areal Pemakaman ditata	%	-	-	-	-	31%	31%	100%	
2	Program Pengembangan Perumahan	Perbaikan rumah tidak layak huni	Unit	1985	2480	3288	132.58%	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
		Jumlah kepala keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah susun	KK	961	2390	961	40.21%	-	-	-	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh	%	0	9.27	5.16	144,33%	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
											Pertanahan dan Pertamanan
4	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Persentase prasarana, sarana, utilitas dan elemen estetika kota dalam kondisi baik	%	100	100	98.82	98.82%	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
		Persentase PSU milik pemerintah Kota Bandung dalam kondisi Baik	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
5	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luasan kawasan pemukiman kumuh	%	-	-	-	-	4.55%	4.55%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
		Persentase Kawasan Permukiman Tertata	%	16,67	-	-	-	-	-	-	
6	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menempati hunian yang layak	%	-	-	-	-	66.51%	66.51%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan
1.5	<b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Rakyat</b>										
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	63,51	63.25	63.76	100.81%	66.91%	66.91%	100%	Satpol PP
2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah aparat yang terlatih	Orang	0	270	300	111.11%	-	-	-	Satpol PP
3	Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penanganan gangguan trantibum	%	130,69	100	100.93	100.93%	-	-	-	Satpol PP
		Tingkat Kondusifitas Kota Melalui Badan Narkotika	%	171,28	-	-	-	-	-	-	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Kota (BNK) dan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda)									
4	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan penegakan Perda	%	114,32	90	100	111.11%	-	-	-	Satpol PP
5	Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	110.5	91	100	109.89%	-	-	-	Satpol PP
6	Program Pencegahan Dini dan Penganggulan Korban Bencana Alam	Cakupan layanan bencana alam	%	0	80	81.17	101.46%	-	-	-	DiskarPB
7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Response Time Rate	Menit	12,26	<15	13,25	100,00%	-	-	-	DiskarPB
8	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	Presentase kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana	%	-	-	-	-	10%	10%	100%	DiskarPB
9	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	Tingkat waktu maksimum tanggap (respons time rate)	Menit	-	-	-	-	15 menit	15 menit	100%	DiskarPB
10	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	rata-rata tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	Jam	-	-	-	-	23 jam	24 jam	100%	DiskarPB
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	persentase tersedianya sarana pengamanan kebakaran di kelurahan	%	-	-	-	-	0%	0%	100%	DiskarPB
12	Program Peningkatan Kesiapsiagaan,	Response Time Rate ≤ 15 menit	Menit	-	-	-	-	≤ 15 menit	≤ 15 menit	100%	DiskarPB

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Pelayanan, Pencegahan, serta Penanganan Kebakaran dan Bencana										
13	Program Pengendalian Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya	Persentase menurunnya potensi konflik	%	66,23	10	8.66	86.60%	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Ekonomi sosial Budaya	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
14	Program Pengembangan, Pemantapan dan Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Persentase menurunnya potensi konflik	%	0	100	100	100.00%	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase Potensi Konflik tidak menjadi konflik lingkup Wawasan Kebangsaan	%					100%	100%	100%	Bakesbangpol
15	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Bandung	%	Tidak Dilaksanakannya Pemilu/ Pilkada	58	76.62	132.10%	-	-	-	Bakesbangpol
16	Program Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres	%	-	-	-	-	77%	77%	100%	Bakesbangpol
		Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pileg	%	-	-	-	-	74%	74%	100%	
17	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	%	Tidak Dilaksanakannya Pemilu/ Pilkada	65	76.62	117.88%	-	-	-	Bakesbangpol
18	Program Sosialisasi dan Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya	%	0	65	76.62	117.88%	-	-	-	Bakesbangpol
19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penanganan potensi konflik	%	0	100	100	100.00%	-	-	-	Bakesbangpol
		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup Kewaspadaan Nasional	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
20	Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	cakupan pengembangan kemampuan dan pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	%	-	-	-	-	73.00%	73.00%	100%	Satpol PP
21	Program Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik	Cakupan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Satpol PP
22	Program Penegakan Produk Hukum daerah	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Satpol PP
		Persentase Penegakan PERDA	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
1.6	<b>Urusan Sosial</b>										
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan keluarga miskin	%	53,49	21.59	54.25	251.27%	-	-	-	Dinas Sosial
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase cakupan penanganan korban trafficking, korban bencana, dan orang terlantar dalam perjalanan yang ditangani	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Sosial
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase penanganan anak terlantar dan Anak Jalanan	%	15,95	4.77	20.33	426.21%	-	-	-	Dinas Sosial
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penanganan penyandang cacat	%	12,43	13.05	22.11	169.43%	-	-	-	Dinas Sosial
		Prosentase penyandang disabilitas yang memperoleh pemenuhan rehabilitasi sosial dasar	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Jumlah penghuni panti yang ditangani	Orang	3554	3554	3842	108.10%	-	-	-	Dinas Sosial

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, dan korban penyalahgunaan Napza	%	24,67	17.87	27.45	153.61%	-	-	-	Dinas Sosial
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang ikut serta dalam penanganan masalah sosial	PSKS	1746	1392	2073	148.92%	-	-	-	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	80%	80%	100%	Dinas Sosial
8	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	Persentase penanganan lanjut usia terlantar	%	48,24	27.28	89.18	326.91%	-	-	-	Dinas Sosial
9	Program Perlindungan Sosial Bencana	Cakupan pemberian bantuan bagi korban bencana	%	0	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Sosial
		Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
10	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mengikuti pemberdayaan	Orang	0	100	231	231.00%	-	-	-	Dinas Sosial
		Jumlah PMKS yang meningkat pendapatannya	Orang	-	-	-	-	200 orang	200 orang	100%	
11	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	Baik	78,87	-	-	-	-	Dinas Sosial
		Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	%					100%	100%	100%	
12	Program Identifikasi dan Inventarisasi Data PMKS	Jumlah data PMKS yang dimutakhirkan	Dokumen	0	2	2	100.00%	-	-	-	Dinas Sosial
		Cakupan data warga miskin yang terverifikasi dan valid	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
13	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	KK	-	-	-	-	62000 KK	62000 KK	100%	Dinas Sosial



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
14	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pemenuhan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Sosial
15	Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Persentase anak dan lansia terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Sosial
1.7	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>										
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang dilatih mandiri	Orang	1060	1182	1200	101.52%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah Peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya	Orang	-	-	-	-	180 orang	180 orang	100%	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	4203	2786	4338	155.71%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah lowongan kerja	Orang	13491	14000	13617	97.26%	-	-	-	
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	-	-	-	-	45,30%	45,30%	100%	
		Calon Wirausaha baru yang dilatih	Orang	-	-	-	-	700 orang	700 orang	100%	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kasus	58	58	68	117.24%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	%	-	-	-	-	58%	58%	100%	
4	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Calon transmigrasi diseleksi	Oang	-	-	-	-	120 orang	120 orang	100%	Dinas Tenaga Kerja
1.8	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
1	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kelurahan layak anak	Kelurahan	0	60	72	120.00%	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan
		Persentase Kelurahan Layak Anak	%	-	-	-	-	52.28%	52.28%	100%	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	0	70.5	58.84	83.46%	-	-	-	Perlindungan anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
		Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	%	-	-	-	-	16.95%	16.95%	100%	
3	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	Indeks Kepuasan Masyarakat Lansia	Indeks	0	Baik	Baik	-	-	-	-	
		Presentase Lansia mendapat layanan	%	-	-	-	-	18.75%	18.75%	100%	
4	Perlindungan dan penanganan Perempuan dan anak Korban kekerasan	Persentase Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
5	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	%	-	-	-	-	41.72%	41.72%	100%	
		Persentase Masyarakat Berpotensi Ekonomi Sosbud	%	0	-	-	-	-	-	-	
6	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	0	-	-	-	20%	20%	100%	
		Laporan partisipasi swadaya masyarakat	Lembaga	0	-	-	-	29 Lembaga	30 Lembaga	100%	
1.9	<b>Urusan Pangan</b>										
1	Program Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,69	91.69	91.69	100.00%	84.26	84.26	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah cadangan pangan ekuivalen beras	Ton	79,84	60	89	148.43%	80 ton	80 ton	100%	
2	Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Pertanian	Jumlah maksimum pangan segar hasil pertanian yang tercemar	Kasus	0	11	1	190,90%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah maksimum pangan segar hasil peternakan yang tercemar	Kasus	0	12	3	175.00%	-	-	-	
3	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman dikonsumsi	%	-	-	-	-	91%	91%	100%	Dinas Pangan dan Pertanian

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Jumlah kelompok masyarakat di bidang pangan, pertanian dan perikanan diberkdayaan	Kelompok	-	-	-	-	45 Kelompok	45 Kelompok	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	Persentase dokumen kajian bidang pangan, pertanian, dan perikanan yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
1.10	<b>Urusan Pertanahan</b>										
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	48,38	100	52.17	52.17%	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
		Persentase luasan RTH	%	-	-	-	-	12.21%	12.21%	100%	
2	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah milik pemerintah Kota Bandung bersertifikat	%	25,10	17	29.94	176.12%	-	-	-	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH yang berkualitas	%	-	-	-	-	46.99%	46.99%	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
1.11	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>										
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan sampah yang dikelola secara landfill	%	69,11	60	81.94	136.57%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan sampah yang dikelola dengan pola Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)	%	22,56	25	16.03	64.12%	-	-	-	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Cakupan sampah dikonversi menjadi energi dengan teknologi ramah lingkungan	%	2	15	0	0.00%	-	-	-	
		Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	Ton	-	-	-	-	116.915 ton	116.915 ton	100%	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sungai utama yang kualitas airnya memenuhi baku mutu sungai Kelas IV	Sungai	2	2	5	250.00%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3	Pelaku Usaha	38	50	50	100.00%	-	-	-	
		Dokumen Amdal	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tinggi Muka Air Tanah (MAT)	BMT	31,27	-31,26	-39,77	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah mata air yang terlindungi	Mata Air	5	5	5	100.00%	-	-	-	
		Persentase kawasan konservasi terpelihara	%	-	-	-	-	17.61%	17.61%	100%	
4	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah jenis usaha rehabilitasi lingkungan yang telah dilakukan	Jenis	0	2	2	100.00%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penurunan beban pencemaran ruas sungai cikapundung	%	-	-	-	-	0%	0%	100%	
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah titik pantau yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas udara ambien	Titik	0	25	27	108.00%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
6	Program Pembinaan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan	Pelaku Usaha	0	20	28	140.00%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan	%	-	-	-	-	12,5%	12,5%	100%	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		pengelolaan lingkungan hidup									
7	Program Penataan Lingkungan	Jumlah dokumen perencanaan yang telah dilengkapi oleh KLHS	Dokumen	0	2	2	100.00%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pelaku kegiatan yang memiliki dan menerapkan dokumen lingkungan	Pemilik Kegiatan	0	30	41	136.67%	-	-	-	
		Persentase pelaku usaha yang menaati peraturan pengelolaan lingkungan hidup	%	-	-	-	-	30%	30%	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Dokumen Lingkungan	Poin	-	-	-	-	74 poin	75 poin	100%	
8	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Teridentifikasinya sektor penyebab peningkatan gas rumah kaca terbesar	Sektor	0	3	3	100.00%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	-	-	-	-	1,50%	1,50%	100%	
9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	44,32	50	44.77	89.54%	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
10	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	Indeks Kualitas Air	Poin	-	-	-	-	31 poin	32 poin	100%	Dinas Lingkungan Hidup
11	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	-	-	-	-	64 poin	65 poin	100%	Dinas Lingkungan Hidup
12	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang terkelola	%	-	-	-	-	0.34%	0.34%	100%	Dinas Lingkungan Hidup
1.12	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>										

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penataan administrasi kependudukan	%	89,72	85	99.37	116.91%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	0	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat Keserasian Database Kependudukan	%	-	-	-	-	98% -	98% -	100%	
3	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Bidang Kependudukan	Jumlah inovasi bidang kependudukan	Jenis	-	1	1	100.00%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Pendayagunaan Data Kependudukan	%	-	-	-	-	100% -	100% -	100%	
4	Program penataan administrasi pencatatan sipil	Cakupan penataan administrasi pencatatan sipil	%	0	70	87.32	124.74%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	%					90% -	90% -	100%	
5	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan pemeliharaan arsip kependudukan dan pencatatatan sipil	%	-	100	N/A	-	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan layanan administrasi pendaftaran penduduk	%	-	-	-	-	90% -	90% -	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
I.13	<b>Urusan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa</b>										
1	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	Persentase masyarakat berpotensi ekonomi Sosbud	%	-	20	29,14	145.70%	-	-		DP3APM
		Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	%	-	-	-	-	41,72	41,72	100%	DP3APM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase kelurahan katagori swadaya dan swasembada	%	-	19	25,17	132.47%	-	-		DP3APM
		Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Juta	237,533	219,615	281,907	128.36%	-	-		DP3APM
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	-	-	-	-	20	20	100%	DP3APM
		Laporan partisipasi swadaya masyarakat	lembaga	-	-	-	-	30	30	100%	DP3APM
I.14	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>										
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	WUB	1000	600	600	100.00%	-	-	-	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Jumlah pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI/ paten, omzet, akses modal sertifikasi halal, kuantitas, dan kualitas produksi	Pelaku Usaha	475	500	838	167.60%	-	-	-	DKUMKM
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat kemampuan usahanya	UMKM	100	270	270	100.00%	-	-	-	DKUMKM
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah lapangan kerja baru per koperasi	%	650	650	750	115.38%	-	-	-	DKUMKM
		Persentase koperasi aktif	%	86,24	88,82	88,85	100.03%	-	-	-	DKUMKM
		Persentase koperasi sehat	%	26,66	27,14	27,22	100.29%	-	-	-	DKUMKM
4	Program Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yang meningkat kemampuan usahanya	PKL	-	200	277	138.50%	-	-	-	DKUMKM

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
5	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	%	-	-	-	-	100	100	100%	DKUMKM
6	Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	Jumlah Usaha Non Formal yang kemampuan usahanya meningkat	orang	-	-	-	-	200	200	100%	DKUMKM
	Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi yang mentaati peraturan Perkoperasian	koperasi	-	-	-	-	150	150	100%	DKUMKM
	Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah usaha mikro yang skala usahanya meningkat	UMKM	-	-	-	-	240	240	100%	DKUMKM
7	Program Pengembangan Usaha Kecil	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	%	-	-	-	-	60	60	100%	DKUMKM
8	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat	%	-	-	-	-	60	60	100%	DKUMKM
9	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang berkualitas	koperasi	-	-	-	-	30	30	100%	DKUMKM
I.15	<b>Urusan Penanaman Modal</b>										
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	12,700	4,756	14,349	301.70%	-	-	-	DPMPTSP
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	12,700	4,756	14,349	301.70%	5,23 Trilyun	5,23 Trilyun	100%	DPMPTSP
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,38	81	80,15	98,95%	-	-	-	DPMPTSP
		Rata-rata waktu layanan izin	Hari Kerja	10	7	6,98	99.71%	-	-	-	DPMPTSP
		Rata-rata waktu respon penyelesaian pengaduan	Jam	4	3	2,62	104,22%	-	-	-	DPMPTSP
4	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Triliun	12,700	4,756	14,349	301,70%	-	-	-	DPMPTSP



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	investor	-	-	-	-	500	500	100%	DPMPTSP
		Presentase perusahaan yang menindaklanjuti promosi investasi	%	-	-	-	-	1	1	100%	DPMPTSP
6	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	investor	-	-	-	-	32	32	100%	DPMPTSP
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	-	-	-	80.17	80.17	100%	DPMPTSP
		Pemenuhan Standar pelayanan perizinan		-	-	-	-	1	1	100%	DPMPTSP
I.16	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>										
1	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Persentase peningkatan potensi dan prestasi pemuda di Kota Bandung	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan pemuda	Kegiatan	7	7	9	128.57%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Program Pembinaan Keolahragaan	Cakupan pembinaan keolahragaan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Prestasi olah raga di tingkat provinsi dan nasional	Nilai	Juara 3 PORPEMDA	Juara 1	Juara 1 POPDA Provinsi dan Juara		-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
					POPDA Provinsi dan Juara 1	3 PORPEMDA		-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan	%	-	-	-	-	90	90	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Program Pembinaan Pembudayaan dan	Jumlah penyelenggaraan event olahraga	Kali	9	8	9	112.50%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Pemasyarakatan Olahraga	Persentase kegiatan pembudayaan dan pemasyarakatan olahraga masyarakat secara rutin	%	-	-	-	-	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga	SOR/ GOR	15	4	4	100.00%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Jumlah SOR dan GOR yang kualitas pelayanannya meningkat	SOR/ GOR	15	15	19	126,67%	-	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif	%	-	-	-	-	0,029	0,029	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kepemudaan	%	-	-	-	-	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Program Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase infrastruktur olahraga yang memenuhi standar	%	-	-	-	-	90	90	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Program Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan	Persentase Infrastruktur Kepemudaan yang Memenuhi Standar	%	-	-	-	-	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
I.17	<b>Urusan Statistik</b>										
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase data terverifikasi yang tersedia	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Diskominfo
		Persentase data informasi yang berkualitas	%	-	-	-	-	35	35	100%	Diskominfo
I.18	<b>Urusan Persandian</b>										
1	Program Optimalisasi Persandian dan Aplikasi	Tingkat aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	%	80	100	100	100.00%	-	-	-	Diskominfo
2	Program Optimalisasi Aplikasi	Cakupan aplikasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis e-government	%	-	-	-	-	36	36	100%	Diskominfo

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
3	Program Optimalisasi Persandian	Cakupan prosentase pengelolaan persandian dan aplikasi yang terkendali dan aman	%	-	-	-	-	100	100	100%	Diskominfo
I.19	<b>Urusan Kebudayaan</b>										
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah dan Jenis Tradisi yang dikembangkan	Objek Tradisi	4	6	6	100.00%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Jenis Objek tradisi yang dilindungi	Objek Tradisi	4	6	6	100.00%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah jenis objek tradisi dimanfaatkan	Objek Tradisi	4	6	6	100.00%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	%	-	-	-	-	37,50	37,50	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	%	-	-	-	-	0,26	0,26	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	-	-	-	-	0,26	0,26	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	%	-	-	-	-	0,26	0,26	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8	Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	Persentase benda dan bangunan cagar budaya dilestarikan	%	-	-	-	-	0,26	0,26	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
I.20	<b>Urusan Perpustakaan</b>										
1	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan	Cakupan TI Sistem Administrasi Perpustakaan	%	75	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	Jumlah pemustaka per tahun	Orang	91,287	92000	112743	122.55%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Persentase Pemustaka Per Tahun	%	-	-	-	-	5,04	5,04	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
I.21	<b>Urusan Kearsipan</b>										
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Sistem TI Administrasi Kearsipan	%	75	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip PD	PD	4	73	80	109.59%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah PD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	PD	58	73	80	109.59%	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Persentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan OPD Secara Baku	%	-	-	-	-	10	10	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan	Cakupan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	dan Sistem Administrasi Kearsipan										
6	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase <i>smart library</i> yang berfungsi dengan baik di Kota Bandung	%	-	-	-	-	2,04	2,04	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Persentase perangkat daerah yang menyelenggarakan sistem kearsipan secara baku	%	-	-	-	-	37,50	37,50	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
II	<b>URUSAN PILIHAN</b>										
II.1	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>										
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi ikan konsumsi	Ton	2970,7	2970	2970,63	100.02%	2,970.00	2,970.00	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah produksi ikan hias	Ekor	1123590	1221700	1260869	103.21%	1,222,000	1,222,000	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kap/th	-	-	-	-	37,95	37,95	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku	217	100	120	120,00%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Program Peningkatan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	Jumlah maksimum pangan segar hasil perikanan yang tercemar	Kasus	0	12	2	187,50%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang perikanan	orang	-	-	-	-	80	80	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
II.2	<b>Urusan Pariwisata</b>										
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pasar pariwisata daerah dikembangkan	Pasar Pariwisata	12	10	10	100.00%	-	-	-	Dinas Kebudayaan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Indeks Brand Awareness Pariwisata Kota Bandung	Indeks	-	-	-	-	3,46	3,46	100%	dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah objek wisata unggulan terbangun	ODTW	5	5	5	100.00%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata memenuhi standar usaha pariwisata	%	6,12	20	24	120,00%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis	Jumlah simpul kreatif	Simpul kreatif	3	6	6	100.00%	-	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4	Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata	Persentase daya tarik wisata dikembangkan	%	-	-	-	-	20	20	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5	Program pengembangan industri pariwisata	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	%	-	-	-	-	5,39	5,39	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program pengembangan kelembagaan pariwisata	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya	%	-	-	-	-	0,97	0,97	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset evidence based policy)	%	-	-	-	-	80	80	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7	Program pengembangan ekosistem kreatif	Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	%	-	-	-	-	50	50	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
8	Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / berkembang	%	-	-	-	-	3,33	3,33	100%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
II.3	<b>Urusan Pertanian</b>										
1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	25	30	120.00%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Program Peningkatan Penerapan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	25	29	116.00%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah pohon produktif	Pohon	23309	15000	15751	105.01%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	75	78	100.03%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah produksi tanaman hias	Pot/ Tahun		195000	198959	102.03%	-	-	-	Dinas Pangan dan Pertanian
		Produktivitas Padi	Kw/Ha-	-	-	-	-	68,08 kw/ha	68,08 kw/ha	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Produksi Tanaman Sayuran	Pohon	-	-	-	-	237.000 Pohon	237.000 Pohon	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Produksi Tanaman Hias	Pohon	-	-	-	-	155.485 Pohon	155.485 Pohon	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Jumlah Penanaman Pohon Buah-buahan	Pohon	-	-	-	-	10.000 Pohon	10.000 Pohon	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
		Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang pertanian	Orang	-	-	-	-	80 orang	80 orang	100%	Dinas Pangan dan Pertanian

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Kasus penyakit zoonosa di Kota Bandung	Kasus	0	7	0	100.00%	7	7	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak domba	Ekor	34684	35693	35702	100.03%	36756	36756	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah pelaku usaha bidang pertanian dan perikanan	Pelaku Usaha	554	75	85	113.33%				Dinas Pangan dan Pertanian
7	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Kualitas bahan baku tembakau	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
8	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi Ternak Domba	Ekor	-	-	-	-	36.756 ekor	36.756 ekor	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
9	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya jumlah pelaku usaha bidang peternakan	Orang	-	-	-	-	80 orang	80 orang	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	Kasus	-	-	-	-	7 kasus	7 kasus	100%	Dinas Pangan dan Pertanian
II.4	<b>Urusan Perdagangan</b>										
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok	%	0.27	15	13,74	91.60%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor Kota Bandung	Juta US \$	465	462	465	100.65%	466	466		Dinas Perdagangan dan Perindustrian



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan dibina	Pelaku Usaha	385	300	300	100.00%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Program Pembinaan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	-	-	-	-	15%	15%	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Program Pengembangan E-Commerce	Nilai Daya Saing perdagangan e Commerce	Poin	-	-	-	-	300 Poin	300 Poin	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Daya Saing perdagangan	Poin	-	-	-	-	350 Poin	350 Poin	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9	Program Standardisasi Kemetrolgian	Jumlah alat UTTP yang terstandardisasi	N/A	-	-	-	-	N/A	N/A	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	-	-	-	-	82	82	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Informasi mengenai barang kena cukai ilegal	Merk	-	-	-	-	15 merk	15 merk	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II.5	<b>Urusan Perindustrian</b>										
1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah IKM yang memiliki sertifikat produk	IKM	600	400	410	102.50%	350	350	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dipromosikan	IKM	99	16	16	100.00%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat daya saingnya	IKM	-	-	-	-	280	280		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase industri kecil yang memiliki SDM berkualitas	%	89,5	97,83	97,83	100.00%	-	-	-	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang meningkat kemampuannya dalam proses produksi	Pelaku Usaha	-	-	-	-	150 pelaku usaha	150 pelaku usaha	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	-	-	-	-	82	82	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra Industri yang meningkat daya saingnya	sentra	-	-	-	-	1 Sentra	1 Sentra	100%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II.6	<b>Urusan Transmigrasi</b>										
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah penempatan transmigran	Orang	140	140	140	100.00%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja
		Calon transmigrasi diseleksi	Orang	-	-	-	-	120	120	100%	Dinas Tenaga Kerja
III	<b>URUSAN PENUNJANG</b>										
III.1	<b>Urusan Perencanaan</b>										
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat aspirasi masyarakat melalui Musrenbang yang	%	35,75	> 35	25,87	100.00%	-	-		Bappelitbang

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		dalam dokumen penganggaran									
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	7	7	7	100.00%	-	-		Bappelitbang
		Persentase Rata-Rata Penyusunan Dokumen Tepat Waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan mitra bidang ekonomi	%	35	90	100	111.11%	-	-	-	Bappelitbang
3	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan mitra Bidang PIPW	%	35	90	100	111.11%	-	-	-	Bappelitbang
4	Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan mitra Bidang SosbudPem	%	35	90	100	111.11%	-	-	-	Bappelitbang
5	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase indikator sasaran RPJMD tercapai/ melebihi target	%	70	70	92,1	131.57%	-	-	-	Bappelitbang
		Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
6	Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	Persentase data dan dokumen dimanfaatkan	%	50	50	100	200.00%	-	-	-	Bappelitbang
		Persentase dokumen pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
7	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Bappelitbang
III.2	<b>Urusan Keuangan</b>										
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK RI	Indeks	N/A	WTP	Belum ada hasil (N/A)	100.00%	-	-	-	BPKA
		Laporan BMD Kota Bandung tepat waktu dan sesuai	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	BPKA

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		peraturan perundang-undangan									
		Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	30 lokasi per bidang tanah	-	-	-	-	30 lokasi per bidang tanah	30 lokasi per bidang tanah	100%	BPKA
<b>2</b>	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah kelompok sasaran penerima insentif pajak daerah	Kelompok	0	1	0		-	-	-	BPPD
		Jumlah penerimaan pajak daerah	Triliun	2,175	2.429	2.16	88.93%	-	-	-	BPPD
<b>3</b>	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase kepatuhan wajib pajak daerah	%	-	75	87,3	116.40%	-	-	-	BPPD
<b>4</b>	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan pajak daerah	Nilai	-	A	A	100.00%	-	-	-	BPPD
<b>5</b>	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentasi layanan data dan informasi	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	BPKA
<b>6</b>	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase lahan milik Pemerintah Kota Bandung yang bersertifikat	19%	-	-	-	-	19%	19%	100%	BPKA
<b>7</b>	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan disusun tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	BPKA
III.3	<b>Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>										
<b>1</b>	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase fasilitasi pindah/purna tugas	%	100%	100	100	100.03%	100	100	100%	BKPP

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100%	100	100	100.00%	100	100	100%	BKPP
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai bidang	%	-	38,29	98,1 (15.289 orang)	256.20%	100	100	100%	BKPP
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun	%					45,69	45,69	100%	BKPP
4	Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center	Penilaian SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	%	92,38	100	100	100.00%	100	100	100%	BKPP
5	Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase penempatan SDM aparatur sesuai kebutuhan	%	-	85	93,5	110.00%	60	60	100%	BKPP
6	Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti	%	-	100	100	100.00%			100%	BKPP
		Persentase PD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sedang dan berat	%					79,37%	79,37%	100%	BKPP
7	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang datanya akurat	%	-	100	96,38	96,38%	97,11	97,11	100%	BKPP
8	Program Perencanaan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan ASN masing-masing PD sesuai Kompetensi dan Beban Kerja	%	-	-	-	-	60	60	100%	BKPP
9	Program Pengembangan Assesment Center	Persentase Penempatan dan Pengembangan Kompetensi Sesuai Hasil Assesment	%	-	-	-	-	50	50	100%	BKPP
III.4	<b>Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>										
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	70	> 50	81,25	100.00%	-	-	-	Bappelitbang

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Bappelitbang
III.5	<b>Urusan Fungsi Penunjang Lainnya</b>										
1	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	33,040	3,306	3,411	103.18%	3,411	3,411	100%	Bagian Pemerintahan Setda
2	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pilpres, Pileg, dan Pilkada	%	0	100	100	100.00%	100	100	100%	
3	Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	Penataan Batas Wilayah	Jumlah Titik Patok Batas Daerah	-	4	4	100.00%				
		Persentase Batas Wilayah Tertata	%	-	-	-	-	100	100	100%	
4	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	
		Tingkat pelaksanaan inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	Indeks	-	Tinggi	Tinggi	100.00%	-	-	-	
		Terfasilitasnya penyelenggara otonomi daerah, pemerintahan daerah dan pemerintahan wilayah	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
5	Program Sosial Keagamaan	Jumlah fasilitasi kegiatan sosial keagamaan	Kegiatan	6	5	5	100.00%	-	-	-	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda
		Jumlah penerimaan zakat	Orang	51.060.559.810	33877958000	51625567542	152.39%	-	-	-	
		Jumlah konflik SARA bernuansa agama	Konflik	0	0	0	100.00%	-	-	-	

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Persentase rancangan Kebijakan Bidang Sosial Keagamaan ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100	100	100%	
6	Program koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan sosial yang di implementasikan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Cakupan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kesejahteraan rakyat lingkup kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sosial budaya	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Lingkup Kesehatan Masyarakat, Pendidikan dan Sosial budaya	Kegiatan	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	
7	Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Lingkup Kesejahteraan Sosial, Kemasyarakatan dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Rancangan Kebijakan bidang Sosial kemasyarakatan ditindaklanjuti	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	%	82,46	100	100	100.00%	100	100	100%	Bagian Hukum Setda
9	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	-	100	135,92	135,92%	100	100	100%	Bagian Hukum Setda
10		Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti menjadi	%	-	65	92,30	142.00%	-	-		

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	naskah kerjasama setiap tahun									Bagian Kerjasama Setda
		Persentase Kerjasama Aktif yang di Implementasikan	%	-	-	-	-	100	100	100%	
11	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	Jumlah Rumusan Kebijakan Bidang Ekonomi	Dokumen	-	7	8	114.29%	-	-	-	
		Jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan kota setiap tahun	Perusahaan	-	80	234	292.50%	-	-	-	
		Persentase Dokumen Kajian Bidang Perekonomian ditindaklanjuti menjadi Rumusan Kebijakan	%	-	-	-	-	100	100	100%	
		Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	perusahaan	-	-	-	-	62	62	100%	
		Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui sumbangan pihak ketiga	perusahaan	-	-	-	-	4	4	100%	
12	Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Bagian Prodekbang Setda
13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terfasilitasinya SKPD dalam melaksanakan pengadaan barang jasa melalui SPSE	%	100	100	N/A	-	-	-	-	Bagian Layanan Pengadaan Setda
14	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik	Persentase PD/ Unit Kerja yang dikendalikan (Dalprog)	%	100	100	N/A	-	-	-	-	
		Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa	%	100	100	N/A	-	-	-	-	
15	Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Bandung	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	
		Nilai Hasil kepuasan pelayanan Barang dan Jasa	%	-	-	-	-	100	100	100%	



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
16	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Jumlah rancangan kebijakan ketatalaksanaan dan kelembagaan	Dokumen	9	8	8	100.00%	-	-	-	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda
		Persentase Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	%	-	-	-	-	100	100	100%	
17	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP komponen pelaporan kinerja	Nilai		11,89	12,61	106.06%				
18	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	Persentase Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	100	100	100%	
19	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja Kota Bandung Komponen Pelaporan	Nilai	-	-	-	-	13	13	100%	
20	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ LPND/luar negeri	%	100	100	100	100.00%	-	-		Bagian TU Pimpinan Setda
		Nilai Indeks Layanan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	%	-	-	-	-	100	100	100%	
21	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Rasio berita baik dan buruk	Rasio	85.87 : 14.12	70:30:00	82:18:00	195,24%	71,00 :29,00	71,00 :29,00	100%	Bagian Humas Setda
22	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD	Indeks	84	80	84	105.00%	85%	85%	100%	Sekretariat DPRD
23	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat capaian pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Tingkat capaian pembinaan yang dilakukan terhadap perangkat daerah	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Tingkat capaian kepuasan stakeholder	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Persentase PD yang mendapat temuan berindikasi penyimpangan material/ administrasi	%	-	13	0	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Persentase PD yang telah menerapkan SPIP level berkembang	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
24	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat tercapainya peningkatan capacity building SDM APIP	%	100	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
25	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan pengawasan	%	-	100	100	100.00%	-	-	-	Inspektorat
		Jumlah dokumen sistem kebijakan dan prosedur pengawasan	Dokumen	-	1	1	100.00%	-	-	-	Inspektorat
26	Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	%	-	-	-	-	80	80	100%	Inspektorat
27	Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	Persentase capaian pelaksanaan pengawasan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Inspektorat
28	Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Persentase Capaian Sistem Pengawasan/Pengendalian Intern	%	-	-	-	-	100	100	100%	Inspektorat
		Tingkat Pemenuhan kapabilitas aparat pengawas	Level	-	-	-	-	Level 3	Level 3	100%	Inspektorat
	<b>Kecamatan Sukasari</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	79,45	79,45	79,64	100.24%	-	-		Kecamatan Sukasari
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sukasari

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase Jumlah RW Yang Memiliki Siskamling Aktif dan Relawan Bencana	70%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukasari
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sukasari
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	80	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Sukasari
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Presentase Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Aktif Dalam Pembangunan	100%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sukasari
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	1 Unit/Kecamatan	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Sukasari
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	-	-	-	-	N/A	N/A	100%	Kecamatan Sukasari
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	80.00%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Sukasari
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	86.15	-	-	-	-	86.15	86.15	100%	Kecamatan Sukasari
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	60%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Sukasari
	<b>Kecamatan Cidada</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,2	81,5	81,97	100.58%	-	-	-	Kecamatan Cidada

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadak
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadak
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cidadak
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadak
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Cidadak
7	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	unit	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cidadak
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cidadak
	<b>Kecamatan Sukajadi</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,3	82,5	86,87	105.30%	-	-		Kecamatan Sukajadi
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukajadi
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	40	40	100%	Kecamatan Sukajadi
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukajadi

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		penyelenggaraan kesejahteraan sosial									
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Sukajadi
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Sukajadi
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Sukajadi
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	20	20	100%	Kecamatan Sukajadi
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Sukajadi
	<b>Kecamatan Cicendo</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,08	70	72,71	103.87%	-	-		Kecamatan Cicendo
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Cicendo
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	51,53	51,53	100%	Kecamatan Cicendo
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cicendo
5	Program Pengadministrasi Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	83.33	83.33	100%	Kecamatan Cicendo

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Kependudukan dan Pemerintahan										
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Cicendo
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	64	64	100%	Kecamatan Cicendo
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cicendo
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cicendo
	<b>Kecamatan Andir</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,30	70	81,38	116.26%	-	-		Kecamatan Andir
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Andir
3	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Andir
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	81.5	81.5	100%	Kecamatan Andir
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Andir
6		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Andir

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Andir
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Andir
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Andir
	<b>Kecamatan Coblong</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,05	81,5	84,09	103.18%	-	-		Kecamatan Coblong
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Coblong
3	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Coblong
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Coblong
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Coblong
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Coblong
6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Coblong
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Coblong

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Coblong
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Coblong
	<b>Kecamatan Bandung Wetan</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,45	82	82,45	100.55%	-	-		Kecamatan Bandung Wetan
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Bandung Wetan
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Wetan
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	20	20	100%	Kecamatan Bandung Wetan
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	75.00	75.00	100%	Kecamatan Bandung Wetan
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Bandung Wetan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	unit	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Wetan
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Bandung Wetan



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	20	20	100%	Kecamatan Bandung Wetan
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Wetan
	<b>Kecamatan Sumur Bandung</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,71	85	85,18	100.21%	-	-		Kecamatan Sumur Bandung
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sumur Bandung
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sumur Bandung
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Sumur Bandung
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Sumur Bandung
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	100%	100%	100%	Kecamatan Sumur Bandung
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Sumur Bandung

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,5	78,5	100%	Kecamatan Sumur Bandung
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Sumur Bandung
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Sumur Bandung
	<b>Kecamatan Cibeunying Kidul</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,34	84	84,33	100.39%	-	-		Kecamatan Cibeunying Kidul
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik, RTH dan Saluran Air dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86.15	86.15	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kidul
	<b>Kecamatan Cibeunying Kaler</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,14	80	86,28	107.85%	-	-		Kecamatan Cibeunying Kaler
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
3	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		penyelenggaraan kesejahteraan sosial									
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibeunying Kaler
	<b>Kecamatan Astana Anyar</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,55	80	83,727	104.65%	-	-	-	Kecamatan Astana Anyar
2	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Astana Anyar
3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	82	82	100%	Kecamatan Astana Anyar
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Astana Anyar
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Astana Anyar
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Astana Anyar
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Astana Anyar
	<b>Kecamatan Bojongloa Kaler</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,18	70	83,53	119.33%	-	-		Kecamatan Bojongloa Kaler
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	84	84	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86.15	86.15	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Bojongloa Kaler
	<b>Kecamatan Bojongloa Kidul</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,91	82	82,66	100.80%	-	-		Kecamatan Bojongloa Kidul
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
3	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
6	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	unit	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	-	-	-	-	90	90	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Bojongloa Kidul
	<b>Kecamatan Babakan Ciparay</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,48	76,44	82,14	107.46%	-	-		Kecamatan Babakan Ciparay
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Babakan Ciparay

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Babakan Ciparay
	<b>Kecamatan Bandung Kulon</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,05	75	83,04	110.72%	-	-		Kecamatan Bandung Kulon
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kulon
3	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	82,20	82,20	100%	Kecamatan Bandung Kulon
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kulon



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
5	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kulon
6	Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kulon
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	90	90	100%	Kecamatan Bandung Kulon
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kulon
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kulon
	<b>Kecamatan Regol</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,17	79,45	83,29	104.83%	-	-		Kecamatan Regol
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan/saluran dan RTH dalam kondisi terpelihara	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Regol
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Regol
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Regol
5	Program Pengadministrasi Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Regol

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Kependudukan dan Pemerintahan										
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Regol
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	unit	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Regol
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Regol
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Regol
10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Regol
	<b>Kecamatan Lengkong</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,60	83	84	101.20%	-	-		Kecamatan Lengkong
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Lengkong
3	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Lengkong
4	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Lengkong

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Lengkung
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Lengkung
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Lengkung
7	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Lengkung
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Lengkung
	<b>Kecamatan Batununggal</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,15	81	81,78	100.96%	-	-		Kecamatan Batununggal
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Batununggal
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Batununggal
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Batununggal
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Batununggal

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Batununggal
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	unit	-	-	-	-	45	45	100%	Kecamatan Batununggal
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Batununggal
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Batununggal
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Batununggal
	<b>Kecamatan Ujungberung</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,31	83	84,04	101.25%	-	-		Kecamatan Ujungberung
2	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	70	70	100%	Kecamatan Ujungberung
3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase nilai unsur perencanaan strategis pada LKIP	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Ujungberung
4	Program Administrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	-	-	-	-	83	83	100%	Kecamatan Ujungberung
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Nilai IKM	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Ujungberung
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	%	-	-	-	-	15	15	100%	Kecamatan Ujungberung

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
6	Program Pemberdayaan KUMKM	Prosentase Koperasi UKM Aktif	unit	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Ujungberung
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Ujungberung
8	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Ujungberung
9	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Ujungberung
	<b>Kecamatan Kiaracondong</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,11	85	86,71	102.01%	-	-		Kecamatan Kiaracondong
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	53,23	53,23	100%	Kecamatan Kiaracondong
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	83,53	83,53	100%	Kecamatan Kiaracondong
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Kiaracondong
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Kiaracondong

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Kiaracondong
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Kiaracondong
7	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	-	-	-	-	-	-	100%	Kecamatan Kiaracondong
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Kiaracondong
9	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Kiaracondong
	<b>Kecamatan Arcamanik</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,15	83,5	83,96	100.55%	-	-		Kecamatan Arcamanik
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Arcamanik
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah RW melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	RW	-	-	-	-	43	43	100%	Kecamatan Arcamanik
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Arcamanik
5	Program Pengadministrasi Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Arcamanik

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
	Kependudukan dan Pemerintahan										
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Arcamanik
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	unit	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Arcamanik
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Arcamanik
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Arcamanik
	<b>Kecamatan Cibiru</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,03	82	82,03	100.04%	-	-	-	
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibiru
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibiru
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cibiru
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Cibiru
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Cibiru

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Cibiru
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	54,54	54,54	100%	Kecamatan Cibiru
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,16	86,16	100%	Kecamatan Cibiru
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cibiru
	<b>Kecamatan Antapani</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,08	70	83,15	118.79%	-	-		Kecamatan Antapani
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Antapani
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Antapani
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Antapani
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Antapani
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Antapani
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Antapani



No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Antapani
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Antapani
	<b>Kecamatan Rancasari</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83,48	82,8	83,03	100.28%	-	-		Kecamatan Rancasari
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Rancasari
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Rancasari
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Rancasari
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Rancasari
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	65	65	100%	Kecamatan Rancasari
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Rancasari
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Rancasari
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Rancasari

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Rancasari
	<b>Kecamatan Buahbatu</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,93	84,5	84,59	100.11%	-	-		Kecamatan Buahbatu
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Buahbatu
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Buahbatu
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Buahbatu
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Buahbatu
6	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Buahbatu
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	55	55	100%	Kecamatan Buahbatu
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,16	86,16	100%	Kecamatan Buahbatu
	<b>Kecamatan Bandung Kidul</b>										

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,89	80,5	88,16	109.52%	-	-		Kecamatan Bandung Kidul
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kidul
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Bandung Kidul
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	85	85	100%	Kecamatan Bandung Kidul
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Bandung Kidul
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Bandung Kidul
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Bandung Kidul
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Bandung Kidul
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Bandung Kidul
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Bandung Kidul
	<b>Kecamatan Gedebage</b>										

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,99	85	89,79	105.64%	-	-		Kecamatan Gedebage
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Gedebage
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Gedebage
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91	91	100%	Kecamatan Gedebage
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	81	81	100%	Kecamatan Gedebage
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Gedebage
7	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	85	85	100%	Kecamatan Gedebage
8	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	76	76	100%	Kecamatan Gedebage
	<b>Kecamatan Panyileukan</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,67	82,86	83,86	101.21%	-	-		Kecamatan Panyileukan
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Panyileukan

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Panyileukan
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Panyileukan
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	78	78	100%	Kecamatan Panyileukan
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	50	50	100%	Kecamatan Panyileukan
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	84	84	100%	Kecamatan Panyileukan
8	Program Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Panyileukan
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	25	25	100%	Kecamatan Panyileukan
	<b>Kecamatan Cinambo</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,99	82	84,312	102.82%	-	-		Kecamatan Cinambo
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cinambo
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cinambo

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	-	-	-	-	91,66	91,66	100%	Kecamatan Cinambo
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	80	80	100%	Kecamatan Cinambo
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	Unit	-	-	-	-	1	1	100%	Kecamatan Cinambo
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	78,50	78,50	100%	Kecamatan Cinambo
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	%	-	-	-	-	86,15	86,15	100%	Kecamatan Cinambo
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Cinambo
	<b>Kecamatan Mandalajati</b>										
1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,36	83	84,53	101.84%	-	-	100%	Kecamatan Mandalajati
2	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Presentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Mandalajati
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak pidana	%	-	-	-	-	79	79	100%	Kecamatan Mandalajati
4	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Mandalajati

No	Urusan/ Program	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target dan Kinerja Realisasi Program Tahun 2018			Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d. Tahun 2019		Perangkat Daerah
					Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Realisasi Tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian s.d. Tahun 2019	Perkiraan Tingkat Realisasi Target RPJMD s.d. Tahun 2019	
		penyelenggaraan kesejahteraan sosial									
5	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai IKM	-	-	-	-	80.0	80.0	100%	Kecamatan Mandalajati
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	-	-	-	-	60	60	100%	Kecamatan Mandalajati
		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan/Kecamatan	unit	-	-	-	-	4	4	100%	Kecamatan Mandalajati
7	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	-	-	-	-	75	75	100%	Kecamatan Mandalajati
8	Pemberdayaan KUMKM	Persentase Koperasi dan UKM Aktif		-	-	-	-	0.05	0.05	100%	Kecamatan Mandalajati
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disusun tepat waktu	%	-	-	-	-	100	100	100%	Kecamatan Mandalajati

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2018 dapat terlihat program program yang tidak mencapai target yaitu sebanyak 17 program yang mana dari program tersebut realisasi yang kurang dari 70% sebanyak 2 program sisanya 15 program memiliki realisasi lebih dari 70% tetapi kurang dari 100%. Sementara program yang sesuai target yakni realisasi 100% sebanyak 103 program dan program yang melebihi target yang berarti realisasinya diatas 100% sebanyak 144 program. Sehingga dapat disimpulkan dari program program yang dijalankan ditahun 2018 sebagian besar memiliki realisasi target diatas 100%.

Untuk Kolom-kolom yang kosong pada tabel diatas itu dikarenakan pada tahun tersebut program yang dimaksud tidak ada/tidak dilaksanakan sehingga tidak ada target ataupun realisasinya sedangkan ditahun sebelum atau sesudahnya terdapat program dimaksud sehingga kolom tersebut dikosongkan pada tahun yang memang tidak ada/tidak melaksanakan program tersebut.



2.3 PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.76  
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1	Pendidikan	<div><div>1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) yang belum tercapai sesuai target.</div><div>2. Fasilitas dan infrastruktur pendidikan Sekolah Dasar dan SMP belum merata.</div><div>3. Kinerja tenaga pendidik penerima tunjangan profesi masih perlu ditingkatkan.</div><div>4. Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal.</div><div>5. Persepsi masyarakat mengenai sekolah yang difavoritkan berpengaruh terhadap pemerataan kualitas sekolah.</div><div>6. Lulusan kursus dan pendidikan kecakapan hidup yang belum relevan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.</div><div>7. Implementasi pendidikan karakter belum optimal.</div><div>8. Mahalnya biaya pendidikan tinggi salah satu kendala bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.</div><div>9. Belum optimalnya pemanfaatan TIK/ICT dalam mengumpulkan data dan informasi data pendidikan.</div><div>10. Program pembangunan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kota belum bersinergi secara optimal.</div><div>11. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.</div></div>
2	Kesehatan	<div><div>1. Cakupan upaya kesehatan masyarakat belum tercapai karena indikator ini merupakan gabungan 3 sub indikator, ada 1 indikator yang belum mencapai target yaitu AKI hal ini disebabkan karena:</div><div>a. Perbaikan koordinasi dan sistem pelaporan kematian di tingkat Rumah</div><div>b. Sakit dan Klinik memunculkan laporan kematian ibu yang selama ini under reported sehingga sumber data dari fasilitas kesehatan yang melaporkan jumlah kematian ibu menjadi bertambah.</div><div>c. Fasilitas kesehatan rujukan di Kota Bandung tidak hanya dimanfaatkan oleh warga kota Bandung saja, menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus komplikasi di faskes rujukan.</div><div>d. Cakupan penduduk mengakses sanitasi dasar yang memenuhi syarat belum mencapai target karena :</div><div>e. Belum ada sinergitas antara perubahan perilaku dengan pembangunan sarana fisik sanitasi.</div><div>f. Perencanaan dan pembangunan di bidang sanitasi jamban sehat belum menjadi prioritas.</div><div>g. Pembangunan sanitasi belum menjadi prioritas di kewilayahan</div></div>

No	Urusan	Permasalahan
3		<p>h. Cakupan pengembangan Smart City pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak mencapai target karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya ketersediaan dan kelengkapan infrastruktur TIK dalam menunjang pengembangan Smart City.</li> <li>▪ Perubahan perilaku petugas dan masyarakat dalam memanfaatkan TIK dan sistem kerja baru berbasis IT memerlukan waktu, upaya sosialisasi, pelatihan, dan pembiasaan yang terus menerus.</li> </ul>
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur masih belum memadai
	Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	1. Penataan hunian rumah susun yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sangat terbatas seperti prasarana sarana penyediaan air bersih, penyediaan sanitasi dasar/MCK dan septic tank komunal masih sangat terbatas.
	Urusan Trantibum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak imbangnya rasio Polisi Pamong Praja dan kompleksitas permasalahan gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta rasio Polisi Pamong Praja dengan luas wilayah Kota Bandung.</li> <li>2. Ada jenis pelanggaran baru yang belum diatur dalam Perda/ Perwal seperti mobil toko yang marak berjualan di zona merah sehingga tidak bisa ditindak dengan beban biaya paksa untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya penindakan parkir liar yang lebih rendah biaya pakusnya.</li> <li>3. Terkait penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pemberdayaan tugas, dan fungsi Satlinmas belum optimal baik dalam kebencanaan maupun peran dalam ketentraman dan ketertiban umum, misalnya melalui siskamling aktif masih cukup rendah di beberapa wilayah.</li> <li>4. Belum ada perlindungan hukum bagi Polisi Pamong Praja secara individual jika terkait dengan tindak pidana.</li> <li>5. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis Pemkot Bandung, aparat kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP Kota Bandung.</li> <li>6. Dinas teknis tidak memberikan update data mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dibawah pengawasan dan pengendalian masing-masing sehingga Satpol PP dalam melaksanakan penertiban hanya mengandalkan laporan dari masyarakat dan hasil pemantauan sendiri.</li> <li>7. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional penanggulangan kebencanaan.</li> <li>8. Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia dalam proses pencegahan dan penanggulangan bencana.</li> <li>9. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, sekolah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> <li>10. Belum optimalnya informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat.</li> <li>11. Keterbatasan data tentang organisasi kebencanaan di Kota Bandung.</li> <li>12. Siskamling aktif yang belum optimal</li> <li>13. Banyaknya Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Astanaanyar.</li> </ol>
6	Urusan Sosial	1. Masih tingginya warga kabupaten lain di sekitar Kota

No	Urusan	Permasalahan
7		<p>Bandung yang masuk ke Kota Bandung tanpa memiliki keahlian yang memadai. Hal ini menyebabkan permasalahan sosial khususnya keterlambatan di Kota Bandung</p> <p>2. Sulit untuk mensinergikan program dan kegiatan terkait perumusan kebijakan dengan OPD terkait.</p>
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>1. Belum optimalnya peran perempuan pada sektor publik</p> <p>2. Belum mempunyai gedung kantor dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang operasional</p> <p>3. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan</p> <p>4. Belum tersedianya Data Terpilah Gender Kota Bandung (Data Mikro) disebabkan perhitungan data masih menggunakan data dari BPS</p>
8	Urusan Pangan	<p>1. Belum optimalnya implementasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan lokal (P2KP) yang diharapkan dapat mengurangi konsumsi beras, hal ini disebabkan ketersediaan karbohidrat sebagai pengganti beras belum dapat memenuhi kebutuhan karena harganya ternyata lebih mahal dari harga beras.</p> <p>2. Kota Bandung bukan merupakan daerah produksi sehingga pangan segar yang dijual dan dikonsumsi masyarakat sebagian besar (95 %) berasal dari luar wilayah Kota Bandung, sehingga diperlukan pengawasan pangan segar yang lebih intensif.</p> <p>3. Pelaku usaha dan masyarakat masih kurang memahami tentang tata cara penanganan dan penyimpanan produk pangan segar serta pengetahuan tentang bahayanya penggunaan bahan kimia berbahaya.</p> <p>4. Terbatasnya SDM pengawas mutu pangan segar terutama petugas laboratorium yang memiliki pendidikan khusus (analisis kimia).</p>
9	Urusan Pertanahan	<p>1. Masih belum diperhitungkan penataan pertanahan yang harus disertifikatkan sehingga belum serasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan pertanahan.</p>
10	Urusan Lingkungan Hidup	<p>1. Layanan persampahan belum mencapai angka maksimal karena masih terdapat masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau ke tempat lain selain tempat pembuangan sampah.</p> <p>2. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih belum terbangun sehingga sampah masih dibuang secara <i>mix</i> dan tidak termanfaatkan sehingga jumlah sampah yang diproses secara <i>landfill</i> masih cukup tinggi.</p> <p>3. Pemilahan sampah sejak dari sumber yang belum membudaya, menyebabkan jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali atau diolah masih rendah.</p> <p>4. Pemilahan sampah yang sudah mulai dilakukan di tingkat rumah tangga masih belum diikuti oleh pengangkutan sampah secara terpilah oleh PD. Kebersihan sehingga sampah yang telah dipilah, diangkut dengan cara dicampur kembali.</p> <p>5. Ketersediaan TPS 3R masih sangat kurang sehingga sampah yang sudah terpilah di tingkat rumah tangga, dicampur kembali ketika dikumpulkan di TPS.</p> <p>6. Masyarakat masih menemui kesulitan untuk memulai membangun Bank Sampah di lingkungannya sehingga sampah yang sudah terpilah di rumah tangga tidak</p>

No	Urusan	Permasalahan
		<p>terkelola pengumpulannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Bank Sampah saat ini sudah bertambah, namun kemampuan Manajemen pengelola Bank Sampah yang masih kurang menyebabkan Bank Sampah yang telah terbangun belum dapat berjalan dengan optimal.</li> <li>Jumlah sampah yang dikonversi menjadi energi masih sangat rendah karena banyak alat biodigester yang telah disediakan ternyata belum berfungsi dengan optimal.</li> <li>Adanya aplikasi LAPOR yang diantaranya dapat digunakan untuk melaporkan kasus-kasus pencemaran lingkungan mempermudah proses pengaduan pencemaran, namun tidak adanya peralatan uji kualitas lingkungan yang <i>portable</i> menyebabkan penanganan kasus pencemaran menjadi terhambat karena harus menunggu pihak laboratorium untuk melakukan pengujian kualitas lingkungan di lokasi pencemaran.</li> <li>Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan masih sangat sedikit sehingga banyak pelaku usaha atau kegiatan yang tidak terawasi penaatannya.</li> <li>Pemahaman para pelaku usaha terhadap kewajiban dan pentingnya melakukan pengelolaan limbah B3 masih sangat rendah sehingga jumlah pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 masih sangat sedikit, padahal hampir seluruh kegiatan/usaha berpotensi menghasilkan limbah B3.</li> <li>Untuk mengetahui kondisi terkini dari kualitas air sungai yang ada di Kota Bandung perlu dilakukan pemantauan kualitas air secara terus menerus dengan peralatan ukur yang dipasang permanen di titik pemantauan, sehingga ketika ada perubahan dapat langsung ditelusuri sumber pencemarnya dan bisa segera dilakukan penindakan terhadap penyebab pencemarannya. Saat ini Kota Bandung belum memiliki alat telemetri dengan kemampuan tersebut.</li> <li>Kualitas air sungai dan anak sungai di Kota Bandung saat ini berada pada kondisi tercemar. Penyebab pencemaran terdiri dari dua hal yaitu sampah dan limbah cair. Sampah yang dibuang ke sungai dan anak-anak sungai seringkali menjadi penyebab banjir karena menyumbat aliran air.</li> <li>Limbah cair yang dibuang ke sungai menjadi penyebab memburuknya kualitas air sungai dan anak sungai di Kota Bandung. Limbah cair ini berasal dari limbah domestik, limbah sejenis domestik dan limbah industri. Pencemaran sungai oleh limbah domestik berasal dari pembuangan langsung oleh masyarakat terutama di permukiman yang berada di bantaran sungai. Pencemaran sungai oleh limbah industri pun mungkin terjadi terutama dari para pelaku usaha skala kecil yang tidak memiliki fasilitas IPAL.</li> <li>Pembuangan limbah cair sejenis domestik dan limbah cair industri kerap terjadi apabila pengawasan tidak dilakukan dengan ketat. Namun, jumlah personil pengawas tidak sebanding dengan wilayah yang cukup luas sehingga perlu melibatkan pihak lain dalam melakukan pengawasan lingkungan.</li> <li>Sumur resapan diperlukan untuk meresapkan air langsung ke dalam tanah, namun hanya dapat dilakukan di daerah yang tanahnya belum jenuh air. Untuk daerah-daerah yang jenuh air, diperlukan teknologi lain untuk mengurangi run off dan untuk menampung air agar dapat dimanfaatkan.</li> <li>Lubang biopori akan efektif dalam meresapkan air ke dalam tanah apabila jumlahnya cukup banyak dan kondisinya terus dipelihara, namun lubang biopori ini seringkali hanya</li> </ol>



No	Urusan	Permasalahan
		<p>dibuat tetapi tidak dipelihara sehingga efektifitas resapannya dan kemampuannya sebagai media komposter menjadi berkurang.</p> <p>18. Untuk mengetahui kondisi ketersediaan cadangan air tanah, dilakukan dengan mengukur tinggi muka air tanah di beberapa titik yang mewakili kondisi air tanah Kota Bandung. Pengukuran tinggi muka air tanah ini hanya dapat dilakukan di sumur-sumur pantau yang kondisi airnya tidak terganggu oleh proses pengambilan air tanah. Namun, jumlah sumur pantau di Kota Bandung jumlahnya masih sangat sedikit sehingga belum dapat mewakili keseluruhan kondisi air tanah di Kota Bandung.</p> <p>19. Emisi gas rumah kaca berasal dari berbagai sektor, diantaranya sektor energi, pertanian, dan sektor pengelolaan limbah. Sektor energi terdiri atas energi industri, transportasi, dan rumah tangga. Sektor Pertanian berasal dari Fermentasi Enterik, Pengelolaan Kotoran Ternak, Penanaman Padi dan Penggunaan Urea. Sedangkan sektor pengelolaan limbah terdiri dari Pengolahan Limbah Padat secara Biologi, Limbah Cair Domestik dan Limbah Cair Industri. Apabila dilihat lebih detail, maka untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, penurunan harus dilakukan di seluruh sektor yaitu dengan penurunan konsumsi energi, perbaikan pada pola pertanian dan perbaikan pada teknologi pengelolaan limbah atau sampah. Usaha untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca harus diikuti dengan usaha mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi. Kesiapan untuk menghadapi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim (bencana klimatologi) seperti banjir, angin puting beliung dan kekeringan harus terus ditingkatkan.</p> <p>20. Ruang Terbuka Hijau dipersyaratkan sebanyak 30% dari luasan suatu wilayah. Saat ini, di Kota Bandung baru terealisasi sebesar kurang lebih 12%. Padahal, luasan RTH ini memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap kualitas udara ambien, kapasitas resapan air dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Sehingga usaha untuk menambah jumlah RTH dan intensifikasi RTH yang ada, harus terus ditingkatkan.</p>
11	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan kematian anggota keluarganya padahal data tersebut sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan
12	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan</p> <p>2. Partisipasi masyarakat belum cukup tinggi dilihat dari persentase Swadaya Masyarakat yang rendah</p>
13	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>1. Belum terintegrasinya program lintas sektoral bagi yang membutuhkan data dan informasi serta koordinasi dari instansi lain.</p> <p>2. Menurunnya animo masyarakat untuk partisipasi dalam program Keluarga Berencana.</p> <p>3. Kurangnya SDM para petugas penyuluh KB dilapangan</p>
14	Urusan Perhubungan	<p>1. Mesin parkir belum optimal dalam pengoperasiannya.</p> <p>2. Masih terdapat beberapa titik kemacetan yang belum teratasi yang disebabkan beberapa hal seperti : persimpangan yang terlalu dekat ( jalan sunda),</p>

No	Urusan	Permasalahan
15		perbandingan volume/ <i>capacity</i> sudah mendekati angka maksimal, dimana volume kendaraan yang melintas sudah mendekati bahkan melebihi kapasitas jalan
	Urusan Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya pengembangan dan integrasi aplikasi, dari 289 aplikasi belum semua kluster/sektor aplikasi terintegrasi
16	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum updatenya database pelaku UMKM yang lengkap, menyeluruh dan terperinci, hal ini mengakibatkan kurangnya pemerataan pembinaan UMKM sehingga kurang mencerminkan keadilan bagi masyarakat</li> <li>2. Program diklat wirausaha baru belum secara maksimal membekali para peserta menjadi wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing</li> <li>3. PKL sulit mengakses permodalan</li> <li>4. PKL umumnya tidak memiliki kemampuan manajemen usaha yang baik sehingga sulit mengembangkan usahanya</li> <li>5. Kurangnya kejelian melihat peluang pasar, kemitraan, jaringan usaha, dan segmentasi pasar</li> <li>6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi</li> </ol>
17	Urusan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Perda dan SOP Perizinan sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik belum optimal.</li> <li>2. Implementasi perizinan terintegrasi secara terpadu belum optimal sehubungan belum ada kesepahaman dengan PD teknis.</li> </ol>
18	Urusan Statistik	Belum tersedianya data yang terstandar di semua perangkat daerah
19	Urusan Persandian	Belum seluruh aplikasi teruji tingkat keamanannya
20	Urusan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya kegiatan yang mengakar dalam rangka pengembangan kebudayaan, seperti diskusi, seminar, sarasehan budaya;</li> <li>2. Minimnya kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku budaya sebagai pelaku budaya;</li> <li>3. Belum terdapat modul pembelajaran objek pemajuan kebudayaan bagi anak usia dini;</li> <li>4. Belum terdapat kerjasama pengembangan budaya antar daerah maupun penyelenggaraan kegiatan pengembangan budaya bersama antar daerah;</li> <li>5. Minimnya kegiatan bersama pengembangan budaya dengan daerah lainnya;</li> <li>6. Penyebarluasan informasi budaya masih bersifat sporadis dalam bentuk pertunjukan di ruang publik;</li> <li>7. Minimnya penyelenggaraan festival seni budaya dan panggiri yang mampu melibatkan banyak budayawan dan mendatangkan pengunjung sebagai industri budaya;</li> <li>8. Belum optimalnya perlindungan bangunan dan benda cagar budaya;</li> <li>9. Belum optimalnya pemanfaatan banyaknya bangunan dan benda cagar budaya untuk pengembangan industri budaya maupun wisata budaya;</li> <li>10. Belum adanya tempat sentra pertunjukan budaya yang bersifat inkubasi dan menjadi <i>prototype</i> kekayaan budaya di Kota Bandung;</li> <li>11. Tingkat partisipasi masyarakat maupun sektor swasta dalam pemanfaatan kegiatan seni budaya tradisional masih belum optimal.</li> </ol>

No	Urusan	Permasalahan
21		12. Belum optimalnya pembinaan bagi lingkung seni;
	Urusan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya minat baca di Kota Bandung</li> <li>2. Berdasarkan hasil analisis jabatan, masih kurangnya SDM Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan perpustakaan atau memiliki pengalaman di bidang perpustakaan;</li> <li>3. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan (Pojok Baca) di OPD dan Kewilayahan Kota Bandung.</li> </ol>
22	Urusan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya pemahaman aparatur birokrasi dalam pengelolaan arsip Dinamis dan arsip Statis;</li> <li>2. Berdasarkan hasil analisis jabatan, kurangnya SDM arsiparis dan atau petugas kearsipan di setiap OPD yang khusus membidangi tata kelola arsip, yang memiliki kualifikasi pendidikan kearsipan atau berpengalaman di bidang kearsipan ;</li> <li>3. Belum optimalnya pengadaan sarana dan prasarana kearsipan di OPD</li> <li>4. Belum optimalnya pembentukan kebijakan 4 Instrumen Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip dan Klasifikasi Arsip).</li> </ol>
23	Urusan Kelautan dan Perikanan	Semakin sempitnya lahan untuk budidaya perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Bandung.
24	Urusan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya destinasi pariwisata yang memenuhi aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang baik.</li> <li>2. Tidak adanya standar pengembangan jasa usaha pariwisata sebagai dasar pengembangan destinasi.</li> <li>3. Masih terdapat usaha pariwisata di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.</li> <li>4. Perlunya adanya pembenahan infrastruktur kota dalam rangka menunjang peningkatan sapta pesona pariwisata di Kota Bandung</li> <li>5. Belum maksimalnya peningkatan infrastruktur dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung</li> <li>6. Terbatasnya daya tarik wisata alam di Kota Bandung.</li> <li>7. Belum optimalnya dukungan seni dan budaya serta ekonomi kreatif dalam menggerakkan roda pariwisata.</li> <li>8. Minimnya destinasi wisata unggulan memenuhi aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di Kota Bandung.</li> <li>9. Kemacetan, infrastruktur, dan transportasi publik kurang mendukung sektor pariwisata.</li> </ol>
25	Urusan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan.</li> <li>2. Kota Bandung merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Barat, sehingga risiko masuknya penyakit zoonosa (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Bandung relatif tinggi.</li> <li>3. Limbah padat RPH babi berupa jeroan dan feses tidak bisa dibuang langsung ke luar RPH.</li> <li>4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan ternak.</li> </ol>
26	Urusan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maraknya toko modern di Kota Bandung.</li> <li>2. Kurangnya pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang ditempuh dalam proses pengurusannya.</li> <li>3. Tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok dikarenakan faktor kelancaran distribusi/pasokan, iklim, dan adanya spekulasi harga. Kota Bandung merupakan daerah konsumsi sehingga tergantung pada pasokan daerah</li> </ol>

No	Urusan	Permasalahan
27		<p>produksi dari luar Kota Bandung.</p> <p>4. Pendistribusian gas elpiji 3 kg belum benar-benar tepat sasaran.</p> <p>5. Terbatasnya akses sumber permodalan bagi para pelaku usaha dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk yang memiliki daya saing.</p> <p>6. Terbatasnya peningkatan akses pasar ekspor, fasilitasi perdagangan luar negeri, dan informasi peluang pasar komoditas ekspor.</p> <p>7. Terbatasnya kemampuan calon eksportir Kota Bandung dalam mengembangkan produk yang berdaya saing.</p>
	Urusan Perindustrian	<p>1. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam penguasaan teknologi proses produksi dan desain kemasan produk.</p> <p>2. Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam berinovasi untuk menciptakan dan mengembangkan produknya.</p>
	Urusan Transmigrasi	Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.
	Urusan Perencanaan	Berkurangnya minat warga dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang
	Urusan Keuangan	<p>1. Karakteristik BPHTB di mana target pendapatannya tidak dapat diprediksi karena sangat tergantung pada transaksi/peralihan hak atas tanah dan bangunan serta kebutuhan untuk membuat akta-akta terkait pembuatan sertifikat di masyarakat.</p> <p>2. Pendapatan BPHTB juga sangat dipengaruhi dengan kebijakan yang berjalan seperti halnya pada tahun 2017, dengan adanya program tax amnesty yang mengamanatkan bahwa per tanggal 31 Desember 2017 harus telah bersertifikat dan juga program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang merupakan program BPN (Badan Pertanahan Nasional).</p> <p>3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan proses keabsahan kepemilikan sertifikat terutama untuk kepemilikan apartemen.</p> <p>4. Pembayaran BPHTB masih mengacu pada nilai NJOP, seharusnya mengacu pada nilai transaksi jual beli yang terjadi/ NPOP.</p> <p>5. Belum Optimalnya penggalian Potensi Pajak Reklame.</p> <p>6. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak reklame.</p> <p>7. Masih belum optimalnya pemberian sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak.</p> <p>8. Belum optimalnya sinergitas kinerja pemberi izin reklame terhadap pembayaran pajak.</p> <p>9. Masih rendahnya monitoring dan pengawasa reklame di Kota Bandung.</p> <p>10. Masih adanya kesulitan wajib pajak PBB menggunakan aplikasi SIPP dalam pelayanan PBB.</p> <p>11. Pelayanan PBB masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh UPT sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib Pajak PBB.</p> <p>12. Belum meratanya tempat pembayaran PBB yang tersebar di Kota Bandung.</p>



No	Urusan	Permasalahan
31	Urusan Kependidikan Kepegawaian dan Pelatihan	Rendahnya minat PNS untuk mengikuti tugas belajar
32	Urusan Penelitian dan Pengembangan	1. Selama kurun waktu 2013 - 2018, evaluasi dalam urusan penelitian dan pengembangan memperlihatkan bahwa ketersediaan data sebagai data dasar untuk melakukan penelitian dan pengembangan kurang baik. Dengan data yang lengkap dan selalu terupdate akan diperoleh metodologi yang tepat dan keluarlah analisis kebijakan kota yang terukur.
33	Urusan Fungsi Penunjang Lainnya	1. Belum optimalnya kinerja pegawai dalam penyelesaian pembentukan produk hukum daerah; 2. Pengawasan internal dalam pembentukan produk hukum daerah masih belum optimal; 3. Masih lemahnya data/alat bukti di Perangkat Daerah dalam penanganan perkara gugatan TUN dan Perdata; 4. Masih lambannya pengolahan dan pelaporan data terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia pada Perangkat Daerah; 5. Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan tingkat pusat tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaan dengan cepat, sehingga menyebabkan terjadinya mispersepsi dalam implementasinya. 6. Belum ada data pemetaan ekonomi perkecamatan se-kota Bandung untuk menentukan potensi konflik lingkup sosial ekonomi dan budaya

## **BAB 3**

# **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Kota Bandung dalam perkembangan ekonominya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi nasional serta kebijakan ekonomi Regional Jawa Barat, oleh karenanya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi Kota Bandung yaitu Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan dengan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu, perlu memperhatikan kondisi ekonomi eksternal selain fokus pada kekuatan internal Kota Bandung agar dapat secara optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

#### **3.1.1. KONDISI EKONOMI**

##### **3.1.1.1. KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI GLOBAL**

Berdasarkan data World Economic Outlook IMF pada Januari 2019, pertumbuhan ekonomi global untuk 2018 sekarang diperkirakan sebesar 3,7% atau 0,1 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 juga menunjukkan penurunan sebesar 0,2% menjadi 3,5%. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,1% dari proyeksi tahun 2019 menjadi 3,6%. Penurunan pertumbuhan global terjadi karena diperkirakan merupakan dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan tarif yang diterapkan

oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain tarif, isu yang dianggap menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi global adalah sikap kebijakan dan keketatan perdagangan dunia. Prioritas kebijakan utama bagi negara-negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi global adalah menyelesaikan secara cepat dan kooperatif mengenai kesepakatan perdagangan serta mengatasi ketidakpastian kebijakan yang dihasilkan.

Pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi global akan meningkat 0,1% yang didasarkan pada kenaikan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa dan beberapa negara berkembang. Negara berkembang pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonominya diproyeksikan naik sebesar 0,4% sedangkan pada negara-negara di kawasan Eropa akan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1%. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global pada tahun berikutnya, semua negara diwajibkan meningkatkan potensi pertumbuhan output dan memperkuat penyangga fiskal dan keuangan di lingkungan yang memiliki beban utang tinggi dan kondisi keuangan yang ketat.

**Tabel 3.1**  
**Indikator dan Proyeksi Perekonomian Dunia Tahun 2017 - 2020**

No.	Rincian	WEO IMF			
		Estimasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020
<b>A.</b>	<b>Dunia</b>	<b>3.8</b>	<b>3.7</b>	<b>3.5</b>	<b>3.6</b>
<b>B.</b>	<b>Negara Maju</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>2.0</b>	<b>1.7</b>
1.	Amerika Serikat	2.2	2.9	2.5	1.8
2.	Eropa	2.4	1.8	1.6	1.7
3.	Jepang	1.9	0.9	1.1	0.5
<b>C</b>	<b>Negara Berkembang</b>	<b>4.7</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.9</b>
<b>D</b>	<b>Negara Berkembang Asia</b>	<b>6.5</b>	<b>6.5</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>
1.	Tiongkok	6.9	6.6	6.2	6.2
2.	India	6.7	7.3	7.5	7.7
3.	ASEAN	5.3	5.2	5.1	5.2

Sumber: IMF, *World Economic Outlook*, Januari 2019

### 3.1.1.2. KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI NASIONAL

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17%, yang berarti lebih tinggi dibanding pertumbuhan 2017, bahkan tertinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir, Pada 2014 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01%, 2015 sebesar 4,88%, 2016 sebesar 5,03%, dan 2017 sebesar 5,07%. Permintaan domestik terutama dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah masih menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi pada 2018. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut, telah berhasil menciptakan lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan serta ketimpangan.

Konsumsi swasta diproyeksikan tetap terjaga seiring daya beli yang terjaga dan konsumsi LNPRT meningkat sebagai dampak positif persiapan Pemilu. Pencapaian inflasi hingga awal tahun 2019 yang terjaga rendah seiring dengan kenaikan upah minimum menjaga daya beli konsumen tetap terjaga baik. Sementara itu investasi diperkirakan tetap kuat terutama yang bersumber dari penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah.

Namun demikian, masih besarnya risiko eksternal menjadi faktor pertumbuhan ekonomi secara umum. Sementara itu, inflasi nasional pada tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran inflasi sebesar 3.5%±1%

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Pengeluaran dan Lapangan Usaha**  
**Tahun 2014-2018 (dalam Persen)**

No.	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
<b>I.</b>	<b>SISI PENGELUARAN</b>					
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.15	4.96	5.01	4.94	5.05
2.	Konsumsi LNPRT	12.19	(0.62)	6.64	6.93	9.08
3.	Konsumsi Pemerintah	1.16	5.31	(0.14)	2.13	4.80
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4.45	5.01	4.47	6.15	6.67
5.	Perubahan Inventori	0.48	(0.59)	0.23	(0.07)	0.71
6.	Ekspor Barang dan Jasa	1.07	(2.12)	(1.66)	8.91	6.48
7.	Impor Barang dan Jasa	2.12	(6.25)	(2.41)	8.06	12.04

No.	Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
<b>II.</b>	<b>SEKTOR LAPANGAN USAHA</b>					
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.24	3.75	3.36	3.87	3.91
B.	Pertambangan dan Penggalian	0.43	(3.42)	0.95	0.66	2.16
C.	Industri Pengolahan	4.64	4.33	4.26	4.29	4.27
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5.90	0.90	5.39	1.54	5.47
E.	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.24	7.07	3.60	4.60	5.46
F.	Konstruksi	6.97	6.36	5.22	6.80	6.09
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.18	2.54	4.03	4.46	4.97
H.	Transportasi dan Pergudangan	7.36	6.71	7.45	8.49	7.01
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.77	4.31	5.17	5.39	5.66
J.	Informasi dan Komunikasi	10.12	9.70	8.88	9.63	7.04
K.	Jasa Keuangan	4.68	8.58	8.90	5.47	4.17
L.	Real Estat	5.00	4.11	4.69	3.66	3.58
M,N.	Jasa Perusahaan	9.81	7.69	7.36	8.44	8.64
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.38	4.63	3.19	2.06	7.02
P.	Jasa Pendidikan	5.47	7.33	3.80	3.70	5.36
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.96	6.69	5.15	6.84	7.13
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	8.93	8.08	8.02	8.73	8.99

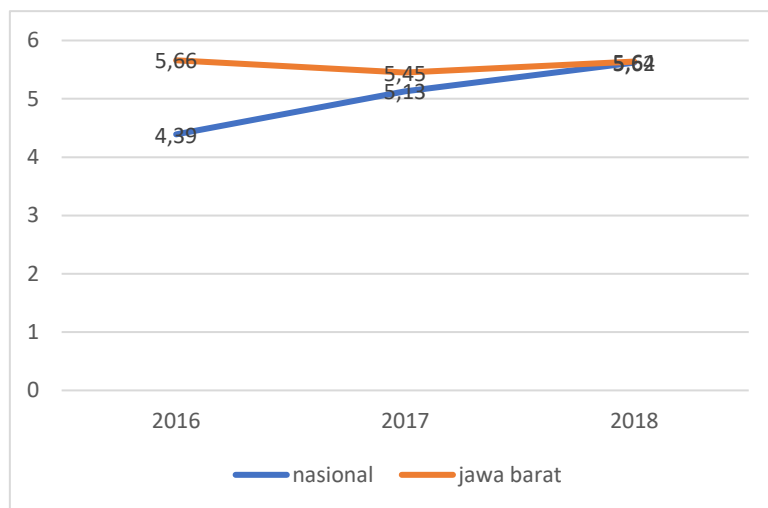
Sumber: Bank Indonesia, 2019

### 3.1.1.3. KONDISI EKONOMI JAWA BARAT

#### 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2018 sebesar 5.64% (yoy), meningkat dibanding tahun 2017 (5.35% yoy). Realisasi ini juga lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5.11% (yoy).

**Gambar 3.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2016 – 2018 (dalam Persen)**



Sumber: BPS, 2018

## 2) Perkembangan Inflasi

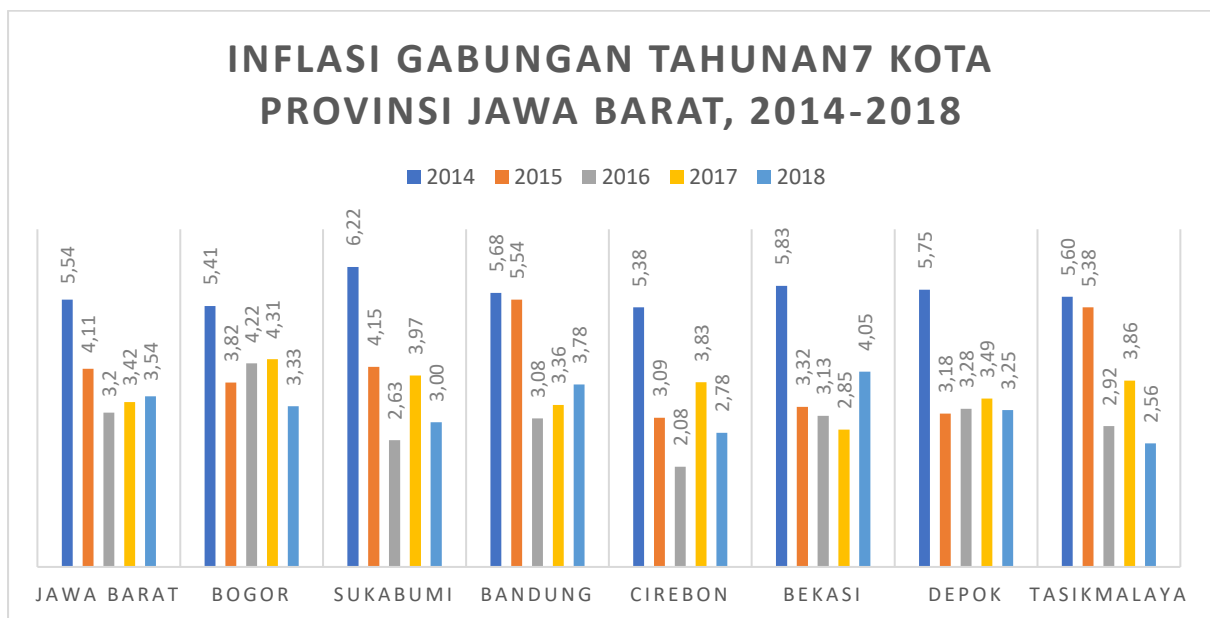
Inflasi Jawa Barat tahun 2018 menunjukkan kondisi yang tetap terkendali. IHK Jawa Barat tahun ini tercatat sebesar 3.54% (yoy), sejalan dengan sasaran inflasi nasional tahun 2018 yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.5%±1%. Capaian ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 3.63% (yoy).

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Desember 2018, seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,78%, Kota Sukabumi sebesar 0,52%, Kota Bandung sebesar 0,71%, Kota Cirebon sebesar 0,58%, Kota Bekasi sebesar 0,59%, Kota Depok sebesar 0,22%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,25%.

Secara spasial, terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian inflasi di atas Jawa Barat, yaitu Kota Bekasi sebesar 4.23% (yoy), Kota Bandung sebesar 3.76% (yoy) dan Bogor sebesar 3.69% (yoy). Sementara itu Kota Tasikmalaya menjadi kota dengan capaian inflasi terendah yaitu sebesar 2.30% (yoy). Kota Bandung dan Bekasi mencatatkan inflasi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Tiga dari tujuh kota perhitungan IHK di Jawa Barat mencatatkan capaian inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat di sepanjang tahun 2018, yaitu Kota Bandung, Bekasi dan Bogor. Selain menjadi kota dengan bobot inflasi tertinggi di Jawa Barat, ketiga kota tersebut memiliki karakteristik yang serupa yaitu berperan sebagai wilayah konsumen dan bukan wilayah produsen. Hal ini menyebabkan ketiga wilayah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap daerah pemasok bahan-bahan konsumsi. Sehingga, tekanan inflasi di ketiga wilayah ini terutama untuk kelompok bahan makanan, sangat bergantung terhadap pola distribusi, keberadaan BUMD pangan, koordinasi antar dinas/instansi terkait serta kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh masing-masing wilayah.

**Gambar 3.2**  
**Angka Inflasi Provinsi Jawa Barat dan 7 Kota Besar di Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2014 - 2018 (dalam Persen)**

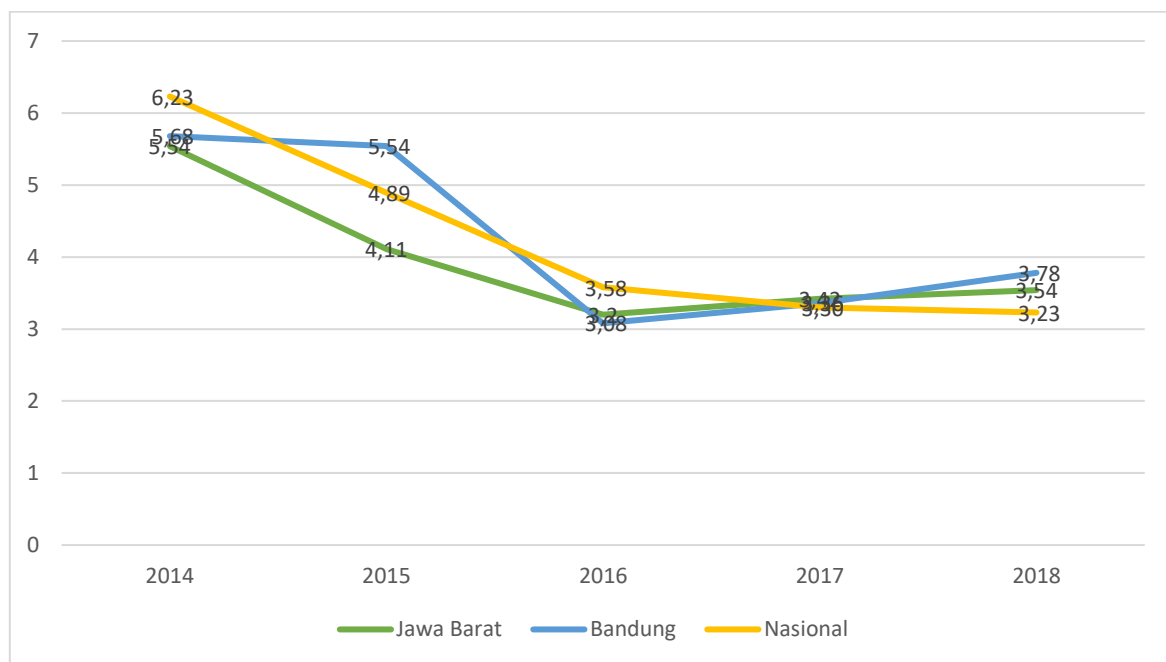


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2018

Pola perubahan angka inflasi antara inflasi Jawa Barat dan Kota Bandung memiliki pola yang sama dan konsisten pergerakannya. Pada tahun 2014, angka inflasi Nasional, Jawa Barat, dan Kota Bandung mampu ditekan masing-masing sebesar angka inflasi 6,23% pada angka inflasi nasional, 5,54% pada Jawa Barat dan angka inflasi 5,68% pada Kota Bandung. Penurunan atau penekanan angka inflasi ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Kota Bandung terus terjadi pada tahun 2015

dan 2016, yaitu untuk angka inflasi Nasional sebesar 4.89% tahun 2016 dan 3.58% tahun 2016, Jawa Barat berada pada angka 4,11% untuk tahun 2015 dan 3,20% untuk tahun 2016, sedangkan angka inflasi Kota Bandung masing-masing berada pada angka 5,54% untuk tahun 2016 dan 3,08% untuk tahun 2016. Tahun 2017 besaran angka inflasi Nasional yaitu sebesar 3.30%, Jawa Barat yaitu sebesar 3.42% dan Kota Bandung sebesar 3.36%. Tahun 2018 angka inflasi nasional yaitu sebesar 3.23%, Jawa Barat yaitu sebesar 3.54% sedangkan untuk Kota Bandung 3.78%.

**Gambar 3.3**  
**Angka Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bandung**  
**Tahun 2014 – 2018 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2018

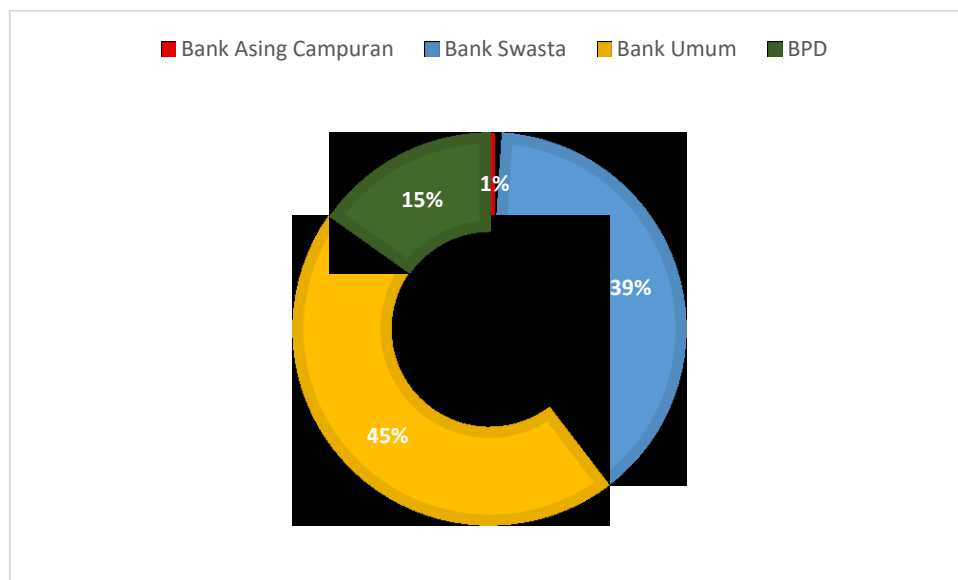
Hasil pemantauan harga barang dan jasa selama November 2018 tercatat beberapa komoditas mengalami kenaikan/penurunan harga dan memberikan andil inflasi/deflasi cukup signifikan. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil inflasi antara lain tukang bukan mandor, bawang merah, cat tembok, beras, bensin, semen, kereta api, telur ayam ras, pasir, rokok kretek filter, besi beton, wortel.



### 3) Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengelolaan Sistem Pembayaran

Dalam laporan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia melaporkan bahwa total asset bank umum di Jawa Barat periode tahun 2018 mencapai Rp650,64 triliun. Setelah mengalami tren peningkatan sejak awal 2016 hingga akhir 2017, pertumbuhan terus mengalami penurunan hingga mencapai 5.29 persen (yoy). Hingga saat ini belum terlihat perubahan struktur kepemilikan aset yang signifikan, tercermin dari pangsa kepemilikan aset terbesar yang masih dimiliki oleh bank pemerintah dan diikuti oleh bank swasta, BPD dan bank asing & campuran.

**Gambar 3.4**  
**Pangsa Aset Perbankan Jawa Barat Per Kelompok Bank**  
**Triwulan IV Tahun 2018**

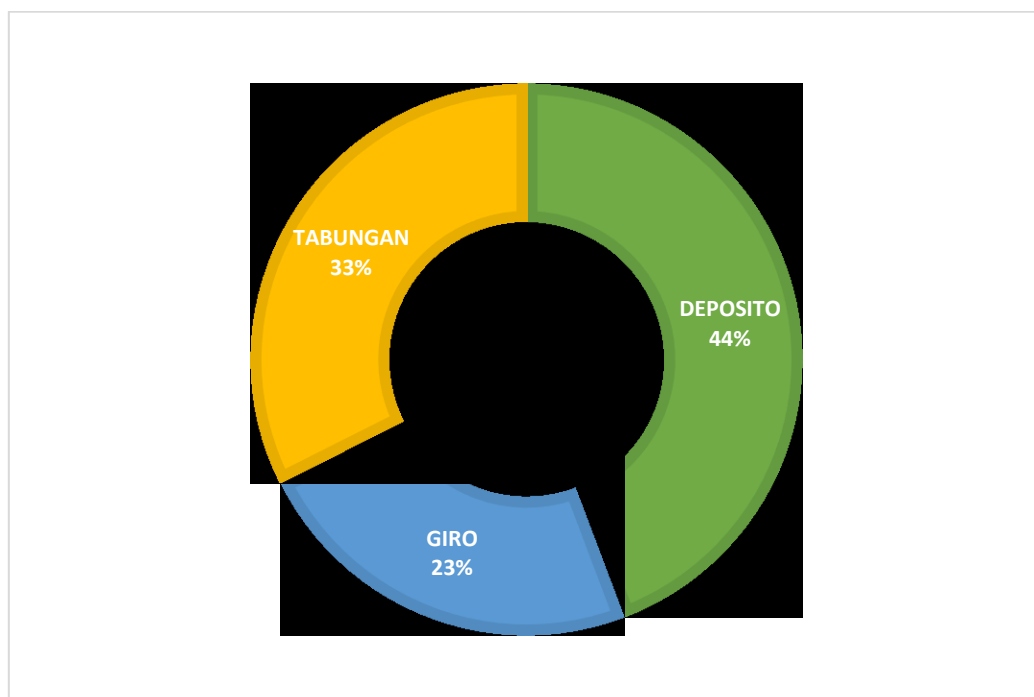


Sumber: Bank Indonesia, 2019

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2018 mencapai Rp464.52 triliun dengan pertumbuhan 3.38% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 6.74% (yoy). Melambatnya pertumbuhan DPK terutama di dorong oleh perlambatan pada giro dari 15.16% (yoy) menjadi -1.05% (yoy) serta perlambatan tabungan dari 11.53% (yoy) menjadi 8.75% pada triwulan IV 2018. Secara spesifik, penurunan giro terdapat terjadi pada giro korporasi yakni bernilai besar (>20 milyar). Melambatnya DPK ini diperkirakan karena adanya *shifting* perilaku penempatan dana ke surat berharga.

Jika melihat proporsi DPK pada skala nasional, proporsi deposito sebagai komponen DPK merupakan yang terbesar (44.58%) yang kemudian diikuti komponen tabungan dan giro. Hal ini berbeda dengan proporsi DPK Jawa Barat dimana proporsi tabungan merupakan komponen DPK terbesar yaitu mencapai 45.30%. Proporsi DPK Jawa Barat triwulan IV 2018 mencapai 8.25% atau tertinggi ketiga dibandingkan provinsi lainnya di Jawa setelah DKI Jakarta (50.67%) dan Jawa Timur (9.63%)

**Gambar 3.5**  
**Proporsi Dana Pihak Ketiga Jawa Barat**  
**Triwulan IV Tahun 2018**



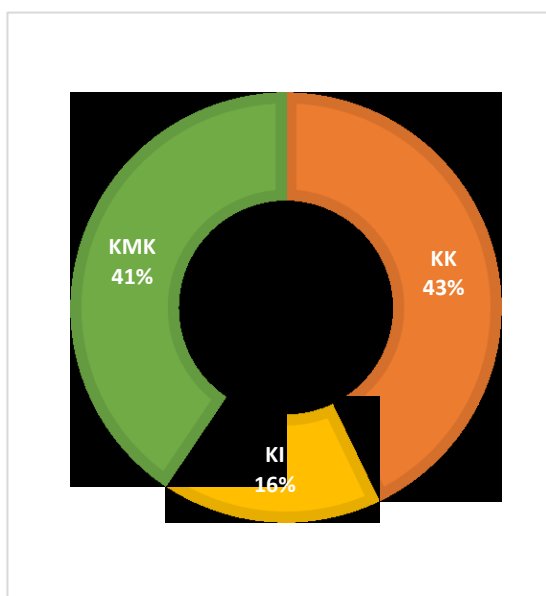
Sumber: *Bank Indonesia, 2019*

Pertumbuhan penyaluran kredit lokasi proyek di Jawa Barat dan lokasi bank di Jawa Barat pada triwulan IV 2018 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya bahkan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2016. Tren suku bunga yang terus menurun serta pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang masih tinggi sebesar 5.50% (yoy) diperkirakan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. Selain itu, peningkatan kredit ini sejalan dengan masih berlanjutnya penurunan suku bunga kredit, meskipun suku bunga acuan BI

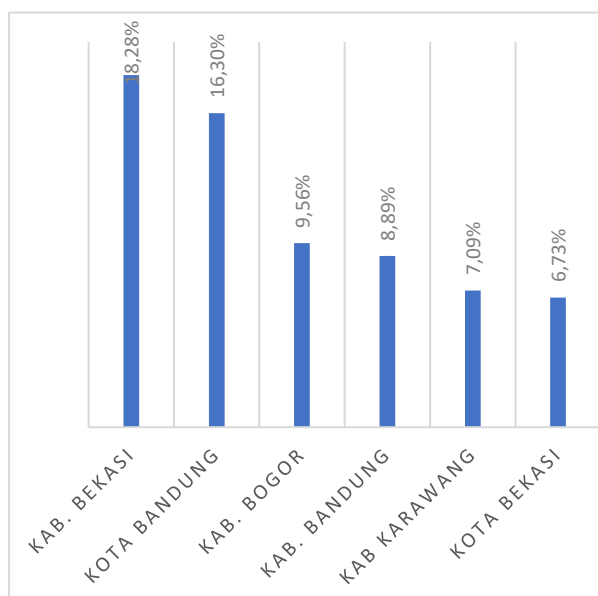
sudah meningkat sejak Mei 2018. Penyaluran kredit lokasi proyek di Jawa Barat pada triwulan IV 2018 mencapai Rp 679,10 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11.76% (yoy). Level pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan-triwulan sebelumnya sejak 2016 dan sudah masuk dalam rentang target pertumbuhan 10% – 12% tahun 2018.

Secara spasial penyaluran kredit bank umum relatif terkonsentrasi di 6 (enam) kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencapai pangsa 66,85% dari total kredit yang disalurkan di Jawa Barat, yaitu meliputi Kabupaten Bekasi (18,28%), Kota Bandung (16,30%), Kabupaten Bogor (9,56%), Kabupaten Bandung (8,89%), Kabupaten Karawang (7,09%) dan Kota Bekasi (6,73%) Penyaluran kredit di Jawa Barat masih terkonsentrasi di kota/kabupaten lokasi kantor atau pabrik industri pengolahan, perdagangan dan jasa. Dari sisi risiko kredit, keenam daerah tersebut kecuali Kabupaten Bandung memiliki rasio NPL yang terjaga di bawah 5%, sementara NPL Kabupaten Bandung pada triwulan IV 2018 mencapai 5,86%. Selain Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Subang dan Kota Sukabumi juga memiliki rasio NPL diatas *threshold*.

**Gambar 3.6**  
**Proporsi Kredit Menurut Jenis**  
**Penggunaan**  
**Triwulan IV Tahun 2017**



**Gambar 3.7**  
**Perkembangan Kredit Kota/Kabupaten**  
**Triwulan IV Tahun 2017**



Sumber: Bank Indonesia, 2019

#### 4) Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Pada agustus 2018, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja di Jawa Barat dibandingkan Agustus 2017, dari 22,39 juta jiwa menjadi 22,63 juta jiwa. Namun disisi lain, hal itu diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dari 64,34% menjadi 62,92%. Menurunnya TPAK ini terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga dan bersekolah. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari 20,55 juta menjadi 20,78 juta jiwa, diikuti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 8,22% pada agustus 2017 menjadi 8,17% pada agustus 2018. TPT Jawa Barat pada periode ini tercatat sebagai yang terendah sejak tahun 2011 dan secara konsisten bergerak dalam tren menurun selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

Membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat sejalan dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat pada triwulan II dan triwulan III 2018 dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Peningkatan LPE Jawa Barat diperkirakan memberi dampak kepada jenis pekerjaan masyarakat, dimana pangsa tenaga kerja di sektor formal meningkat (dari 50,2% menjadi 51,8%). Tingginya LPE pada lapangan usaha industri pengolahan yang tercatat di atas level pertumbuhan PDRB Jawa Barat menyebabkan tingginya serapan tenaga kerja formal seperti buruh pabrik.

**Tabel 3.3**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Jawa Barat**  
**Tahun 2016–2018 (Juta Orang)**

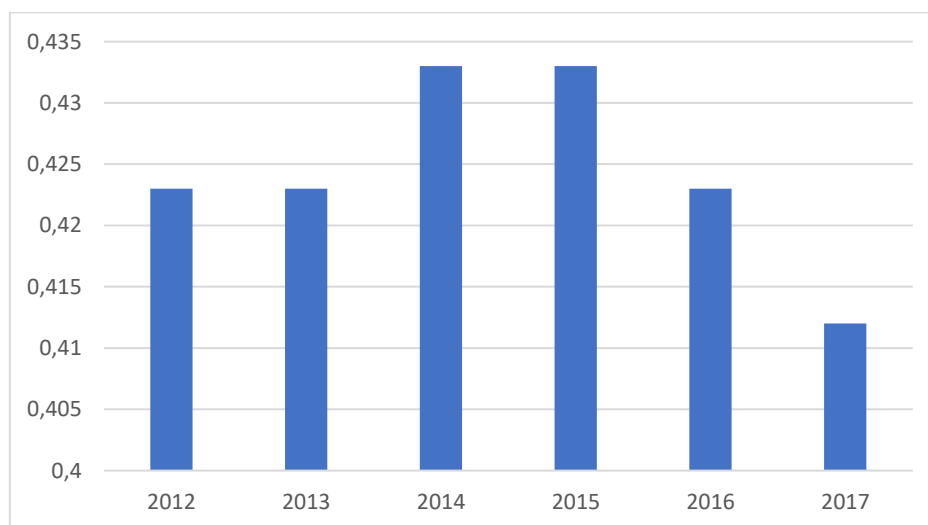
No.	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
<b>I</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>21,08</b>	<b>22,39</b>	<b>22,63</b>
1	Bekerja	19,20	20,55	20,78
2	Pengangguran	1,87	1,84	1,85
<b>II</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>13,67</b>	<b>12,96</b>	<b>13,34</b>
1	Sekolah	3,14	3,02	3,04
2	Mengurus Rumah Tangga	8,73	8,85	8,99
3	Lainnya	1,81	1,41	1,31

No.	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2016	Agustus 2017	Agustus 2018
III	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</b>	<b>60,65 %</b>	<b>63,34%</b>	<b>62,92%</b>
1	Laki-laki	80,62%	82,40%	83,09%
2.	Perempuan	49,30%	43,89%	42,37%
	<b>Penduduk Usia 15 Tahun ke atas</b>	<b>34,75</b>	<b>35,35</b>	<b>35,37</b>

Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2019

Gini rasio di Jawa Barat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan angka 0,41 persen. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Dengan kata lain pemerataan pembangunan Jawa Barat secara umum memberikan dampak bagi pemerataan penduduk Jawa Barat.

**Gambar 3.8**  
**Gini Rasio Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017**



Sumber: BPS Prov. Jawa Barat, 2018

#### **3.1.1.4. KONDISI EKONOMI KOTA BANDUNG**

##### **1) Laju Pertumbuhan Ekonomi**

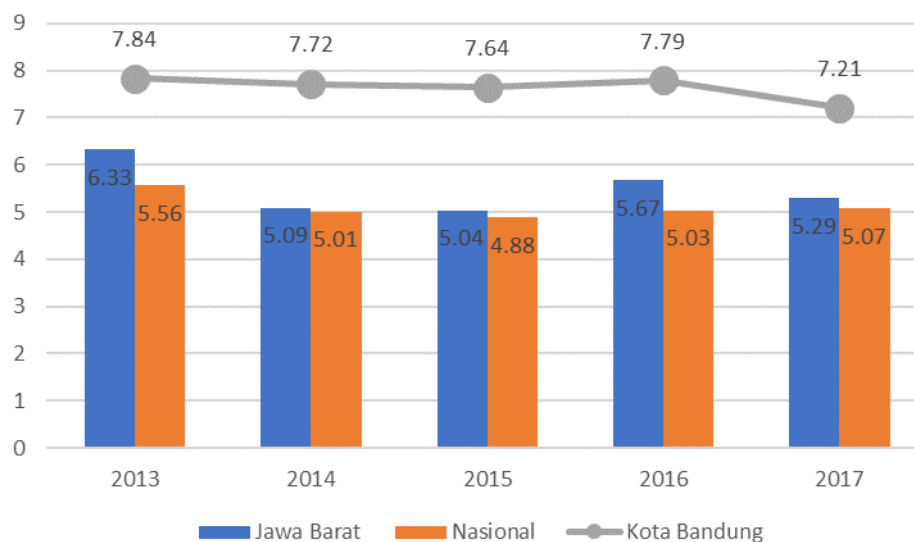
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang sering digunakan sebagai

salah satu alat strategi kebijakan bidang ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB adalah salah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Indikator ini menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung dari tahun 2013–2017 memperlihatkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2013, perekonomian Kota Bandung yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 mampu tumbuh 7,84%, kemudian melambat menjadi 7,72% dan 7,64% pada tahun 2014 dan 2015 yang selanjutnya pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,79%.

Tingkat LPE Kota Bandung ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara nasional. Selama periode 2013-2017, rerata LPE Kota Bandung mencapai 7,75%, sedangkan rerata LPE Provinsi Jawa Barat dan nasional selama periode 2013-2017 masing-masing sebesar 5,53% dan 5,12%.

**Gambar 3.9**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2013–2017**  
**dan Perbandingannya dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)**

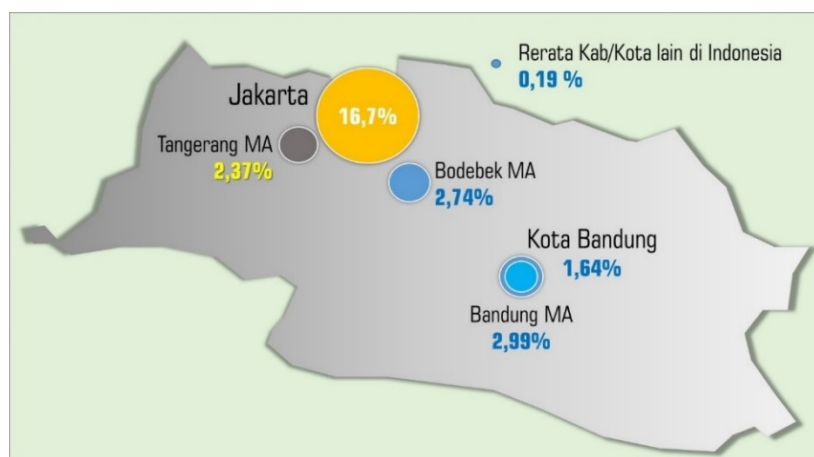


Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Provinsi Jawa Barat, dan BPS Nasional

Dimensi yang lebih luas lagi untuk dapat memotret perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Bandung perlu ditelaah secara komprehensif. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (berkorelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Hal ini berguna untuk dapat melihat kerangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dan holistik.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tergolong lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Bandung Metropolitan Area (BMA), Jawa Barat dan jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat ekonomi nasional dan Jawa Barat mengalami perlambatan cukup besar pada tahun 2012-2015, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung relatif stabil, atau mengindikasikan adanya ketahanan. Saat perekonomian nasional membaik di Tahun 2015-2016 dan pemulihan ekonomi Jawa Barat Tahun 2016, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung juga meningkat, dengan perbedaan pertumbuhan yang cenderung semakin lebar dengan nasional. Artinya Kota Bandung termasuk *'fast growing economy'* di Indonesia. Berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, kontribusi ekonomi Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :

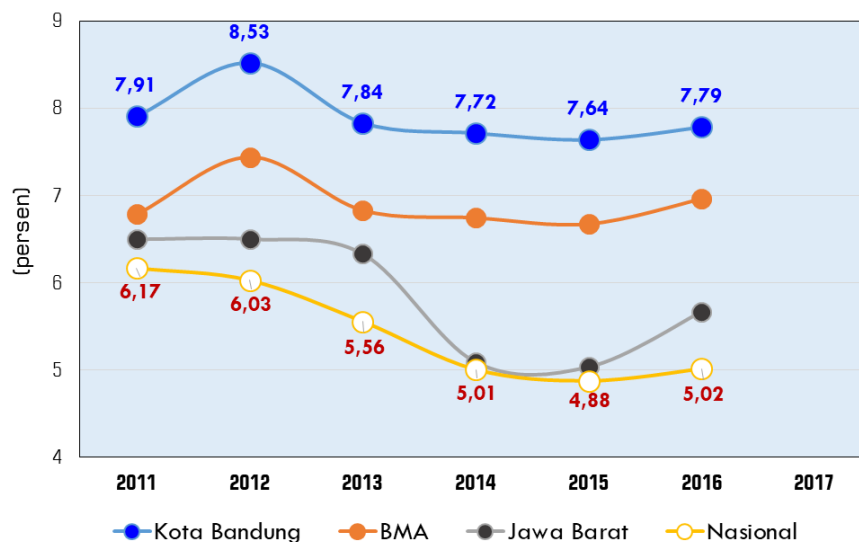
**Gambar 3.10**  
**Kontribusi Kota Bandung pada Ekonomi Nasional**



Kota Bandung menempati posisi strategis Dalam hal kontribusinya bagi perekonomian nasional dengan rata-rata kontribusi ekonomi Kota Bandung Tahun 2010-2016 sebesar 1,64% dari ekonomi nasional, atau lebih besar dari rerata kabupaten/kota di Indonesia yang hanya 0,19%. Kota Bandung termasuk menjadi kota ekonomi penting di Indonesia. Bila digabungkan dalam lingkup BMA, kontribusi 2,99% dari ekonomi Indonesia. Jakarta, ukuran ekonomi 10x ekonomi Kota Bandung, dan berkontribusi 16,7% pada ekonomi nasional, atau 21,81% bila termasuk wilayah urbannya. Ukuran dan pertumbuhan ekonomi Megapolitan Jakarta bisa menjadi potensi permintaan pada ekonomi Kota Bandung, melalui kegiatan-kegiatan wisata, bisnis, pendidikan dan yang lainnya. Jakarta juga dapat mendukung akses dan jejaring untuk Kota Bandung.

**Gambar 3.11**

**Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung, BMA, Jawa Barat dan Nasional**

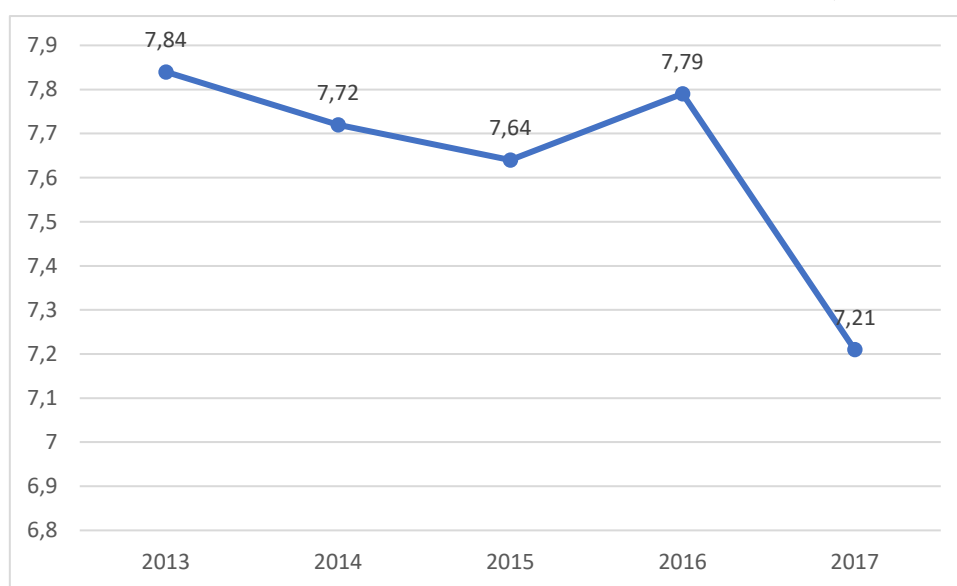


Peran sektor ekonomi Kota Bandung, terhadap ekonomi Jawa Barat sekitar 12,1% pada Tahun 2010-2016, di atas rerata kabupaten/kota lain (3,84%). Sebanyak 13 sektor (81%) dari 16 sektor yang ada, kontribusinya lebih dari rerata sektor (12,1%). Hampir semua sektor ekonomi Kota Bandung berperan penting di Jawa Barat. Peran sektor-sektor dapat dikategorikan menjadi kontribusi (1) sangat tinggi: lebih dari 30% (2) tinggi: 20%-30% (3) sedang: 10%-20% (4) rendah: kurang dari 10%.



Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi termasuk memiliki peran sangat besar di Jawa Barat (lebih 30%). Produk-produk Sektor informasi dan komunikasi serta Sektor Jasa Keuangan sifatnya dapat dikonsumsi/ digunakan di daerah lain, sehingga kontribusi yang ‘sangat tinggi’ ini memberikan dukungan penting bagi wilayah selain Kota Bandung. Pertumbuhan sektor tersebut bisa diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sifat lokal atau melayani wilayah tersebut. Pertumbuhan sektor ini biasanya mengikuti pola pertumbuhan penduduk. Kontribusi sektor ini tinggi, karena Kota Bandung berpenduduk banyak, kebutuhan akan air minum besar serta timbunan sampah/limbah yang perlu dikelola juga besar.

**Gambar 3.12**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

Apabila dilihat berdasarkan sektor lapangan usaha dalam lima tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi didapat pada informasi dan komunikasi sebesar 14,69 persen, disusul oleh sektor jasa lainnya, sektor kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masing-masing sebesar 10,60 persen, 10,47 persen, dan 10,24 persen. Sektor tersier perekonomian Kota Bandung selama lima tahun terakhir tumbuh pesat, hal ini ditunjukkan dengan angka rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir. Hampir semua sektor tersier memiliki laju pertumbuhan di atas 7 persen per tahun, kecuali sektor real estate serta administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang masing-masing 5,55 persen dan 0,74 persen per tahun.

Laju pertumbuhan sektor sekunder mengalami perlambatan, hal ini dapat dilihat seperti pada sektor industri pengolahan yang secara umum mengalami perlambatan dari 4,71 persen pada tahun 2013 terus melambat menjadi 4,01 persen pada tahun 2016, baru kemudian mengalami koreksi meningkat pada tahun 2017 menjadi 4,53 persen. Hal yang sama juga terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami yang juga mengalami perlambatan, tercatat pada tahun 2013 berada pada angka 8,71 persen terus melambat sampai dengan 6,37 persen pada tahun 2017.

Perlambatan laju pertumbuhan juga terjadi pada sektor tersier pada umumnya. Laju pertumbuhan ekonomi pada sektor transportasi dan pergudangan sejak tahun 2013 mencapai 9,39 persen melambat pada tahun-tahun berikutnya mencapai angka 8,56 persen pada tahun 2014, menguat sedikit menjadi 11,47 persen pada tahun 2015, dan kembali melambat pada tahun 2016 menjadi 9,74 persen, dan menurun kembali pada tahun 2017 menjadi 5,65. Pada sektor informasi dan komunikasi, pada tiga tahun pertama dari 2013 sampai 2015 mengalami tren positif yakni dari 13,48 persen menjadi 16,47 persen, namun pada dua tahun terakhir mengalami perlambatan yakni menjadi 15,58 pada tahun 2016 dan 13,16 pada tahun 2017. Berbanding terbalik dengan sektor informasi dan komunikasi, laju pertumbuhan ekonomi sektor jasa pendidikan pada tiga tahun awal sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami perlambatan dari 8,09 persen menjadi 7,73

persen, namun pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan menjadi 7,88 persen pada tahun 2016 dan 8,93 persen pada tahun 2017.

**Tabel 3.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2013 – 2017 (dalam Persen)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**	Rata-rata
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,18	0,17	1,73	(4,22)	7,14	1,80
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	Industri Pengolahan	4,06	4,71	3,94	4,01	4,53	4,25
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	4,82	5,47	3,55	6,70	2,82	4,67
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,10	5,52	3,51	3,67	(0,53)	3,65
<b>F</b>	Konstruksi	8,54	6,80	7,86	6,93	7,76	7,58
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,71	7,62	7,17	7,26	6,37	7,43
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	9,39	8,56	11,47	9,74	5,65	8,96
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,18	11,05	8,23	11,41	10,32	10,24
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	13,48	14,74	16,47	15,58	13,16	14,69
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,40	7,63	6,18	8,46	6,70	7,27
<b>L</b>	Real Estate	6,95	5,77	4,06	4,32	7,18	5,66
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	10,52	10,56	7,94	8,48	9,61	9,42
<b>O</b>	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0,02)	0,94	1,03	0,97	0,78	0,74
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	8,09	7,85	7,73	7,88	8,93	8,10
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,72	10,87	11,65	9,94	9,18	10,47
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya	11,49	11,62	8,76	9,60	11,54	10,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7,84	7,72	7,64	7,79	7,21	7,64

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

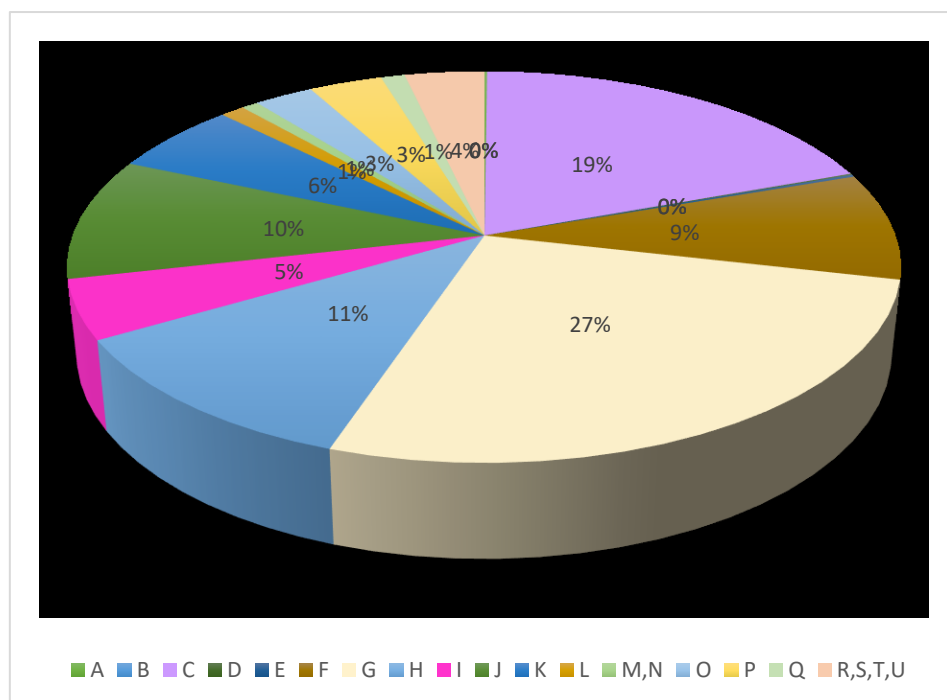
## 2) Kontribusi Sektor-Sektor Dalam PDRB

Kontribusi sektor ekonomi dalam PDRB mencerminkan bagaimana karakteristik aktivitas perekonomian Kota Bandung. Pada tahun 2017, aktivitas perekonomian Kota Bandung didominasi oleh sektor skunder, yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 26,56% dan sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri

Pengolahan sebesar 19,33%. Kemudian disusul oleh sektor tersier yakni sektor Transportasi dan Pergudangan 11,41 %, sektor Informasi dan Komunikasi 10,01%, dan sektor Konstruksi 8,86%. Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya menyumbang di bawah 6 persen terhadap PDRB Kota Bandung. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya menyumbang sebesar 0,12 persen, bahkan sektor penggalian dan pertambangan tidak memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bandung.

Sektor lainnya dalam PDRB yang kurang signifikan terhadap perekonomian Kota Bandung antara lain, sektor sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,10 persen, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,19 persen, sektor Real Estate 1,10 persen, sektor Jasa Perusahaan 0,76 persen, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,08.

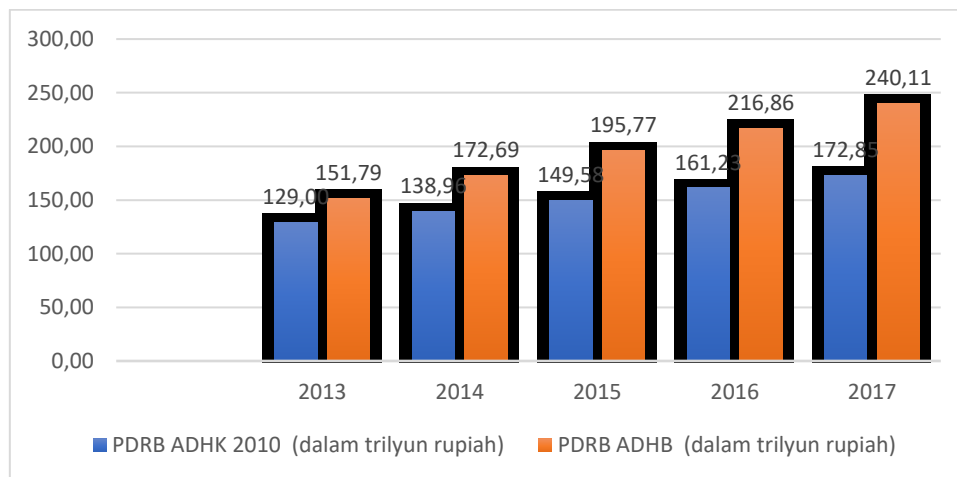
**Gambar 3.13**  
**Kontribusi Ekonomi Kota Bandung Tahun 2017 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

Kondisi ekonomi Kota Bandung sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2016 total PRDR ADHK 2010 mencapai 172,85 Triliun naik dari 129,00 Triliun pada tahun 2013, sedangkan PDRB ADHB pada tahun 2012 berada pada nilai 151,79 Triliun pada 2012 terus meningkat mencapai Rp 240,11 Triliun pada tahun 2017. Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 3.14**  
**Nilai PDRB Kota Bandung Tahun 2013 – 2017 (dalam Triliun Rupiah)**



Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

Trend perekonomian Kota Bandung ke depan diprediksi akan terus berkembang terutama pada sektor sekunder dan tersier. Namun sektor primer mengalami penurunan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Bandung, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusi masing-masing sektor perekonomian Kota Bandung tidak terlepas adanya perkembangan dari masing-masing sektoral yang terus berkembang mengingat karakteristik Kota Bandung sebagai kota cepat tumbuh yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan kecenderungan penurunan terhadap kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung, semenjak tahun 2013 kontribusi sektor pertanian sebesar 0,14% menurun menjadi 0,12% pada tahun 2017. Khusus sektor pertambangan dan penggalian tidak memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung. Sektor industri pengolahan perlahan

menunjukkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Bandung, Sejak tahun 2012 sumbangan sektor industri pengolahan sebesar 21,83% terus menurun menjadi 19,33 persen pada tahun 2017.

Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas Kota Bandung menunjukkan trend yang menaik meskipun tidak terlalu signifikan. Sejak tahun 2013 sumbangan sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,08% pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 0,10%, sebagai akibat permintaan atas kebutuhan penggunaan energi di Kota Bandung. Trend penurunan kontribusi, juga terjadi pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 0,19%.

**Tabel 3.5**  
**Kontribusi Sektor Ekonomi Kota Bandung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017 (dalam Persen)**

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016**	2017***	Trend
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	<i>Turun</i>
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
C	Industri Pengolahan	21.83	21.48	20.58	19.97	19.33	<i>Turun</i>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	<i>Naik</i>
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	<i>Turun</i>
F	Konstruksi	9.00	9.00	9.00	8.87	8.86	<i>Turun</i>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28.44	27.78	27.47	26.95	26.56	<i>Turun</i>
H	Transportasi dan Pergudangan	8.52	9.25	10.64	11.25	11.41	<i>Naik</i>
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.47	4.62	4.56	4.74	4.90	<i>Naik</i>
J	Informasi dan Komunikasi	8.97	9.05	9.29	9.71	10.11	<i>Naik</i>
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.72	5.80	5.71	5.82	5.89	<i>Naik</i>
L	Real Estate	1.29	1.24	1.16	1.11	1.10	<i>Turun</i>
M,N	Jasa Perusahaan	0.76	0.77	0.76	0.75	0.76	<i>Turun</i>

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016**	2017***	Trend
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.15	2.97	2.82	2.68	2.68	<i>Turun</i>
P	Jasa Pendidikan	3.24	3.26	3.22	3.22	3.32	<i>Turun</i>
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.94	1.00	1.03	1.07	1.08	<i>Naik</i>
R,S,T, U	Jasa lainnya	3.26	3.37	3.33	3.45	3.60	<i>Naik</i>
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

### 3) PDRB Per Kapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu wilayah dengan jumlah penduduk tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tingkat pendapatan penduduk Kota Bandung perkapita pada tahun 2013 mencapai Rp 61,74 juta terus meningkat menjadi Rp.96,12 juta pada tahun 2017. Namun demikian bila diperhatikan peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita tersebut mengalami perlambatan dari 14,35% pada tahun 2013 menjadi 10,42% pada tahun 2017.

Sama halnya dengan ADHB berlaku per kapita, dari tahun 2012 sampai dengan 2016 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita yang diterima oleh penduduk Kota Bandung menunjukkan peningkatan, dari Rp 48,94 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 69,20 juta pada tahun 2017. Dari sisi pertumbuhan, Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita bersifat fluktuasi, dari 7,21% pada tahun 2013, mengalami perlambatan menjadi 7,18 persen pada tahun 2014-2015, dan kemudian naik kembali pada tahun 2017 sebesar 7,38%.

**Tabel 3.6**  
**Pendapatan Per Kapita Kota Bandung Tahun 2013 – 2017**  
**(dalam Juta Rupiah Per Kapita)**

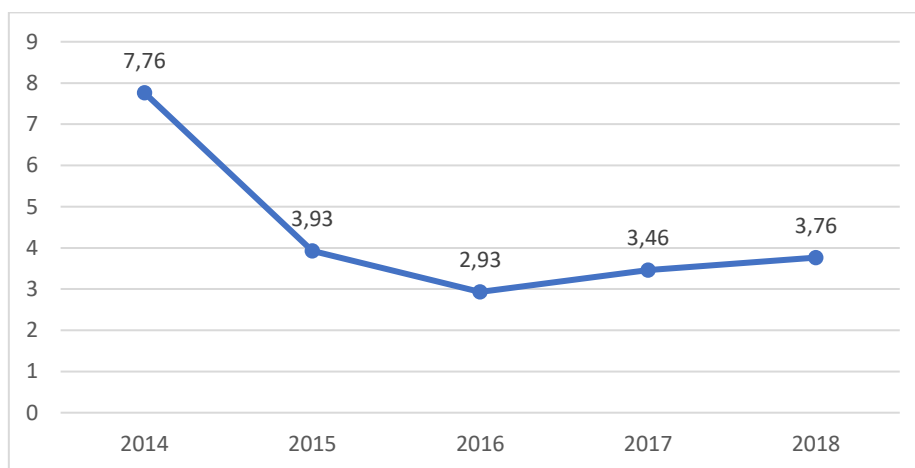
No.	Tahun	2013	2014	2015*	2016**	2017***
1.	ADH Berlaku per Kapita (Juta Rp)	61.74	69.90	78.92	87.14	96,12
2.	Pertumbuhan (%)	14.35	13.21	12.90	10.42	10.42
3.	ADH Konstan 2010 per Kapita (Juta Rp)	52.47	56.24	60.28	64.73	69.20
4.	Pertumbuhan (%)	7.21	7.18	7.18	7.38	7.38

Sumber: BPS Kota Bandung, 2018

#### 4) Inflasi

Tingkat inflasi Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 secara umum mengalami fluktuasi yang cenderung terkendali, setelah mencapai nilai yang cukup tinggi pada tahun 2014. Tercatat pada tahun 2014 inflasi Kota Bandung mencapai 7,76% (yoy), kemudian mengalami penurunan cukup jauh menjadi 3,93% (yoy) pada tahun 2015, kemudian turun lagi pada tahun 2016 mencapai 2,93 persen (yoy). Kemudian pada dua tahun terakhir yakni 2017 dan 2018 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan masing-masing menjadi 3,46 persen (yoy) dan 3,76 persen (yoy).

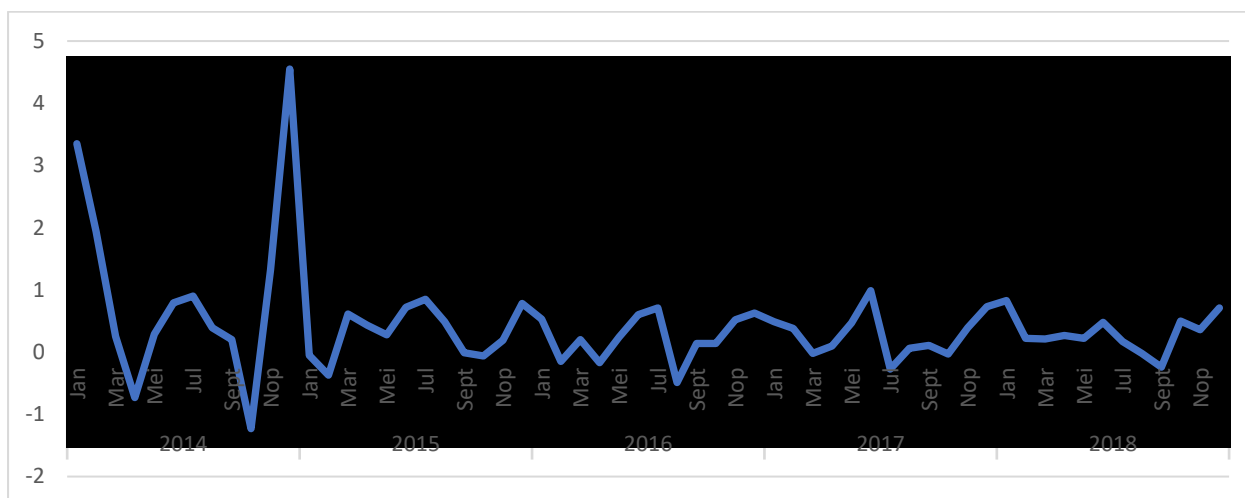
**Gambar 3.15**  
**Inflasi Tahunan Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Kota Bandung, 2019



**Gambar 3.16**  
**Inflasi Bulanan Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 (dalam Persen)**



Sumber: BPS Kota Bandung, 2017

## 5) Indikator Makro

Indikator makro pembangunan secara umum merupakan dampak secara langsung dan tidak langsung dari adanya penyelenggaraan pemerintah Kota Bandung. Secara umum indikator makro di Kota Bandung menunjukkan peningkatan baik secara material maupun non material. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung pada tahun 2018 meningkat menjadi 81,06% dari tahun 2017 yang hanya sebesar 80,31 persen. Kemudian pada tingkat kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2018 menurun dari 103,98 ribu penduduk miskin menjadi 89,38 ribu penduduk miskin atau persentase penduduk miskin menurun dari 4,17 persen menjadi 3,57 persen. Maka dengan kata lain bahwa pada tahun 2017 terjadi pengurangan penduduk miskin di Kota Bandung.

**Tabel 3.7**  
**Indikator Makro Kota Bandung**  
**Tahun 2014 – 2018**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	IPM	Poin	78,98	79,67	80,13	80,31	81,06
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,51	10,52	10,58	10,59	10,63
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,33	13,63	13,89	13,90	14,18
4.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,80	73,82	73,84	73,86	74,00
5.	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	15,05	15,61	15,80	16,03	16,63

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
6.	LPE	%	7,72	7,64	7,79	7,21	N/A
7.	PDRB (Berlaku)	Milyar Rp	172,69	195,84	217,04	240,11	N/A
8.	PDRB per Kapita (Berlaku)	Juta Rp	69,87	78,91	87,14	96,12	N/A
9.	PDRB (Konstan)	Milyar Rp	138,96	149,58	161,23	172,85	N/A
10.	PDRB per Kapita (Konstan)	Juta Rp	56,22	60,27	64,73	69,2	N/A
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,05	9,02	9,02	8,44	8,01
12.	Inflasi	%	7,76	3,93	2,93	3,46	3,76
13.	Tingkat Kemiskinan	%	4,65	4,61	4,32	4,17	3,57
14.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	115	114,10	107,57	103,98	89,38
15.	Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini)	Rasio	0,48	0,44	0,44	0,43	0,42

Sumber: BPS Kota Bandung, 2019

## 3.2. ASUMSI DASAR KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.2.1. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020

Berdasarkan kondisi ekonomi global, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan kebijakan ekonomi diantaranya :

**Pertama,** Menghadapi tahun politik Tahun 2020, pada umumnya dunia usaha lebih cenderung “*wait and see*” dan lebih fokus pada konsolidasi bisnis dibanding ekspansi, kondisi ini sudah berlangsung dari Tahun 2018.

**Kedua,** laju pertumbuhan penduduk diupayakan dapat ditekan di bawah angka 1,45 %. Untuk itu diperlukan optimalisasi pengendalian laju pertumbuhan alami dan pengendalian laju pertumbuhan migrasi terutama migrasi masuk, sebagai salah satu upaya preventif untuk mengurangi masalah sosial ekonomi yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk yang dikarenakan luas wilayah kota yang terbatas.

**Ketiga**, Reformulasi regulasi di berbagai kementerian dan lembaga. Di tingkat pusat dan daerah akan memberikan keyakinan dan dampak signifikan pada minat berinvestasi. Integrasi sistem perizinan dan kemudahan berusaha akan mempermudah aktivitas ekonomi. Percepatan reformasi struktural yang terjadi akan meningkatkan produktivitas perekonomian.

**Keempat**, percepatan pertumbuhan bangkitan ekonomi, stabilitas politik dan keamanan yang terjaga, perkembangan usaha yang kompetitif, kreatif dan produktif, kesiapan dan distribusi sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang memadai, serta meningkatnya dukungan partisipasi masyarakat dan investasi serta perlunya pemantapan sinergitas pada wilayah Bandung Raya yang akan memberikan nilai positif peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

**Kelima**, jumlah kemiskinan mencapai 4.17 %, menjadikan beban tersendiri dalam memberikan jaring pengaman sosial khususnya bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

**Keenam**, meningkatnya ketimpangan yang ditandai dengan kenaikan angka indeks gini rasio sebesar 0.44 menjadikan Pemerintah Kota Bandung harus mengambil langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan ekonomi dengan fokus pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah.

Secara umum, kebijakan untuk merespon tantangan dan prospek perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung diantaranya Meningkatkan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan komoditas utama masyarakat; meningkatkan kerjasama penyediaan bahan pangan dengan lembaga/perusahaan pemasok bahan pangan untuk memenuhi kecukupan gizi masyarakat; **Peningkatan peran Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan**, dengan meningkatkan jumlah komunitas dan klaster IKM berbasis industri kreatif dan pelaku usaha kreatif, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan membangun sistem pengawasan pajak sebagai sistem pengendalian internal yang handal, meningkatkan kompetensi dan integritas petugas pelayanan pajak, membangun sistem pelayanan publik

dalam manajemen pajak daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel, menyediakan sistem informasi pelayanan perpajakan yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi manajemen pajak daerah *online*, Intensifikasi penerimaan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan retribusi daerah; **Peningkatan kemudahan perizinan dan nilai investasi**, dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi antar *stakeholder* penanaman modal melalui (a) Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kota Bandung dengan Investor, (b) Pembentukan dan penguatan *Task Force* atau representasi *Promotion Business Centre* dalam menangani pangsa dan peluang investasi, Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayan perizinan; **Peningkatan Kesempatan Kerja**, dengan pemberian kesempatan memperoleh pelatihan peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja, mengupayakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan tenaga kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan baru, Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja, Penciptaan lapangan pekerjaan baru dengan mengembangkan koperasi, Penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor industri kecil dan menengah, menciptakan wirausaha baru, dengan memfasilitasi wirausaha pemula, dicapai melalui Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, dengan Perangkat Daerah Utama.

**Tabel 3.8**  
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Bandung Tahun 2020**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Target 2020
1.	IPM	Poin	81,06	80,60	80,70
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,63	N/A	N/A
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,18	14,00	14,01
4.	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,00	73,90	73,92
5.	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	16,63	16,370	16,584
6.	LPE	%	N/A	7,36	7,51

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2018	Target 2019	Target 2020
7.	PDRB (Berlaku)	Milyar Rp	N/A	297,049	328,814
8.	PDRB per Kapita (Berlaku)	Juta Rp	N/A	70,73	73,38
9.	PDRB (Konstan)	Milyar Rp	N/A	197,924	211,214
10.	PDRB per Kapita (Konstan)	Juta Rp	N/A	N/A	N/A
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,01	8,39	8,34
12.	Inflasi	%	3,76	3,87	3,73
13.	Tingkat Kemiskinan	%	3,57	3,83	3,66
14.	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Orang	89,38	96,13	92,03
15.	Ketimpangan Pendapatan (Koefisien Gini)	Rasio	0,42	0,44	0,43

Sumber: BPS Kota Bandung, 2019

### 3.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Bandung Tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi Tahun 2019 dan 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan RKPD) Kota Bandung Tahun 2020, merupakan rencana pada tahun kedua Kepala Daerah periode 2018-2023 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung tahap IV. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat tergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan yang disepakati.

Rancangan RKPD Kota Bandung Tahun 2020, fokus pada target kinerja periode RPJMD Tahun 2018-2023 yang masih belum tercapai serta permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Tahun 2020, serta berpedoman pada tahap ke 4 RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 .

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas *Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah*.

Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumberdaya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah

dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2018, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kota Bandung.

### **3.2.3. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung pada tahun 2020 masing-masing mencapai Rp6.053.390.902.678,41 dan Rp6.509.221.486.380,54. Kemudian anggaran APBD tahun 2019 masing-masing mencapai Rp6.552.675.658.887,08 dan Rp7.121.331.712.722,25. Pendapatan turun sebesar 7,62 persen dari pendapatan tahun sebelumnya dan belanja turun sekitar 8,60 persen dari belanja tahun sebelumnya, karena belum memasukan pendapatan yang besumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### **3.2.3.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari Rp5.685.213.859.929,00 pada tahun 2016, meningkat menjadi Rp5.735.006.649.088,00 pada tahun 2017, dan meningkat lagi menjadi Rp5.939.997.423.418,00 pada tahun 2018. Dilihat dari proporsinya, perbandingan realisasi sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah masing-masing adalah sebagai berikut: pada tahun 2016 sebesar 37,87%, 42,98% dan 19,15%, sementara pada tahun 2017 sebesar 44,96%, 39,94%, dan 15,10%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 43,29%, 40,86%, dan 15,84%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 mencapai Rp2.152.755.704.962,00, meningkat menjadi Rp2.578.457.420.885,00 pada tahun 2017, dan mengalami penurunan menjadi Rp2.571.591.786.199,00 pada tahun 2018. Realisasi Dana

Perimbangan mencapai Rp2.443.763.935.834,00 pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi Rp2.290.752.638.595,00 pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi Rp2.427.237.815.833,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah mengalami fluktuasi dari Rp1.088.694.219.133,00 pada tahun 2016, turun menjadi Rp865.796.589.608,00 pada tahun 2017, dan kembali naik menjadi Rp941.167.821.386,00 pada tahun 2018.

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 2,23%, dengan pertumbuhan tertinggi didapat pada pendapatan pajak daerah sebesar 13,26%, dan pertumbuhan terendah didapat pada bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar (25,53%), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 3.9**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandung**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016* (Rp)	Realisasi Tahun 2017* (Rp)	Realisasi Tahun 2018* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.685.213.859.929</b>	<b>5.735.006.649.088</b>	<b>5.939.997.423.418</b>	<b>2,23</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.152.755.704.962</b>	<b>2.578.457.420.885</b>	<b>2.571.591.786.199</b>	<b>9,75</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.709.807.582.556	2.175.084.126.326	2.160.150.277.316	13,26
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	92.006.779.460	50.064.557.334	69.134.407.113	(3,75)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.658.411.624	11.279.072.122	10.771.957.542	0,66
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	340.282.931.322	342.029.665.103	331.535.144.228	(1,28)
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.443.763.935.834</b>	<b>2.290.752.638.595</b>	<b>2.427.237.815.833</b>	<b>(0,15)</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	293.628.719.200	275.473.874.557	297.754.381.674	0,95
4.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	22.024.549.634	26.593.543.094	23.969.468.586	5,44
4.2.3	Dana Alokasi Umum	1.672.456.589.000	1.643.076.905.000	1.643.076.905.000	(0,88)
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	455.654.078.000	345.608.315.944	462.437.060.573	4,83
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>1.088.694.219.133</b>	<b>865.796.589.608</b>	<b>941.167.821.386</b>	<b>(5,88)</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	269.620.301.234	20.573.000.000	43.554.000.000	9,67



No	Uraian	Realisasi Tahun 2016* (Rp)	Realisasi Tahun 2017* (Rp)	Realisasi Tahun 2018* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	742.941.917.490	785.519.486.817	855.508.409.459	7,32
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.132.000.409	59.704.102.791	42.105.411.927	(25,53)

Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2016, 2017, 2018 (Audited)

Sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya selama periode tahun 2016 s.d tahun 2018 berasal dari pendapatan pajak daerah, dengan proporsi setiap tahunnya sebesar 30,07% pada tahun 2016, 37,93% pada tahun 2017, dan 36,37% pada tahun 2018. Proporsi tersebut diperoleh dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam setiap tahun anggaran dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenan.

**Tabel 3.10**  
**Persentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Bandung**

No	Uraian	Tahun		
		2016* (%)	2017* (%)	2018* (%)
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>37,87</b>	<b>44,96</b>	<b>43,29</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30,07	37,93	36,37
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1,62	0,87	1,16
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,19	0,20	0,18
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,99	5,96	5,58
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>42,98</b>	<b>39,94</b>	<b>40,86</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5,16	4,80	5,01
4.2.2	BH Bukan Pajak (SDA)	0,39	0,46	0,40
4.2.3	Dana Alokasi Umum	29,42	28,65	27,66
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	8,01	6,03	7,79

No	Uraian	Tahun		
		2016* (%)	2017* (%)	2018* (%)
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>19,15</b>	<b>15,10</b>	<b>15,84</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	4,74	0,36	0,73
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13,07	13,70	14,40
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8,01	6,03	0,71
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2016, 2017, 2018 (Audited)

Perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yang didapat dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dalam APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 3.11**  
**Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Kota Bandung**

No	Uraian	Kinerja		
		2016* (%)	2017* (%)	2018* (%)
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>85,06</b>	<b>90,38</b>	<b>86,70</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>77,79</b>	<b>85,50</b>	<b>75,69</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	78,20	90,62	81,70
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44,93	19,06	30,06
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53,29	56,40	16,10
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95,53	102,69	72,64
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>87,72</b>	<b>94,81</b>	<b>95,29</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	108,55	84,38	76,27
4.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	106,23	116,65	118,78
4.2.3	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	55,41	81,54	93,68
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>96,28</b>	<b>94,78</b>	<b>103,82</b>

No	Uraian	Kinerja		
		2016* (%)	2017* (%)	2018* (%)
4.3.1	Pendapatan Hibah	99,77	77,60	62,22
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96,46	98,42	107,81
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	84,24	67,19	97,89

Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2016, 2017, 2018 (Audited)

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada beberapa regulasi, yaitu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019 (2) Proyeksi pendapatan berdasarkan RPJPD (3) Proyeksi pendapatan berdasarkan RPJMD serta (4) proyeksi pendapatan berdasarkan hasil kajian. Pada penyusunan RKPD Tahun 2020 dasar proyeksi pendapatan yang digunakan adalah Perda RPJMD tahun kedua, selain itu juga memperhatikan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kapasitas pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Bandung.

Pada tahun 2019, pendapatan daerah ditargetkan pada nilai Rp6.552.675.658.887,08, dengan komposisi sumber pendapatan Rp3.055.014.614.374,75 dari Pendapatan Asli Daerah, Rp2.535.287.328.333,33 dari Dana Perimbangan, dan Rp962.373.716.179,00 dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Sementara itu, untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2020, diperkirakan mencapai angka Rp6.053.390.902.678,41 turun sebesar 7,62 persen dari pendapatan tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan adanya koreksi terhadap proyeksi pendapatan Tahun 2019 yang dinilai terlalu tinggi, sehingga pada tahun 2020 ini dilakukan perhitungan ulang berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing komponen pendapatan daerah. Penentuan proyeksi yang didasarkan pada potensi riil masing-masing komponen pendapatan ini diharapkan dapat lebih realistis untuk dicapai. Proyeksi pendapatan daerah Kota Bandung pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp6.053.390.902.678,41 yang berasal dari sektor Pajak Rp2.522.552.659.693,00, Retribusi Rp71.127.268.961,00,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp24.952.800.000,00, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp504.342.787.082,00, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp438.255.234.451,41, Dana Alokasi Umum Rp1.643.076.905.000,00, dan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp849.083.247.491,00.

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Kota Bandung**

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.053.390.902.678,41</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.122.975.515.736,00</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.522.552.659.693,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	71.127.268.961,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.952.800.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	504.342.787.082,00
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.081.332.139.451,41</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak	438.255.234.451,41
4.2.3	Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000,00
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>849.083.247.491,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	849.083.247.491,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00

*Sumber: Hasil Analisa 2019*

Keterangan lebih lanjut mengenai rincian realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandung**  
**Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018*	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.735.006.649.088</b>	<b>5.939.997.423.418</b>	<b>6.552.675.658.887,08</b>	<b>6.053.390.902.678,41</b>	<b>6.289.362.308.040,61</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.578.457.420.885</b>	<b>2.571.591.786.199</b>	<b>3.055.014.614.374,75</b>	<b>3.122.975.515.736,00</b>	<b>3.268.833.227.361,00</b>
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.175.084.126.326	2.160.150.277.316	2.436.311.729.897,75	2.522.552.659.693,00	2.691.062.135.340,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	50.064.557.334	69.134.407.113	135.564.168.477,00	71.127.268.961,00	78.763.712.768,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.279.072.122	10.771.957.542	80.040.000.000,00	24.952.800.000,00	25.929.496.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	342.029.665.103	331.535.144.228	403.098.716.000,00	504.342.787.082,00	473.077.883.253,00
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.290.752.638.595</b>	<b>2.427.237.815.833</b>	<b>2.535.287.328.333,33</b>	<b>2.081.332.139.451,41</b>	<b>2.112.010.005.863,01</b>
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	302.067.417.651	321.723.850.260	339.361.364.333,33	438.255.234.451,41	468.933.100.863,01
4.2.3	Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000	1.643.076.905.000	1.695.146.944.000,00	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00
4.2.4	Dana Alokasi Khusus	345.608.315.944	462.437.060.573	500.779.020.000,00	0,00	0,00
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>865.796.589.608</b>	<b>941.167.821.386</b>	<b>962.373.716.179,00</b>	<b>849.083.247.491,00</b>	<b>908.519.074.816,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	20.573.000.000	43.554.000.000	100.000.000.000,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	785.519.486.817	855.508.409.459	862.373.716.179,00	849.083.247.491,00	908.519.074.816,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0,00	0,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	59.704.102.791	42.105.411.927	0	0,00	0,00

Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2017 dan 2018 (Audited)

\*\* Data Penetapan APBD 2019 (tahun berjalan)

\*\*\* Data Proyeksi/Target APBD 2020 dan 2021

Rancangan RKPD Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan penetapan target pada beberapa komponen pendapatan antara yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 dengan yang diproyeksikan dalam Rancangan RKPD tahun 2020, hal ini menyebabkan terdapat selisih antara proyeksi RPJMD dan proyeksi Rancangan RKPD. Proyeksi pendapatan tahun 2020 pada RKPD lebih rendah dibandingkan yang termuat dalam RPJMD tahun 2020, hal ini disebabkan komponen DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksi nol.

**Tabel 3.14**  
**Proyeksi/Target Penerimaan Daerah Kota Bandung**

No	Uraian	Proyeksi RPJMD 2018-2023 (Rp)	Proyeksi RANCANGAN RKPD 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
<b>A</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>6.417.323.951.787,41</b>	<b>6.053.390.902.678,41</b>	<b>(363.933.049.109,00)</b>
<b>A.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.068.092.487.054,00</b>	<b>3.122.975.515.736,00</b>	<b>54.883.028.682,00</b>
	Pajak Daerah	2.522.552.659.693,00	2.522.552.659.693,00	0,00
	Retribusi Daerah	68.517.268.961,00	71.127.268.961,00	2.610.000.000,00
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	24.952.800.000,00	24.952.800.000,00	0,00
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	452.069.758.400,00	504.342.787.082,00	52.273.028.682,00
<b>A.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.440.444.114.451,41</b>	<b>2.081.332.139.451,41</b>	<b>(359.111.975.000,00)</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	438.255.234.451,41	438.255.234.451,41	0,00
	Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus	359.111.975.000,00	0,00	(359.111.975.000,00)
<b>A.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>908.787.350.282,00</b>	<b>849.083.247.491,00</b>	<b>(59.704.102.791,00)</b>
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	849.083.247.491,00	849.083.247.491,00	0,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	59.704.102.791,00	0,00	(59.704.102.791,00)
	Total Pendapatan (A)	<b>6.417.323.951.787,41</b>	<b>6.053.390.902.678,41</b>	<b>(363.933.049.109,00)</b>
<b>B</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pencairan Dana Cadangan	0	0,00	0,00

No	Uraian	Proyeksi RPJMD 2018-2023 (Rp)	Proyeksi RANCANGAN RKPD 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang dipisahkan	0	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00
	Pengembalian Utang	0	0,00	0,00
	Penerimaan Piutang	0	0,00	0,00
	Jumlah (B)	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Proyeksi Silpa Riil</b>	<b>712.160.730.316,95</b>	<b>455.830.583.702,13</b>	<b>(256.330.146.614,82)</b>
	Saldo Khas Neraca Daerah	712.160.730.316,95	455.830.583.702,13	(256.330.146.614,82)
	Dikurangi:	0	0,00	0,00
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	0	0,00	0,00
	Kegiatan lanjutan	0	0,00	0,00
	Jumlah (C)	<b>712.160.730.316,95</b>	<b>455.830.583.702,13</b>	(256.330.146.614,82)
	<b>Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (A) + (B) + (C)</b>	<b>7.129.484.682.104,36</b>	<b>6.509.221.486.380,54</b>	<b>(620.263.195.723,82)</b>

Mencermati pertumbuhan pendapatan daerah, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Bandung Tahun 2020 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta koordinasi untuk meningkatkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat maupun propinsi Jawa Barat. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada Tahun 2020, maka upaya meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung diarahkan pada:

- Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menerapkan sistem on-line penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
- Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah serta aparat kewilayahan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
- Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;

- f. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;
- g. Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagai alternatif pendanaan terutama untuk pendanaan Infrastruktur;
- h. Mengembangkan *networking* dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Bandung Tahun 2020 yang perlu dilaksanakan antara lain:

- 1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Penguatan data basis pajak daerah Kota Bandung (*by name by address*);
  - c. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
  - d. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional;
  - e. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat, yaitu melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
  - f. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
  - g. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;



- h. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan
    - a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21;
    - b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
    - c. Meningkatkan akurasi data Potensi dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
    - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
  3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui:
    - a. peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), serta *Corporate Social Responsibility* (CSR).
    - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Bandung melalui kemudahan pelayanan jemput bola untuk penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak.
    - c. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah provinsi dan pajak daerah.

### **3.2.3.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung dan penunjang. Belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan tidak terduga;
2. Belanja Langsung yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kota Bandung mengalami fluktuasi dari Rp5.830.413.719.644,00 pada tahun 2016, turun menjadi Rp5.541.718.107.062,75 pada tahun 2017, kemudian naik menjadi Rp6.114.449.093.123,40 pada tahun 2018. Dilihat dari proporsinya, perbandingan alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dengan Belanja Langsung (BL) adalah sebagai berikut: pada tahun 2016 sebesar 43,84% (BTL) dan 56,16% (BL), pada tahun 2017 sebesar 48,52% (BTL) dan 51,48% (BL), sementara pada tahun 2018 menjadi 49,91% (BTL) dan 50,09% (BL).

Realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2016 mencapai Rp2.556.095.241.401,00 naik pada tahun 2017 menjadi Rp2.688.859.297.531,00, dan meningkat lagi menjadi Rp3.051.422.896.853,00 pada tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi Belanja Langsung mencapai Rp3.274.318.478.243,00 pada tahun 2016 turun menjadi Rp2.852.795.995.381,75 pada tahun 2017, kemudian meningkat lagi menjadi Rp3.063.026.196.270,40 pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, belanja daerah ditetapkan pada nilai Rp7.121.331.712.722,25, dengan komposisi Rp3.226.341.577.041,95 untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp.3.894.990.135.680,30 untuk Belanja Langsung.

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah adalah sebesar 5,63%, dengan pertumbuhan tertinggi didapat pada Belanja Tidak Terduga sebesar 937,42%, dan pertumbuhan terendah didapat pada Belanja Subsidi sebesar (100,00%), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 3.15**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kota Bandung**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2016* (Rp)	Realisasi Tahun 2017* (Rp)	Realisasi Tahun 2018* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	Belanja Pegawai	2.275.389.581.281	2.337.405.976.085,00	2.536.996.464.878,00	5,63
2.	Belanja Bunga	0	0	0	0
3.	Belanja Subsidi	128.532.390.000	0	108.825.685.200,00	(100,00)
4.	Belanja Hibah	151.250.782.000	350.206.704.601,00	402.404.804.575,00	73,22
5.	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	900.741.220	900.741.220,00	1.520.608.500,00	34,41
7.	Belanja Tidak Terduga	21.746.900	345.875.625,00	1.675.333.700,00	937,42
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.556.095.241.401</b>	<b>2.688.859.297.531,00</b>	<b>3.051.422.896.853,00</b>	<b>9,34</b>

*Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2016, 2017, 2018 (Audited)*

Perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2020, diperkirakan mencapai angka Rp.6.509.221.486.380,54 dengan komposisi Rp.2.955.051.785.309,76 untuk Belanja Tidak Langsung, dan Rp.3.554.169.701.070,78 untuk Belanja Langsung.

**Tabel 3.16**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kota Bandung**

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>6.509.221.486.380,54</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.955.051.785.309,76</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.654.898.388.895,76
5.1.2	Belanja Bunga	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	139.153.204.134,00
5.1.4	Belanja Hibah	149.282.835.500,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pem. Desa Lainnya	1.717.356.780,00

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.554.169.701.070,78</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	n.a
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	n.a
5.2.3	Belanja Modal	n.a

Atas perhitungan proyeksi belanja daerah tahun 2020 tersebut, kemudian dilakukan pembagian pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 3.17**  
**Rincian Proyeksi Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun 2020**

No.	PERANGKAT DAERAH	Tahun 2020
<b>1</b>	Dinas Pendidikan	546.777.506.019,17
<b>2</b>	Dinas Kesehatan	733.697.660.486,49
<b>3</b>	Dinas Pekerjaan Umum	473.097.838.271,99
<b>4</b>	Dinas Penatan Ruang	29.993.201.053,70
<b>5</b>	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan	302.973.999.252,40
<b>6</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	30.484.949.407,00
<b>7</b>	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	31.877.994.788,97
<b>8</b>	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	28.189.964.100,00
<b>9</b>	Dinas Tenaga Kerja	24.671.184.688,00
<b>10</b>	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	12.567.632.465,75
<b>11</b>	Dinas Pangan dan Pertanian	30.161.007.863,17
<b>12</b>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	144.442.644.589,80
<b>13</b>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.642.213.319,00
<b>14</b>	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.558.768.957,50
<b>15</b>	Dinas Perhubungan	186.821.616.073,00
<b>16</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.273.533.100,00
<b>17</b>	Dinas Koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	12.271.779.234,07

No.	PERANGKAT DAERAH	Tahun 2020
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.998.924.790,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	41.066.941.651,32
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	40.094.547.900,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.924.480.050,00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	29.214.773.341,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	14.591.226.468,43
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	14.782.107.417,25
25	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	24.417.975.159,25
27	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan	24.816.198.062,25
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00
29	Sekretariat Daerah	167.971.294.565,00
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
31	Sekretariat DPRD	46.966.000.549,35
32	Inspektorat	32.775.418.870,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.050.515.530,25
34	Kecamatan Sukasari	10.738.7003.424,45
35	Kecamatan Cidadak	9.285.067.872,25
36	Kecamatan Sukajadi	14.297.647.879,00
37	Kecamatan Cicendo	16.366.532.890,75
38	Kecamatan Andir	15.695.013.366,00
39	Kecamatan Coblong	19.926.330.621,30
40	Kecamatan Bandung Wetan	9.866.098.521,00
41	Kecamatan Sumur Bandung	10.688.347.354,60
42	Kecamatan Cibeunying Kidul	22.088.730.012,68
43	Kecamatan Cibeunying Kaler	12.809.036.345,00
44	Kecamatan Astana Anyar	13.976.816.569,04
45	Kecamatan Bojongloa Kaler	14.119.699.225,00
46	Kecamatan Bojongloa Kidul	15.389.518.692,75
47	Kecamatan Babakan Ciparay	16.552.633.854,00
48	Kecamatan Bandung Kulon	20.977.036.596,00

No.	PERANGKAT DAERAH	Tahun 2020
49	Kecamatan Regol	17.302.655.535,00
50	Kecamatan Lengkong	18.239.006.689,00
51	Kecamatan Batununggal	22.419.063.919,00
52	Kecamatan Ujungberung	15.803.005.935,00
53	Kecamatan Kiaracondong	22.234.950.069,17
54	Kecamatan Arcamanik	13.813.944.674,00
55	Kecamatan Cibiru	14.060.689.048,90
56	Kecamatan Antapani	15.743.732.915,20
57	Kecamatan Rancasari	14.461.004.018,98
58	Kecamatan Buahbatu	15.257.308.790,00
59	Kecamatan Bandung Kidul	11.343.613.370,00
60	Kecamatan Gedebage	12.390.793.288,00
61	Kecamatan Panyileukan	11.105.271.659,00
62	Kecamatan Cinambo	16.709.293.941,00
63	Kecamatan Mandalajati	14.334.255.970,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.554.169.701.070,78</b>

Perkembangan realisasi dan proyeksi belanja dalam kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.18**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kota Bandung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018*	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
5	<b>Belanja</b>	<b>5.541.655.292.912</b>	<b>6.114.449.093.123,40</b>	<b>7.121.331.712.722,25</b>	<b>6.509.221.486.380,54</b>	<b>6.586.107.664.346,66</b>
5.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.688.859.297.531</b>	<b>3.051.422.896.853,00</b>	<b>3.226.341.577.041,95</b>	<b>2.955.051.785.309,76</b>	<b>3.178.475.607.280,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.337.405.976.085	2.536.996.464.878,00	2.909.152.769.690,95	2.654.898.388.895,76	2.903.740.000.000,00
5.1.2	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0	108.825.685.200,00	108.825.685.200,00	139.153.204.134,00	56.438.250.500,00
5.1.4	Belanja Hibah	350.206.70.601	402.404.804.575,00	196.470.565.700,00	149.282.835.500,00	200.050.000.000,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018*	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota dan Pem. Desa Lainnya	900.741.220,00	1.520.608.500,00	1.500.000.000,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	345.875.625,00	1.675.333.700,00	10.392.556.451,00	10.000.000.000,00	16.530.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.852.795.995.381</b>	<b>3.063.026.196.270,40</b>	<b>3.894.990.135.680,30</b>	<b>3.554.169.701.070,78</b>	<b>3.407.632.056.966,66</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	n.a	n.a	254.937.013.787,59	n.a	n.a
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	n.a	n.a	2.511.421.501.941,55	n.a	n.a
5.2.3	Belanja Modal	n.a	n.a	1.128.631.619.951,16	n.a	n.a

Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2017, 2018 (Audited)

\*\* Data Penetapan APBD 2019 (tahun berjalan)

\*\*\* Data Proyeksi/Target APBD 2020 dan 2021

Rancangan RKPD Tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD 2018-2023. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan penetapan target pada beberapa komponen belanja antara yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 dengan yang diproyeksikan dalam Rancangan RKPD tahun 2020, hal ini menyebabkan akan terdapat selisih antara proyeksi RPJMD dan proyeksi Rancangan RKPD. Perbedaan besaran proyeksi belanja tahun 2020 pada RKPD lebih rendah dibandingkan yang termuat dalam RPJMD tahun 2020, hal ini disebabkan antara lain ada penurunan beberapa komponen belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja hibah, serta belanja tidak terduga) menjadi lebih rasional yang didasarkan pada realisasi tahun-tahun sebelumnya. Belanja langsung tahun 2020 juga mengalami penurunan, terutama belanja yang bersumber dari DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebagai akibat pendapatan dari komponen DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksi nol.

**Tabel 3.19**  
**Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bandung**

No	Uraian	Proyeksi RPJMD 2019-2023 (Rp)	Proyeksi Rancangan RKPD 2020 (Rp)	Selisih (Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.028.283.041.980,00</b>	<b>2.955.051.785.309,76</b>	<b>(73.231.256.670,24)</b>
1.	Belanja Pegawai	2.701.160.000.000,00	2.654.898.388.895,76	(46.261.611.104,24)
2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
3.	Belanja Subsidi	108.825.685.200,00	139.153.204.134,00	30.327.518.934,00
4.	Belanja Hibah	200.050.000.000,00	149.282.835.500,00	(50.767.164.500,00)
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00	0,00
7.	Belanja Tidak Terduga	16.530.000.000,00	10.000.000.000,00	(6.530.000.000,00)
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.101.201.640.124,36</b>	<b>3.554.169.701.070,78</b>	<b>(547.031.939.053,58)</b>
<b>C</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>7.129.484.682.104,36</b>	<b>6.509.221.486.380,54</b>	<b>(620.263.195.723,82)</b>

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan belanja daerah Kota Bandung adalah berikut ini:

- a. Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2020
- b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
- c. Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020



Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan upaya sebagai berikut:

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelajaan yang proporsional, efisien dan efektif.

Kebijakan untuk belanja langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan Pendidikan, dan urusan Kesehatan;
2. Penganggaran belanja langsung untuk mewujudkan target kinerja sasaran daerah yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
4. Belanja untuk mengakomodir usulan Musrenbang dan reses
5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik Pemerintah Kota
6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

7. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat di kewilayahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
8. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya. Kebijakan ini terutama terkait Efisiensi Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Pengadaan Pakaian Dinas, serta Belanja Modal Barang Alat Kerja berupa pengadaan meubeuler, komputer serta laptop.
9. Selektif dalam mengakomodir usulan pengadaan Kendaraan Dinas menggunakan spesifikasi yang disesuaikan dengan standar eselonering melalui persetujuan Ketua TAPD.
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan terget kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
11. Melakukan analisis mengenai kesesuaian Program/Kegiatan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan
12. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; acress yang besarnya 7,5% untuk memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan

tunjangan kinerja dinamis (TKD) sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS pada belanja langsung.

2. Mengalokasikan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.
4. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

### **3.2.3.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pengertian pembiayaan menurut peraturan perundangan adalah sebagai berikut:

- Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (UU No.23/2014)
- Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus (Permendagri No.13/2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PermendagriNo. 21 Tahun 2011)

Istilah pembiayaan berbeda dengan pendanaan (*funding*). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Sisi pendapatan dari pembiayaan sebagai faktor penambah sisi penerimaan/pendapatan daerah dimana pos pembiayaan digunakan untuk menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang defisit.

Jenis pembiayaan daerah dapat dibedakan sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah;
- Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman.

Selanjutnya Pembiayaan Netto adalah selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit APBD.

Pada tahun 2020, perhitungan proyeksi pembiayaan daerah, diperkirakan berada pada nilai Rp.455.830.583.702,13, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 455.830.583.702,13 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp.0,00.

Berikut ini ditampilkan tabel mengenai perkembangan pembiayaan daerah.

**Tabel 3.20**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Kota Bandung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018*	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>408.505.992.689,00</b>	<b>408.240.534.714,25</b>	<b>568.656.053.835,17</b>	<b>455.830.583.702,13</b>	<b>296.745.356.206,64</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>532.128.992.689,00</b>	<b>601.195.062.912,00</b>	<b>779.006.053.835,17</b>	<b>455.830.583.702,13</b>	<b>296.745.356.206,64</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	532.128.992.689,00	601.195.062.912,00	779.006.053.835,17	455.830.583.702,13	296.745.356.206,64
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018*	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>123.623.000.000,00</b>	<b>193.554.000.000,00</b>	<b>210.350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	123.623.000.000,00	193.554.000.000,00	210.350.000.000,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2017, 2018 (Audited)

\*\* Data Penetapan APBD 2019 (tahun berjalan)

\*\*\* Data Proyeksi/Target APBD 2020 dan 2021

## 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi)

daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
- 2) Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut :
  - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
  - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/ kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

**Tabel 3.21**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**  
**Kota Bandung Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021**

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018**	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.735.006.649.088</b>	<b>5.939.997.423.418</b>	<b>6.552.675.658.887.08</b>	<b>6.053.390.902.678,41</b>	<b>6.289.362.308.040,61</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.578.457.420.885</b>	<b>2.571.591.786.199</b>	<b>3.055.014.614.374.75</b>	<b>3.122.975.515.736,00</b>	<b>3.268.833.227.361,00</b>
<b>4.1.1</b>	Pendapatan Pajak Daerah	2.175.084.126.326	2.160.150.277.316	2.436.311.729.897,75	2.522.552.659.693,00	2.691.062.135.340,00
<b>4.1.2</b>	Pendapatan Retribusi Daerah	50.064.557.334	69.134.407.113	135.564.168.477,00	71.127.268.961,00	78.763.712.768,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018**	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
<b>4.1.3</b>	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.279.072.122	10.771.957.542	80.040.000.000,00	24.952.800.000,00	25.929.496.000,00
<b>4.1.4</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	342.029.665.103	331.535.144.228	403.098.716.000,00	504.342.787.082,00	473.077.883.253,00
<b>4.2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.290.752.638.595</b>	<b>2.427.237.815.833</b>	<b>2.535.287.328.333,33</b>	<b>2.081.332.139.451,41</b>	<b>2.112.010.005.863,01</b>
<b>4.2.1</b>	Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	302.067.417.651	321.723.850.260	339.361.364.333,33	438.255.234.451,41	468.933.100.863,01
<b>4.2.3</b>	Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000	1.643.076.905.000	1.695.146.944.000,00	1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00
<b>4.2.4</b>	Dana Alokasi Khusus	345.608.315.944	462.437.060.573	500.779.020.000,00	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>865.796.589.608</b>	<b>941.167.821.386</b>	<b>962.373.716.179,00</b>	<b>849.083.247.491,00</b>	<b>908.519.074.816,00</b>
<b>4.3.1</b>	Pendapatan Hibah	20.573.000.000	43.554.000.000	100.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>4.3.2</b>	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	785.519.486.817	855.508.409.459	862.373.716.179,00	849.083.247.491,00	908.519.074.816,00
<b>4.3.3</b>	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	0,00	0,00
<b>4.3.4</b>	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	59.704.102.791	42.105.411.927	0	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>5.541.655.292.912</b>	<b>6.114.449.093.123,40</b>	<b>7.121.331.712.722,25</b>	<b>6.509.221.486.380,54</b>	<b>6.586.107.664.346,66</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.688.859.297.531</b>	<b>3.051.422.896.853,00</b>	<b>3.226.341.577.041,95</b>	<b>2.955.051.785.309,76</b>	<b>3.178.475.607.280,00</b>
<b>5.1.1</b>	Belanja Pegawai	2.337.405.976.085	2.536.996.464.878,00	2.909.152.769.690,95	2.654.898.388.895,76	2.903.740.000.000,00
<b>5.1.2</b>	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.3</b>	Belanja Subsidi	0	108.825.685.200,00	108.825.685.200,00	139.153.204.134,00	56.438.250.500,00
<b>5.1.4</b>	Belanja Hibah	350.206.70.601	402.404.804.575,00	196.470.565.700,00	149.282.835.500,00	200.050.000.000,00
<b>5.1.5</b>	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.6</b>	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/	900.741.220,00	1.520.608.500,00	1.500.000.000,00	1.717.356.780,00	1.717.356.780,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017*	Realisasi Tahun 2018**	Tahun Berjalan 2019**	Proyeksi/Target Tahun 2020***	Proyeksi/Target Tahun 2021***
	Kab/Kota dan Pem. Desa Lainnya					
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	345.875.625,00	1.675.333.700,00	10.392.556.451,00	10.000.000.000,00	16.530.000.000,00
5.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.852.795.995.381</b>	<b>3.063.026.196.270,40</b>	<b>3.894.990.135.680,30</b>	<b>3.554.169.701.070,78</b>	<b>3.407.632.056.966,66</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	n.a	n.a	254.937.013.787,59	n.a	n.a
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	n.a	n.a	2.511.421.501.941,55	n.a	n.a
5.2.3	Belanja Modal	n.a	n.a	1.128.631.619.951,16	n.a	n.a
6	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>408.505.992.689,00</b>	<b>408.240.534.714,25</b>	<b>568.656.053.835,17</b>	<b>455.830.583.702,13</b>	<b>296.745.356.206,64</b>
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>532.128.992.689,00</b>	<b>601.195.062.912,00</b>	<b>779.006.053.835,17</b>	<b>455.830.583.702,13</b>	<b>296.745.356.206,64</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	532.128.992.689,00	601.195.062.912,00	779.006.053.835,17	455.830.583.702,13	296.745.356.206,64
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>123.623.000.000,00</b>	<b>193.554.000.000,00</b>	<b>210.350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	123.623.000.000,00	193.554.000.000,00	210.350.000.000,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: \* Data Realisasi APBD Tahun 2017, 2018 (Audited)

\*\* Data Penetapan APBD 2019 (tahun berjalan)

\*\*\* Data Proyeksi/Target APBD 2020



## BAB 4

# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas memperlihatkan fokus pembangunan yang harus didahulukan dan diutamakan daripada yang lain didasarkan pada tingkat urgensi aspek tersebut dalam pembangunan. Upaya untuk memprioritaskan salah satu aspek pembangunan disebabkan karena adanya keterbatasan sumberdaya dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah yang pada gilirannya dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023; (2) Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2018 dan RKPD Tahun 2019; (3) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020; (4) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2020; dan (6) RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti terhadap NAWACITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.

- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada Tahun 2020,
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan Kota Bandung pada tahun 2020 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kedua RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD, dengan penjabaran sebagai berikut.

**Misi 1 “Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing” : Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata. dengan sasaran:**

- 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
- 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

**Misi 2 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” : Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima, dengan sasaran:**

- 1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

**Misi 3 “Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan”: Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal dengan sasaran:**

1. Meningkatnya perekonomian kota;
2. Menurunnya jumlah penduduk miskin;
3. Meningkatkan kesempatan kerja.

**Misi 4 "Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan" : Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan sasaran:**

1. Meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas;
3. Meningkatnya layanan air bersih;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung.

**Misi 5 "Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi" : Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta, dengan sasaran:**

1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan.

Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan jangka panjang, jangka menengah serta dengan memperhatikan evaluasi kinerja pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2019, maka tema pembangunan yang diusung pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**"Meningkatkan kehidupan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Perekonomian Kota dan Kualitas Infrastruktur yang Didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien"**

## 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2020 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode ke IV. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bandung memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

### 4.1.1 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, tema Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkualitas yang berfokus pada 5 Prioritas Nasional yang terdiri atas:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Target utama dari pembangunan nasional tahun 2020 dijabarkan dalam 5 target utama pembangunan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Pembangunan Tahun 2020**

No	Indikator	Skenario 2020
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 - 5,5
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,1
3	Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,0
4	Rasio Gini (indeks)	0,375 - 0,380
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5

Sumber: *Rancangan Awal RKP Tahun 2020, Bappenas, 2019*

#### 4.1.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dirumuskan secara komprehensif sebagai bagian dari pengejawantahan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Perwujudan visi melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. **Misi Pertama**, Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. **Misi Kedua**, Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. **Misi Ketiga**, Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. **Misi Keempat**, Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. **Misi Kelima**, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kelima misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Tujuan dan 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
2. Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran: (1) meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat (2) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan; (3) meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; (4) meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan; dan (5) meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional.
3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasiskan kearifan lokal dan seni budaya daerah, dengan sasaran: (1) meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal; (2) terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dan kenyamanan lingkungan sosial;
4. Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran: (1) meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok; (2) meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian; (3) meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan (4) terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan.
5. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan sasaran: (1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik; dan (3) meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.
6. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi, dengan sasaran: (1) Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan; (2) tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif; (3) meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas

perekonomian Jawa Barat; dan (4) meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.

7. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang *smart*, bersih dan akuntabel; dan (2) terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

Indikator kinerja tujuan, sasaran, kondisi capaian tahun lalu dan target tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2020
Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban				
1.1	Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)		69,1 - 69,5
1.1.1	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (persen)	69,1 - 69,5
		b.	Indeks Demokrasi (Poin)	70,79 - 71,78
Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif				
2.1	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan (Poin)		70-71
2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	a.	Indeks Kebahagiaan (Poin)	70-71
2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	a.	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,87 – 76,07
2.1.3.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Poin)	71
		b.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	89,82
2.1.4.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	a.	Rata–Rata lama sekolah (tahun)	8,39
		b.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,39
2.1.5.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan, Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Jawa Barat di Tingkat Nasional	a.	Indeks Pembangunan Pemuda (Poin)	56,31
2.2	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram berbasis kearifan lokal dan seni	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)		18,65

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2020
budaya daerah				
2.2.1	Meningkatnya pelestarian dan Pengembangan kebudayaan lokal	a.	Persentase Pemajuan Kebudayaan Jawa Barat (Persen)	18,65
2.2.2	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	a.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (poin)	70-71
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah				
3.1.	Terwujudnya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan		Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	44-46
3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	a.	Konsumsi listrik per kapita (Kwh/kapita)	1.340
3.1.2.	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a.	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (Persen)	44 - 46
3.1.3.	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a.	Indeks Desa Membangun (Poin)	0,66
3.1.4.	Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Pembangunan	a.	Usulan pembentukan Daerah persiapan otonomi baru (Usulan)	1
3.2.	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan		Indeks Lingkungan (IKLH) (Poin)	Kualitas Hidup 49,98
3.2.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	49,98
		b.	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	3,92
3.2.2.	Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	a.	Indeks Penggunaan Air (Poin)	1,1910
3.2.3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Poin)	164
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.				
4.1.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi		Produk Domestik Regional Bruto (ADHB) (Rp. Triliun)	2.471,85
4.1.1.	Jawa Barat sebagai daerah pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan yang mandiri	a.	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	83,2
		b.	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	115,36



TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET TAHUN 2020
4.1.2.	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif	a.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	3,01-3,15
4.1.3.	Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Jawa Barat	a.	Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	2,70
		b.	Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	3
4.1.4.	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (Triliun Rupiah)	520,17
		b.	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	22
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota				
5.1.	Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>whole of government</i>		Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	A
5.1.1.	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang <i>smart</i> , bersih dan akuntabel	b.	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	A
5.1.2.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.	a.	Tingkat efektivitas kerjasama Daerah (%)	60

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

#### 4.1.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

Berdasarkan hasil rewiu terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan provinsi Jawa Barat serta berpedoman terhadap RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, berikut merupakan penjabaran tujaun dan sasaran pembangunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

**Tabel 4.3**  
**Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja 2019	Target Kinerja 2020	PD Pengampu
<b>Misi 1: Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing</b>							
1.	<b>Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai agama dan budaya</b>	1.	Indeks pembangunan manusia	poin	80,31	80,50	80,70
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,90	14,00	14,01
		3.	Angka Kelulusan	Persenta se	100	100	100

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja 2019	Target Kinerja 2020	PD Pengampu
		4	Rata-rata Nilai Hasil ujian SD	Angka	76.72	76,78	76.76	
		5	Rata-rata Nilai Hasil ujian SMP	Angka	57.02	57,03	57.04	
	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	6	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,86	73,90	73,92	Dinkes, DPPKB
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih								
2.	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	100	60	100	
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		2.	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	A	A	Bappelitbang Inspektorat, SETDA,
		3.	Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		4.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	BPKA
		5.	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan baik	Persentase	51,61	60	70	DPMPTSP, Disdukcapil,
		6.	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Integrative	Diskominfo
Misi 3: Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan								
3	Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan	1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	7,21	-	7,51	
		2.	Indeks Gini	Poin	0.43	-	0.40	
	Meningkatnya perekonomian kota	3.	PDRB Perkapita	Juta Rp	69,20	70,73	73,38	Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan, DPMPTSP,
		4.	Indeks Daya Saing Pariwisata	poin	3,27	3,27	3,55	Disbudpar
		5.	Pengeluaran Per Kapita	Ribupiah/orang/tahun	16.156	16.156	16.584	Diskop UMKM, Disdagin, Dispangtan
	Meningkatkan kesempatan kerja	6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,44	8,44	8,34	Disnaker, Diskop UMKM ,Disbudpar, Dispora, Dispangtan
	Menurunnya jumlah penduduk miskin	7.	Angka Kemiskinan	%	4,17		3,66	Dinsosnangkis, Dispangtan, DPKP3, Disdik, Dinkes
Misi 4: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan								
4	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan	poin	73,27	73,37	73,47	

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja 2019	Target Kinerja 2020	PD Pengampu
			Hidup, dan Infrastruktur					
	Meningkatnya ruang Kota yang, nyaman, dan berkelanjutan	2.	Persentase RTH	%	12.2	12,4	12.6	Dinas Penataan Ruang, DPKP3
	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	3.	Lama genangan yang tertangani pada titik genangan	Menit	120	120	80	DPU,
		4.	Jumlah aspek penyebab kemacetan	Aspek	12	12	10	Dishub,
		5.	Persentase luasan kawasan kumuh	%	9,76	4,55	3,96	DPKP3
		6.	Cakupan layanan Air bersih	%	77,27	77,27	80	PDAM, DPKP3
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	32,56	35,35	32,86	DLHK
		8.	Cakupan layanan pengelolaan sampah kota	%	97,47	98	98,3	DLHK
Misi 5: Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi								
5.	Optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan	1.	Persentase pembiayaan pembangunan dari non APBD terhadap Belanja Langsung APBD Kota	%	17,86		46,19	
	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan kepentingan lainnya	2.	Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan		193 Miliar	Meningkat 2%	Meningkat 4%	SETDA, DP3APM
	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	3.	Persentase realisasi program/agen da prioritas pembangunan	%	71,43	71,43	85,71	DP3APM
		4.	Persentase realisasi program/ agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta	%	0	33,33	33,33	SETDA

Sumber: Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

## 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 disusun dengan memperhatikan:

### **Prioritas I:**

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Suatu prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Prioritas II:**

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan. Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

### **Prioritas III:**

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Selain berpedoman pada pencapaian target kinerja pada RPJPD Kota Bandung Tahap ke IV, kinerja RPJMD periode 2018-2023 yang belum mencapai target, evaluasi kinerja sampai dengan Tahun 2019, permasalahan pembangunan Kota Bandung yang belum tertangani, serta memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi.

Proses Penentuan Prioritas dilakukan dengan pembobotan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dilakukan pembobotan terhadap prioritas pembangunan turunan dari sasaran yang merepresentasikan penyelenggaraan urusan, kemudian dihitung skalanya dengan membandingkan terhadap 8 (delapan) indikator yang digunakan yaitu:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan;
7. Hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan;
8. Pencapaian SDGs dan SPM.

Berdasarkan hasil pembobotan tersebut, ditentukan prioritas dengan melihat sasaran daerah yang memiliki skor tertinggi, untuk kinerja yang sejenis dikelompokkan dalam satu pernyataan prioritas, proses pembobotan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Scoring Prioritas Pembangunan Tahun 2020**

No	Prioritas Pembangunan Turunan dari Sasaran yang merepresentasikan Penyelenggaraan Urusan	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;	Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;	Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.	Evaluasi dan Identifikasi Permasalahan	Pencapaian SDGS dan SPM	Total
		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>100</b>
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
4	Meningkatnya perekonomian kota	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
5	Menurunnya jumlah penduduk miskin	3	3	3	3	2	3	3	3	2,9
6	Meningkatkan kesempatan kerja	3	2	3	3	2	3	3	3	2,8
7	Meningkatnya ruang kota yang nyaman, dan berkelanjutan	3	3	3	3	2	2	3	3	2,8
8	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	3	3	3	3	2	3	2	3	2,75
9	Meningkatnya kualitas layanan air bersih	3	3	3	3	2	1	3	3	2,7
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	3	3	3	3	2	1	3	3	2,7
11	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	3	3	3	3	2	1	3	3	2,7
12	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	3	3	3	3	2	1	3	3	2,7

*Sumber: Hasil Analisis 2019*

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan prioritas RKPD Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan;
2. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan TIK;
4. Penyelesaian Permasalahan layanan Infrastruktur Kota;
5. Peningkatan Perekonomian Kota;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan;
7. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan.

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program/kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada periode 2018-2023 pada tahun kedua. Secara lebih lengkap prioritas, sasaran, program dapat dilihat pada tabel berikut.

#### **4.2.1 SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI**

##### **4.2.1.1 SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DENGAN PRIORITAS NASIONAL**

Prioritas pembangunan daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya. Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, telah ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional, yang terdiri dari:

##### **1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.**

Prioritas pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dilaksanakan melalui perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, pengentasan kemiskinan dan pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa.

##### **2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah**

Prioritas infrastruktur dan pemerataan wilayah dilaksanakan melalui perluasan infrastruktur dasar, penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana, peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur perkotaan dan perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

**3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja**

Prioritas nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja dilaksanakan melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri, serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

**4. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan**

Prioritas ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air, pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan energi baru dan terbarukan (EBT), peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan, serta penguatan ketahanan bencana.

**5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan**

Prioritas stabilitas pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui penguatan kemampuan pertahanan, peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan internasional, penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi, penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber dan penguatan kemandirian laut, serta penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah serta mempedomani Prioritas Nasional. sinkronisasi serta keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2020 dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2020**

No	Prioritas RKP Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan
		Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Peningkatan perekonomian kota
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
		Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	-

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 diolah



Prioritas RKP selaras dengan prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 yang masih memfokuskan pembangunan pada faktor manusia sebagai subjek dan objeknya. Pada RKP Tahun 2020 pembangunan SDM dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan yang dapat diartikan bahwa yang menjadi fokus peningkatan kualitas SDM terutama adalah masyarakat miskin, sedangkan pada prioritas Kota Bandung, peningkatan SDM di akselerasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat, sedangkan pengentasan kemiskinan difokuskan pada peningkatan pendapatan bagi golongan masyarakat yang beradapada desil 1 dan 2 mengingat angka ketimpangan Kota Bandung berada pada angka 0,40 yang menunjukan ketimpangan sedang menuju ketimpangan tinggi.

Peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi serta permasalahan lingkungan hidup sama-sama mendapatkan porsi sebagai prioritas nasional dan prioritas kota sedangkhan untuk stabilitas pertahanan dan keamanan menjadi domain pemerintah pusat sehingga tidak menjadi prioritas pada pembangunan Kota Bandung Tahun 2020.

Selain memperhatikan prioritas nasional, pembangunan Kota Bandung juga harus mempertimbangkan kebijakan global yang akan berpengaruh terhadap pembangunan kota, Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Tujuan SDGs**

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
2	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan;	Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia;	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
4	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan
5	Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan;	-
6	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota

No	Tujuan SDGs	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
8	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;	Peningkatan perekonomian kota
9	Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
10	Mengurangi kesenjangan;	Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
11	Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	Peningkatan perekonomian kota
13	Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
14	Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;	-
15	Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;	Pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
16	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan;	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
17	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi ( <i>means of implementation</i> ) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	Sinergitas pembiayaan pembangunan

Sumber: Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

#### 4.2.1.2 SINKRONISASI PRIORITAS DAERAH DENGAN PRIORITAS PROVINSI

Selain berpedoman terhadap prioritas nasional, pembangunan Kota Bandung juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, berikut merupakan sinkronisasi Prioritas

Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

**Tabel 4.7**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Bandung dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**

No	Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	Prioritas Pembangunan Kota Bandung Tahun 2020
1.	Akses pendidikan untuk semua	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan
2.	Desentralisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan
3.	Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi	Peningkatan perekonomian kota
4.	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Peningkatan perekonomian kota
5.	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	-
6.	Infrastruktur konektivitas wilayah	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
7.	Gerakan bangun desa (Gerbang desa)	Penyelesaian permasalahan layanan infrastruktur kota
8.	Subsidi gratis Golekmah (Golongan Ekonomi Lemah)	Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
9.	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah (reformasi birokrasi)	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK

Sumber: Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

**4.2.2 PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2020**

Prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2020 yang telah ditetapkan, dicapai dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas daerah disebut program prioritas. Pada penyusunan RKPD Tahun 2020, program prioritas adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung atau *supporting*. Berikut merupakan sasaran pembangunan dan program prioritas pembangunan serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Prioritas, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2020**

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
			Program Pendidikan Non Formal
			Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca
2	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Program Pengelolaan Sumberdaya Kesehatan
			Program Peningkatan pelayanan Keseharan BLUD
			Program Jaminan pembiayaan Kesehatan Masyarakat
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
			Program Pengadaan dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan dan Bahan berbahaya
			Program Keluarga Berencana
			Program Ketahanan Keluarga
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan TIK	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
			Program Perencanaan Pembangunan
			Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah
			Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Program Pelayanan Perijinan
			Program dukungan Reformasi Birokrasi

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
			dan Pencegahan Korupsi
			Program Pelayanan Perijinan
			Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
			Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4	Peningkatan Perekonomian Kota	Meningkatnya perekonomian kota	Program Pemberdayaan UMKM
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
			Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan
			Program Peningkatan Produksi Pertanian
			Program Peningkatan Produksi Peternakan
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
			Program Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata
			Program Pengembangan Industri Pariwisata
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Program Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Program Pembangunan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Program Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
			Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
5	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Program Padat Karya
			Program Pengembangan Usaha Kecil
			Program Pengembangan Ekosistem Kreatif
			Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda
			Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
			Program Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda
			Program Pengembangan Usaha Mikro

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
		Menurunnya jumlah penduduk miskin	Program Penanganan Fakir Miskin Program Pemberdayaan PMKS Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Ketahanan Pangan Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Program Bantuan Pendidikan Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Distribusi Pangan dan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang penting
6	Penyelesaian Permasalahan layanan infrastruktur Kota	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Program Perencanaan Tata Ruang
			Program Pemanfaatan Ruang
			Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Program Penyelenggaraan sarana, prasarana dan utilitas
			Program Penyelenggaraan Penanggulangan Pra dan Tanggap darurat Bencana
			Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
			Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
			Program Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
			Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
			Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
			Program Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
			Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Program Penataan Kawasan Permukiman
7	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
			Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air
			Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2020	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
8	Sinergitas pembiayaan pembangunan.		Program Pemberdayaan Kewilayahan
			Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
			Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi
			Program Pelayanan Perijinan
			Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Sumber: Perda RPJMD Kota Bandung 2018-2023 diolah

Program Prioritas Kota Bandung merupakan program yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan Perda RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran daerah berikut indikator kinerja dan targetnya.

Sinkronisasi terhadap indikator kinerja dan target program dilakukan untuk memastikan sasaran daerah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan indikator dan target kinerja yang sesuai, dengan cara mencapai sasaran disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.9  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat kesehatan	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan mutu infrastruktur pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata
			Meningkatkan mutu proses pembelajaran	
			Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
			Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan	
			Meningkatkan budaya baca	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat	
			Meningkatkan budaya hidup sehat	
			Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	
2	Peningkatan Kualitas	Meningkatnya kapasitas dan	Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui



NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan TIK	akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatkan integritas aparatur sebagai pelayan masyarakat Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan Penguatan kelembagaan tepat ukuran dan tepat fungsi Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan Meningkatkan kinerja instansi pemerintah Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	pemnafaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
3	Peningkatan Perekonomian Kota	Meningkatnya perekonomian kota	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif Meningkatkan produk unggulan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat Meningkatkan daya saing industri unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas iklim usaha dan invenstasi yang kondusif Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan	Meningkatkan perekonomian kota yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi dan pengelolaan pariwisata serta penguatan pada usaha kecil dan menengah
4	Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya kesempatan kerja Meningkatnya daya saing pariwisata, lingkungan bisnis pariwisata, tata kelola, dan infrastruktur pariwisata Kota Bandung Peningkatan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru berbasis padat karya Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan/jaminan sosial bagi warga miskin Mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan Membangun rusun untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan fungsi dan	



NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			keseimbangan lingkungan hidup	
5	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya ruang kota yang aman, nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan lahan	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
			Menurunkan pelanggaran perijinan tata ruang	
			Meningkatkan kualitas RTH	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta	
6	Penyelesaian Permasalahan layanan infrastruktur Kota	Meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas	Meningkatkan kapasitas saluran drainase	
			Meningkatkan fungsi lahan pada wilayah hulu/wilayah perbatasan kota/kabupaten	
			Meningkatkan resapan air hujan	
			Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta	
			Meningkatkan sarana dan prasarana mobilitas penduduk kota	
			Meningkatkan aksesibilitas sarana dan prasarana jalan	
			Meningkatkan manajemen kebutuhan lalu lintas	
			Meningkatkan keselamatan berlalu lintas	
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan memperhatikan prinsip jalan yang berkeselamatan	
			Mengembangkan sistem jaringan angkutan umum massal yang terintegrasi dan transportasi ramah lingkungan	
			Mengendalikan ketertiban dan keselamatan lalu lintas	
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman	
			Meningkatkan akses sanitasi dan air minum	
			Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat kawasan kumuh	
			Meningkatkan akses air bersih	
			Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber air baku	
			Mengurangi tingkat kehilangan air	
7	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Meningkatkan Indeks Kualitas Air	
			Meningkatkan Penanganan sampah	
			Mengurangi sampah dari sumber	
8	Sinergitas pembiayaan pembangunan.	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dan	Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam berpartisipasi dan berkolaborasi pada pembangunan kota	Mengoptimalkan pembangunan kota melalui partisipasi, kolaborasi masyarakat

NO	PRIORITAS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		swasta dalam pembangunan	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan melalui kerjasama daerah (antara lain pengelolaan TJSL/CSR, kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain sebagainya)	dan swasta dengan Pemerintah Kota

## **BAB 5**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Berdasarkan Sasaran, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2020 yang dibahas pada Bab 4, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, disusun program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 oleh perangkat daerah.

Pembahasan substansi pada Bab 5 diperoleh dari kondisi, permasalahan, isu strategis hingga menghasilkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan Tahun 2020 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui serangkaian Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2020. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan dengan berbagai pendekatan.

Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan

pelayanan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademisi yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan FGD untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan Tahun 2019.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan melalui:
  - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas
  - b. Transaparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui e-musrenbang, sehingga masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara real time.
  - c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
  - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung
  - e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi emusrenbang pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan top-down yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global seperti SDG's dan pemenuhan SPM.

4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedepankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui:
  - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah.
  - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana, diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

## **5.1. RINGKASAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH**

### **5.1.1. RINGKASAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG**

Ringkasan anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2020. Hal-hal yang menjadi perhatian Perangkat Daerah dalam menetapkan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Perangkat Daerah yang diinput ke dalam Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIRA) adalah sebagai berikut:

#### **A. Prioritas I:**

Prioritas I merupakan prioritas pembangunan daerah tahun rencana dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD (program pembangunan daerah) dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas pendidikan 20% (dua puluh persen) yang terangkum dalam prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Prioritas II:

Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya telah mengandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan dan dengan memperhatikan prioritas I yang berhubungan dengan Perangkat Daerah terkait. Suatu prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani.

## C. Prioritas III:

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung, seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga

Secara rinci rumusan program prioritas Perangkat Daerah beserta ringkasan anggarannya dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Program Belanja Langsung pada Anggaran Tahun 2020**

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
1	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>546,776,663,593.94</b>
	Program Bantuan Pendidikan	115,489,175,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,987,298,100.00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar	237,449,881,963.94
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	10,379,849,600.00
	Program Pendidikan Non Formal	3,148,380,750.00
	Program Pendidikan Nonformal	4,028,894,000.00
	Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	168,472,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	525,827,000.00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	167,970,303,400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,628,581,780.00
2	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>733,697,660,486.49</b>
	Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	158,505,019,000.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31,974,658,496.00
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	649,952,000.00
	Program Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	-
	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	2,080,331,440.00
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	2,798,716,413.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	7,894,233,000.00
	Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	303,240,300.00
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,901,282,400.00
	Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya	5,356,000.00
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan	29,403,543,100.00
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata	9,617,313,800.00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	52,001,613,916.00
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	490,492,000.00
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga	177,307,360.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	270,616,250.00
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	317,333,174,093.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,276,543,400.00
	Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	4,355,062,400.00
	Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan	63,804,186,212.99
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	973,547,130.00
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,668,117,000.00
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	43,213,354,775.50
<b>3</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	<b>473,097,838,272.45</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,255,385,567.53
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	348,023,740.00
	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	328,949,631,661.32
	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	49,118,035,135.00
	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	72,994,123,038.60
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	828,729,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10,603,910,130.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,000,000,000.00
<b>4</b>	<b>Dinas Penataan Ruang</b>	<b>29,993,200,840.00</b>
	Program Pemanfaatan Ruang Kota	8,472,791,800.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,941,851,490.00
	Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	733,063,090.00
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	10,522,187,060.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	217,899,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,900,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,804,504,300.00
	Program Perencanaan Tata Ruang	1,270,004,100.00
<b>5</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan</b>	<b>302,973,999,251.19</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,593,283,396.00
	Program Penataan Kawasan Permukiman	52,318,869,560.00
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	71,728,634,245.00
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	88,182,164,669.89
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	117,521,250.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	172,975,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,424,566,192.30
	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	62,151,769,946.00
	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas	7,284,214,992.00
<b>6</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>30,484,949,407.00</b>
	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15,581,332,100.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,758,703,275.00
	Program Penegakan Produk Hukum Daerah	1,355,536,000.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	227,764,600.00
	Program Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dan Pengetahuan Masyarakat	1,188,096,200.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	974,308,360.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,886,745,114.00
	Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	3,512,463,758.00
<b>7</b>	<b>Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana</b>	<b>31,877,994,788.97</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,007,471,568.97



No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	324,427,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,331,832,700.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	343,014,400.00
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	1,302,379,700.00
	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	14,118,688,100.00
	Program Peningkatan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana	1,319,419,780.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,044,780,960.00
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	6,085,980,080.00
<b>8</b>	<b>Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>28,189,964,100.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,372,287,480.00
	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	4,323,098,400.00
	Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	468,504,300.00
	Program Penanganan Fakir Miskin	2,684,058,743.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	111,100,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,627,842,590.00
	Program Perlindungan Sosial Bencana	1,368,370,600.00
	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8,234,701,987.00
<b>9</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja</b>	<b>24,671,184,688.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,438,815,483.00
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	137,194,044.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	5,373,781,101.00
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,992,540,510.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,343,914,200.00
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	2,384,939,350.00
<b>10</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>12,324,968,547.26</b>
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	1,022,176,476.00
	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	606,148,850.00
	Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi	998,745,593.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,848,088,535.70
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	2,359,324,653.96
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	49,775,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140,595,400.00
	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	965,998,525.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200,363,521.60
	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1,133,751,992.00
<b>11</b>	<b>Dinas Pangan dan Pertanian</b>	<b>30,161,007,863.01</b>
	Program Ketahanan Pangan	1,900,676,300.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,037,334,708.99
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	1,834,948,900.00
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	1,045,003,125.00
	Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	2,992,885,475.02
	Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	142,236,300.00
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1,263,199,613.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	120,062,250.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198,275,000.00
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	300,000,100.00
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	409,476,770.00
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	411,626,900.00
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2,000,502,164.00
	Program Peningkatan Produksi Peternakan	585,484,197.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,919,296,060.00
<b>12</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>	<b>144,442,644,590.10</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,215,655,420.00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	2,640,332,550.00
	Program Pencegahan dampak lingkungan	1,806,040,760.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	205,840,000.00
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	120,895,823,380.30
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air	596,012,000.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3	579,380,970.00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air	682,362,800.00
	Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim	1,407,585,430.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60,500,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	276,600,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,141,541,563.80
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4,934,969,716.00
<b>13</b>	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>13,642,213,319.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,869,614,559.00
	Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2,230,144,660.00
	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,062,388,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63,250,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	293,666,800.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,123,149,300.00
<b>14</b>	<b>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>9,558,768,958.00</b>
	Program Keluarga Berencana	533,040,200.00
	Program Ketahanan Keluarga	1,847,020,800.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,552,828,258.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	148,428,000.00
	Program Pengendalian Penduduk	633,550,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	221,250,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	172,064,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,215,739,700.00
	Program Promosi Keluarga Berencana	2,234,848,000.00
<b>15</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>186,821,616,073.00</b>
	Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	16,272,883,950.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,757,992,599.00
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	12,749,905,812.00
	Program Pembinaan Transportasi	909,392,900.00
	Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir	12,878,927,100.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	86,539,000.00
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	11,440,413,050.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	633,650,000.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	320,450,000.00
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6,385,003,060.00
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	28,406,686,800.00
	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Badan Layanan Umum Daerah	5,750,940,000.00
	Program Peningkatan Pelayanan Transportasi BLUD	72,366,847,082.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,188,453,470.00
	Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan	4,673,531,250.00
<b>16</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>20,273,533,100.25</b>
	Program Diseminasi Informasi	1,619,262,700.00
	Program Layanan Informasi Publik	1,100,000,000.00
	Program Optimalisasi Aplikasi	2,369,890,000.00
	Program Optimalisasi Persandian	237,860,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,598,173,700.25
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	143,000,000.00
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1,343,284,200.00
	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	9,925,838,800.00
	Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	474,533,700.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	63,525,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	398,165,000.00
<b>17</b>	<b>Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>	<b>12,271,779,234.07</b>
	Program Pemberdayaan UMKM	2,505,083,870.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,061,174,130.00
	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	2,551,876,354.07
	Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	1,733,157,000.00
	Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	848,656,400.00
	Program Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian KSP/USP Koperasi	331,720,000.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	143,283,000.00
	Program Pengembangan Usaha Mikro	653,507,060.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17,556,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi	432,445,900.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	126,060,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	867,259,520.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
18	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>7,998,924,790.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,446,976,540.00
	Program Pelayanan Perizinan	1,548,294,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	84,730,800.00
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	700,950,900.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93,200,000.00
	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	347,975,000.00
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	884,169,400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	892,628,150.00
19	<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>	<b>41,066,941,651.32</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,906,629,447.00
	Program Pembinaan Keolahragaan	13,128,854,500.00
	Program Pembinaan Kepemudaan	7,256,425,550.00
	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	5,380,933,644.32
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	163,630,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230,468,510.00
20	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>40,094,547,900.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,756,010,790.00
	Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman	885,907,000.00
	Program perlindungan objek pemajuan kebudayaan	361,741,650.00
	Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	12,699,716,000.00
	Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata	1,722,588,090.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	1,164,656,145.00
	Program pengembangan ekosistem kreatif	1,986,838,000.00
	Program pengembangan industri pariwisata	1,665,267,350.00
	Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif	639,187,027.00
	Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif	448,008,678.00
	Program pengembangan kelembagaan pariwisata	518,717,000.00
	Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,625,734,600.00
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2,653,097,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212,346,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,754,732,570.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
<b>21</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>8,924,480,049.99</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,711,942,784.99
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	74,758,000.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan	408,423,440.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	140,937,300.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	283,987,100.00
	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan	765,817,520.00
	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca	977,078,525.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,289,925,780.00
	Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	271,609,600.00
<b>22</b>	<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>29,214,773,341.00</b>
	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	-
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,898,771,101.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	196,519,100.00
	Program Pengembangan E-Commerce	246,040,000.00
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4,251,840,910.00
	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan	358,273,900.00
	Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2,305,002,710.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1,531,220,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	79,200,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	829,758,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	273,860,800.00
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	1,407,051,735.00
	Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	1,179,511,340.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,311,117,070.00
	Program Standardisasi Kemetrolgian	1,346,606,175.00
<b>23</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>14,486,901,667.70</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,046,090,473.00
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1,994,717,120.00
	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	161,680,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	86,212,500.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	316,690,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,007,743,866.70
	Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	501,536,180.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4,965,094,200.00
	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	407,137,328.00
<b>24</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset</b>	<b>14,782,091,490.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,178,250,060.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	226,197,400.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	4,842,968,016.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5,112,315,974.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	305,535,400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,116,824,640.00
<b>25</b>	<b>Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>24,417,974,440.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,631,565,240.00
	Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	3,753,187,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	195,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	607,500,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,062,506,700.00
	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak Daerah	33,122,500.00
	Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	1,533,287,750.00
	Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	4,601,804,750.00
<b>26</b>	<b>Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>24,816,198,062.00</b>
	Program Pengembangan Assesment Center	581,544,600.00
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	256,494,320.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,195,771,983.00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	380,396,000.00
	Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur	953,363,750.00
	Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	1,262,426,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	83,875,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	231,690,200.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	13,598,195,529.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,948,186,280.00
	Program Perencanaan Kepegawaian	1,324,254,400.00



No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
<b>27</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>167,971,294,565.00</b>
	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	14,747,120,604.00
	Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi	2,018,627,600.00
	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	567,255,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101,381,583,525.00
	Program Pembangunan Produk Hukum Daerah	925,599,250.00
	Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah	221,006,875.00
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	85,190,000.00
	Program Pengadaan Barang Jasa Daerah	2,447,706,120.00
	Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	1,333,481,000.00
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	325,703,500.00
	Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah	1,029,529,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,325,308,100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,637,955,600.00
	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	6,495,039,180.00
	Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	442,137,750.00
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1,532,500,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27,322,680,711.00
	Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	2,332,600,250.00
	Program Sosial Keagamaan	1,800,270,000.00
<b>28</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>48,957,232,988.17</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,023,100,378.17
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	33,000,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	895,000,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,039,132,610.00
<b>29</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>32,775,418,870.00</b>
	Program dukungan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi	1,135,665,650.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,889,221,900.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	407,065,800.00



No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1,416,685,900.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25,141,035,300.00
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Pemerintah Daerah	785,744,320.00
<b>30</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>10,960,235,830.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,446,098,430.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34,072,500.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
	Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	6,350,959,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,129,105,900.00
<b>31</b>	<b>Kecamatan Sukasari</b>	<b>10,738,703,424.45</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,193,650,549.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,199,999,997.81
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	718,809,375.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,117,354,907.22
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81,000,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,736,546,395.42
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	661,342,200.00
<b>32</b>	<b>Kecamatan Cidadap</b>	<b>9,285,067,872.24</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	990,222,560.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	4,523,190,730.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	531,311,092.24
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	925,932,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33,015,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	73,185,200.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,423,108,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	785,102,790.00
<b>33</b>	<b>Kecamatan Sukajadi</b>	<b>14,297,647,879.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,455,840,989.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,624,961,220.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	948,462,980.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,504,581,600.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	41,250,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,884,434,600.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	838,116,490.00
<b>34</b>	<b>Kecamatan Cicendo</b>	<b>16,366,532,891.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,409,705,845.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,785,066,396.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,237,056,800.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	2,065,901,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,198,994,850.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	669,808,000.00
<b>35</b>	<b>Kecamatan Andir</b>	<b>15,695,013,365.99</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,430,425,350.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,422,683,831.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,094,964,164.99
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,776,447,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33,330,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96,665,800.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,122,995,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	717,501,720.00
<b>36</b>	<b>Kecamatan Coblong</b>	<b>19,926,330,621.27</b>
	Pemberdayaan KUMKM	105,501,400.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	66,419,200.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,515,500,400.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	281,415,800.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	11,171,239,140.00
	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	274,039,959.97
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,903,658,821.30
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	3,398,666,900.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22,750,000.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	496,277,000.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	690,862,000.00
<b>37</b>	<b>Kecamatan Bandung Wetan</b>	<b>9,866,098,521.00</b>
	Pemberdayaan KUMKM	7,314,600.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	64,302,500.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,265,205,752.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	107,376,500.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,319,562,346.00
	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	254,876,420.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	430,752,730.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	971,074,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25,932,500.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	951,810,800.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	467,890,373.00
<b>38</b>	<b>Kecamatan Sumur Bandung</b>	<b>10,688,347,186.60</b>
	Pemberdayaan KUMKM	10,000,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	947,671,550.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	127,570,000.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,825,000,000.60
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	793,353,670.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,077,360,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27,500,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	459,634,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	845,099,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	575,158,466.00
<b>39</b>	<b>Kecamatan Cibeunying Kidul</b>	<b>22,088,730,012.68</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,337,681,170.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	12,636,916,300.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,528,107,700.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	2,664,252,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43,659,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	91,370,400.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,794,118,920.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	992,624,522.68
<b>40</b>	<b>Kecamatan Cibeunying Kaler</b>	<b>12,809,036,345.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,145,673,710.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,601,659,590.30
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,089,324,664.70
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,797,285,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33,412,500.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,250,200.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,717,920,980.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	373,509,700.00
<b>41</b>	<b>Kecamatan Astana Anyar</b>	<b>13,976,816,569.03</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,491,800,856.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	207,548,000.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,664,506,480.04
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	689,565,699.99
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,483,958,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37,375,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,948,964,900.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	453,097,133.00
<b>42</b>	<b>Kecamatan Bojongloa Kaler</b>	<b>14,119,699,225.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,180,846,615.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,359,099,740.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	983,130,810.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,723,088,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36,300,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56,100,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,934,895,690.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	846,238,370.00
<b>43</b>	<b>Kecamatan Bojongloa Kidul</b>	<b>15,389,518,693.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,832,164,633.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,300,000,000.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	2,013,045,160.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	540,373,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42,100,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	104,950,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,380,345,400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,176,540,000.00
<b>44</b>	<b>Kecamatan Babakan Ciparay</b>	<b>16,552,633,854.37</b>
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7,475,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,019,217,687.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,583,468,675.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	838,249,712.37
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,734,038,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37,950,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70,000,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,533,627,580.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	728,607,200.00
<b>45</b>	<b>Kecamatan Bandung Kulon</b>	<b>20,977,036,596.03</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,887,117,378.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	10,638,542,532.20
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,714,192,072.83

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	2,422,465,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	67,250,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	86,007,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,855,563,500.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,305,899,113.00
<b>46</b>	<b>Kecamatan Regol</b>	<b>17,302,655,534.97</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,923,719,805.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	9,234,767,640.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	821,329,429.97
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,951,239,200.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23,625,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	73,732,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,138,243,400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,135,999,060.00
<b>47</b>	<b>Kecamatan Lengkong</b>	<b>18,239,006,689.04</b>
	Pemberdayaan KUMKM	66,207,400.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	103,341,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,587,028,125.04
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	276,534,000.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	10,146,217,382.00
	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	616,176,000.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,383,626,500.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,850,778,300.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	97,575,092.00
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,299,870,090.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	811,652,800.00
<b>48</b>	<b>Kecamatan Batununggal</b>	<b>22,419,063,918.96</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,736,965,900.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	12,775,713,200.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,466,307,095.96
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	2,608,619,800.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,828,351,104.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	863,106,819.00
<b>49</b>	<b>Kecamatan Ujungberung</b>	<b>15,768,957,185.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,348,173,105.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,489,467,150.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,585,007,250.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,555,673,700.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85,494,750.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,770,400.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,652,807,430.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	956,563,400.00
<b>50</b>	<b>Kecamatan Kiaracondong</b>	<b>22,234,950,069.17</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,875,807,665.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	12,420,653,164.17
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,691,080,020.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	2,723,494,200.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,000,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,732,237,720.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	683,677,300.00
<b>51</b>	<b>Kecamatan Arcamanik</b>	<b>13,813,944,674.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,276,964,950.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,574,616,066.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,241,558,749.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,406,977,250.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44,988,000.00



No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61,886,800.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,574,877,275.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	632,075,584.00
<b>52</b>	<b>Kecamatan Cibiru</b>	<b>14,060,689,048.90</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,359,147,600.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,760,001,058.90
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	876,894,915.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,475,764,600.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27,603,125.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74,606,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,973,059,750.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	513,612,000.00
<b>53</b>	<b>Kecamatan Antapani</b>	<b>15,693,213,990.20</b>
	Pemberdayaan KUMKM	23,710,200.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	48,967,750.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,387,377,600.00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	135,832,200.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,738,464,540.20
	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	502,541,500.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,118,797,150.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,691,596,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	39,380,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49,792,600.00
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,237,052,600.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	719,701,850.00
<b>54</b>	<b>Kecamatan Rancasari</b>	<b>14,461,004,018.97</b>
	Pemberdayaan KUMKM	16,527,000.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	28,374,000.00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,000,701,770.25
	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	157,516,600.00



No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,031,886,898.72
	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	464,438,000.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	992,816,940.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,785,600,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	38,500,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,000,000.00
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,275,000,100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	594,642,710.00
<b>55</b>	<b>Kecamatan Buahbatu</b>	<b>15,257,308,790.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,550,763,935.40
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	8,074,941,444.60
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,595,209,960.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,778,774,600.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35,200,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60,000,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,575,808,800.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	586,610,050.00
<b>56</b>	<b>Kecamatan Bandung Kidul</b>	<b>11,343,613,370.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,513,273,650.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,376,405,100.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	796,157,400.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,025,779,400.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	74,340,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	81,180,560.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,687,224,450.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	789,252,810.00
<b>57</b>	<b>Kecamatan Gedebage</b>	<b>12,390,793,288.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,333,668,578.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	6,303,602,560.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,395,353,000.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,654,546,350.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	65,000,000.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,196,573,800.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	442,049,000.00
<b>58</b>	<b>Kecamatan Panyileukan</b>	<b>11,105,271,659.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	807,862,614.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	5,824,676,380.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,291,734,665.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	911,825,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	149,930.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,617,261,400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	651,761,670.00
<b>59</b>	<b>Kecamatan Cinambo</b>	<b>15,240,757,050.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,302,024,040.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	4,235,956,360.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	731,897,150.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	597,528,500.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	66,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61,886,800.00
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,445,963,700.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,799,500,500.00
<b>60</b>	<b>Kecamatan Mandalajati</b>	<b>14,334,255,970.00</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,433,394,300.00
	Program Pemberdayaan Kewilayahan	7,811,752,170.00
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	1,125,791,000.00
	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	1,691,154,000.00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33,000,000.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
	Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1,480,912,400.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	758,252,100.00

No	Perangkat Daerah/Program	Anggaran/Jumlah
<b>Jumlah Total</b>		<b>3,554,169,701,070.78</b>

Pada RKPD Tahun 2020, Pemerintah Kota Bandung melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung terhadap prioritas provinsi. Jumlah program dan kegiatan yang mendukung sebanyak 119 program dan 573 kegiatan.

### 5.1.2. RINGKASAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Berikut beberapa penjelasan terkait belanja tidak langsung Perangkat Daerah pada RKPD TAHUN 2020:

1. Belanja Pegawai	Rp	2.654.898.388.895,76
2. Belanja Bunga	Rp	0,00
3. Belanja Subsidi	Rp	139.153.204.134,00
4. Belanja Hibah	Rp	149.282.835.500,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.717.356.780,00
7. Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00

**Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 2.955.051.785.309,76**

Berikut rekapitulasi belanja tidak langsung pada RKPD Tahun 2020.

**Tabel 5.2**  
**Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung pada Anggaran Tahun 2020**

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
<b>1</b>	Dinas Pendidikan	1.107.729.400.917,17
<b>2</b>	Dinas Kesehatan Kota Bandung	308.351.727.556,52
<b>3</b>	Dinas Pekerjaan Umum	47.771.113.475,35
<b>4</b>	Dinas Penataan Ruang	46.344.475.146,36

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan	29.696.380.729,18
6	Satuan Polisi Pamong Praja	61.678.469.802,42
7	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	31.065.072.967,71
8	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	11.852.039.464,97
9	Dinas Tenaga Kerja	14.939.239.583,87
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	11.382.876.667,28
11	Dinas Pangan dan Pertanian	20.848.802.770,13
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	13.568.228.756,57
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.163.942.652,24
14	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	11.579.399.145,59
15	Dinas Perhubungan	63.422.855.516,11
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.988.323.455,56
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	12.082.273.415,14
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	20.383.489.259,74
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.678.229.480,55
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17.502.745.229,79
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.913.521.503,41
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15.164.635.296,55
23	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	20.606.205.530,55
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	25.188.386.199,56
25	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	300.153.396.414,00
26	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	76.178.193.228,28
27	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	86.883.980.607,66
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.870.592.676,64
29	Sekretariat Daerah	65.882.739.138,74
30	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.004.011.973,61
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.625.627.674,18
32	Inspektorat	35.634.817.800,70
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.998.909.722,08
34	Kecamatan Sukasari	9.785.861.093,87
35	Kecamatan Cidadap	8.945.475.099,45

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN
36	Kecamatan Sukajadi	11.519.211.491,83
37	Kecamatan Cicendo	13.311.334.148,01
38	Kecamatan Andir	13.927.425.203,11
39	Kecamatan Coblong	12.240.486.925,37
40	Kecamatan Bandung Wetan	8.144.770.618,87
41	Kecamatan Sumur Bandung	9.908.167.683,90
42	Kecamatan Cibeunying Kidul	12.533.020.922,09
43	Kecamatan Cibeunying Kaler	10.779.782.666,56
44	Kecamatan Astanaanyar	11.725.587.856,50
45	Kecamatan Bojongloa Kaler	10.383.642.007,10
46	Kecamatan Bojongloa Kidul	13.980.885.937,76
47	Kecamatan Babakan Ciparay	12.653.970.349,79
48	Kecamatan Bandung Kulon	15.791.070.872,81
49	Kecamatan Regol	13.905.885.416,83
50	Kecamatan Lengkong	14.842.256.935,78
51	Kecamatan Batununggal	15.962.056.703,26
52	Kecamatan Ujungberung	13.115.309.649,14
53	Kecamatan Kiaracondong	12.599.351.201,22
54	Kecamatan Arcamanik	11.244.789.494,71
55	Kecamatan Cibiru	11.769.611.015,75
56	Kecamatan Antapani	10.474.158.697,93
57	Kecamatan Rancasari	10.934.017.423,92
58	Kecamatan Buahbatu	11.435.571.215,43
59	Kecamatan Bandung Kidul	9.747.981.656,22
60	Kecamatan Gedebage	11.334.589.343,32
61	Kecamatan Panyileukan	11.931.185.398,12
62	Kecamatan Cinambo	11.494.559.058,51
63	Kecamatan Mandalajati	10.495.665.464,40
	<b>Jumlah</b>	<b>2.955.051.785.309,76</b>

## **5.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2020 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang disusun menggunakan matrik program dan kegiatan Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator Kinerja;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Kinerja capaian program;
- Besaran dana yang dibutuhkan;
- Target kinerja capaian program/kegiatan.

Penjelasan lebih rinci terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung pada tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2020.

## **BAB 6**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Selain penetapan IKU dan IKK untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bandung menetapkan target indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Laju pertumbuhan Penduduk dan Indeks Gini. Adapun penentuan target indikator kinerja makro disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Kota Bandung Tahun 2020**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target	
			2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,31	81,06	81,20	81,61
2	Harapan lama Sekolah	Tahun	13,90	14,18	14,30	14,48
3	Persentase Penduduk miskin	Persen	4.17	3.57	3,83	3,66
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,44	8,01	7,89	7,79
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	7,21	N/A	7,74	7,85
6	Indeks Gini	Poin	0,43	0,42	0,41	0,40

Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.2**  
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.90	14.00	14.01
		Angka Kelulusan	persentase	100	100	100
		Rata-rata nilai hasil ujian SD	Angka	76.72	76.74	76.76
		Rata-rata nilai hasil ujian SMP	Angka	57.02	57.03	57.04
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.86	73.90	73,92
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks Kepuasan baik	Persentase	51.61	60	70
		Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	A	A
		Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	Integrative
5	Meningkatnya perekonomian kota	PDRB Perkapita	Juta Rp	69.20	70.73	73,38
		Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3.27	3.39	3.55
		Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah/org /tahun	16.156	16.370	16.584



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
6	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	%	4.17	3.83	3,66
7	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.44	8.39	8.34
8	Meningkatnya ruang Kota yang nyaman dan berkelanjutan	Persentase RTH	%	12.2	12.4	12.6
9	Meningkatnya infrastruktur Kota terpadu dan berkualitas	Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	120	100	80
		Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	12	11	10
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	9,76	4.55	3,96
10	Meningkatnya Layanan Air Bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	%	77,27	79	80
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	32,56	35.35	32,86
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%	97.47	98	98,3
12	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	193 Milyar	Meningkat 2% dari tahun 2018	Meningkat 4% dari tahun 2018
13	Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	%	71,43	71.43	85,71
		Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta (akumulasi)	%	0	33.33	33,33

Sumber: RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicators* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 6.3**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja**  
**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bandung**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>				
1	Penduduk	jiwa	2.504.373	2.509.827	5.514.447
2	PDRB harga Berlaku	juta Rp.	240.109.627	297.049.895	328.814.885
3	PDRB harga Konstan	juta Rp.	172.851.961	197.924.495	211.214.729
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	7,21	7.36	7,52
5	Laju inflasi	persen	3.46	3.87	3,73
6	Indeks Kebahagiaan	poin	N/A	75.4	76,0
7	Indeks Gini	poin	0.43	0.44	0,40
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	81.06	80.60	81.61
9	Harapan Lama Sekolah	angka	13.90	14.00	14,48
10	Angka usia harapan hidup	angka	73.86	73.90	73,92
11	Persentase balita gizi buruk	persen	0,30	0.365	0,28
12	Prevalensi balita gizi kurang	prevalensi	6,10	6.05	6,00
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	N/A	75.75	75,76
14	Persentase PAD terhadap pendapatan	persen	N/A	50.90	47.81
15	Opini BPK	opini	N/A	WDP	WTP
16	Pencapaian Score Pola Pangan Harapan	persen	N/A	84.26	84.27
17	Penguatan Cadangan Pangan	persen	N/A	80	100
18	Penanganan Daerah Rawan Pangan	persen	N/A	100	100
19	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	N/A	0.11	0,10
20	Kontribusi Sektor Perdagangan terhada PDRB	persen	N/A	25.60	25,15
21	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	persen	N/A	18.04	17,39
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>				
1	Rasio ketergantungan	rasio	N/A	37.76	37,45
2	Rasio penduduk yang bekerja	rasio	N/A	92.72	93.16
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	N/A	62.35	62.20
4	Rasio kesempatan kerja terhadap	rasio	N/A	58.00	58.16

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
	penduduk usia 15 tahun ke atas				
5	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	proporsi	N/A	0.29	0.31
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	N/A	70.75	70,75
<b>III</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
<b>A</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>				
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	79,54	79.56	79,58
2	Angka partisipasi sekolah	persen	100	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	persen	100	100	100
4	Angka Partisipasi Murni				
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	persen	100	100	100
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	persen	100	100	100
7	Angka Partisipasi Kasar				
8	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	persen	102,12	102.14	102,16
9	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	persen	103,25	103.27	103,29
10	Angka Putus Sekolah				
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,01	0.01	0,01
12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0,02	0.02	0,02
13	Angka kelulusan				
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100	100	100
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	100	100	100
16	Angka Melanjutkan (AM):				
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	92,95	92.97	92,99
18	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	persen	94,64	94.66	94,68
19	Fasilitas Pendidikan				

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
20	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	90	92	94
21	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	persen	90	91	93
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	rasio	1:251	1:454	1:454
23	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	rasio	1:36	1:28	1:28
24	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	rasio	1:36	1:28	1:28
25	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	persen	100	100	100
26	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	89	91	93
<b>II</b>	<b>Kesehatan</b>				
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	angka	2,80	2.80	4,4
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	angka	0,47	1.50	1,45
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	angka	1,7	3.9	3,8
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	angka	56,90	71.81	64,60
5	Rasio posyandu per satuan penduduk	rasio	1.959	2.001	2.008
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1,16	1,21	1,21
7	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	rasio	1,41	1,41	1,41
8	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	1,36	1,40	1,40
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	49	1,44	1,45
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	80	80	80
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki	persen	90	90	90

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
	kompetensi kebidanan				
12	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen	100	100	100
13	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100
14	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	90	90	90
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	2,2	2,2	2,2
17	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	persen	100	100	100
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	100	100	100
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	per 100.000 penduduk	301	301	301
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	per 100.000 penduduk	4	4	4
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	87,85	100	100
24	Penderita diare yang ditangani	persen	15,62	15,66	15,7
25	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	< 1	< 1	< 1
26	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	persen	100	100	100
27	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	persen	0,4	3,5	4
28	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100	100	100
29	Cakupan kunjungan bayi	persen	90	90	90
30	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	persen	95	95	95
31	Cakupan pelayanan nifas	persen	80	80	90

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
32	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	100	100	100
33	Cakupan pelayanan anak balita	persen	90	97	98
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	100	100	100
35	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	100	100	100
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100	100	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan	persen	97	100	100
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100
III	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
	<b>Pekerjaan Umum</b>				
1	Tingkat Kemantapan Jalan	persen	92	93	100
2	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	persen	54	100	100
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	meter	265.023	273,690	231.813
4	Jumlah Lokasi banjir yang ditangani pada kawasan Permukiman	lokasi	N/A	77	86
5	Panjang Normalisasi saluran sungai	meter	N/A	86,2	86.2
6	Jumlah Kawasan sempadan sungai yang ditata	meter	N/A	10	10
	<b>Penataan Ruang</b>				
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	12.20	12,4	12.6

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	persen	NA	53	54
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	NA	76	77
4	Jumlah Gedung pemerintah Kota Bandung yang dilengkapi fasilitas untuk kaum dafabel	persen	NA	60	60
<b>IV</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				
1	Persentase luasan kawasan kumuh	persen	9,76	4,55	3,96
<b>V</b>	<b>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>				
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	1:1	1:1	1:1
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	persen	100	100	100
3	Persentase Penegakan Perda	persen	100	100	100
4	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana (Target 20 Kelurahan)	kelurahan	10	15	20
5	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	<22	≤ 15	≤ 15
6	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	2	2	2
7	Kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP	kegiatan	2	2	2
8	Jumlah demo	kali	297	150	144
<b>VI</b>	<b>Sosial</b>				
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	16,93	29	31
2	Persentase PMKS yang tertangani	persen	17,84	37,76	40,77
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk	persen	16,93	29	31

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
	pemenuhan kebutuhan dasar				
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	persen	100	100	100
5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	NA	3	6
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	persen	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	persen	20	20	20
<b>B</b>	<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>				
<b>I</b>	<b>Tenaga Kerja</b>				
1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	persen	58	58	58
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	44,88	45.33	45,56
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen	56,02	31.11	32,65
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen	100	100	100
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	persen	51,25	28.89	46,67
<b>II</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	25.325	28.325	30.325
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	3	4	6
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	211.500	231.500	251.500
4	Rasio KDRT	persen	0,0146	0,0265	0,0236
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	870.849	890.849	910.849
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Orang	243	245	246
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Orang	3	5	5
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Orang	5	5	5
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Orang	10	10	10
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Orang	11	11	13
11	Cakupan layanan pemulangan bagi	Orang	10	10	10

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
	perempuan dan anak korban kekerasan				
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		5	5	5
III	<b>Pangan</b>				
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap	103,76	104.14	104,53
2	Ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr	2.298,15	2.228,60	2.200,00
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	90,94	88.19	57,00
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	N/A	91.00	92,00
IV	<b>Pertanahan</b>				
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	persen	9	9	9
V	<b>Lingkungan Hidup</b>				
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	tidak	tidak	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	tidak	tidak	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	ada	ada	ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	poin	20	20.2	20,4
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	poin	58.61	58.81	59.01
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	poin	22,44	29.24	22,44
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	12,5	18.0	23,5
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana PPLHD di Kabupaten/Kota	orang - sarana	2-1	2.2	3 - 2
9	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	13	15	15

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	tidak	ada	ada
11	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	persen	100	100	100
12	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	90,99	97.00	97,00
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	persen	18,00	20.00	22,00
14	Persentase cakupan area pelayanan	persen	93,50	95.00	100,00
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	90,99	97.00	97,00
16	Tersedianya sumber air baku (air permukaan) alternatif untuk penyediaan air minum yang terjaga kelestariannya (kapasitas produksi sumber air baku)	ltr/detik	3.042	3.742	3.862
17	Persentase tingkat pelayanan air limbah dengan on site dan off site	persen	NA	76	78
18	Terbangunnya Taman RW	unit	NA	300	300
<b>VI</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>				
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio	1:0,8	1:1	1:1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio	1:0,9	1:0,9	1:0,9
3	Rasio pasangan berakte nikah	rasio	1:0,4	1:0,4	1:0,4
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota Bandung.	ada/tidak	ada	ada	ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	sudah	sudah	sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	94,78	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	40,85	45	55
8	Kepemilikan KTP	persen	89,9	100	100
9	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 PDDK	buah	706	970	1000
10	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	persen	92,08	98	98
11	Cakupan pasangan non muslim berakta kawin	persen	25,46	35	50
<b>VII</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	151	151	151
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	151	151	151
<b>VIII</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan KB</b>				
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	persen	0,37	0,36	0,35
2	Total Fertility Rate	persen	1,95	1,94	1,93
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	persen	100	100	100
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen	100	100	100
5	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	jumlah	64	1	64
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	jumlah	37	37	37
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan	jumlah	3	4	5

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
	pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan				
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jumlah	2-3	2	2
9	Ratio Akseptor KB	persen	72,29	72,50	73
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	persen	72,29	72,50	73
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15- 19 tahun (ASFR 15- 19)	persen	26,65	25	24
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	20,22	20	19,50
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	14,90	14,80	14,70
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	40,72	41	41,50
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	persen	72,29	72,50	73
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	persen	57	59	61
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	persen	40	41,5	43
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	persen	32	34	36
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	jumlah	-	-	1
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	jumlah	74	77	89
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB	persen	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
	untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk				
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	persen	69	71	73
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	persen	100	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	100	100	100
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	82,69	83	84
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	persen	100	100	100
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual	persen	-	-	-
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	100	100	100
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	85	86	87

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	20	20	20
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	persen	0,51	0,35	0,40
<b>IX</b>	<b>Perhubungan</b>				
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	6.156.085	6.856.682	6.984.994
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	6.955	6.978	6.982
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	9.413	2.344	736
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	8,42	8,43	8,44
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	5	6	7
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	8,15	5	5
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	pj jln / 1928882	pj jln / 2044614	pj jln / 2167291
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	44.349.037	44.792.527	45.240.453
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	orang	5.365.128	5.311.477	5.258.362
<b>X</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>				
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	persen	100	100	100
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	persen	80	82	84
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	persen	85,16	86,76	88,49
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	94,27	94,46	94,65
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	persen	26,99	25,59	24,19

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
<b>XI</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b>				
<b>1</b>	Jumlah koperasi berkualitas	koperasi	N/A	30	30
<b>2</b>	Jumlah usaha mikro yang usahanya meningkat	usaha mikro	N/A	240	240
<b>XII</b>	<b>Penanaman Modal</b>				
<b>1</b>	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	400	500	550
<b>2</b>	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	4,75	5.23	5,65
<b>3</b>	Rasio daya serap tenaga kerja PMDN	rasio	5 : 1	4 : 1	5 : 1
<b>4</b>	Rasio daya serap tenaga kerja PMA	rasio	23 : 1	24 : 1	23 : 1
<b>5</b>	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	8,05	8,05	18,82
<b>XIII</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>				
<b>1</b>	Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi Kepemudaan	834	834	872
<b>2</b>	Wirausaha muda	orang	25	25	25
<b>3</b>	Jumlah pembinaan olahraga	Kegiatan	10	10	12
<b>4</b>	Jumlah pembinaan atlet muda	Kegiatan	125	125	160
<b>XIV</b>	<b>Statistik</b>				
<b>1</b>	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	ada
<b>2</b>	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	ada	ada	ada
<b>3</b>	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	ada	ada	ada
<b>4</b>	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada	ada
<b>XV</b>	<b>Persandian</b>				
<b>1</b>	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	31,25	46,87	62,50
<b>XVI</b>	<b>Kebudayaan</b>				
<b>1</b>	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	176	40	55
<b>2</b>	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan	N/A	2	3



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	N/A	2	4
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	99	109	119
<b>XVII Perpustakaan</b>					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustaka	92.000	93.000	94.000
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	96.236	107.736	111.336
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	0,7	0,7	0,7
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	pemustaka	7.667	7.750	7.833
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	33.490	34.490	35.590
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	2	5	6
7	Jumlah perpustakaan aktif	perpustakaan	79	55	67
<b>XVIII Kearsipan</b>					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	73	12	25
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan	1	1	2
<b>C FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>					
<b>I Pariwisata</b>					
1	Kunjungan wisata	Orang	6.960.512	8.428.063	8.697.761
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2,25	2,34	2,43
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	659.227.500.992	680.322.781.024	702.093.110.017
<b>II Pertanian</b>					
1	Produktivitas padi per hektar	kw/ha	68,08	68,08	68,22
2	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	N/A	45	48
<b>III Perdagangan</b>					
1	Nilai Ekspor Kota Bandung (US\$)	juta (US\$)	NA	466	467
<b>IV Perindustrian</b>					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	NA	12,12	28,57
<b>V Kelautan dan Perikanan</b>					
1	Produksi perikanan	persen	100	100	100

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
2	Konsumsi ikan	persen	N/A	100	100
3	Produksi Ikan Konsumsi	ton	2.970	2.970	2.971
4	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/ kap/thn	N/A	37,95	37,97
<b>D</b>	<b>FOKUS URUSAN PENUNJANG</b>				
<b>I</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	-	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	1	-
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	2	2	2
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	-	-
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	2	2	2
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	1	1	-

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100	100	100
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	persen	100	100	100
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	100	100
II	<b>Keuangan</b>				
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WDP	WDP	WTP
2	Persentase SILPA	persen	10,61	10,61	10,61
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	10,61	10,61	10,61
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	N/A	N/ A	N/A
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	24,16	24,16	24,16
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	18,74	18,74	18,74
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	rasio (BL/BTL)	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5	54,5 : 45,5
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu
III	<b>Kepegawaian dan Diklat</b>				
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	11,51	63,59	63,61
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	4,10	7,03	7,08
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	93,99	92,52	92,78
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	34	36	36
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	1.711	1.862	1.862
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	9.236	9.212	8.505

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
<b>IV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>				
<b>1</b>	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	100
<b>2</b>	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	persen	70,0	30,0	70,5
	Penerapan SIDA:				
<b>3</b>	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	NA	100	100
<b>4</b>	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	NA	30,0	70,5
<b>V</b>	<b>Pengawasan</b>				
<b>1</b>	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0,15	0,14	0,13
<b>2</b>	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	85,26	87,82	90,45
<b>3</b>	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	56,08	57,20	58,35
<b>4</b>	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	96,67	96,67	96,67
<b>VI</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>				
<b>1</b>	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	ada
<b>2</b>	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan	ada/tidak	ada	ada	ada
<b>3</b>	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	ada

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020
<b>VII.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>				
<b>1</b>	Nilai LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
<b>2</b>	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM baik	Persentase	51,61	60	60
<b>3</b>	Nilai evaluasi AKIP Kota Bandung	Predikat	A	A	A
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan</b>				
<b>1</b>	Rata-Rata IKM Kecamatan	Predikat			
<b>2</b>	Persentase Kelurahan Unggul	Persentase	N/A	20%	25%
<b>3</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase	76,00	77,00	78,00

Sumber: *RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023*

## **BAB 7**

# **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, yang diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.

Penyusunan Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2020 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang pada level Rukun Warga, Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota serta mengakomodir usulan melalui mekanisme reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Kota Bandung Tahun 2020 merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018- 2023 yang harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja untuk Tahun 2020, dan penyusunan KUA/PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBD tahun anggaran 2020.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBD, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBD pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan melakukan beberapa inovasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas

perencanaan dan penganaggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Penyusunan RKPD Tahun 2020 digunakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIRA) yang telah mengalami pengembangan dengan menambahkan fitur untuk menyesuaikan jenis belanja dengan output yang dihasilkan.
2. Proses asistensi *offline* maupun *online* terhadap kesesuaian Program/Kegiatan dan belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara intensif di Bappelitbang yang bertujuan agar program prioritas yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal.
3. Upaya menjaga keselarasan antara RKPD dengan RPJMD pada Tahun kedua dilakukan dengan secara konsisten menjadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai pedoman, dimana sasaran daerah dalam RPJMD diimplementasikan dalam program tahunan Perangkat Daerah.
4. Penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyepakati prioritas pembangunan Tahun 2020 didukung dengan pemanfaatan aplikasi e-Musrenbang yang memberikan kesempatan secara luas kepada Rukun Warga (RW) melalui proses rembug warga untuk menyampaikan usulan dan dapat secara online mengetahui status usulan yang disampaikan. Pada proses tersebut RW mengusulkan kegiatan yang akan dibahas pada forum Musrenbang kelurahan. Musrenbang Kelurahan kemudian menyepakati usulan program prioritas yang akan disampaikan pada forum Musrenbang Kecamatan selanjutnya usulan disampaikan pada forum Musrenbang Kota. Aplikasi e Musrenbang ini telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIRA)
5. Pada Proses akomodasi usulan reses DPRD digunakan aplikasi yang telah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran (SIRA).

Dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan pembangunan secara terarah, efektif dan efisien, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 secara sinergis dan terintegrasi.
2. Program/kegiatan beserta alokasi anggaran yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan menjadi dasar bagi perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang pencapaiannya diukur secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kota Bandung Tahun 2020, RKPD Kota Bandung Tahun 2020 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.
4. Dalam rangka sinkronisasi & sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Renja Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahun 2020 dengan berpedoman pada dokumen RPKD 2020.
5. Pemerintah Kota Bandung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD Kota Bandung Tahun 2020.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Walikota melalui Kepala Bappelitbang.
7. Apabila realisasi SILPA pada akhir tahun anggaran 2019 melebihi dari proyeksi, maka kelebihan tersebut di prioritaskan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut:
  - Pembangunan Infrastruktur pelayanan publik
  - Kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan
  - Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan daya beli
  - Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan banjir



- Kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kemacetan
  - Kegiatan pengelolaan sampah berbasis pengurangan di sumber
  - Kegiatan Pengembangan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
  - Prioritas lain yang menunjang pencapaian target RPJMD
8. Kepala Bappelitbang menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
9. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dimungkinkan terjadi perubahan RKPD Kota Bandung tahun 2020 bila diperlukan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Kota Bandung Tahun 2020 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Kota Bandung Tahun 2020, demi mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis.

WALI KOTA BANDUNG



ODED MOHAMAD DANIAL

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Total Pagu : 546.776.663.594

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1</b>	<b>01</b>		<b>Pendidikan</b>					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>100 %</b>	<b>3.987.298.100</b>	<b>100 %</b>	<b>4.386.027.910</b>
1	01	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	599.671.000	12 laporan	659.638.100
1	01	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah lembaga yang disediakan ATK	1 lembaga	375.250.000	1 lembaga	412.775.000
1	01	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis	350.038.700	3 Jenis	385.042.570
1	01	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	263.920.000	12 laporan	290.312.000
1	01	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 laporan	160.122.600	12 laporan	176.134.860
1	01	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 laporan	410.475.000	12 laporan	451.522.500
1	01	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	12 laporan	1.827.820.800	12 laporan	2.010.602.880
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>3.628.581.780</b>	<b>100 %</b>	<b>3.991.439.958</b>
1	01	02	012 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah perlengkapan peraltan aparatur yang disediakan	6 Jenis	577.244.800	6 Jenis	634.969.280
1	01	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan pemeliharaan rutin gedung kantor	4 laporan	192.097.400	4 laporan	211.307.140
1	01	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	131 Unit	1.099.999.870	131 Unit	1.209.999.857
1	01	02	042 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 gedung	1.522.439.710	1 gedung	1.674.683.681
1	01	02	052 Pengelolaan Aset Satuan Pendidikan	- Jumlah sekolah yang difasilitasi pengelolaan asetnya	331 Sekolah	236.800.000	331 Sekolah	260.480.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>525.827.000</b>	<b>100 %</b>	<b>578.409.700</b>
1	01	03	008 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah kegiatan pembinaan Kinerja Aparatur	3 kegiatan	525.827.000	3 kegiatan	578.409.700
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>15</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Angka Partisipasi Kasar PAUD	<b>100 %</b>	<b>533.517.600</b>	<b>100 %</b>	<b>586.869.360</b>
1	01	15	075 Kegiatan Fasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	- Jumlah lembaga yang difasilitasi pengelolaan dana Bantuan operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	1000 lembaga	533.517.600	1000 lembaga	586.869.360
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>18</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	APK Kesetaraan	<b>100 %</b>	<b>3.148.380.750</b>	<b>100 %</b>	<b>3.463.218.825</b>
1	01	18	018 Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal	- Jumlah lembaga yang difasilitasi Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal dan Informal	100 lembaga	550.000.000	100 lembaga	605.000.000
1	01	18	020 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Asesment Center	- Jumlah pesertaPembinaan dan Pengembangan Asesment Center	800 orang	527.978.000	800 orang	580.775.800
1	01	18	023 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	- Jumlah lembaga yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan	20 lembaga	919.927.000	20 lembaga	1.011.919.700
1	01	18	026 Penyelenggaraan SKB	- Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya - Jumlah lembaga yang ditingkatkan kualitasnya	1 lembaga 1 lembaga	1.150.475.750	1 lembaga 1 lembaga	1.265.523.325
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>20</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	<b>52.55 %</b>	<b>17.616.798.400</b>	<b>52.55 %</b>	<b>19.378.478.240</b>
1	01	20	015 Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	- Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	400 orang	2.199.871.000	400 orang	2.419.858.100
1	01	20	016 Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	- Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	1000 Orang	6.628.010.200	1000 Orang	7.290.811.220
1	01	20	017 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Non Formal dan PAUD Dikmas	- Jumlah peserta Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan Nonformal dan PAUD Dikmas	250 orang	392.909.000	250 orang	432.199.900
1	01	20	018 Kegiatan Pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP	- Jumlah peserta pelatihan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan SMP	300 Orang	3.270.892.800	300 Orang	3.597.982.080
1	01	20	019 Kegiatan Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	- Jumlah peserta Sertifikasi dan Apresiasi Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	1000 orang	4.706.810.200	1000 orang	5.177.491.220
1	01	20	030 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD	- Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan SD	300 orang	418.305.200	300 orang	460.135.720
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>32</b>	<b>Program Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</b>	Persentase sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	<b>100 %</b>	<b>168.472.000</b>	<b>100 %</b>	<b>185.319.200</b>

1	01	32	001	Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang Pendidikan Dasar	- Jumlah Sekolah yang difasilitasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	331 Sekolah	168.472.000	331 Sekolah	185.319.200
1	01	36		<b>Program Bantuan Pendidikan</b>	Persentase masyarakat miskin yg mendapatkan bantuan Pendidikan	<b>100 %</b>	<b>115.489.175.000</b>	<b>100 %</b>	<b>127.038.092.500</b>
1	01	36	001	Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SD melalui Kartu Bandung Juara	- Jumlah siswa SD yang diberi bantuan melalui Kartu Bandung Juara	51500 Siswa	63.605.575.000	51500 Siswa	69.966.132.500
1	01	36	002	Pemberian bantuan kebutuhan sekolah siswa SMP melalui Kartu Bandung Juara	- Jumlah siswa SMP yang diberi bantuan melalui Kartu Bandung Juara	37100 Siswa	51.883.600.000	37100 Siswa	57.071.960.000
1	01	37		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Dasar</b>	Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang dimanfaatkan	<b>100 %</b>	<b>237.449.881.964</b>	<b>100 %</b>	<b>261.194.870.160</b>
1	01	37	001	Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	- Jumlah Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	1 Sistem	1.296.288.800	1 Sistem	1.425.917.680
1	01	37	002	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	- Jumlah kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online	1 kegiatan	428.017.400	1 kegiatan	470.819.140
1	01	37	003	Pembangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana SD	- Jumlah SD yang difasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana	274 Sekolah	88.897.620.400	274 Sekolah	97.787.382.440
1	01	37	004	Pendampingan Program HEBAT	- Jumlah kegiatan pendampingan program Hebat	1 kegiatan	163.680.000	1 kegiatan	180.048.000
1	01	37	005	Pengembangan Kesiswaan SD	- Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan kesiswaan	457 Sekolah	1.687.290.720	457 Sekolah	1.856.019.792
1	01	37	006	Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD	- Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan kurikulum	457 Sekolah	433.300.000	457 Sekolah	476.630.000
1	01	37	007	Pengembangan Proses Belajar Mengajar SD	- Jumlah SD yang difasilitasi proses belajar mengajar	274 Sekolah	296.550.000	274 Sekolah	326.205.000
1	01	37	008	Pengembangan Proses Belajar Mengajar SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi proses belajar mengajar	62 Sekolah	300.000.000	62 Sekolah	330.000.000
1	01	37	009	Penjaminan Mutu Pendidikan	- Jumlah kegiatan peningkatan mutu pendidkan	1 kegiatan	107.830.000	1 kegiatan	118.613.000
1	01	37	010	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SD	- Jumlah SD yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	25 Sekolah	505.150.000	25 Sekolah	555.665.000
1	01	37	011	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif	25 Sekolah	505.994.000	25 Sekolah	556.593.400
1	01	37	012	Penyelenggaraan Ujian Jenjang SD	- Jumlah SD yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian	457 Sekolah	1.900.000.000	457 Sekolah	2.090.000.000
1	01	37	013	Penyelenggaraan Ujian Jenjang SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi Penyelenggaraan Ujian	250 Sekolah	800.000.000	250 Sekolah	880.000.000
1	01	37	014	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	- Jumlah dokumen Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan - Jumlah laporan bulanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5 Dokumen 12 laporan	367.282.500	5 Dokumen 12 laporan	404.010.750
1	01	37	015	Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan	- Jumlah kegiatan pembinaan dewan sekolah	1 kegiatan	82.323.000	1 kegiatan	90.555.300
1	01	37	016	Kegiatan Pengembangan Inovasi Pendidikan	- Jumlah kegiatan pengembangan inovasi pendidikan	2 Kegiatan	684.310.000	2 Kegiatan	752.741.000
1	01	37	017	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pendidikan	- Jumlah Dokumen kebijakan Pendidikan	5 Dokumen	510.950.000	5 Dokumen	562.045.000
1	01	37	018	Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SD	- Jumlah Laporan Bulanan Pelayanan Pendidikan SD	12 laporan	41.029.768.234	12 laporan	45.132.745.057
1	01	37	019	Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan SMP	- Jumlah Laporan Pelayanan Pendidikan SMP	12 laporan	25.741.551.610	12 laporan	28.315.706.771
1	01	37	020	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan sarana dan prasarana	62 Sekolah	67.967.360.000	62 Sekolah	74.764.096.000
1	01	37	021	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SD	- Jumlah SD yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	274 Sekolah	822.221.800	274 Sekolah	904.443.980
1	01	37	022	Pengembangan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Sekolah Gratis SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan dan tata kelola penyelenggaraan sekolah gratis	62 Sekolah	816.243.500	62 Sekolah	897.867.850
1	01	37	023	Pengembangan Kesiswaan SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kesiswaan	250 Sekolah	1.561.950.000	250 Sekolah	1.718.145.000
1	01	37	024	Pengembangan Kurikulum Pendidikan SMP	- Jumlah SMP yang difasilitasi pengembangan kurikulum	250 Sekolah	544.200.000	250 Sekolah	598.620.000
1	01	38		<b>Program Pendidikan Nonformal</b>	APK Kesetaraan	<b>100 %</b>	<b>4.028.894.000</b>	<b>100 %</b>	<b>4.431.783.400</b>
1	01	38	001	Kegiatan Pemberian bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	- Jumlah warga belajar yang diberi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C	3000 orang	3.139.140.000	3000 orang	3.453.054.000
1	01	38	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal	- Jumlah peserta Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Nonformal	800 orang	610.154.400	800 orang	671.169.840
1	01	38	003	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	- Jumlah lembaga Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan PAUD Dikmas	150 lembaga	279.599.600	150 lembaga	307.559.560
1	01	39		<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disertifikasi	<b>52.55 %</b>	<b>150.353.505.000</b>	<b>52.55 %</b>	<b>165.388.855.500</b>
1	01	39	001	Kegiatan Peningkatan Mutu PTK Non ASN	- Jumlah PTK Non ASN yang diberi honor	10000 Org	150.353.505.000	10000 Org	165.388.855.500
1	01	40		<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Angka Partisipasi Kasar PAUD	<b>100 %</b>	<b>9.846.332.000</b>	<b>100 %</b>	<b>10.830.965.200</b>
1	01	40	001	Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Jumlah lembaga yang difasilitasi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4 lembaga	8.388.578.600	4 lembaga	9.227.436.460
1	01	40	002	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	- Jumlah lembaga yang difasilitasi Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1160 lembaga	697.174.400	1160 lembaga	766.891.840
1	01	40	003	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Paud Dikmas	- Jumlah PAUD Dikmas yang difasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	60 lembaga	108.220.000	60 lembaga	119.042.000
1	01	40	004	Pelaksanaan Pendidikan PAUD	- Jumlah lembaga yang dibina	4 lembaga	652.359.000	4 lembaga	717.594.900

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Total Pagu : 733.697.660.486

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2		3		4	5	6	7
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	02			Kesehatan							
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		31.974.658.496	100 %		35.172.124.346
1	02	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Dinas Kesehatan	12 laporan		5.065.485.550	12 laporan		5.572.034.105
1	02	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan	12 laporan		191.400.000	12 laporan		210.540.000
1	02	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				10.145.600			11.160.160
1	02	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan ATK RSKIA	1 laporan		399.597.050	1 laporan		439.556.755
1	02	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Penyediaan cetakan & pengadaan Dinas Kesehatan	1 laporan		1.437.055.400	1 laporan		1.580.760.940
1	02	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Dinas Kesehatan	1 laporan		631.876.700	1 laporan		695.064.370
1	02	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan	1 laporan		3.452.496.120	1 laporan		3.797.745.732
1	02	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan	12 laporan		743.521.500	12 laporan		817.873.650
1	02	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas Kesehatan	1 laporan		243.350.000	1 laporan		267.685.000
1	02	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Dinas Kesehatan	12 laporan		1.050.000.000	12 laporan		1.155.000.000
1	02	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran				2.543.307.776			2.797.638.554
1	02	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor				15.768.350.900			17.345.185.990
1	02	01	024	Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Layanan Kesehatan Masyarakat Bulanan	12 laporan		140.271.900	12 laporan		154.299.090
1	02	01	027	Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	- Jumlah Laporan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan	85 laporan		297.800.000	85 laporan		327.580.000
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %		4.276.543.400	100 %		4.704.197.740
1	02	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				400.000.000			440.000.000
1	02	02	007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				858.000.000			943.800.000
1	02	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSKIA	4 Unit		3.018.543.400	4 Unit		3.320.397.740
1	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100 %		270.616.250	100 %		297.677.875
1	02	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya RSKIA	165 Stel		104.816.250	165 Stel		115.297.875
1	02	03	007	Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur	- Jumlah laporan pembinaan aparatur Dinas Kesehatan	12 laporan		165.800.000	12 laporan		182.380.000
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Tingkat Kesehatan Masyarakat	89.60 %		43.213.354.776	89.60 %		47.534.690.253
1	02	16	066	Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat	- Jumlah Pembinaan gizi masyarakat	8 kali		362.094.630	8 kali		398.304.093
1	02	16	070	Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga	- Jumlah fasyankes yang dilakukan pembinaan kesehatan keluarga sesuai standar - Jumlah Pembinaan Kesehatan Keluarga	80 Faskes 21 kali		595.050.350	80 Faskes 21 kali		654.555.385
1	02	16	071	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIKUTRA LAMA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		943.384.000	12 Jenis		1.037.722.400
1	02	16	072	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS LEDENG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		668.576.000	12 Jenis		735.433.600
1	02	16	073	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi BLUD UPT PUSKESMAS KARANGSETRA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		382.765.000	12 Jenis		421.041.500
1	02	16	074	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAWARNA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		808.766.000	12 Jenis		889.642.600
1	02	16	075	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi v UPT PUSKESMAS SUKAGALIH	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		242.921.256	12 Jenis		267.213.381
1	02	16	076	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABATAN	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		1.204.862.000	12 Jenis		1.325.348.200
1	02	16	077	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SURYALAYA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		154.049.000	12 Jenis		169.453.900
1	02	16	078	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPAKU	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis		351.378.000	12 Jenis		386.515.800

1	02	16	079	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABAKAN SURABAYA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.282.278.000	12 Jenis	1.410.505.800
1	02	16	080	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKARAJA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	93.615.400	12 Jenis	102.976.940
1	02	16	081	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIGADUNG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	13.714.400	12 Jenis	15.085.840
1	02	16	082	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLAYUNG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.182.298.000	12 Jenis	1.300.527.800
1	02	16	083	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GUMURUH	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.888.403.000	12 Jenis	2.077.243.300
1	02	16	084	Kegiatan Pelayanan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MOCH RAMDAN	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.552.798.000	12 Jenis	1.708.077.800
1	02	16	085	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ASTANA ANYAR	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	675.338.897	12 Jenis	742.872.787
1	02	16	086	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAPAKIR	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	2.866.021.000	12 Jenis	3.152.623.100
1	02	16	087	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS AHMAD YANI			872.267.000		959.493.700
1	02	16	088	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA LAMA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	546.124.800	12 Jenis	600.737.280
1	02	16	089	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRLUYU	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.085.504.000	12 Jenis	1.194.054.400
1	02	16	090	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIGONDEWAH	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.497.449.000	12 Jenis	1.647.193.900
1	02	16	091	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BABAKAN TAROGONG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	213.921.900	12 Jenis	235.314.090
1	02	16	092	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJERAH	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.433.770.000	12 Jenis	1.577.147.000
1	02	16	093	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JATIHANDAP	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	454.231.000	12 Jenis	499.654.100
1	02	16	094	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS LIO GENTENG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	309.311.373	12 Jenis	340.242.510
1	02	16	095	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIBOLERANG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.050.729.000	12 Jenis	1.155.801.900
1	02	16	096	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIJAGRA BARU	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	371.899.000	12 Jenis	409.088.900
1	02	16	097	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PELINDUNG HEWAN	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.189.587.000	12 Jenis	1.308.545.700
1	02	16	098	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIBADUYUT KIDUL	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	191.421.900	12 Jenis	210.564.090
1	02	16	099	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIPADUNG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.917.171.000	12 Jenis	2.108.888.100
1	02	16	100	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SUKAHAJI	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	2.566.611.800	12 Jenis	2.823.272.980
1	02	16	101	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PANYILEUKAN	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	599.679.000	12 Jenis	659.646.900
1	02	16	102	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS ANTAPANI	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	1.224.864.000	12 Jenis	1.347.350.400
1	02	16	103	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MANDALAMEKAR	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	163.968.000	12 Jenis	180.364.800
1	02	16	104	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CIBADUYUT WETAN	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	180.921.900	12 Jenis	199.014.090
1	02	16	105	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CILENGKRANG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	854.970.000	12 Jenis	940.467.000
1	02	16	106	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASIRJATI	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	191.000.000	12 Jenis	210.100.000
1	02	16	107	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS JAJAWAY	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	183.082.000	12 Jenis	201.390.200
1	02	16	108	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PAMULANG	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	408.501.000	12 Jenis	449.351.100
1	02	16	109	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS PASAWAHAN	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	421.387.000	12 Jenis	463.525.700
1	02	16	110	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS GIRIMANDE	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	178.677.000	12 Jenis	196.544.700
1	02	16	111	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DERWATI	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	766.948.000	12 Jenis	843.642.800
1	02	16	112	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS RUSUNAWA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	794.066.000	12 Jenis	873.472.600
1	02	16	113	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS CEMPAKA ARUM	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	311.432.000	12 Jenis	342.575.200
1	02	16	114	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKEJATI	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	856.545.000	12 Jenis	942.199.500
1	02	16	115	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS BALAIKOTA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	585.025.270	12 Jenis	643.527.797
1	02	16	116	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS DAGO	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	2.557.778.000	12 Jenis	2.813.555.800
1	02	16	117	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS MENGGER	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	252.802.000	12 Jenis	278.082.200
1	02	16	118	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SARIADI	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	915.086.000	12 Jenis	1.006.594.600
1	02	16	119	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS SEKELOA	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	602.970.000	12 Jenis	663.267.000
1	02	16	120	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Non BLUD Kapitasi UPT PUSKESMAS TAMANSARI	- Jumlah Pelayanan Kesehatan Sesuai SPM	12 Jenis	794.673.000	12 Jenis	874.140.300
1	02	16	121	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Cipamokolan	- Jumlah pelayanan sesuai SPM	12 Jenis	496.347.600	12 Jenis	545.982.360
1	02	16	122	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Pagarsih	- Jumlah pelayanan sesuai SPM	12 Jenis	136.461.750	12 Jenis	150.107.925

1	02	16	123	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Puter	- Jumlah pelayanan sesuai SPM	12 Jenis	464.568.800	12 Jenis	511.025.680
1	02	16	124	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Sukarasa	- Jumlah pelayanan sesuai SPM	12 Jenis	98.756.000	12 Jenis	108.631.600
1	02	16	125	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Riung Bandung	- Jumlah pelayanan sesuai SPM	12 Jenis	74.472.000	12 Jenis	81.919.200
1	02	16	126	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat UPT. Puskesmas Panghegar	- Jumlah pelayanan sesuai SPM	12 Jenis	130.061.750	12 Jenis	143.067.925
1	02	19		<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	Cakupan Peningkatan PHBS tatanan Rumah Tangga	<b>11.92 %</b>	<b>973.547.130</b>	<b>67.9 %</b>	<b>1.070.901.843</b>
1	02	19	002	Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	- Jumlah masyarakat (individu) yang mendapatkan penyuluhan di RSKIA	7700 orang	529.067.130	7700 orang	581.973.843
1	02	19	010	Kegiatan Promosi Kesehatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan	- Jumlah Fasyankes yang mendapat pembinaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat - Jumlah Jenis Publikasi KIE kepada Masyarakat	125 Fasyankes 6 Dokumen	444.480.000	125 Fasyankes 6 Dokumen	488.928.000
1	02	23		<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	<b>31.63 %</b>	<b>81.360.000</b>	<b>80 %</b>	<b>89.496.000</b>
1	02	23	001	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	- Jumlah Dokumen standar pelayanan kesehatan RSKGM	1 Dokumen	81.360.000	1 Dokumen	89.496.000
1	02	26		<b>Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	persentase sarana dan prasarana RS daerah milik pemerintah yang memenuhi standar	<b>87.33 %</b>	<b>9.617.313.800</b>	<b>87.33 %</b>	<b>10.579.045.180</b>
1	02	26	001	Kegiatan Pembangunan Rumah sakit	- Jumlah dokumen DED gedung parkir RSKIA	1 Dokumen	2.360.000.000	1 Dokumen	2.596.000.000
1	02	26	017	Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah sakit			5.320.000.000		5.852.000.000
1	02	26	023	Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	- Jumlah porsi penyediaan makanan dan minuman pasien	75000 porsi	1.537.313.800	75000 porsi	1.691.045.180
1	02	26	034	Kegiatan Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	- Jumlah unit/instalasi yang mendapat mebeleur RSKIA	4 Ruang layanan	400.000.000	4 Ruang layanan	440.000.000
1	02	27		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</b>	persentase sarana prasarana RS daerah milik pemerintah yang sesuai standar	<b>87.33 %</b>	<b>7.894.233.000</b>	<b>87.33 %</b>	<b>8.683.656.300</b>
1	02	27	001	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala RSKGM	1 laporan	2.643.880.000	1 laporan	2.908.268.000
1	02	27	017	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit			5.250.353.000		5.775.388.300
1	02	33		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah</b>	Persentase Rata-rata IKM BLUD	<b>79 Nilai</b>	<b>23.807.724.000</b>	<b>79 Nilai</b>	<b>26.188.496.400</b>
1	02	33	003	Kegiatan Pelayanan BLUD	- IKM BLUD	79 Nilai	23.807.724.000	79 Nilai	26.188.496.400
1	02	36		<b>Program Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan</b>	Cakupan pengembangan Smart City pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	<b>100 %</b>	<b>4.355.062.400</b>	<b>100 %</b>	<b>4.790.568.640</b>
1	02	36	003	Kegiatan Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan	- Jumlah Puskesmas yang mendapat Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	80 Puskesmas	4.153.072.400	80 Puskesmas	4.568.379.640
1	02	36	006	Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan	- Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan - Dokumen Evaluasi pembangunan kesehatan	8 Dokumen 7 Dokumen	201.990.000	8 Dokumen 7 Dokumen	222.189.000
1	02	40		<b>Program Pengadaan Dan Pengawasan Obat, Perbekalan Kesehatan, Pangan Dan Bahan Berbahaya</b>	-	-	<b>5.356.000</b>		<b>5.891.600</b>
1	02	40	003	Kegiatan Penatalaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan			5.356.000		5.891.600
1	02	41		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Upaya Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga</b>	-	-	<b>177.307.360</b>		<b>195.038.096</b>
1	02	41	001	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat			177.307.360		195.038.096
1	02	45		<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	-	-	<b>2.798.716.413</b>		<b>3.078.588.054</b>
1	02	45	010	Kegiatan Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan untuk Menunjang Jaminan Kesehatan Nasional			2.798.716.413		3.078.588.054
1	02	47		<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan</b>	Persentase kecamatan dengan puskesmas dibandingkan rasio jumlah puskesmas dan jumlah penduduk	<b>100 %</b>	<b>29.403.543.100</b>	<b>100 %</b>	<b>32.343.897.410</b>
1	02	47	001	Kegiatan Rehabilitasi Total Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Unit Puskesmas yang direhabilitasi total	10 Dokumen	25.175.861.300	10 Dokumen	27.693.447.430
1	02	47	003	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan	- Jumlah unit kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan	4 Unit	529.720.500	4 Unit	582.692.550
1	02	47	005	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	7 Unit	778.464.700	7 Unit	856.311.170
1	02	47	006	Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan	- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang direhabilitasi	5 Unit	2.919.496.600	5 Unit	3.211.446.260
1	02	51		<b>Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</b>	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	<b>100 %</b>	<b>158.505.019.000</b>	<b>100 %</b>	<b>174.355.520.900</b>
1	02	51	004	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	407668 Orang	118.500.000.000	407668 Orang	130.350.000.000
1	02	51	005	Kegiatan Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	- Jumlah Masyarakat miskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	251259 Orang	40.005.019.000	251259 Orang	44.005.520.900
1	02	55		<b>Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan</b>	persentase jenis layanan laboratorium yang sesuai standar	<b>100 %</b>	<b>2.080.331.440</b>	<b>100 %</b>	<b>2.288.364.584</b>

1	02	55	001	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan	- jumlah dokumen jenis pelayanan kegiatan laboratorium sesuai standar	34 Dokumen	2.080.331.440	34 Dokumen	2.288.364.584
1	02	56		<b>Program Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu</b>	persentasi warga yang mendapat pelayanan gawat darurat	<b>1.30 %</b>	<b>303.240.300</b>	<b>1.30 %</b>	<b>333.564.330</b>
1	02	56	001	Kegiatan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu	- Jumlah pelayanan kesehatan gawat darurat pra fasilitas kesehatan - Jumlah pelayanan kesehatan non gawat darurat	210 laporan 420 laporan	303.240.300	210 laporan 420 laporan	333.564.330
1	02	57		<b>Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>	-	-	<b>649.952.000</b>		<b>714.947.200</b>
1	02	57	001	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Esensial, Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat			649.952.000		714.947.200
1	02	58		<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	Persentase penyakit menular yang ditangani sesuai standar	<b>100 %</b>	<b>1.901.282.400</b>	<b>100 %</b>	<b>2.091.410.640</b>
1	02	58	001	Kegiatan Kesehatan Jiwa dan Napza	- Jumlah penyakit gangguan jiwa yang ditangani sesuai standar	2500 Jiwa	127.300.000	2500 Jiwa	140.030.000
1	02	58	002	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan tes HIV sesuai standar - Jumlah Penemuan kasus penyakit menular (HIV, TBC, DBD, Diare dan Pneumonia pada balita) - Jumlah fasilitas kesehatan yang melaksanakan pengobatan Tuberkulosis sesuai standar	66 Faskes 51674 kasus 59 Faskes	572.275.000	66 Faskes 51674 kasus 59 Faskes	629.502.500
1	02	58	003	Kegiatan Pencegahan dan pengendalian Gangguan Indera dan Fungsional	- Jumlah faskes yang mampu melaksanakan deteksi dini dan penanganan gangguan penglihatan	50 Faskes	82.500.000	50 Faskes	90.750.000
1	02	58	004	Kegiatan Peningkatan Imunisasi	- Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) - Jumlah yang diimunisasi dasar lengkap	100 % 40342 Orang	432.100.000	100 % 40342 Orang	475.310.000
1	02	58	005	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	- Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam - Jumlah Penemuan Kasus Acute Flacid Paralysis (AFP)	100 % 11 kasus	53.322.400	100 % 11 kasus	58.654.640
1	02	58	006	Pelayanan Kesehatan Matra	- Jumlah Jemaah Haji yang dilayani pemeriksaan dan pembinaan Kesehatan Haji - Jumlah situasi khusus kesehatan matra bencana, event dan hari-hari besar yang terpantau dan direspon	2464 Orang 20 event	317.770.000	2464 Orang 20 event	349.547.000
1	02	58	007	Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	- Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan kegiatan pengendalian terpadu PTM - Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memiliki SOP penanganan penyakit tidak menular (hipertensi & DM) sesuai standar dan menyampaikan laporan ke dinas kesehatan - Jumlah penanganan kasus hipertensi sesuai standar - Jumlah penanganan kasus Diabetes Mellitus (DM) sesuai standar	30 Puskesmas 70 Faskes 75000 kasus 3900 kasus	316.015.000	30 Puskesmas 70 Faskes 75000 kasus 3900 kasus	347.616.500
1	02	59		<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan</b>	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan	<b>77.4 %</b>	<b>52.001.613.916</b>	<b>77.40 %</b>	<b>57.201.775.308</b>
1	02	59	001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Dan Regulasi Kesehatan	- Jumlah dokumen rancangan produk hukum daerah - Jumlah rekomendasi izin tenaga dan fasilitas kesehatan	4 Dokumen 200 laporan	180.000.000	4 Dokumen 200 laporan	198.000.000
1	02	59	001	Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan			49.375.864.127		54.313.450.540
1	02	59	002	Kegiatan Peningkatan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga	- Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat P-IRT	200 ijin	88.000.000	200 ijin	96.800.000
1	02	59	004	Kegiatan Standarisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan yang mengikuti Diklat dan tersertifikasi	100 Orang	2.357.749.789	100 Orang	2.593.524.768
1	02	60		<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	Persentase rekomendasi IKL yang ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Wali Kota	<b>100 %</b>	<b>490.492.000</b>	<b>100 %</b>	<b>539.541.200</b>
1	02	60	001	Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat Masyarakat	- Jumlah Dokumen Rekomendasi IKL yang dihasilkan	5 Dokumen	490.492.000	5 Dokumen	539.541.200
1	02	61		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah</b>	Persentase Rata-rata Nilai IKM	<b>79 Nilai</b>	<b>293.525.450.093</b>	<b>79 Nilai</b>	<b>322.877.995.102</b>
1	02	61	001	Kegiatan Pelayanan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	- IKM BLUD	79 Nilai	4.958.624.000	79 Nilai	5.454.486.400
1	02	61	002	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT)	- Persentase jumlah Panggilan Gawat darurat yang di tangani	100 %	261.963.000	100 %	288.159.300
1	02	61	003	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS ARCAMANIK	- IKM BLUD	79 Nilai	1.516.374.000	79 Nilai	1.668.011.400
1	02	61	004	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CARINGIN	- IKM BLUD	79 Nilai	2.508.865.000	79 Nilai	2.759.751.500
1	02	61	005	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIBIRU	- IKM BLUD	79 Nilai	2.148.561.000	79 Nilai	2.363.417.100
1	02	61	006	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CINAMBO	- IKM BLUD	79 Nilai	1.147.056.000	79 Nilai	1.261.761.600
1	02	61	007	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIPAMOKOLAN	- IKM BLUD	79 Nilai	1.700.453.000	79 Nilai	1.870.498.300
1	02	61	008	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CITARIP	- IKM BLUD	79 Nilai	3.143.403.000	79 Nilai	3.457.743.300
1	02	61	009	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS CIUMBULEUIT	- IKM BLUD	79 Nilai	2.853.142.000	79 Nilai	3.138.456.200
1	02	61	010	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GARUDA	- IKM BLUD	79 Nilai	5.069.282.000	79 Nilai	5.576.210.200
1	02	61	011	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS GRIYA ANTAPANI	- IKM BLUD	79 Nilai	1.037.495.000	79 Nilai	1.141.244.500
1	02	61	012	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS KUJANGSARI	- IKM BLUD	79 Nilai	1.747.470.000	79 Nilai	1.922.217.000
1	02	61	013	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS NEGLASARI	- IKM BLUD	79 Nilai	1.870.127.000	79 Nilai	2.057.139.700

1	02	61	014	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PADASUKA	- IKM BLUD	79 Nilai	4.492.919.000	79 Nilai	4.942.210.900
1	02	61	015	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PAGARSIH	- IKM BLUD	79 %	1.724.651.093	79 %	1.897.116.202
1	02	61	016	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASIRKALIKI	- IKM BLUD	79 Nilai	4.906.880.000	79 Nilai	5.397.568.000
1	02	61	017	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PASUNDAN	- IKM BLUD	79 Nilai	1.823.370.000	79 Nilai	2.005.707.000
1	02	61	018	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS PUTER	- IKM BLUD	79 Nilai	3.030.828.000	79 Nilai	3.333.910.800
1	02	61	019	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SALAM	- IKM BLUD	79 Nilai	744.780.000	79 Nilai	819.258.000
1	02	61	020	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SINDANGJAYA	- IKM BLUD	79 Nilai	1.393.201.000	79 Nilai	1.532.521.100
1	02	61	021	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKAJADI	- IKM BLUD	79 Nilai	2.710.490.000	79 Nilai	2.981.539.000
1	02	61	022	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS SUKARASA	- IKM BLUD	79 Nilai	1.881.562.000	79 Nilai	2.069.718.200
1	02	61	023	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TALAGABODAS	- IKM BLUD	79 Nilai	1.637.084.000	79 Nilai	1.800.792.400
1	02	61	024	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT PUSKESMAS TAMB LONG	- IKM BLUD	79 Nilai	1.216.870.000	79 Nilai	1.338.557.000
1	02	61	025	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT KESEHATAN GIGI MULUT (RSKGM)	- persentase rata rata ikm	79 Nilai	17.000.000.000	79 Nilai	18.700.000.000
1	02	61	026	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT KESEHATAN IBU DAN ANAK (RSKIA)	- Indeks Kepuasan Masyarakat BLUD RSKIA	79 Nilai	100.000.000.000	79 Nilai	110.000.000.000
1	02	61	027	Kegiatan Pelayanan BLUD UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG BERUNG (RSUD)			121.000.000.000		133.100.000.000
1	02	62		<b>Program Pola Pengelolaan UPT. Kesehatan</b>	Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Tata laksana Keuangan Yang Sehat	<b>100 %</b>	<b>63.804.186.213</b>	<b>100 %</b>	<b>70.184.604.834</b>
1	02	62	001	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPT Kesehatan			63.804.186.213		70.184.604.834
1	02	64		<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar	<b>31.63 %</b>	<b>1.586.757.000</b>	<b>31.63 %</b>	<b>1.745.432.700</b>
1	02	64	001	Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit	- Level akreditasi	Paripurna Level	848.295.000	Paripurna Level	933.124.500
1	02	64	002	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Dasar			386.312.000		424.943.200
1	02	64	003	Kegiatan Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Lanjutan	- Jumlah FKRTL ( RS dan Klinik Utama ) sesuai standar	21 Faskes	284.610.000	21 Faskes	313.071.000
1	02	64	004	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	- Jumlah fasilitas HATTRA yang dibina - Jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standar - Jumlah FKRTL ( RS dan Klinik Utama ) sesuai standar - Jumlah FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama) sesuai standar - Jumlah Laboratorium Klinik sesuai standar	155 Hattra 142 Faskes 21 Faskes 91 - 19 Faskes	67.540.000	155 Hattra 142 Faskes 21 Faskes 91 - 19 Faskes	74.294.000



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Total Pagu : 473.097.838.272

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	<b>100 %</b>	<b>9.255.385.568</b>	<b>100 %</b> <b>10.180.924.124</b>
1 03 01	002		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia	12 Bulan	1.383.709.800	12 Bulan 1.522.080.780
1 03 01	003		Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	12 Bulan	487.025.440	12 Bulan 535.727.984
1 03 01	008		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jasa kebersihan kantor tersedia	12 Bulan	1.615.893.950	12 Bulan 1.777.483.345
1 03 01	009		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah peralatan kerja diperbaiki	118 Unit	295.735.000	118 Unit 325.308.500
1 03 01	010		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Kebutuhan Alat Tulis Kantor tersedia	12 Bulan	603.345.380	12 Bulan 663.679.918
1 03 01	011		Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	30 jenis	571.786.088	30 jenis 628.964.696
1 03 01	012		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor tersedia	12 Bulan	181.810.200	12 Bulan 199.991.220
1 03 01	014		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kebutuhan peralatan rumah tangga tersedia	12 Bulan	799.787.230	12 Bulan 879.765.953
1 03 01	015		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia	12 Bulan	464.552.000	12 Bulan 511.007.200
1 03 01	017		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Kebutuhan makanan dan minuman tersedia	12 Bulan	330.847.000	12 Bulan 363.931.700
1 03 01	018		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Kebutuhan transportasi dan akomodasi untuk rapat dan konsultasi luar daerah tersedia	12 Bulan	756.963.400	12 Bulan 832.659.740
1 03 01	020		Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jasa Pengamanan Kantor Tersedia	12 Bulan	1.763.930.080	12 Bulan 1.940.323.088
<b>1 03 02</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>10.603.910.130</b>	<b>100 %</b> <b>11.664.301.143</b>
1 03 02	009		Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	25 Unit	367.184.510	25 Unit 403.902.961
1 03 02	010		Kegiatan Pengadaan Mebelair	- Jumlah pengadaan meubelair	135 Buah	599.978.390	135 Buah 659.976.229
1 03 02	022		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Tersedianya gedung kantor dan prasarana terpelihara dengan baik	12 Bulan	3.455.742.400	12 Bulan 3.801.316.640
1 03 02	024		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	80 Unit	5.145.112.830	80 Unit 5.659.624.113
1 03 02	047		Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang dihasilkan	10 Paket	1.035.892.000	10 Paket 1.139.481.200
<b>1 03 03</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase pelayanan pemenuhan prasarana kedisiplinan kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>828.729.000</b>	<b>100 %</b> <b>911.601.900</b>
1 03 03	002		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	400 Stel	304.007.000	400 Stel 334.407.700
1 03 03	005		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	400 Stel	524.722.000	400 Stel 577.194.200
<b>1 03 42</b>	<b>42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>		<b>83,7 Nilai</b>	<b>348.023.740</b>	<b>382.826.114</b>
1 03 42	005		Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebnamargaan	- Jumlah paket pengadaan peralatan pendukung kegiatan	7 Paket	348.023.740	7 Paket 382.826.114
<b>1 03 43</b>	<b>43</b>		<b>Program Perencanaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	-	-	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>
1 03 43	001		Kegiatan Penyusunan Strategi dan Kebijakan Kedinasan	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang dihasilkan	10 Paket	1.000.000.000	10 Paket 1.100.000.000
<b>1 03 47</b>	<b>47</b>		<b>Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan</b>	jumlah simpang tak sebidang yang terbangun (fly over / under pass)	<b>618402 m</b>	<b>328.949.631.661</b>	<b>1 Buah</b> <b>361.844.594.827</b>
1 03 47	001		Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Bojonagara	- Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Bojonagara - Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Bojonagara	20000 M2 24000 m1	5.131.297.314	20000 M2 24000 m1 5.644.427.045
1 03 47	002		Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Cibeunying	- Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Cibeunying - Luas saluran jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Cibeunying	23000 m2 2400 M2	5.564.629.814	23000 m2 2400 M2 6.121.092.795
1 03 47	003		Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Gedebage	- Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Gedebage	20500 m2	4.890.126.888	20500 m2 5.379.139.577
1 03 47	004		Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Karees	- Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Karees - Panjang saluran yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Karees	16000 M2 7000 m	5.029.979.570	16000 M2 7000 m 5.532.977.527

1	03	47	005	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Tegallega	- Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Tegallega - Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Melalui Penanganan Rutin Wilayah Tegallega	% 22000 M2 12000 M / Lari	4.754.380.750	% 22000 M2 12000 M / Lari	5.229.818.825
1	03	47	006	Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Pekerjaan Umum Wilayah Ujungberung	- Luas perkerasan jalan yang dipelihara secara swakelola di Wilayah Ujungberung	17500 m2	4.552.663.559	17500 m2	5.007.929.915
1	03	47	007	Kegiatan Perencanaan Kebinamargaan	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan trotoar/drainase jalan yang dihasilkan - Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan jalan dan jembatan yang dihasilkan	12 Paket 20 Paket	3.600.000.000	12 Paket 20 Paket	3.960.000.000
1	03	47	008	Pembangunan dan Pemeliharaan Kebinamargaan	- Panjang drainase jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual - luas trotoar terbangun dan terpelihara secara kontraktual - Luas perkerasan jalan terbangun dan terpelihara secara kontraktual	8000 m 13000 M2 520000 M2	274.502.537.137	8000 m 13000 M2 520000 M2	301.952.790.851
1	03	47	009	Pengadaan, Rehabilitasi /Pemeliharaan peralatan dan Perbengkelan	- Jumlah peralatan perbengkelan terpelihara	30 Unit	5.066.650.751	30 Unit	5.573.315.826
1	03	47	010	Pengendalian dan Pemanfaatan Kebinamargaan	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan yang dihasilkan	20 Paket	10.013.217.500	20 Paket	11.014.539.250
1	03	47	011	Produksi Campuran Aspal (PCA) Jalan	- luas jalan yang dipelihara dari produksi campuran aspal	37000 M2	5.844.148.378	37000 M2	6.428.563.216
1	03	48		<b>Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum</b>	jumlah PJU dalam kondisi baik	<b>49000 titik</b>	<b>49.118.035.135</b>	<b>49000 titik</b>	<b>54.029.838.649</b>
1	03	48	001	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	- Jumlah pembangunan PJU baru dan pemeliharaan PJU eksisting	2500 Titik	45.958.915.135	2500 Titik	50.554.806.649
1	03	48	002	Pengendalian dan Pemanfaatan Penerangan Jalan Umum	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan yang dihasilkan	20 Paket	1.209.120.000	20 Paket	1.330.032.000
1	03	48	003	Perencanaan Penerangan Jalan Umum	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan penerangan jalan umum yang dihasilkan	17 Paket	1.950.000.000	17 Paket	2.145.000.000
1	03	49		<b>Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air</b>	lama genangan yang tertangani pada titik genangan	<b>80 menit</b>	<b>72.994.123.039</b>	<b>80 menit</b>	<b>80.293.535.342</b>
1	03	49	001	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	- Panjang TPT terbangun dan terpelihara secara kontraktual - Panjang pagar pengaman sungai terbangun dan terpelihara	13500 m1 1400 m1	58.946.792.740	13500 m1 1400 m1	64.841.472.014
1	03	49	002	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Aliran Sungai	- Luas Daerah Aliran Sungai yang dipelihara	25000 M2	9.946.840.299	25000 M2	10.941.524.328
1	03	49	003	Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi pengawasan yang dihasilkan	20 Paket	1.700.490.000	20 Paket	1.870.539.000
1	03	49	004	Kegiatan Perencanaan Sumber Daya Air	- Jumlah paket pekerjaan jasa konsultansi perencanaan sarana/prasarana sumber daya air yang dihasilkan	17 Paket	2.400.000.000	17 Paket	2.640.000.000

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 1.03.02 Dinas Penataan Ruang

Total Pagu : 29.993.200.840

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	tertib administrasi tata publik perkantoran	100 %	4.941.851.490		5.436.036.639
1	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulanan	12 Jasa Bulanan	1.515.626.710	12 Jasa Bulanan	1.667.189.381
1	03	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa	12 Bulan	253.000.000	12 Bulan	278.300.000
1	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Jasa Bulanan	721.255.700	12 Jasa Bulanan	793.381.270
1	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	12 laporan	275.971.630	12 laporan	303.568.793
1	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	12 laporan bulanan	302.601.350	12 laporan bulanan	332.861.485
1	03	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	157.126.200	12 laporan	172.838.820
1	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 laporan	59.813.600	12 laporan	65.794.960
1	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan	419.510.300	12 laporan	461.461.330
1	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	400.000.000	12 laporan	440.000.000
1	03	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- jumlah laporan penyediaan jasa keamanan kantor	12 laporan	836.946.000	12 laporan	920.640.600
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	tertib administrasi tata publik perkantoran	100 %	3.804.504.300		4.184.954.730
1	03	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	133 Unit	1.451.244.900	133 Unit	1.596.369.390
1	03	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- jumlah laporan peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 laporan	184.550.000	12 laporan	203.005.000
1	03	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2 gedung	1.927.457.400	2 gedung	2.120.203.140
1	03	02	045	Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	- Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	241.252.000	1 Aplikasi	265.377.200
1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	peningkatan disiplin aparatur	100 %	217.899.000		239.688.900
1	03	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	330 Stel	217.899.000	330 Stel	239.688.900
1	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	tertib administrasi tata publik perkantoran	100 %	30.900.000	100 %	33.990.000
1	03	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	330 orang	30.900.000	330 orang	33.990.000
1	03	33		Program Perencanaan Tata Ruang	meningkatkan dokumen perencanaan tata ruang	2 Dokumen	1.270.004.100	2 Dokumen	1.397.004.510
1	03	33	013	Kegiatan Survey dan Pemetaan	- Jumlah dokumen informasi geospasial sesuai kebutuhan	1 Dokumen	448.546.200	1 Dokumen	493.400.820
1	03	33	026	Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Garisan Rencana Sarana Prasarana Kota	- jumlah dokumen peta garisan rencana kota	1 Dokumen	266.070.200	1 Dokumen	292.677.220
1	03	33	029	Penyusunan Kebijakan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang	- jumlah dokumen teknis tata ruang	1 Dokumen	555.387.700	1 Dokumen	610.926.470
1	03	40		Program Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota	77 %	733.063.090	77 %	806.369.399
1	03	40	002	Kegiatan Pengawasan Bangunan	- jumlah wilayah yang telah dilakukan pengawasan bangunan	8 SWK	45.520.000	8 SWK	50.072.000
1	03	40	003	Kegiatan Penertiban Bangunan	- Jumlah wilayah yang telah dilakukan peningkatan ketertiban bangunan dan bangun bangunan di Kota Bandung	8 SWK	187.873.240	8 SWK	206.660.564
1	03	40	004	Kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip/dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	- jumlah unit arsip tata ruang yang tertata	1 Unit	357.152.250	1 Unit	392.867.475
1	03	40	005	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota	- jumlah dokumen evaluasi pemanfaatan ruang, pengawasan dan pengendalian tata ruang	1 Dokumen	142.517.600	1 Dokumen	156.769.360
1	03	45		PEMANFAATAN RUANG KOTA	meningkatkan bangunan gedung umum yang memenuhi RTH privat	3 %	8.472.791.800	3 %	9.320.070.980
1	03	45	001	Penyusunan Perencanaan Bangunan Gedung Pemerintah	- jumlah dokumen DED/FS bangunan gedung pemerintah	3 Dokumen	4.301.814.000	3 Dokumen	4.731.995.400
1	03	45	006	Penyusunan Kebijakan Teknis tentang Bangun Bangunan	- jumlah dokumen panduan design elemen dekorasi kota	1 Dokumen	367.178.900	1 Dokumen	403.896.790
1	03	45	008	Pemutakhiran Data Bangunan	- jumlah dokumen pemutakhiran data bangunan	1 Dokumen	316.065.200	1 Dokumen	347.671.720
1	03	45	009	Pendataan dan Penggambaran Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan Pemerintah	- jumlah dokumen aset bangunan pemerintah	1 Dokumen	399.451.800	1 Dokumen	439.396.980
1	03	45	010	Penyusunan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung (TABG)	- jumlah dokumen rekomendasi teknis bangunan gedung	1 Dokumen	2.355.056.000	1 Dokumen	2.590.561.600
1	03	45	012	Kegiatan evaluasi pemanfaatan ruang terbuka hijau perkotaan	- jumlah dokumen kajian pemanfaatan ruang terbuka hijau privat bangunan gedung umum	1 Dokumen	379.383.400	1 Dokumen	417.321.740

1	03	45	013	Kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi Penerbitan SLBP			353.842.500		389.226.750
1	04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	04	19		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	tertatanya areal pemakaman	32 %	10.522.187.060	32 %	11.574.405.766
1	04	19	021	kegiatan Pengelolaan Pemakaman I	- Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil I	3 UPT	2.513.270.800	3 UPT	2.764.597.880
1	04	19	022	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman II	- Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil II	4 UPT	2.548.003.760	4 UPT	2.802.804.136
1	04	19	023	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman III	- Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil III	3 TPU	2.911.930.000	3 TPU	3.203.123.000
1	04	19	024	Kegiatan Pengelolaan Pemakaman IV	- Jumlah TPU pemakaman yang ditata dan dipelihara UPT Wil IV	3 TPU	2.548.982.500	3 TPU	2.803.880.750

# Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan

Total Pagu : 302.973.999.251

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi	100 %	1.358.403.944	100 %	1.494.244.338
1	04	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Jasa Bulanan	1.100.230.314	12 Jasa Bulanan	1.210.253.345
1	04	01	003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 kali	21.090.000	2 kali	23.199.000
1	04	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	108 Unit	237.083.630	108 Unit	260.791.993
1	04	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90 %	11.424.566.192	90 %	12.567.022.812
1	04	02	012 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Tersedianya perlengkapan dan peralatan aparatur	6 jenis	310.402.620	6 jenis	341.442.882
1	04	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	3.145.360.157	1 gedung	3.459.896.173
1	04	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas oprasional terpelihara	76 Unit	5.418.372.600	76 Unit	5.960.209.860
1	04	02	049 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	- Jumlah Kendaraan Operasional yang dikelola	44 Unit	2.550.430.815	44 Unit	2.805.473.897
1	04	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100 %	117.521.250	100 %	129.273.375
1	04	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	185 Stel	117.521.250	185 Stel	129.273.375
1	04	20	Program Penataan Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	3.96 %	52.318.869.560	3.96 %	57.550.756.516
1	04	20	004 Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	- Infrastruktur Permukiman yang terpelihara	80 Titik	1.472.369.450	80 Titik	1.619.606.395
1	04	20	005 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	- Jumlah dokumen pengawasan	9 Dokumen	1.166.817.500	9 Dokumen	1.283.499.250
1	04	20	006 Kegiatan Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	- Jumlah Penerangan Jalan Lingkungan	1431 titik	6.255.266.246	1431 titik	6.880.792.871
1	04	20	007 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Lingkungan	11163 m2	12.402.842.320	11163 m2	13.643.126.552
1	04	20	008 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	- Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan	1376 m2	2.456.785.696	1376 m2	2.702.464.266
1	04	20	009 Kegiatan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	- Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	30 lokasi	711.321.920	30 lokasi	782.454.112
1	04	20	010 Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar	- Jumlah sarana Air Bersih yang di bangun	112 lokasi	22.966.401.593	112 lokasi	25.263.041.752
1	04	20	011 Kegiatan Perencanaan kawasan permukiman	- Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	26 Dokumen	4.887.064.835	26 Dokumen	5.375.771.319
1	04	26	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	3.73 %	7.284.214.992	3.73 %	8.012.636.491
1	04	26	001 Kegiatan Pemeliharaan Elemen Estetika Kota	- Elemen estetika kota yang terpelihara	117 lokasi	4.484.585.070	117 lokasi	4.933.043.577
1	04	26	002 Kegiatan Penataan Elemen Estetika Kota	- Elemen estetika kota yang tertata	4 lokasi	1.389.974.750	4 lokasi	1.528.972.225
1	04	26	003 Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas	- Jumlah dokumen perencanaan PSU	2 Dokumen	1.138.230.172	2 Dokumen	1.252.053.189
1	04	26	004 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Prasarana Sarana dan Utilitas	- Jumlah dokumen pengawasan	1 Dokumen	271.425.000	1 Dokumen	298.567.500
1	04	27	Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak	67.70 %	62.151.769.946	67.70 %	68.366.946.941
1	04	27	001 Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	- Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	1000 Unit	23.478.788.145	1000 Unit	25.826.666.960
1	04	27	002 Kegiatan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat	- Jumlah sarana dan prasarana dasar perumahan sederhana sehat	2 lokasi	30.540.800.000	2 lokasi	33.594.880.000
1	04	27	003 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	- Jumlah dokumen pengawasan	8 Dokumen	1.521.181.800	8 Dokumen	1.673.299.980
1	04	27	004 Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun	- Jumlah rumah susun yang dikelola	10 gedung	5.611.000.001	10 gedung	6.172.100.001
1	04	27	005 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Perumahan	- Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	1.000.000.000	5 Dokumen	1.100.000.000
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	04		Pertanahan					
2	04	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	8.234.879.452		9.058.367.397
2	04	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah jasa kebersihan kantor	12 Jasa Bulanan	4.100.781.565	12 Jasa Bulanan	4.510.859.722
2	04	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	8 jenis	489.185.500	8 jenis	538.104.050
2	04	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	12 laporan	199.994.737	12 laporan	219.994.211
2	04	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	17 jenis	225.216.500	17 jenis	247.738.150
2	04	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 laporan	67.474.750	12 laporan	74.222.225
2	04	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 jenis	118.800.000	4 jenis	130.680.000

2	04	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah penyediaan bahan bacaan	16 jenis	67.284.000	16 jenis	74.012.400
2	04	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	400.000.000	12 laporan	440.000.000
2	04	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	750.000.000	12 Bulan	825.000.000
2	04	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung bulanan	12 Jasa Bulanan	365.436.000	12 Jasa Bulanan	401.979.600
2	04	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah jasa pengaman kantor	26 Org	1.450.706.400	26 Org	1.595.777.040
2	04	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	-	<b>172.975.000</b>		<b>190.272.500</b>
2	04	05	008	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	185 Org	172.975.000	185 Org	190.272.500
2	04	16		<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	Persentase luasan RTH	<b>12.21 %</b>	<b>71.728.634.245</b>	<b>12.21 %</b>	<b>78.901.497.670</b>
2	04	16	269	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah aset Tanah untuk RTH	17 lokasi	25.125.418.775	17 lokasi	27.637.960.653
2	04	16	270	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah aset Tanah untuk perkantoran	7 lokasi	20.645.000.000	7 lokasi	22.709.500.000
2	04	16	271	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah aset Tanah untuk fasilitas umum	1 lokasi	12.985.000.000	1 lokasi	14.283.500.000
2	04	16	272	Kegiatan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	- Jumlah dokumen untuk pelayanan sewa tanah	1 Dokumen	1.640.667.500	1 Dokumen	1.804.734.250
2	04	16	273	Kegiatan Pemuktahiran Database Sewa Tanah Milik Daerah	- Database sewa tanah milik Daerah	1 Dokumen	224.092.000	1 Dokumen	246.501.200
2	04	16	275	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertanahan	- Jumlah pengawasan dan pengendalian pertanahan	1 Dokumen	2.342.794.270	1 Dokumen	2.577.073.697
2	04	16	281	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk RTH	18 Dokumen	1.480.000.000	18 Dokumen	1.628.000.000
2	04	16	282	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk RTH	18 Kali	235.240.000	18 Kali	258.764.000
2	04	16	283	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RTH	- Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk RTH	18 Dokumen	1.000.000.000	18 Dokumen	1.100.000.000
2	04	16	284	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk perkantoran	8 Dokumen	425.000.000	8 Dokumen	467.500.000
2	04	16	285	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk perkantoran	8 kali	337.800.000	8 kali	371.580.000
2	04	16	286	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Perkantoran	- Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk perkantoran	8 Dokumen	1.000.000.000	8 Dokumen	1.100.000.000
2	04	16	287	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	247.500.000
2	04	16	288	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah persiapan pengadaan lahan untuk fasilitas umum	1 kali	150.000.000	1 kali	165.000.000
2	04	16	289	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum	- Jumlah aset Pemerintah Kota Bandung untuk fasilitas umum	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000
2	04	16	290	Kegiatan Analisa dan Studi Kelayakan Pertanahan	- Jumlah dokumen hasil analisa dan studi kelayakan pertanahan	3 Dokumen	1.950.000.000	3 Dokumen	2.145.000.000
2	04	16	291	Kegiatan Penanganan Konflik-konflik Pertanahan	- Jumlah masalah pertanahan yang tertangani	25 kasus	962.621.700	25 kasus	1.058.883.870
2	05			<b>Lingkungan Hidup</b>					
2	05	24		<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	Persentase RTH yang berkualitas	<b>50.31 %</b>	<b>88.182.164.670</b>	<b>50.31 %</b>	<b>97.000.381.137</b>
2	05	24	005	Kegiatan Penataan RTH	- Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan yang tertata	51 lokasi	6.610.346.589	51 lokasi	7.271.381.247
2	05	24	006	Kegiatan Pemeliharaan RTH	- Jumlah taman, median dan jalur hijau jalan dalam kondisi baik	150 lokasi	34.559.742.213	150 lokasi	38.015.716.434
2	05	24	029	Kegiatan Pengelolaan Taman Rekreasi	- Taman Tegallega dalam kondisi baik	196567 M2	42.113.746.000	196567 M2	46.325.120.600
2	05	24	030	Kegiatan Pemeliharaan, Pengawasan, Pengendalian dan Penghijauan Pohon	- Pemeliharaan Pohon dan Penghijauan di Kota Bandung	30 Kecamatan	3.262.560.156	30 Kecamatan	3.588.816.172
2	05	24	031	Kegiatan Penyediaan Bibit Tanaman	- Jumlah Bibit Tanaman	7697 bibit	1.335.808.962	7697 bibit	1.469.389.858
2	05	24	032	Kegiatan Perencanaan RTH	- Jumlah Dokumen perencanaan	5 Dokumen	299.960.750	5 Dokumen	329.956.825

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja

Total Pagu : 30.484.949.407

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	3.758.703.275	100 %	4.134.573.603
1	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Listrik, Air, Telp, Internet	12 laporan	209.347.600	12 laporan	230.282.360
1	05	01	003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			158.928.000		174.820.800
1	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 laporan	117.752.900	12 laporan	129.528.190
1	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	47.373.500	12 laporan	52.110.850
1	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 laporan	154.094.000	12 laporan	169.503.400
1	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK.	12 laporan	109.795.730	12 laporan	120.775.303
1	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	12 laporan	69.024.637	12 laporan	75.927.101
1	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	12 laporan	8.334.700	12 laporan	9.168.170
1	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	4.181.760	12 laporan	4.599.936
1	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Jenis Bahan Bacaan, Jumlah Jasa Pemasangan Iklan yang Terpasang	12 laporan	45.372.000	12 laporan	49.909.200
1	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 laporan	434.900.000	12 laporan	478.390.000
1	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Bulanan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	669.910.048	12 laporan	736.901.053
1	05	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	12 laporan	1.729.688.400	12 laporan	1.902.657.240
1	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	3.886.745.114	75 %	4.275.419.625
1	05	02	012 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Jenis Perlengkapan dan Peralatan Aparatur	4 jenis	83.425.100	4 jenis	91.767.610
1	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Unit	128.999.014	1 Unit	141.898.915
1	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	12 laporan	3.663.640.000	12 laporan	4.030.004.000
1	05	02	030 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi	- Jumlah Laporan Bulanan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	12 laporan	10.681.000	12 laporan	11.749.100
1	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100 %	974.308.360	91,64 %	1.071.739.196
1	05	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	333 Stel	303.922.410	333 Stel	334.314.651
1	05	03	003 Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	333 Stel	503.129.700	333 Stel	553.442.670
1	05	03	005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu	338 Stel	167.256.250	338 Stel	183.981.875
1	05	08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi	100 %	227.764.600	80 %	250.541.060
1	05	08	001 Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Bulanan Pengelolaan Data dan Informasi	12 laporan	227.764.600	12 laporan	250.541.060
1	05	32	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT	Cakupan Pengembangan Kemampuan dan Pengetahuan Pol PP dan Masyarakat	75 %	1.188.096.200	75 %	1.306.905.820
1	05	32	001 Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal kepada Masyarakat dan Badan Hukum	- Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan Perda Perwal yang Mengandung Sanksi	288 kali	357.852.200	288 kali	393.637.420
1	05	32	002 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI, POLRI dan Instansi Terkait	- Jumlah Polisi Pamong Praja yang Terlatih - Jumlah Pelatihan Polisi Pamong Praja Bekerja Sama dengan TNI, Polri, dan Instansi Terkait	346 Orang 2 Kegiatan	600.000.000	346 Orang 2 Kegiatan	660.000.000
1	05	32	003 Kegiatan Penanganan Perkara Pelanggaran Perda (Sekretariat PPNS)	- Jumlah Bimtek penanganan Perkara Pelanggaran Perda - Jumlah PPNS yang Mengikuti Bimtek Penanganan Perkara Pelanggaran Perda	3 Bimtek 80 Orang	230.244.000	3 Bimtek 80 Orang	253.268.400
1	05	34	PROGRAM PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Persentase Penegakan PERDA	100 %	1.355.536.000	100 %	1.491.089.600
1	05	34	001 Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Gangguan Tibum Tranmas	- Jumlah Operasi Pengamatan dan Penggambaran Intelijen terhadap Gangguan Tibum Tranmas	24 kali	210.000.000	24 kali	231.000.000
1	05	34	003 Kegiatan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	- Jumlah Operasi Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah - Jumlah Sidang Yustisi	100 kali 10 kali	1.022.486.000	100 kali 10 kali	1.124.734.600

1	05	34	004	Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah Laporan Bulanan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	12 laporan	123.050.000	12 laporan	135.355.000
1	05	35		<b>Program Peyelenggaraan Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat</b>	Persentase Siskamling Tingkat RW yang Aktif	<b>70,07 %</b>	<b>3.512.463.758</b>	<b>70,07 %</b>	<b>3.863.710.134</b>
1	05	35	001	Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah Anggota Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang Diperbantukan - Jumlah Patroli Anggota Linmas	90 Orang 240 kali	2.515.225.000	90 Orang 240 kali	2.766.747.500
1	05	35	002	Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah Pelatihan dan Pembinaan Dalam Rangka Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Jumlah Anggota Linmas Terlatih	5 kali 200 Orang	759.912.758	5 kali 200 Orang	835.904.034
1	05	35	003	Kegiatan Peningkatan bina potensi masyarakat	- Jumlah Siskamling RW Terbina	50 RW	237.326.000	50 RW	261.058.600
1	05	36		<b>Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Cakupan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>100 %</b>	<b>15.581.332.100</b>	<b>100 %</b>	<b>17.139.465.310</b>
1	05	36	001	Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Trantibum Tranmas dengan TNI, POLRI, dan Instansi terkait	- Jumlah Operasi yang Bekerja Sama dengan TNI, POLRI, dan Instansi Terkait dalam Penyelenggaraan Trantibum	24 kali	1.434.975.000	24 kali	1.578.472.500
1	05	36	002	Kegiatan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Patroli Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan	12 Kali	43.970.000	12 Kali	48.367.000
1	05	36	003	Kegiatan Dukungan Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Operasi Penertiban Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Tenaga PHL Satpol PP	365 kali 383 Orang	14.102.387.100	365 kali 383 Orang	15.512.625.810



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 1.05.02 Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Total Pagu : 31.877.994.789

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 05</b>			<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
<b>1 05 01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	<b>100 %</b>	<b>6.007.471.569</b>	<b>6.608.218.726</b>
1 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	556.724.380	12 laporan	612.396.818
1 05 01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	720.347.600	12 laporan	792.382.360
1 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	58 unit	627.694.000	58 unit	690.463.400
1 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	8 Orang	425.840.800	8 Orang	468.424.880
1 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	42 Unit	95.700.000	42 Unit	105.270.000
1 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Penyediaan ATK	24 Jenis	101.513.400	24 Jenis	111.664.740
1 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	7 jenis	103.019.679	7 jenis	113.321.647
1 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	7 jenis	19.811.100	7 jenis	21.792.210
1 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	8 jenis	954.381.400	8 jenis	1.049.819.540
1 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	257.458.870	12 laporan	283.204.757
1 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	12 laporan	173.360.000	12 laporan	190.696.000
1 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	320.204.340	12 laporan	352.224.774
1 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	814.470.000	12 laporan	895.917.000
1 05 01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor Bulanan	17 Orang	836.946.000	17 Orang	920.640.600
<b>1 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>1.044.780.960</b>		<b>1.149.259.056</b>
1 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 gedung	164.252.000	5 gedung	180.677.200
1 05 02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	5 gedung	880.528.960	5 gedung	968.581.856
<b>1 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	<b>100 %</b>	<b>1.331.832.700</b>		<b>1.465.015.970</b>
1 05 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	120 Stel	512.981.700	120 Stel	564.279.870
1 05 03	003	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	750 Stel	509.905.000	750 Stel	560.895.500
1 05 03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	350 Stel	308.946.000	350 Stel	339.840.600
<b>1 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	<b>100 %</b>	<b>343.014.400</b>	<b>100 %</b>	<b>377.315.840</b>
1 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Persentase layanan data dan informasi	100 %	343.014.400	100 %	377.315.840
<b>1 05 08</b>		<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	Persentase Layanan Data dan Informasi	<b>100 %</b>	<b>324.427.500</b>		<b>356.870.250</b>
1 05 08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Laporan dokumen data lingkup kebakaran dan kebencanaan	1 aplikasi	324.427.500	1 aplikasi	356.870.250
<b>1 05 27</b>		<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana</b>	-	-	<b>1.302.379.700</b>		<b>1.432.617.670</b>
1 05 27	002	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan bahaya kebakaran dan bencana	- Jumlah Penyuluhan Kebakaran dan Bencana	15 kelurahan	579.408.500	15 kelurahan	637.349.350
1 05 27	004	Kegiatan Pembinaan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	- Jumlah Kader Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana yang Terbina	200 orang	440.541.700	200 orang	484.595.870
1 05 27	005	Kegiatan Penyusunan, Sosialisasi dan Pengawasan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	- Jumlah bangunan dan gedung yang diawasi dan diperiksa alat pemadam dan proteksi kebakaran baik aktif maupun pasif serta alat proteksi kebakaran di kawasan pemukiman - Jumlah Penyusunan Peraturan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Bencana	720 gedung 1 Produk hukum	282.429.500	720 gedung 1 Produk hukum	310.672.450
<b>1 05 28</b>		<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan</b>	Tingkat waktu maksimum tanggap (Respons Time Rate)	<b>15 menit</b>	<b>533.857.110</b>	<b>15 menit</b>	<b>587.242.821</b>
1 05 28	004	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Utara	- Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	100 % 8 Kelurahan	135.633.450	100 % 8 Kelurahan	149.196.795

1	05	28	005	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Barat	- Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	100 % 8 Kelurahan	136.259.400	100 % 8 Kelurahan	149.885.340
1	05	28	006	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Timur	- Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	100 % 8 Kelurahan	134.341.760	100 % 8 Kelurahan	147.775.936
1	05	28	007	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana di UPT Wilayah Selatan	- Persentase layanan penanggulangan kebakaran dan bencana dalam waktu tanggap - Jumlah Sosialisasi penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat	100 % 7 Kelurahan	127.622.500	100 % 7 Kelurahan	140.384.750
1	05	28		<b>Program Peningkatan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan</b>	-	-	<b>13.584.830.990</b>		<b>14.943.314.089</b>
1	05	28	001	Kegiatan Pelayanan Penanggulangan Operasi Pemadaman	- Persentase layanan pemadaman dan terdampak kebakaran dalam waktu tanggap	100 %	12.912.819.090	100 %	14.204.100.999
1	05	28	002	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan	- Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam	576 Orang	507.011.900	576 Orang	557.713.090
1	05	28	003	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	- Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi kebakaran dan non kebakaran) dalam waktu tanggap	100 %	165.000.000	100 %	181.500.000
1	05	30		<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya</b>	-	-	<b>6.085.980.080</b>		<b>6.694.578.088</b>
1	05	30	001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana lainnya	- Jumlah Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebakaran, Penyelamatan dan Bencana	14 jenis	3.430.735.400	14 jenis	3.773.808.940
1	05	30	002	Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya	- Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana kebakaran, penyelamatan dan bencana	59 Unit	840.308.480	59 Unit	924.339.328
1	05	30	004	Kegiatan penataan sarana dan prasarana kawasan dan logistik	- Jumlah kawasan kumuh di kelurahan yang memiliki sarana pengamanan kebakaran	2 Kelurahan	1.814.936.200	2 Kelurahan	1.996.429.820
1	05	37		<b>Program Peningkatan Penanggulangan Pra dan Tanggap Darurat Bencana</b>	-	-	<b>1.319.419.780</b>		<b>1.451.361.758</b>
1	05	37	001	Kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana	- jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana - Jumlah Aparatur dan warga negara yang mendapat pelatihan kebencanaan	200 Orang 200 Orang	642.566.600	200 Orang 200 Orang	706.823.260
1	05	37	002	Kegiatan fasilitasi penanganan darurat	- Persentase layanan tanggap darurat bencana kebakaran dalam waktu tanggap - Persentase tingkat waktu maksimum assesment tanggap darurat bencana	100 % 100 %	232.615.000	100 % 100 %	255.876.500
1	05	37	003	Kegiatan Kerjasama bantuan penanggulangan bencana	- Persentase penyaluran kebutuhan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	444.238.180	100 %	488.661.998

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 1.06.01 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Total Pagu : 28.189.964.100

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	06		Sosial					
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9.372.287.480	100 %	10.309.516.228
1	06	01	002 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah dokumen pelaporan penyediaan jasa listrik, air, dan komunikasi	12 Dokumen	778.620.000	12 Dokumen	856.482.000
1	06	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Pemenuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	25 Unit	1.132.996.750	25 Unit	1.246.296.425
1	06	01	010 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	- Cakupan penyediaan ATK	100 %	199.991.330	100 %	219.990.463
1	06	01	011 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Cakupan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	200.910.000	100 persen	221.001.000
1	06	01	014 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	- cakupan penyediaan peralatan rumah tangga	100 persen	87.553.400	100 persen	96.308.740
1	06	01	015 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan (koran dan majalah) yang disediakan dalam setahun	100 persen	23.020.800	100 persen	25.322.880
1	06	01	017 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah pelaporan penyediaan makanan dan minuman	12 Dokumen	151.786.800	12 Dokumen	166.965.480
1	06	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah dokumen pelaporan perjalanan dinas luar daerah	12 Dokumen	337.500.000	12 Dokumen	371.250.000
1	06	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan supir kantor	102 Orang	4.519.508.400	102 Orang	4.971.459.240
1	06	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	16 Orang	1.940.400.000	16 Orang	2.134.440.000
1	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	100 %	1.627.842.590	100 %	1.790.626.849
1	06	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah dokumen laporan pemeliharaan gedung kantor	3 Dokumen	1.189.005.840	3 Dokumen	1.307.906.424
1	06	02	048 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2005 Manajemen Mutu	- Status sertifikasi ISO 9001-2015 dan jumlah dokumen draft Raperwal / Kajian penyelenggaraan kesos	1 Dokumen	79.997.500	1 Dokumen	87.997.250
1	06	02	049 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	- Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana	12 Dokumen	358.839.250	12 Dokumen	394.723.175
1	06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	111.100.000	100 %	122.210.000
1	06	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan kinerja	100 Orang	111.100.000	100 Orang	122.210.000
1	06	24	Program Perlindungan Sosial Bencana	-	-	1.368.370.600		1.505.207.660
1	06	24	001 Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan Kebencanaan	- Jumlah personil Tagana yang memperoleh bimbingan teknis dan insentif selama 1 tahun	60 Orang	488.370.600	60 Orang	537.207.660
1	06	24	002 Kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Kegiatan penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap, cepat darurat serta kejadian luar biasa	100 persen	880.000.000	100 persen	968.000.000
1	06	26	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Cakupan warga miskin yang memperoleh akses terhadap program pemerintah	100 %	4.323.098.400	100 %	4.755.408.240
1	06	26	004 Kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya	- Cakupan layanan bagi warga miskin yang memohon layanan	100 persen	201.352.800	100 persen	221.488.080
1	06	26	005 Kegiatan Identifikasi dan verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	- Jumlah dokumen penetapan data PMKS dan fakir miskin yang valid dan mutakhir	2 Dokumen	2.316.594.500	2 Dokumen	2.548.253.950
1	06	26	006 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	- Jumlah media yang digunakan untuk penyebarluasan informasi	3 media	349.992.500	3 media	384.991.750
1	06	26	007 Kegiatan Pengendalian Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	- Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi data kesejahteraan sosial	4 Kegiatan	58.355.000	4 Kegiatan	64.190.500
1	06	26	008 Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin	- Jumlah warga miskin yang memperoleh jaminan sosial	59308 KK	1.396.803.600	59308 KK	1.536.483.960
1	06	28	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	620000 keluarga	2.684.058.743	620000 keluarga	2.952.464.617
1	06	28	002 Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	- Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan - Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan	1250 keluarga 1250 Orang	1.628.058.743	1250 keluarga 1250 Orang	1.790.864.617
1	06	28	006 Kegiatan pengembangan usaha ekonomi keluarga PMKS	- Jumlah keluarga yang mengikuti pengembangan usaha ekonomi	151 Orang	1.056.000.000	151 Orang	1.161.600.000
1	06	29	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	8.234.701.987		9.058.172.186
1	06	29	001 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan	- Cakupan korban trafficking yang memperoleh pelayanan advokasi dan perlindungan sosial	50 Orang	23.760.000	50 Orang	26.136.000
1	06	29	003 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	- Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial	120 Orang	182.933.000	120 Orang	201.226.300
1	06	29	004 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	- Jumlah penjangkauan dan penerbitan PMKS jalanan	160 kali	707.817.750	160 kali	778.599.525
1	06	29	007 Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Puskesmas	- Cakupan klien puskesmas yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	100 persen	5.248.417.237	100 persen	5.773.258.961

1	06	29	008	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Luar Panti	- Jumlah anak terlantar yang mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan	350 Orang	611.865.750	350 Orang	673.052.325
1	06	29	009	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	- Jumlah lanjut usia luar panti yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar berupa tambahan nutrisi	500 Orang	568.391.250	500 Orang	625.230.375
1	06	29	010	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas	- Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pembinaan melalui rehabilitasi sosial dan penyelenggaraan hari Disabilitas Internasional	1000 Orang	891.517.000	1000 Orang	980.668.700
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>32</b>		<b>Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	-	-	<b>468.504.300</b>		<b>515.354.730</b>
1	06	32	001	Kegiatan Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	- Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	30 Kegiatan	119.949.500	30 Kegiatan	131.944.450
1	06	32	002	Kegiatan peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	- Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang mengikuti bimbingan teknis	2675 Orang	138.468.000	2675 Orang	152.314.800
1	06	32	005	Kegiatan Pelestarian Nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	- Jumlah kegiatan - kegiatan dalam rangka pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	2 Kegiatan	132.000.000	2 Kegiatan	145.200.000
1	06	32	007	Kegiatan Peningkatan jenjang kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	- Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	4 Kegiatan	78.086.800	4 Kegiatan	85.895.480

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

Total Pagu : 24.671.184.688

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2	3	4	5	6	7
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	01			Tenaga Kerja					
2	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	3.438.815.483	100 persen	3.782.697.031
2	01	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			35.715.000		39.286.500
2	01	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	12 laporan	534.808.800	12 laporan	588.289.680
2	01	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	176 Unit	59.675.000	176 Unit	65.642.500
2	01	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	2 laporan	213.833.180	2 laporan	235.216.498
2	01	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 laporan	146.037.750	1 laporan	160.641.525
2	01	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21 jenis	49.536.300	21 jenis	54.489.930
2	01	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 laporan	50.765.550	1 laporan	55.842.105
2	01	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Kebutuhan untuk Iklan - Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 kali 12 laporan	762.430.000	4 kali 12 laporan	838.673.000
2	01	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Makan dan Minum Dinas	12 laporan	68.874.300	12 laporan	75.761.730
2	01	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	12 laporan	550.845.483	12 laporan	605.930.031
2	01	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	4 laporan	361.833.120	4 laporan	398.016.432
2	01	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Kebutuhan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	4 laporan	604.461.000	4 laporan	664.907.100
2	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	11.343.914.200	100 persen	12.478.305.620
2	01	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Terwujudnya Gedung Kantor	1 gedung	10.295.283.000	1 gedung	11.324.811.300
2	01	02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	14 Unit	51.947.500	14 Unit	57.142.250
2	01	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Bangunan	90.112.000	2 Bangunan	99.123.200
2	01	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	49 Unit	906.571.700	49 Unit	997.228.870
2	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Program Kegiatan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	220 orang	1.992.540.510	220 orang	2.191.794.561
2	01	15	006	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	- Jumlah Peserta pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Sertifikasi di Bidang Las Listrik - Jumlah Peserta pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan sertifikasi di Bidang Teknisi Otomotif Mobil - Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Sertifikasi di Bidang Administrasi perkantoran - Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Sertifikasi di Bidang Teknologi (Desain Grafis) - Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Sertifikasi Teknik Pendinginan	2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket	1.179.022.910	2 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket	1.296.925.201
2	01	15	012	Kegiatan Pemagangan dalam negeri	- Jumlah Peserta Pemagangan bagi Perusahaan	40 Orang	292.350.600	40 Orang	321.585.660
2	01	15	013	Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	- Data Base Ketenagakerjaan - BIMMA	1 Dokumen 1 aplikasi	178.671.900	1 Dokumen 1 aplikasi	196.539.090
2	01	15	014	Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi Lembaga Pelatihan Kerja	- Bimtek Akreditasi,Bimtek Metodologi,Competency Base training (CBT) - Jumlah LPK yang diakreditasi	4 Paket 10 LPK	282.580.500	4 Paket 10 LPK	310.838.550
2	01	15	015	Kegiatan Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	- Jumlah Peningkatan Uji Kompetensi Tenaga Kerja	20 Orang	59.914.600	20 Orang	65.906.060
2	01	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Terlaksananya Program Kegiatan Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	1120 orang	5.373.781.101		5.911.159.211
2	01	16	005	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	- Jumlah Pelatihan Bagi Calon Wira Usaha Baru - Jumlah pembekalan bagi calon Wirausaha baru - Terselenggaranya pelatihan produktiftas	840 orang 6 kali 4 Paket	2.318.994.221	840 orang 6 kali 4 Paket	2.550.893.643
2	01	16	008	Perluasan Kesempatan Kerja	- Jumlah Pelatihan Pengembangan Wirausaha Baru	280 Orang	1.433.634.280	280 Orang	1.576.997.708

2	01	16	009	Kegiatan Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	- Sosialisasi Bursa Kerja Khusus (BKK) - Jumlah Pameran Bursa Kerja	1 Paket 4 event	1.291.240.600	1 Paket 4 event	1.420.364.660
2	01	16	011	Kegiatan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	- Jumlah Pembinaan/Monitoring TKI/TKA/Disabilitas	60 perusahaan	329.912.000	60 perusahaan	362.903.200
2	01	17		<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	Terselesaikannya Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB)	<b>58 persen</b>	<b>2.384.939.350</b>	<b>58 persen</b>	<b>2.623.433.285</b>
2	01	17	011	Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, Peningkatan Peran Serta Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan dan Pembahasan Serta Perumusan UMK Bandung	- Jumlah Pembinaan Hubungan Industrial, Peningkatan Peran serta Fungsi Kelembagaan ketenagakerjaan dan Pembahasan serta Perumusan UMK Bandung - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) - Kajian Sektor Unggulan rekomendasi UMK, UMSK dan Survey pasar - Jumlah Rapat Dewan Pengupahan Kota (DPK) - Jumlah rapat LKS Tripartit - Pembinaan Hubungan Industrial - Sosialisasi UMK dan Struktur skala Upah	5 kali 2 Kegiatan 4 Dokumen 9 kali 8 kali 2 kali 1 Kegiatan	1.315.600.000	5 kali 2 Kegiatan 4 Dokumen 9 kali 8 kali 2 kali 1 Kegiatan	1.447.160.000
2	01	17	015	Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	- Diseminasi Norma Kerja dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan	5 kali	233.016.000	5 kali	256.317.600
2	01	17	016	Kegiatan Peningkatan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	- Bimbingan Teknis calon Ahli K3 Umum - Bimbingan Teknis Pembentukan P2K3	1 kali 1 Kali	320.908.325	1 kali 1 Kali	352.999.158
2	01	17	017	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	- Jumlah Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Persyaratan Kerja	4 kegiatan	175.312.050	4 kegiatan	192.843.255
2	01	17	018	Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Pekerja/Buruh	- Diseminasi fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5 kali	151.615.150	5 kali	166.776.665
2	01	17	019	Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	- Jumlah Penguatan Mediator - Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - Jumlah Pembinaan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	30 Orang 150 Orang 1 kali	188.487.825	30 Orang 150 Orang 1 kali	207.336.608
3				<b>Urusan Pilihan</b>					
3	08			<b>Transmigrasi</b>					
3	08	15		<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	Terlaksananya Program Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi yang diikuti oleh Masyarakat	<b>120 orang</b>	<b>137.194.044</b>	<b>120 orang</b>	<b>150.913.448</b>
3	08	15	006	Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Transmigrasi	- Jumlah Masyarakat yang diberikan Penyuluhan Bertransmigrasi	120 orang	137.194.044	120 orang	150.913.448

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat

Total Pagu : 12.324.968.547

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	02		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	4.848.088.536		5.332.897.389
2	02	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, air dan Listrik	12 Jasa Bulanan	153.359.269	12 Jasa Bulanan	168.695.195
2	02	01	003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	22.000.000	20 Unit	24.200.000
2	02	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	17 Unit	519.028.400	17 Unit	570.931.240
2	02	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	589.490.000	12 Jasa Bulanan	648.439.000
2	02	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	1 laporan	141.250.600	1 laporan	155.375.660
2	02	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Penggandaan	30 Jenis	136.489.150	30 Jenis	150.138.065
2	02	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	3 laporan	7.903.500	3 laporan	8.693.850
2	02	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 laporan	42.672.000	12 laporan	46.939.200
2	02	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	106.171.000	12 laporan	116.788.100
2	02	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	36 laporan	1.100.000.217	36 laporan	1.210.000.239
2	02	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan	858.000.000	12 laporan	943.800.000
2	02	01	020 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Jasa pengaman kantor	19 Org	1.004.335.200	19 Org	1.104.768.720
2	02	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	3 Org	167.389.200	3 Org	184.128.120
2	02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	200.363.522		220.399.874
2	02	02	003 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah unit pembagunan gedung kantor	1 Unit	5.309.040	1 Unit	5.839.944
2	02	02	012 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	3 Jenis	12.616.890	3 Jenis	13.878.579
2	02	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit pembagunan gedung kantor	1 gedung	182.437.592	1 gedung	200.681.351
2	02	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	49.775.000		54.752.500
2	02	03	005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			49.775.000		54.752.500
2	02	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	140.595.400		154.654.940
2	02	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	120 Org	140.595.400	120 Org	154.654.940
2	02	19	Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelurahan Layak Anak	6887 %	1.133.751.992	6887 %	1.247.127.191
2	02	19	001 Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)	- Jumlah Pembinaan Kelurahan Layak Anak	16 Kelurahan	493.521.992	16 Kelurahan	542.874.191
2	02	19	002 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum Anak	- Jumlah forum anak yang mendapatkan pembinaan - Jumlah Pembinaan forum anak Kecamatan	10 Kelurahan 15 Kecamatan	363.480.000	10 Kelurahan 15 Kecamatan	399.828.000
2	02	19	003 Kegiatan Sistem Perlindungan Bagi Anak	- Jumlah penyusunan database perlindungan anak	22 laporan	276.750.000	22 laporan	304.425.000
2	02	21	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Tingkat Partisipasi Organisasi Perempuan Dalam Ruang Publik	3050 %	1.022.176.476	3050 %	1.124.394.124
2	02	21	001 Kegiatan Pemberdayaan perempuan	- Jumlah Perempuan yang diberdayakan	100 %	372.878.176	100 %	410.165.994
2	02	21	002 Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Advokasi	- Jumlah keluarga Binaan	100 keluarga	360.209.300	100 keluarga	396.230.230
2	02	21	003 Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Perempuan	- Jumlah Lembaga dan Organisasi Perempuan yang mendapat pembinaan - jumlah dokumen	4 lembaga	289.089.000	4 lembaga	317.997.900
2	02	22	Program Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban kekerasan	Jumlah laporan penanganan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	150 Org	606.148.850	150 Org	666.763.735
2	02	22	001 Kegiatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	- Persentase penanganan Anak terhadap tindak kekerasan	100 %	606.148.850	100 %	666.763.735
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2	07	23	Program Peningkatan Pelayanan Bagi Lansia	Persentase Bandung Kota Ramah Lansia	1875 %	965.998.525	1875 %	1.062.598.378
2	07	23	001 Penyusunan Data dan Kebijakan Lansia	- Jumlah Penyusunan Kebijakan bagi Lansia	6 Dokumen	332.894.577	6 Dokumen	366.184.035
2	07	23	002 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Lansia	- Kelembagaan Lanjut Usia yang Aktif	13 lembaga	300.491.067	13 lembaga	330.540.174

2	07	23	003	Pengembangan Pemberdayaan Lansia	- Jumlah Lansia Yang diberdayakan	7500 Org	332.612.881	7500 Org	365.874.169
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>24</b>		<b>Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi</b>	Persentase Kelurahan Klasifikasi Swasembada	<b>5629 %</b>	<b>998.745.593</b>	<b>5629 %</b>	<b>1.098.620.152</b>
2	07	24	001	Pemberdayaan Sosial Budaya	- Jumlah kecamatan yang mendapatkan Pembinaan BBGRM	17 laporan	418.350.000	17 laporan	460.185.000
2	07	24	002	Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	- Jumlah Inovasi dan pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	30 lembaga	250.545.593	30 lembaga	275.600.152
2	07	24	003	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	- Jumlah Kecamatan yang mendapatkan fasilitas TTG	30 Kelurahan	329.850.000	30 Kelurahan	362.835.000
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>25</b>		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui swadaya murni masyarakat	<b>1 RW</b>	<b>2.359.324.654</b>	<b>2 %</b>	<b>2.595.257.119</b>
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	- Jumlah Pembinaan kelembagaan PKK, LPM, Posyandu	181 Kecamatan	1.701.397.904	181 Kecamatan	1.871.537.694
2	07	25	002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah Penyelenggaran lomba Lingkup Lembaga Kemasyarakatan dan Swadaya Masyarakat	5 laporan	336.926.750	5 laporan	370.619.425
2	07	25	003	Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	- Jumlah Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, P3MK, Manajemen Lembaga Kemasyarakatan	151 kelurahan	321.000.000	151 kelurahan	353.100.000



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.03.01 Dinas Pangan dan Pertanian

Total Pagu : 30.161.007.863

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2	3	4	5	6	7
3				Urusan Pilihan					
3	03			Pertanian					
3	03	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas Padi	11000 Pohon	2.000.502.164	68.22 kw/ha	2.200.552.380
3	03	19	010	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura - Penyediaan Tanaman buah-buahan - Penyediaan Tanaman sayuran - Penyediaan Tanaman hias	2 Paket 11.000 Pohon 105.000 Pohon 550 Pohon	720.636.700	2 Paket 11.000 Pohon 105.000 Pohon 550 Pohon	792.700.370
3	03	19	011	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Demplot padi - Pelatihan budidaya tanaman pangan - Pelatihan budidaya tanaman hias - Penanggulangan hama dan penyakit tanaman - Program Penghijauan - Panen Raya	2 lokasi 1 kali 1 kali 2 lokasi 1 kali 1 kali	210.019.470	2 lokasi 1 kali 1 kali 2 lokasi 1 kali 1 kali	231.021.417
3	03	19	012	Kegiatan Pengembangan Perbenihan/Perbibitan di UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	- Pembinaan Kelompok tani Padi di Lahan Sawah Abadi - Pelatihan Perbenihan/perbibitan - Pelatihan Hidroponik - Penyediaan bibit tanaman sayuran - Pelatihan Budidaya Ternak puyuh - Penyediaan pakan ternak - Penyediaan bibit tanaman buah-buahan	4 kali 5 kali 54 kali 60.000 Pohon 1 kali 17450 Kg 1.200 Pohon	650.913.110	4 kali 5 kali 54 kali 60.000 Pohon 1 kali 17450 Kg 1.200 Pohon	716.004.421
3	03	19	013	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	- Jumlah Pelatihan pengolahan hasil pertanian - Pelatihan kemasan - Pameran pertanian - Pendampingan pelaku usaha olahan hasil pertanian	300 Orang 3 kali 2 kali 1 kali	418.932.884	300 Orang 3 kali 2 kali 1 kali	460.826.172
3	03	25		Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Meningkatnya Mutu Tembakau Sesuai Kebutuhan Industri	100 %	300.000.100	100 %	330.000.110
3	03	25	002	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	- Workshop kelembagaan petani tembakau - Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) tembakau - Uji laboratorium kualitas tembakau	2 kali 2 kali 4 kali	300.000.100	2 kali 2 kali 4 kali	330.000.110
3	03	27		Program Peningkatan Produksi Peternakan	Populasi Ternak Domba	37829 ekor	585.484.197	37829 ekor	644.032.617
3	03	27	001	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Peternakan	- Penyediaan ternak domba - Pengadaan alat dan mesin peternakan	40 ekor 8 jenis	427.134.390	40 ekor 8 jenis	469.847.829
3	03	27	002	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan	- Demplot peternakan - Pelatihan budidaya ternak - Lomba kelompok ternak	2 lokasi 12 kali 1 kali	158.349.807	2 lokasi 12 kali 1 kali	174.184.788
3	03	28		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Peternakan	90 orang	411.626.900	90 orang	452.789.590
3	03	28	001	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	- Lomba olahan hasil peternakan - Pelatihan kemasan olahan hasil peternakan - Jumlah Pelatihan pengolahan hasil peternakan - Bimbingan teknis pemasaran online olahan hasil peternakan - Pameran olahan hasil peternakan - Pendampingan pelaku usaha olahan hasil peternakan	2 kali 150 Orang 180 Orang 1 kali 2 kali 180 Orang	411.626.900	2 kali 150 Orang 180 Orang 1 kali 2 kali 180 Orang	452.789.590
3	03	29		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah Maksimum Kasus Penyakit Zoonosa	7 kasus	1.045.003.125	7 kasus	1.149.503.438
3	03	29	001	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan dan Ternak	- Penyediaan peralatan kesehatan hewan - Penyediaan obat hewan, vaksin dan vitamin	7 Jenis 20 jenis	497.007.900	7 Jenis 20 jenis	546.708.690
3	03	29	002	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT Klinik Hewan	- Jumlah Pemeriksaan dan pengobatan kesehatan hewan - Penyediaan obat hewan - Penyediaan peralatan kesehatan hewan	6700 ekor 2 Paket 1 Paket	547.995.225	6700 ekor 2 Paket 1 Paket	602.794.748
3	01			Kelautan dan Perikanan					
3	01	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Ikan Konsumsi	37.97 kg/kap/thn	1.263.199.613	2970.5 ton	1.389.519.574
3	01	20	003	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	- Pencegahan dan pengobatan hama penyakit ikan - Jumlah Demplot ikan konsumsi dan ikan hias - Pelatihan budidaya perikanan	6 kali 6 lokasi 8 kali	236.204.023	6 kali 6 lokasi 8 kali	259.824.425

3	01	20	009	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	- Benih Ikan Hias - Pengadaan Sarana dan Prasarana Ikan Hias - Benih Ikan konsumsi - Pengadaan Sarana dan Prasarana Ikan Konsumsi - Pengadaan Pakan	6 set 1 Paket 250000 ekor 1 Paket 1 Paket	476.996.270	6 set 1 Paket 250000 ekor 1 Paket 1 Paket	524.695.897
3	01	20	010	Kegiatan Pengembangan Benih dan Bibit Ikan di UPT Balai Benih Ikan	- Benih dan Bibit Ikan konsumsi - Benih dan Bibit Ikan hias - Peralatan ikan konsumsi dan ikan hias - Pakan ikan konsumsi dan ikan hias	2400 ekor 25 ekor 3 Paket 8000 Kg	549.999.320	2400 ekor 25 ekor 3 Paket 8000 Kg	604.999.252
3	01	26		<b>Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	Bertambahnya Jumlah Pelaku Usaha Bidang Perikanan	<b>90 orang</b>	<b>409.476.770</b>	<b>90 orang</b>	<b>450.424.447</b>
3	01	26	001	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan - Pameran ikan hias - Jumlah Pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	6 kali 2 kali 120 Orang	409.476.770	6 kali 2 kali 120 Orang	450.424.447
2				<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
2	03			<b>Pangan</b>					
2	03	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Layanan Adiministrasi Perkantoran	<b>100 %</b>	<b>4.037.334.709</b>	<b>100 %</b>	<b>4.441.068.180</b>
2	03	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	12 laporan	903.064.800	12 laporan	993.371.280
2	03	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	5.808.000	12 laporan	6.388.800
2	03	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 laporan	390.574.800	12 laporan	429.632.280
2	03	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	12 laporan	259.629.040	12 laporan	285.591.944
2	03	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan pengadaan cetakan dan penggandaan	12 laporan	221.178.596	12 laporan	243.296.456
2	03	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 laporan	79.937.330	12 laporan	87.931.063
2	03	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	342.842.500	12 laporan	377.126.750
2	03	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	57.907.630	12 laporan	63.698.393
2	03	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 laporan	23.205.600	12 laporan	25.526.160
2	03	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan bulanan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	140.851.700	12 laporan	154.936.870
2	03	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan bulanan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	665.221.513	12 laporan	731.743.664
2	03	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	277.556.400	12 laporan	305.312.040
2	03	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	12 laporan	669.556.800	12 laporan	736.512.480
2	03	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>12.919.296.060</b>	<b>100 %</b>	<b>14.211.225.666</b>
2	03	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah lokasi Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	1 lokasi	10.506.672.880	1 lokasi	11.557.340.168
2	03	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah laporan pengadaan mebeulair	12 laporan	221.087.130	12 laporan	243.195.843
2	03	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 laporan	299.200.000	12 laporan	329.120.000
2	03	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12 laporan	1.115.835.050	12 laporan	1.227.418.555
2	03	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12 laporan	75.801.000	12 laporan	83.381.100
2	03	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah laporan gedung kantor yang direhabilitasi	12 laporan	700.700.000	12 laporan	770.770.000
2	03	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	<b>100 %</b>	<b>120.062.250</b>	<b>100 %</b>	<b>132.068.475</b>
2	03	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 laporan	120.062.250	1 laporan	132.068.475
2	03	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	<b>75 %</b>	<b>198.275.000</b>	<b>75 %</b>	<b>218.102.500</b>
2	03	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kinerja aparatur	1 laporan	198.275.000	1 laporan	218.102.500
2	03	15		<b>Program Ketahanan Pangan</b>	Jumlah Cadangan Pangan Ekuivalen Beras	<b>84.27 -</b>	<b>1.900.676.300</b>	<b>80 ton</b>	<b>2.090.743.930</b>
2	03	15	010	Kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung	- Penyusunan kebijakan strategis pangan dan gizi di Kota Bandung - Rumusan kebijakan Ketahanan Pangan	1 Dokumen 1 Dokumen	265.229.910	1 Dokumen 1 Dokumen	291.752.901
2	03	15	011	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (Rice Centre)	- Jumlah Pengadaan beras	70 ton	879.888.200	70 ton	967.877.020
2	03	15	017	Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	- Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan Penganekaragaman Konsumsi Pangan - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	7 kali 1 Dokumen	372.851.190	7 kali 1 Dokumen	410.136.309

2	03	15	018	Kegiatan Pemantauan dan Akses Pangan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi distribusi pangan</li> <li>- Rapat sosialisasi dan evaluasi ATM beras</li> <li>- ATM Beras</li> <li>- Rapat Koordinasi kesiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)</li> <li>- Sidak gabungan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)</li> </ul>	5 kali 1 Kali 6 Unit 2 kali 3 kali	382.707.000	5 kali 1 Kali 6 Unit 2 kali 3 kali	420.977.700
2	03	19		<b>Program Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	92 %	2.992.885.475	92 %	3.292.174.023
2	03	19	001	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sampel pangan segar hasil peternakan yang diperiksa</li> <li>- Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil peternakan</li> <li>- Penyediaan sarana minilab food security hasil peternakan</li> <li>- Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi</li> </ul>	3.000 Sampel 113 lokasi 3 Paket 4 kali	782.544.000	3.000 Sampel 113 lokasi 3 Paket 4 kali	860.798.400
2	03	19	002	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sampel pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura yang diperiksa</li> <li>- Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>- Penyediaan sarana minilab food security hasil tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>- Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi</li> </ul>	2.200 Sampel 109 lokasi 3 Paket 4 kali	574.889.625	2.200 Sampel 109 lokasi 3 Paket 4 kali	632.378.588
2	03	19	003	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sampel pangan segar hasil perikanan yang diperiksa</li> <li>- Jumlah lokasi pemeriksaan pangan segar hasil perikanan</li> <li>- Penyediaan sarana minilab food security hasil perikanan</li> <li>- Pemeriksaan sampel di laboratorium terakreditasi</li> </ul>	2.200 Sampel 99 lokasi 3 Paket 4 kali	576.992.000	2.200 Sampel 99 lokasi 3 Paket 4 kali	634.691.200
2	03	19	004	Kegiatan Pelayanan Pematangan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan sanitary lingkungan RPH</li> <li>- Pengelolaan RPH</li> <li>- Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan yang dipotong di RPH</li> </ul>	2 lokasi 2 lokasi 40.000 ekor	1.058.459.850	2 lokasi 2 lokasi 40.000 ekor	1.164.305.835
2	03	21		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>	Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan diberdayakan	48 Kelompok	1.834.948.900	48 Kelompok	2.018.443.790
2	03	21	001	Kegiatan Promosi dan Akses Kerja Sama Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah fasilitas bidang pangan, pertanian dan perikanan</li> <li>- Pelaksanaan fasilitas penyusunan naskah kerjasama</li> <li>- Pelaksanaan pameran (lokal/regional/nasional)</li> </ul>	2 Kelompok 1 Dokumen 4 kali	586.035.000	2 Kelompok 1 Dokumen 4 kali	644.638.500
2	03	21	002	Kegiatan Penyuluhan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program penyuluh</li> <li>- Temu tani</li> <li>- Temu teknis</li> <li>- Pembinaan demplot padi</li> <li>- Sekolah lapang</li> </ul>	1 kali 10 Kelompok 12 kali 4 Kelompok 6 Kelompok	232.253.600	1 kali 10 Kelompok 12 kali 4 Kelompok 6 Kelompok	255.478.960
2	03	21	003	Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Tanaman Hias Pot Gantung Kastuba</li> <li>- Penyediaan screenhouse hidroponik</li> <li>- Penyediaan Instalasi Hidroponik</li> <li>- Penyediaan Vertical Garden</li> <li>- Pelaksanaan Pelatihan Kampung Berkebun (Urban Farming)</li> </ul>	4 lokus 1 Unit 10 Unit 10 Unit 1500 Orang	1.016.660.300	4 lokus 1 Unit 10 Unit 10 Unit 1500 Orang	1.118.326.330
2	03	24		<b>Program Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan</b>	Persentase Dokumen Kajian Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	142.236.300	100 %	156.459.930
2	03	24	001	Kegiatan Kajian Pengembangan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan	- Jumlah dokumen kajian di bidang pangan, pertanian, dan perikanan	1 Dokumen	142.236.300	1 Dokumen	156.459.930

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Total Pagu : 144.442.644.590

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2	3	4	5	6	7
<b>2</b>				<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2</b>	<b>05</b>			<b>Lingkungan Hidup</b>					
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>100 persen</b>	<b>6.215.655.420</b>	<b>100 persen</b>	<b>6.837.220.962</b>
2	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan telepon, koran, internet, air dan listrik	12 laporan bulanan	326.705.400	12 laporan bulanan	359.375.940
2	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan pemeliharaan dan pengurusan perijinan Kendaraan dinas atau Operasional	12 laporan bulanan	971.679.090	12 laporan bulanan	1.068.846.999
2	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan penyediaan ATK	12 laporan bulanan	199.778.210	12 laporan bulanan	219.756.031
2	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan bulanan	12 laporan bulanan	2.031.233.600	12 laporan bulanan	2.234.356.960
2	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah unit peralatan dan perlengkapan yang diadakan	7 Unit	602.625.540	7 Unit	662.888.094
2	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga bulanan	12 laporan bulanan	55.936.980	12 laporan bulanan	61.530.678
2	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan bulanan	148.720.000	12 laporan bulanan	163.592.000
2	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan bulanan	818.845.000	12 laporan bulanan	900.729.500
2	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Laporan Kegiatan pembayaran Jasa Tenaga Pendukung	12 laporan bulanan	1.060.131.600	12 laporan bulanan	1.166.144.760
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	<b>100 persen</b>	<b>4.141.541.564</b>	<b>100 persen</b>	<b>4.555.695.720</b>
2	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Pengadaan kendaraan roda 4 untuk pejabat struktural	1 Unit	270.798.770	1 Unit	297.878.647
2	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Pengadaan mebeulair kantor	4 Jenis	41.691.180	4 Jenis	45.860.298
2	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Paket	388.251.614	2 Paket	427.076.775
2	05	02	028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor dan Gedung	3 Paket	140.800.000	3 Paket	154.880.000
2	05	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah gedung yang direhabilitasi	1 gedung	3.300.000.000	1 gedung	3.630.000.000
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tingkat disiplin aparatur	<b>100 persen</b>	<b>60.500.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>66.550.000</b>
2	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta Perlengkapannya	70 Stel	60.500.000	70 Stel	66.550.000
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 persen</b>	<b>276.600.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>304.260.000</b>
2	05	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70 Orang	276.600.000	70 Orang	304.260.000
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>08</b>		<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan data dan informasi	<b>100 persen</b>	<b>205.840.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>226.424.000</b>
2	05	08	001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Cakupan data yang dikompilasi dari bidang	100 %	205.840.000	100 %	226.424.000
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>15</b>		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	Jumlah sampah yang termanfaatkan dan di daur ulang di sumber sampah	<b>130735 ton</b>	<b>120.895.823.380</b>	<b>130735 ton</b>	<b>132.985.405.718</b>
2	05	15	002	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	- Jumlah jenis sarana persampahan yang diadakan	16 Jenis	51.817.273.605	16 Jenis	56.999.000.966
2	05	15	006	Kegiatan Bimbingan Teknis Persampahan	- Jumlah peserta yang menerima pelatihan mengenai manajemen pengelolaan Bank Sampah dan mengenai metode pengolahan sampah	6 Jenis	464.800.000	6 Jenis	511.280.000
2	05	15	008	Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	- Jumlah laporan layanan pengelolaan sampah bulanan	12 laporan bulanan	31.535.535.000	12 laporan bulanan	34.689.088.500
2	05	15	011	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	- Jumlah KBS baru yang terbentuk	30 Kecamatan	4.319.664.375	30 Kecamatan	4.751.630.813
2	05	15	016	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	- Jumlah komponen titik pantau yang disiapkan	15 Komponen	2.795.120.380	15 Komponen	3.074.632.418
2	05	15	028	Kegiatan Fasilitas Edukasi Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan	- Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata - Jumlah sekolah yang menerima pelatihan mengenai pengelolaan persampahan	30 Sekolah 20 Sekolah	1.302.381.180	30 Sekolah 20 Sekolah	1.432.619.298
2	05	15	029	Pelaksanaan Tata Kelola Pengumpulan Sampah			27.230.174.840		29.953.192.324
2	05	15	30	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah	- Jumlah draft kebijakan yang dibuat	3 Berkas	1.430.874.000	3 Berkas	1.573.961.400
<b>2</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	Persentase kawasan konservasi terpelihara	<b>28,99 persen</b>	<b>4.934.969.716</b>	<b>28,99 persen</b>	<b>5.428.466.688</b>
2	05	17	020	Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati	- Dokumen DED Taman Kehati yang dapat disusun - Dokumen Lingkungan PembangunanTaman Kehati - Master Plan Pengelolaan Kehati - Jumlah tanaman khas yang diadakan - Pembangunan Taman Kehati	- - - 1000 Pohon 1 lokasi	2.657.292.806	- - - 1000 Pohon 1 lokasi	2.923.022.087

2	05	17	021	Kegiatan Konservasi Air Tanah	- Jumlah Sumur Resapan dalam yang dibuat - Jumlah sumur imbuhan ASR yang dibuat - Jumlah sumur pantau yang dibuat - Jumlah kawasan resapan air tanah yang dikonservasi - Kajian hidrogeologi	11 Unit 8 Unit 1 Unit - 1 Dokumen	1.809.421.910	11 Unit 8 Unit 1 Unit - 1 Dokumen	1.990.364.101
2	05	17	022	Kegiatan Perlindungan Mata Air	- Jumlah pohon yang ditanam di wilayah tangkapan air - Jumlah mata air yang dipantau debitnya - Jumlah kawasan mata air yang dikonservasi	200 Pohon 10 Titik 5 lokasi	468.255.000	200 Pohon 10 Titik 5 lokasi	515.080.500
2	05	30		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Air</b>	Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran "cemar ringan"	<b>41.30 persen</b>	<b>596.012.000</b>	<b>41.30 persen</b>	<b>655.613.200</b>
2	05	30	001	Kegiatan Pemantauan Kualitas Air	- Jumlah sungai yang dipantau	16 Sungai	596.012.000	16 Sungai	655.613.200
2	05	32		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan akibat Limbah B3</b>	Persentase Limbah B3 rumah tangga dan UMKM yang dikelola	<b>0.51 persen</b>	<b>579.380.970</b>	<b>0.51 persen</b>	<b>637.319.067</b>
2	05	32	001	Kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	- Rekapitulasi data pelaku usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi ijin pengelolaan LB3 - Rekomendasi ijin pengelolaan LB3 - Tersusunnya Masterplan Pengelolaan Limbah B3	1 Berkas 30 rekomendasi -	177.589.920	1 Berkas 30 rekomendasi -	195.348.912
2	05	32	002	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	- Tersedianya dokumen DED pembangunan TPS Limbah B3 untuk industri UMKM - Tersedianya TPS Limbah B3 Rtangga	1 Dokumen -	283.690.650	1 Dokumen -	312.059.715
2	05	32	003	Kegiatan Pemantauan Kualitas Tanah	- Jumlah Laporan hasil uji kualitas tanah dan sludge	20 Berkas	118.100.400	20 Berkas	129.910.440
2	05	33		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup</b>	Cakupan perlindungan kualitas lingkungan	<b>33.43 persen</b>	<b>2.640.332.550</b>	<b>33.43 persen</b>	<b>2.904.365.805</b>
2	05	33	001	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup	- Jumlah pelaku usaha yang menaati aturan pengelolaan lingkungan	47 Pelaku Usaha	843.149.850	47 Pelaku Usaha	927.464.835
2	05	33	002	Kegiatan Penataan dan penegakan hukum lingkungan	- Jumlah sanksi administrasi yang diberikan	8 Berkas	901.004.600	8 Berkas	991.105.060
2	05	33	003	Kegiatan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	896.178.100	100 %	985.795.910
2	05	34		<b>Program Pencegahan dampak lingkungan</b>	Cakupan pencegahan dampak lingkungan akibat kebijakan dan usaha/kegiatan	<b>100 persen</b>	<b>1.806.040.760</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.986.644.836</b>
2	05	34	001	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	- Dokumen KLHS untuk K/R/P	1 Dokumen	467.562.520	1 Dokumen	514.318.772
2	05	34	002	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Lingkungan	- Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dikeluarkan	200 Berkas	334.495.400	200 Berkas	367.944.940
2	05	34	003	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Lingkungan	- Jumlah SDM Tim Komisi AMDAL yang meningkat kapasitasnya	40 Orang/Bulan	300.592.000	40 Orang/Bulan	330.651.200
2	05	34	004	Kegiatan Perencanaan dan Penataan Lingkungan	- Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 Dokumen	249.459.520	2 Dokumen	274.405.472
2	05	34	005	Penyusunan Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat	1 Dokumen	453.931.320	1 Dokumen	499.324.452
2	05	36		<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Rehabilitasi Kerusakan Air</b>	Indeks Kualitas Air	<b>20.40 poin</b>	<b>682.362.800</b>	<b>20.40 poin</b>	<b>750.599.080</b>
2	05	36	001	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air	- Jumlah ijin pembuangan air limbah yang diverifikasi	34 Berkas	682.362.800	34 Berkas	750.599.080
2	05	37		<b>Program Pengendalian Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim</b>	Indeks S02	<b>1.16 poin</b>	<b>1.407.585.430</b>	<b>1.16 poin</b>	<b>1.548.343.973</b>
2	05	37	001	Kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	- Jumlah RW yang mengikuti Program Kampung Iklim - Jumlah Kantor yang menerapkan ecooffice dengan benar	2 RW 6 lokasi	453.589.000	2 RW 6 lokasi	498.947.900
2	05	37	002	Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara	- Jumlah Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien	23 Berkas	667.000.000	23 Berkas	733.700.000
2	05	37	003	Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara	- Jumlah pelaksanaan uji emisi	4 lokasi	286.996.430	4 lokasi	315.696.073

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Total Pagu : 13.642.213.319

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	<b>100 persen</b>	<b>7.869.614.559</b>	<b>100 persen</b> <b>8.656.576.015</b>
2 06 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 laporan	348.344.000	12 laporan	383.178.400
2 06 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	12 laporan	43.000.000	12 laporan	47.300.000
2 06 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah laporan Peralatan Kerja yang diperbaiki	12 laporan	289.618.600	12 laporan	318.580.460
2 06 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	658.000.410	12 laporan	723.800.451
2 06 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetak dan Penggandaan	12 laporan	88.821.389	12 laporan	97.703.528
2 06 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 laporan	11.256.300	12 laporan	12.381.930
2 06 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	505.096.570	12 laporan	555.606.227
2 06 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	61.480.320	12 laporan	67.628.352
2 06 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	25.488.000	12 laporan	28.036.800
2 06 01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan	49.150.970	12 laporan	54.066.067
2 06 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	214.869.600	12 laporan	236.356.560
2 06 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	450.000.000	12 laporan	495.000.000
2 06 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	12 laporan	3.394.800.000	12 laporan	3.734.280.000
2 06 01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	12 laporan	1.729.688.400	12 laporan	1.902.657.240
<b>2 06 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>100 persen</b>	<b>2.123.149.300</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.335.464.230</b>
2 06 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000
2 06 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 laporan	1.923.149.300	12 laporan	2.115.464.230
<b>2 06 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	<b>100 persen</b>	<b>63.250.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>69.575.000</b>
2 06 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	112 Stel	63.250.000	112 Stel	69.575.000
<b>2 06 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<b>100 persen</b>	<b>293.666.800</b>	<b>100 persen</b>	<b>323.033.480</b>
2 06 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 laporan	293.666.800	1 laporan	323.033.480
<b>2 06 21</b>		<b>Program Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan</b>	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	<b>60 persen</b>	<b>2.230.144.660</b>	<b>60 persen</b>	<b>2.453.159.126</b>
2 06 21	001	Kegiatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	- Jumlah Konsep Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan	2 laporan	50.370.100	2 laporan	55.407.110
2 06 21	002	Kegiatan Diseminasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	- Jumlah Laporan Diseminasi Kebijakan Kependudukan	12 laporan	291.114.000	12 laporan	320.225.400
2 06 21	003	Kegiatan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	- Jumlah Laporan Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	12 laporan	31.108.000	12 laporan	34.218.800
2 06 21	004	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi kependudukan	- Jumlah Laporan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang Terimplementasi	4 laporan	1.652.824.560	4 laporan	1.818.107.016
2 06 21	005	Kegiatan Pengelolaan Data dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	- Jumlah Laporan Data yang Tervalidasi	12 laporan	146.300.000	12 laporan	160.930.000
2 06 21	006	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama	- Jumlah Dokumen Perjanjian kerjasama	30 Dokumen	58.428.000	30 Dokumen	64.270.800
<b>2 06 22</b>		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	Cakupan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>97.25 persen</b>	<b>1.062.388.000</b>	<b>97.25 persen</b>	<b>1.168.626.800</b>
2 06 22	001	Kegiatan peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	- Jumlah Layanan Penerbitan Akta Kelahiran	67000 Dokumen	796.100.000	67000 Dokumen	875.710.000
2 06 22	002	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian bagi Masyarakat Non Muslim	- Jumlah Layanan Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Masyarakat non Muslim	1100 Dokumen	30.228.000	1100 Dokumen	33.250.800
2 06 22	003	Kegiatan Layanan Penerbitan Dokumen Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Akta Kematian	- Jumlah layanan penerbitan dokumen perubahan status anak, pewarganegaraan dan akta kematian	12000 Dokumen	93.940.000	12000 Dokumen	103.334.000
2 06 22	004	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk	- Jumlah Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	15000 Dokumen	68.640.000	15000 Dokumen	75.504.000
2 06 22	005	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penduduk Keluar dan Datang	- Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	12 laporan	39.160.000	12 laporan	43.076.000

2	06	22	006	Kegiatan Pendataan dan Pembinaan Penduduk non Permanen dan Penduduk Rentan	- Jumlah laporan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan	12 laporan	34.320.000	12 laporan	37.752.000
---	----	----	-----	--	--	------------	------------	------------	------------

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Total Pagu : 9.558.768.958

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2	08	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	2.552.828.258	100 persen	2.808.111.084
2	08	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 laporan	166.377.600	1 laporan	183.015.360
2	08	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 laporan	140.975.000	1 laporan	155.072.500
2	08	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	1 laporan	24.500.000	1 laporan	26.950.000
2	08	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 laporan	205.941.500	1 laporan	226.535.650
2	08	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 laporan	133.310.000	1 laporan	146.641.000
2	08	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 laporan	30.268.400	1 laporan	33.295.240
2	08	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	51.866.500	1 laporan	57.053.150
2	08	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 laporan	97.706.200	1 laporan	107.476.820
2	08	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	1 laporan	37.872.000	1 laporan	41.659.200
2	08	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan minuman	1 laporan	295.011.200	1 laporan	324.512.320
2	08	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 laporan	516.568.338	1 laporan	568.225.172
2	08	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga pendukung adminstrasi perkantoran / teknis perkantoran	1 laporan	548.087.520	1 laporan	602.896.272
2	08	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Laporan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi	1 laporan	304.344.000	1 laporan	334.778.400
2	08	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen	1.215.739.700	100 persen	1.337.313.670
2	08	02	010 Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Laporan Pengadaan Mebeulair	1 laporan	24.975.000	1 laporan	27.472.500
2	08	02	013 Kegiatan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	- Jumlah Laporan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor / Kendaraan Hias	1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000
2	08	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 laporan	229.869.500	1 laporan	252.856.450
2	08	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 laporan	860.895.200	1 laporan	946.984.720
2	08	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100 persen	221.250.000	100 persen	243.375.000
2	08	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 laporan	97.500.000	1 laporan	107.250.000
2	08	03	005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	1 laporan	123.750.000	1 laporan	136.125.000
2	08	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	100 persen	172.064.000	100 persen	189.270.400
2	08	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatur - Jumlah Kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) DPPKB Tahun 2020	1 laporan 1 laporan	172.064.000	1 laporan 1 laporan	189.270.400
2	08	08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan data dan informasi	100 persen	148.428.000	100 persen	163.270.800
2	08	08	001 Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tahunan, Triwulanan dan bulanan	20 Dokumen	148.428.000	20 Dokumen	163.270.800
2	08	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	73.00 persen	533.040.200	73.00 persen	586.344.220
2	08	15	022 Kegiatan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana	- Jumlah peserta KB baru	2750 Org	231.812.200	2750 Org	254.993.420
2	08	15	026 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kepesertaan KB	- Jumlah Motivator Akseptor KB Lestari	90 Pasangan Akseptor	172.028.000	90 Pasangan Akseptor	189.230.800
2	08	15	027 Kegiatan Pengadaan dan Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi	- Jumlah Fasyankes yang mendapatkan Distribusi, Alat, Obat dan Kontrasepsi	85 Faskes	129.200.000	85 Faskes	142.120.000
2	08	27	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Data dan Informasi Kependudukan yang Akurat dan Tepat Waktu	100 persen	633.550.000	100 persen	696.905.000
2	08	27	007 Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	- Jumlah Dokumen Penyusunan Data dan Informasi Penduduk dan Keluarga	12 Dokumen	201.300.000	12 Dokumen	221.430.000
2	08	27	009 Kegiatan Perumusan Penyebaran Penduduk dan Keluarga	- Draft Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen	228.520.000	1 Dokumen	251.372.000



2	08	27	010	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kependudukan	- Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kependudukan	6 Sekolah	203.730.000	6 Sekolah	224.103.000
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>28</b>		<b>Program Promosi Keluarga Berencana</b>	Jumlah Kampung KB Aktif	<b>2625 orang</b>	<b>2.234.848.000</b>	<b>26 RW</b>	<b>2.458.332.800</b>
2	08	28	001	Kegiatan Advokasi dan Penggerakan	- Jumlah Kampung KB yang di Advokasi & digerakan	31 RW	469.446.000	31 RW	516.390.600
2	08	28	002	Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB	- Persentase PKB dan PLKB yang didayagunakan - Persentase Petugas Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan	100 persen 100 persen	1.581.990.000	100 persen 100 persen	1.740.189.000
2	08	28	003	Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi, dan Edukasi (KIE)	- Jumlah Kegiatan Penyuluhan, Komunikasi dan Edukasi (KIE)	30 Kegiatan	183.412.000	30 Kegiatan	201.753.200
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>29</b>		<b>Program Ketahanan Keluarga</b>	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	<b>81.37 persen</b>	<b>1.847.020.800</b>	<b>72.17 persen</b>	<b>2.031.722.880</b>
2	08	29	001	Kegiatan BKB, BKL, dan BKR	- Jumlah Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Mendapatkan Pembinaan	208 Kelompok	829.250.800	208 Kelompok	912.175.880
2	08	29	002	Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	- Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	36 Kelompok	561.090.000	36 Kelompok	617.199.000
2	08	29	004	Kegiatan Ketahanan Remaja	- Jumlah Kelompok PIK R yang Dibina	75 Kelompok	456.680.000	75 Kelompok	502.348.000

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.09.01 Dinas Perhubungan

Total Pagu : 186.821.616.073

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 09</b>			<b>Perhubungan</b>				
<b>2 09 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>100 %</b>	<b>7.757.992.599</b>	<b>100 %</b>
2 09 01 001		001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan pelayanan surat menyurat	12 laporan	116.714.931	12 laporan
2 09 01 002		002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	2.499.998.700	12 laporan
2 09 01 008		008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	1.139.640.500	12 laporan
2 09 01 010		010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan ATK	1 laporan	179.834.050	1 laporan
2 09 01 011		011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah jenis Pengadaan Cetak	4 Jenis	800.119.848	4 Jenis
2 09 01 012		012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	1 laporan	150.496.170	1 laporan
2 09 01 015		015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratuan Perundang-Undangan	12 laporan	200.000.000	12 laporan
2 09 01 017		017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	375.000.000	12 laporan
2 09 01 018		018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah - Laporan penyediaan jasa pengamanan kantor	12 laporan 12 laporan	562.500.000	12 laporan 12 laporan
2 09 01 020		020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor			1.733.688.400	
<b>2 09 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>6.188.453.470</b>	<b>100 %</b>
2 09 02 005		005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit	400.000.000	3 Unit
2 09 02 010		010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Tersedianya Mebeulair Dinas	48 Buah	345.532.600	48 Buah
2 09 02 012		012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur			564.251.770	
2 09 02 022		022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit	799.000.000	3 Unit
2 09 02 024		024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	159 Unit	3.749.999.100	159 Unit
2 09 02 028		028	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis	329.670.000	5 Jenis
<b>2 09 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>633.650.000</b>	<b>100 %</b>
2 09 03 002		002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	447 Stel	422.037.500	447 Stel
2 09 03 005		005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	405 Stel	211.612.500	405 Stel
<b>2 09 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>17 %</b>	<b>320.450.000</b>	<b>17 %</b>
2 09 05 001		001	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah aparatur yang dididik	155 orang	320.450.000	155 orang
<b>2 09 08</b>			<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan data dan informasi	<b>100 %</b>	<b>86.539.000</b>	<b>100 %</b>
2 09 08 001		001	Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Data base terpadu sistem informasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	86.539.000	1 Dokumen
<b>2 09 17</b>			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	Persentase penumpang sarana angkutan umum	<b>20.25 %</b>	<b>28.406.686.800</b>	<b>20.25 %</b>
2 09 17 009		009	Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal	- Jumlah tenaga kebersihan di lingkungan terminal	46 orang	1.603.421.600	46 orang
2 09 17 016		016	Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	- Laporan hasil koordinasi	4 laporan	478.264.200	4 laporan
2 09 17 031		031	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massa/ Bus Line	- Jumlah koridor bus TMB yang beroperasi	4 Koridor	17.675.000.000	4 Koridor
2 09 17 032		032	Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Bike Sharing	- Jumlah station bike sharing yang beroperasi	30 Buah	2.000.001.000	30 Buah
2 09 17 033		033	Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan Angkutan Massa/Bus Sekolah	- Jumlah koridor bus sekolah yang beroperasi	4 Koridor	6.650.000.000	4 Koridor
<b>2 09 18</b>			<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	Persentase sarana prasarana perhubungan yang terbangun	<b>40 %</b>	<b>12.749.905.812</b>	<b>40 %</b>
2 09 18 007		007	Kegiatan Pembangunan Sarana bike sharing	- Sarana bike sharing yang terbangun	1 Buah	796.725.436	1 Buah
2 09 18 011		011	Kegiatan Pengadaan sarana angkutan umum / khusus	- Sarana angkutan umum / khusus yang tersedia	8 Unit	1.997.014.600	8 Unit
2 09 18 012		012	Kegiatan Pembangunan jembatan penyeberangan orang	- Jembatan penyeberangan orang yang dibangun	1 Unit	1.563.774.804	1 Unit
2 09 18 014		014	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	- Terminal yang direhabilitasi/pemeliharaan	1 lokasi	3.889.972.244	1 lokasi
2 09 18 015		015	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan	- Jumlah shelter angkut dan shelter sepeda yang terpelihara	5 lokasi	1.210.950.550	5 lokasi
2 09 18 016		016	Kegiatan Pengadaan perlengkapan angkutan	- Terbangunnya signage angkot stop	14 Buah	616.388.801	14 Buah
2 09 18 017		017	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Terminal Angkutan Darat	- Jumlah terminal yang sarana prasarana nya meningkat	1 lokasi	589.680.615	1 lokasi

2	09	18	018	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi (BITS)	- Sarana prasarana BITS yang terbangun	1 set	1.799.882.375	1 set	1.979.870.613
2	09	18	019	Kegiatan Pengadaan prasarana angkutan umum / khusus	- prasarana angkutan umum / khusus yang terbangun	1 set	285.516.387	1 set	314.068.026
2	09	19		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terbangun	<b>20 %</b>	<b>11.440.413.050</b>	<b>20 %</b>	<b>12.584.454.355</b>
2	09	19	001	Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	- Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas	729 Buah	2.000.000.000	729 Buah	2.200.000.000
2	09	19	002	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	- Tersedianya marka jalan	12660 M2	6.804.733.780	12660 M2	7.485.207.158
2	09	19	016	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	- Pagar pengaman jalan yang terpasang	124 Unit	915.897.600	124 Unit	1.007.487.360
2	09	19	017	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan dan Kanstain	- Tersedianya Paku Jalan	1203 Buah	400.000.000	1203 Buah	440.000.000
2	09	19	018	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	- Jumlah cermin tikungan yang terpasang	127 Buah	719.781.670	127 Buah	791.759.837
2	09	19	019	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan /Warning Light	- Jumlah Lampu Peringatan Warning light yang terpasang	18 Buah	600.000.000	18 Buah	660.000.000
2	09	20		<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	Persentase kendaraan umum yang lulus uji	<b>90 %</b>	<b>6.385.003.060</b>	<b>90 %</b>	<b>7.023.503.366</b>
2	09	20	003	Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	- Uji petik kendaraan bermotor	6 kali	143.822.400	6 kali	158.204.640
2	09	20	004	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	- Pengujian kendaraan bermotor	60000 Unit	3.994.966.400	60000 Unit	4.394.463.040
2	09	20	005	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	- Prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	1 Unit	400.000.000	1 Unit	440.000.000
2	09	20	007	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	- Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang terbangun	1 set	1.096.396.400	1 set	1.206.036.040
2	09	20	008	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor	- Sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	1 set	749.817.860	1 set	824.799.646
2	09	22		<b>Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan</b>	Persentase simpang tertib lalu lintas	<b>20 %</b>	<b>16.272.883.950</b>	<b>20 %</b>	<b>17.900.172.345</b>
2	09	22	006	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Car Free Day / Car Free Night	- Laporan koordinasi penyelenggaraan CFD / CFN	2 laporan	1.479.307.000	2 laporan	1.627.237.700
2	09	22	007	Kegiatan Koordinasi pengaturan lalu lintas	- Laporan pengaturan lalu lintas	12 laporan	10.500.000.000	12 laporan	11.550.000.000
2	09	22	008	Kegiatan Kampanye publik keselamatan jalan	- Jumlah Kampanye publik	4 kali	1.045.019.450	4 kali	1.149.521.395
2	09	22	009	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan raya	- Jumlah penertiban angkutan di jalan raya	240 kali	3.248.557.500	240 kali	3.573.413.250
2	09	24		<b>Program Perencanaan dan Evaluasi Bidang Perhubungan</b>	Persentase dokumen perencanaan	<b>100 %</b>	<b>4.673.531.250</b>	<b>100 %</b>	<b>5.140.884.375</b>
2	09	24	001	Kegiatan Perencanaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	- Dokumen perencanaan	18 Dokumen	1.764.580.150	18 Dokumen	1.941.038.165
2	09	24	002	Kegiatan Perencanaan Pengembangan dan Penataan Sistem Transportasi Kota	- Dokumen perencanaan	5 Dokumen	2.208.396.000	5 Dokumen	2.429.235.600
2	09	24	003	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pengukuran Kinerja Transportasi	- Laporan kinerja transportasi	10 laporan	700.555.100	10 laporan	770.610.610
2	09	25		<b>Program Pembinaan Transportasi</b>	Persentase pengguna transportasi ramah lingkungan	<b>1 %</b>	<b>909.392.900</b>	<b>1 %</b>	<b>1.000.332.190</b>
2	09	25	001	Kegiatan Pembinaan dan Edukasi Transportasi Ramah Lingkungan (Eco Transport)	- Kampanye publik	6 kali	454.390.000	6 kali	499.829.000
2	09	25	002	Kegiatan Pembinaan dan Kampanye Kebijakan di bidang perhubungan	- Kampanye publik	6 kali	455.002.900	6 kali	500.503.190
2	09	26		<b>Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir</b>	Persentase kinerja APILL dan parkir	<b>70 %</b>	<b>2.883.189.600</b>	<b>70 %</b>	<b>3.171.508.560</b>
2	09	26	002	Kegiatan Pengadaan perlengkapan fasilitas dan petugas Parkir	- Perlengkapan juru parkir	500 Stel	785.080.000	500 Stel	863.588.000
2	09	26	003	Kegiatan Pengadaan Marka Parkir	- Jumlah marka parkir yang tersedia	2629 M / Lari	98.109.600	2629 M / Lari	107.920.560
2	09	26	004	Kegiatan Pemeliharaan dan operasional sarana prasarana parkir	- Jumlah mesin parkir yang beroperasi	443 Unit	2.000.000.000	443 Unit	2.200.000.000
2	09	27		<b>Program Pengaturan Lalu lintas dan parkir</b>	-	-	<b>9.995.737.500</b>	-	<b>10.995.311.250</b>
2	09	27	001	Rehabilitasi Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS)	- ATCS yang dipelihara	137 Titik	9.995.737.500	137 Titik	10.995.311.250
2	09	28		<b>Program Peningkatan Pelayanan Transportasi BLUD</b>	-	-	<b>72.366.847.082</b>	-	<b>79.603.531.790</b>
2	09	28	001	Kegiatan Pelayanan BLUD (Parkir)	- Pelayanan parkir	1 Tahun	72.366.847.082	1 Tahun	79.603.531.790
2	09	29		<b>Program Peningkatan Pelayanan Transportasi Badan Layanan Umum Daerah</b>	Cakupan Pelayanan Transportasi	<b>100 %</b>	<b>5.750.940.000</b>	<b>100 %</b>	<b>6.326.034.000</b>
2	09	29	001	Kegiatan Pelayanan BLUD	- Pelayanan angkutan	1 Tahun	5.750.940.000	1 Tahun	6.326.034.000

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

Total Pagu : 20.273.533.100

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	14		Statistik					
2	14	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Meningkatnya Data Informasi yang Berkualitas	45 persen	1.343.284.200	45 persen	1.477.612.620
2	14	15	007 Kegiatan Pengolahan dan Analisa Data	- Jumlah Dashboard Kota	2 laporan	336.310.000	2 laporan	369.941.000
2	14	15	008 Kegiatan Publikasi dan Data Terbuka	- Jumlah publikasi data dan infografis	3 laporan	419.059.000	3 laporan	460.964.900
2	14	15	009 Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data dan Statistik	- Jumlah Dokumen/ data hasil survey	4 Dokumen	587.915.200	4 Dokumen	646.706.720
2	15		Persandian					
2	15	18	Program Optimalisasi Aplikasi	Meningkatnya Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis e-Government	40 persen	2.369.890.000	40 persen	2.606.879.000
2	15	18	001 Kegiatan Pengelolaan Aplikasi	- Jumlah aplikasi yang dikelola	5 aplikasi	518.150.000	5 aplikasi	569.965.000
2	15	18	002 Kegiatan Pengelolaan Bandung Command Center	- Jumlah unit yang dikelola	1 Unit	1.551.190.000	1 Unit	1.706.309.000
2	15	18	003 Kegiatan Integrasi Aplikasi	- Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	4 aplikasi	300.550.000	4 aplikasi	330.605.000
2	15	19	Program Optimalisasi Persandian	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Aplikasi yang Terkendali dan Aman	100 persen	237.860.000	100 persen	261.646.000
2	15	19	003 Pengelolaan persandian dan Keamanan Informasi	- Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	10 aplikasi	237.860.000	10 aplikasi	261.646.000
2	10		Komunikasi dan Informatika					
2	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Administrasi Perkantoran	100 persen	2.598.173.700	100 persen	2.857.991.070
2	10	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Bulanan Komunikasi, Air dan Listrik	12 laporan	161.499.997	12 laporan	177.649.997
2	10	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinankendaraan dinas/operasional	28 Unit	765.830.200	28 Unit	842.413.220
2	10	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan penyediaan ATK bulanan	12 laporan	172.487.100	12 laporan	189.735.810
2	10	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan	12 laporan	195.038.800	12 laporan	214.542.680
2	10	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	62.715.400	12 laporan	68.986.940
2	10	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan	12 laporan	67.320.000	12 laporan	74.052.000
2	10	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan	12 laporan	151.250.000	12 laporan	166.375.000
2	10	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	365.661.003	12 laporan	402.227.103
2	10	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	12 laporan	210.000.000	12 laporan	231.000.000
2	10	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan kantor	12 laporan	446.371.200	12 laporan	491.008.320
2	10	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 persen	398.165.000	100 persen	437.981.500
2	10	02	012 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah unit Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	7 Unit	145.365.000	7 Unit	159.901.500
2	10	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	200.000.000	1 Unit	220.000.000
2	10	02	028 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung	175 Unit	52.800.000	175 Unit	58.080.000
2	10	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai	100 persen	63.525.000	100 persen	69.877.500
2	10	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Paket	63.525.000	1 Paket	69.877.500
2	10	08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi Dinas	100 persen	143.000.000	100 persen	157.300.000
2	10	08	001 Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	2 Dokumen	143.000.000	2 Dokumen	157.300.000
2	10	19	Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Interkoneksi Pengembangan Infrastruktur TIK yang Berfungsi	100 persen	9.925.838.800	100 persen	10.918.422.680
2	10	19	001 Kegiatan Pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	- Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengembangan Infrastruktur Publik	1 Dokumen	1.482.849.700	1 Dokumen	1.631.134.670
2	10	19	002 Kegiatan pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur TIK	- Jumlah Lokasi dilengkapi Wifi dan atau CCTV - Jumlah Interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/Kelurahan/Puskesmas	153 lokasi 380 lokasi	7.578.158.600	153 lokasi 380 lokasi	8.335.974.460
2	10	19	003 Kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perangkat Keras	- Jumlah Lokasi yang telah Menggunakan WAN di Kota Bandung - Jumlah Server yang Terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	72 lokasi 34 lokasi	864.830.500	72 lokasi 34 lokasi	951.313.550

2	10	21		<b>Program Layanan Informasi Publik</b>	Meningkatnya Layanan Informasi melalui Media Kepada Masyarakat	<b>100 persen</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.210.000.000</b>
2	10	21	002	<i>Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik</i>	<i>- Jumlah Studio yang Dikelola</i>	<i>2 Unit</i>	<i>1.100.000.000</i>	<i>2 Unit</i>	<i>1.210.000.000</i>
2	10	23		<b>Program Diseminasi Informasi</b>	Meningkatnya Layanan Informasi Masyarakat	<b>70 persen</b>	<b>1.619.262.700</b>	<b>70 persen</b>	<b>1.781.188.970</b>
2	10	23	001	<i>Kegiatan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi</i>	<i>- Jumlah Layanan Penyuluhan dan Pengendalian Informasi</i>	<i>10 Kegiatan</i>	<i>189.877.500</i>	<i>10 Kegiatan</i>	<i>208.865.250</i>
2	10	23	002	<i>Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i>	<i>- Jumlah kegiatan layanan informasi publik</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>738.084.200</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>811.892.620</i>
2	10	23	003	<i>Kegiatan Kemitraan Informasi Masyarakat</i>	<i>- Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan</i>	<i>9 Kegiatan</i>	<i>691.301.000</i>	<i>9 Kegiatan</i>	<i>760.431.100</i>
2	10	24		<b>Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	Meningkatnya Dokumen Hasil Kajian yang digunakan dalam Rumusan Kebijakan yang Diimplementasikan	<b>60 persen</b>	<b>474.533.700</b>	<b>60 persen</b>	<b>521.987.070</b>
2	10	24	001	<i>Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>- Jumlah laporan hasil evaluasi TIK</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>135.417.000</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>148.958.700</i>
2	10	24	002	<i>Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi</i>	<i>- Jumlah kegiatan pengembangan sumber daya TIK</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>140.520.000</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>154.572.000</i>
2	10	24	003	<i>Kegiatan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>- Jumlah kegiatan perencanaan TIK Pemerintah Kota Bandung</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>198.596.700</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>218.456.370</i>

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Total Pagu : 12.271.779.234

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	11		Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah						
2	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	2.061.174.130	100 %	2.267.291.543	
2	11	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan penyediaan jasa bulanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	352.855.800	12 laporan	388.141.380	
2	11	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	18 Unit	15.055.300	18 Unit	16.560.830	
2	11	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 laporan	307.604.000	12 laporan	338.364.400	
2	11	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	49 Unit	35.585.000	49 Unit	39.143.500	
2	11	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	26.448.180	12 laporan	29.092.998	
2	11	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan	4 laporan	30.250.000	4 laporan	33.275.000	
2	11	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor	12 laporan	4.664.000	12 laporan	5.130.400	
2	11	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	82.541.800	12 laporan	90.795.980	
2	11	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	70.485.250	12 laporan	77.533.775	
2	11	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 laporan	25.000.800	12 laporan	27.500.880	
2	11	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	115.286.600	12 laporan	126.815.260	
2	11	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	594.619.000	12 laporan	654.080.900	
2	11	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 laporan	121.796.400	12 laporan	133.976.040	
2	11	01	020 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa keamanan kantor	12 laporan	278.982.000	12 laporan	306.880.200	
2	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	867.259.520	100 %	953.985.472	
2	11	02	005 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah pengadaan dinas kendaraan/ operasional	10 unit motor -	349.147.700	10 unit motor -	384.062.470	
2	11	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4 laporan	27.429.820	4 laporan	30.172.802	
2	11	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara	18 Unit	490.682.000	18 Unit	539.750.200	
2	11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100 %	17.556.000	100 %	19.311.600	
2	11	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 Orang	17.556.000	50 Orang	19.311.600	
2	11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai bidang	75 %	126.060.000	75 %	138.666.000	
2	11	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- jumlah peserta pembinaan kinerja aparatur	55 Orang	126.060.000	55 Orang	138.666.000	
2	11	08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	persentase layanan data dan informasi	100 %	143.283.000	100 %	157.611.300	
2	11	08	001 Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- jumlah jenis data dan informasi Perangkat Daerah yang dikelola	3 Jenis	143.283.000	3 Jenis	157.611.300	
2	11	22	Program Pemberdayaan Usaha Non Formal	Jumlah Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya	200 orang	1.733.157.000	200 orang	1.906.472.700	
2	11	22	001 Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Non Formal	- jumlah peserta kegiatan pemberdayaan bagi Usaha Non Formal	500 orang	392.971.000	500 orang	432.268.100	
2	11	22	002 Kegiatan Fasilitas Pembiayaan bagi Usaha Non Formal	- jumlah peserta kegiatan fasilitas akses pembiayaan bagi Usaha Non Formal	500 orang	311.654.000	500 orang	342.819.400	
2	11	22	003 Kegiatan Promosi dan Pemasaran bagi Usaha Non Formal	- jumlah lokasi Usaha Non Formal yang dipromosikan - jumlah kegiatan pameran Usaha Non Formal	4 lokasi 2 Kegiatan	1.028.532.000	4 lokasi 2 Kegiatan	1.131.385.200	
2	11	23	Program Pengawasan Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	jumlah Koperasi yang mentaati peraturan perkoperasian	160 Koperasi	1.180.376.400	160 Koperasi	1.298.414.040	
2	11	23	001 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Koperasi	- jumlah bimtek peningkatan pengawasan koperasi	8 kegiatan	527.002.200	8 kegiatan	579.702.420	
2	11	23	003 Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	- jumlah pendampingan pengelolaan manajemen, otonomisasi dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	110 Koperasi	321.654.200	110 Koperasi	353.819.620	
2	11	23	004 Kegiatan Pemantauan dan Pemeriksaan Manajemen Koperasi	- jumlah audit Koperasi	20 Koperasi	331.720.000	20 Koperasi	364.892.000	
2	11	24	Pemberdayaan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat usahanya	240 Usaha Mikro -	2.505.083.870	240 Usaha Mikro -	2.755.592.257	
2	11	24	001 Penyelenggaraan promosi dan pemasaran produk UMKM	- Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi promosi, pemasaran dan sistem bisnis	50 Usaha Mikro -	1.028.337.500	50 Usaha Mikro -	1.131.171.250	

2	11	24	002	<i>Fasilitasi Intermediasi akses Pembiayaan UMKM</i>	<i>- jumlah peserta temu usaha fasilitasi akses pembiayaan bagi Usaha Mikro</i>	<i>100 Usaha Mikro -</i>	<i>573.692.650</i>	<i>100 Usaha Mikro -</i>	<i>631.061.915</i>
2	11	24	003	<i>Fasilitasi pengembangan pendampingan dan kemitraan usaha pelaku usaha mikro</i>	<i>- jumlah usaha mikro yang diberdayakan</i>	<i>200 Usaha Mikro -</i>	<i>903.053.720</i>	<i>200 Usaha Mikro -</i>	<i>993.359.092</i>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>27</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi</b>	Persentase SDM Koperasi yang kualitasnya meningkat	<b>60 %</b>	<b>432.445.900</b>	<b>60 %</b>	<b>475.690.490</b>
2	11	27	001	<i>Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian</i>	<i>- jumlah pengelola Koperasi yang terlatih</i>	<i>320 Orang</i>	<i>432.445.900</i>	<i>320 Orang</i>	<i>475.690.490</i>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>28</b>		<b>Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi</b>	Jumlah Koperasi berkualitas	<b>30 Koperasi</b>	<b>2.551.876.354</b>	<b>30 Koperasi</b>	<b>2.807.063.989</b>
2	11	28	001	<i>Kegiatan Pengembangan Jaringan Pemasaran dan Promosi Produk Koperasi</i>	<i>- jumlah kegiatan promosi dan pameran</i> <i>- jumlah kegiatan temu usaha/ kemitraan</i>	<i>5 event</i> <i>1 event</i>	<i>894.695.000</i>	<i>5 event</i> <i>1 event</i>	<i>984.164.500</i>
2	11	28	002	<i>Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Koperasi.</i>	<i>- Jumlah koperasi yang terbina</i> <i>- jumlah laporan triwulanan perkembangan koperasi</i> <i>- jumlah koperasi di tempat ibadah setiap kelurahan</i>	<i>480 Koperasi</i> <i>4 laporan</i> <i>25 Koperasi</i>	<i>1.240.156.354</i>	<i>480 Koperasi</i> <i>4 laporan</i> <i>25 Koperasi</i>	<i>1.364.171.989</i>
2	11	28	003	<i>Kegiatan Perluasan akses pembiayaan bagi koperasi</i>	<i>- jumlah Workshop fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi</i> <i>- jumlah koperasi juara setiap kelurahan</i>	<i>5 kegiatan</i> <i>25 Koperasi</i>	<i>417.025.000</i>	<i>5 kegiatan</i> <i>25 Koperasi</i>	<i>458.727.500</i>
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>29</b>		<b>Program Pengembangan Usaha Mikro</b>	Persentase SDM Usaha Mikro yang kualitasnya meningkat	<b>60 %</b>	<b>653.507.060</b>	<b>60 %</b>	<b>718.857.766</b>
2	11	29	001	<i>Capacity building bagi SDM Usaha Mikro</i>	<i>- jumlah peserta Diklat Usaha Mikro</i>	<i>360 Orang</i>	<i>653.507.060</i>	<i>360 Orang</i>	<i>718.857.766</i>

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Total Pagu : 7.998.924.790

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
2			Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	12		Penanaman Modal						
2	12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	3.446.976.540	100 %	3.791.674.194	
2	12	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa bulanan komunikasi, air dan listrik	12 laporan	274.443.600	12 laporan	301.887.960	
2	12	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	150 Unit	261.000.000	150 Unit	287.100.000	
2	12	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 laporan bulanan	610.016.910	12 laporan bulanan	671.018.601	
2	12	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan cetakan dan penggandaan	12 laporan bulanan	568.833.000	12 laporan bulanan	625.716.300	
2	12	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 laporan	25.958.000	12 laporan	28.553.800	
2	12	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	38.463.030	12 laporan	42.309.333	
2	12	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan bulanan	32.500.000	12 laporan bulanan	35.750.000	
2	12	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan bulanan	132.593.000	12 laporan bulanan	145.852.300	
2	12	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan bulanan kegiatan koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	12 laporan bulanan	422.695.000	12 laporan bulanan	464.964.500	
2	12	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	12 laporan bulanan	268.890.000	12 laporan bulanan	295.779.000	
2	12	01	020 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa pengamanan kantor	12 laporan bulanan	456.516.000	12 laporan bulanan	502.167.600	
2	12	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan pengemudi kantor	12 laporan bulanan	355.068.000	12 laporan bulanan	390.574.800	
2	12	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan parasarana dalam kondisi baik	100 %	892.628.150	100 %	981.890.965	
2	12	02	012 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah pengadaan barang modal	22 Unit	330.436.150	22 Unit	363.479.765	
2	12	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 laporan bulanan	110.000.000	12 laporan bulanan	121.000.000	
2	12	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	44 Unit	452.192.000	44 Unit	497.411.200	
2	12	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100 %	84.730.800	100 %	93.203.880	
2	12	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	110 Stel	84.730.800	110 Stel	93.203.880	
2	12	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	100 %	93.200.000	100 %	102.520.000	
2	12	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	110 Orang	93.200.000	110 Orang	102.520.000	
2	12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN/PMA	100 %	884.169.400	550 Investor	972.586.340	
2	12	15	018 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal	- Jumlah sosialisasi penanaman modal - Jumlah pameran investasi - Jumlah event investasi	4 kali 3 kali 2 kali	884.169.400	4 kali 3 kali 2 kali	972.586.340	
2	12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	5.65 Trilyun Rupiah	700.950.900	5.65 Trilyun Rupiah	771.045.990	
2	12	16	015 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	- Digitasi Data Sebaran Investasi	1 aplikasi	391.146.900	1 aplikasi	430.261.590	
2	12	16	026 Kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan Penanaman Modal	- Dokumen studi kelayakan penanaman modal	1 Dokumen	309.804.000	1 Dokumen	340.784.400	
2	12	20	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Investasi	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	100 Investor	347.975.000	100 Investor	382.772.500	
2	12	20	003 Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Penanaman Modal	- Jumlah investor yang diawasi - Jumlah laporan pengawasan penanaman modal	50 pelaku usaha 12 laporan	117.400.000	50 pelaku usaha 12 laporan	129.140.000	
2	12	20	005 Kegiatan Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Perizinan	- Jumlah laporan layanan proses advokasi - Jumlah laporan pelayanan pengaduan yang di tangani	12 laporan bulanan 12 laporan bulanan	71.715.000	12 laporan bulanan 12 laporan bulanan	78.886.500	
2	12	20	006 Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal	- Jumlah pelaku usaha yang dipantau dan dibina - Jumlah laporan pemantuan dan pembinaan penanaman modal	50 Pelaku Usaha 12 laporan	158.860.000	50 Pelaku Usaha 12 laporan	174.746.000	
2	12	22	Program Pelayanan Perizinan	Pemenuhan standar pelayanan perizinan	80.19 Nilai	1.548.294.000	100 %	1.703.123.400	
2	12	22	001 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	- Jumlah Aplikasi	3 aplikasi	1.185.808.000	3 aplikasi	1.304.388.800	
2	12	22	002 Kegiatan Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum	- Jumlah dokumen rancangan produk hukum	2 Raperwal	58.750.000	2 Raperwal	64.625.000	
2	12	22	003 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan PPTSP			74.036.000		81.439.600	



2	12	22	004	Kegiatan Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan			229.700.000		252.670.000
---	----	----	-----	--	--	--	-------------	--	-------------

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.13.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Total Pagu : 41.066.941.651

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	13		Kepemudaan dan Olah Raga						
2	13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	14.906.629.447		16.397.292.392	
2	13	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah jasa bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Jasa Bulanan	3.881.544.034	12 Jasa Bulanan	4.269.698.437	
2	13	01	003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Jasa Bulanan	100.100.000	12 Jasa Bulanan	110.110.000	
2	13	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	61 Unit	266.263.700	61 Unit	292.890.070	
2	13	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 laporan	3.447.346.400	12 laporan	3.792.081.040	
2	13	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah penyediaan ATK	12 laporan	60.369.900	12 laporan	66.406.890	
2	13	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	10 jenis	213.188.250	10 jenis	234.507.075	
2	13	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 laporan	46.446.900	12 laporan	51.091.590	
2	13	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12.490.280	12 laporan	13.739.308	
2	13	01	016 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			828.810.000		911.691.000	
2	13	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan kegiatan makanan dan minuman	12 laporan	147.462.000	12 laporan	162.208.200	
2	13	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			1.937.323.983		2.131.056.381	
2	13	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	13 Bulan	617.500.000	13 Bulan	679.250.000	
2	13	01	020 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah jasa pengamanan kantor	12 Jasa Bulanan	3.347.784.000	12 Jasa Bulanan	3.682.562.400	
2	13	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	230.468.510		253.515.361	
2	13	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 laporan	230.468.510	2 laporan	253.515.361	
2	13	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	163.630.000		179.993.000	
2	13	03	005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	100 Stel	163.630.000	100 Stel	179.993.000	
2	13	23	Program Pembinaan Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Keolahragaan	90 %	13.128.854.500	90 %	14.441.739.950	
2	13	23	001 Kegiatan penghargaan keolahragaan	- Jumlah event pemberian penghargaan keolahragaan	1 event	1.515.020.000	1 event	1.666.522.000	
2	13	23	002 Kegiatan peningkatan promosi olahraga prestasi	- jumlah event promosi olahraga prestasi	5 Kegiatan	2.772.943.800	5 Kegiatan	3.050.238.180	
2	13	23	004 Kegiatan Kemitraan Keolahragaan	- Jumlah Pelatihan dalam Kemitraan Olahraga	2 Pelatihan	314.490.000	2 Pelatihan	345.939.000	
2	13	23	005 Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	- Jumlah event pemasyarakatan olahraga rekreasi di masyarakat	2 event	699.259.400	2 event	769.185.340	
2	13	23	006 Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Tradisional	- Jumlah event pemasyarakatan olahraga tradisional di masyarakat	3 event	555.560.700	3 event	611.116.770	
2	13	23	007 Kegiatan Pemberdayaan Olahraga Khusus	- Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus	2 event	692.197.200	2 event	761.416.920	
2	13	23	008 Kegiatan Pembinaan Olahraga Pendidikan	- Jumlah kegiatan pembinaan olahraga pendidikan	3 event	5.121.507.000	3 event	5.633.657.700	
2	13	23	009 Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga	- Jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga	1 Kegiatan	1.457.876.400	1 Kegiatan	1.603.664.040	
2	13	26	Program Pembinaan Kepemudaan	Persentase Rata-Rata organisasi pemuda yang aktif Positif	0.035 %	7.256.425.550	0.035 %	7.982.068.105	
2	13	26	003 kegiatan peningkatan karya dan prestasi pemuda	- jumlah event karya dan prestasi pemuda yang diraih	1 event	620.845.750	1 event	682.930.325	
2	13	26	004 kegiatan peningkatan kepedulian pemuda	- jumlah event kepedulian pemuda	3 event	517.956.000	3 event	569.751.600	
2	13	26	005 kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan	- jumlah pemberdayaan organisasi pemuda	22 OKP	543.296.000	22 OKP	597.625.600	
2	13	26	006 kegiatan peningkatan kepramukaan	- jumlah pembinaan gerakan kepramukaan	4 Pembinaan	639.300.000	4 Pembinaan	703.230.000	
2	13	26	007 kegiatan pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter	- jumlah pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter	15 Pembinaan	2.144.931.000	15 Pembinaan	2.359.424.100	
2	13	26	009 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Hidup Pemuda	- Jumlah wirausaha muda yang meningkat Kapasitasnya	600 orang	1.424.729.250	600 orang	1.567.202.175	
2	13	26	010 kegiatan peningkatan kerjasama dan kemitraan	- jumlah event kerjasama dan kemitraan pemuda	1 event	294.717.550	1 event	324.189.305	
2	13	26	011 Kegiatan Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	- Jumlah pelatihan/seminar/workshop kreatifitas dan inovasi pemuda	8 Pelatihan	1.070.650.000	8 Pelatihan	1.177.715.000	
2	13	29	Program Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan dan Keolahragaan	Persentase infrastruktur Kepemudaan dan keolahragaan yang berfungsi dengan baik	90 %	5.380.933.644	90 %	5.919.027.009	
2	13	29	001 Kegiatan pengembangan sentra keolahragaan	- Persentase rata-rata Sarana dan Prasarana Olahraga dengan fungsi baik	90 persen	2.972.440.644	90 persen	3.269.684.709	
2	13	29	002 Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Kepemudaan	- Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan dengan fungsi baik	90 persen	1.419.991.800	90 persen	1.561.990.980	

2	13	29	003	Kegiatan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga	- Cakupan infrastruktur sarana prasarana olahraga di kecamatan yang terpelihara	100 persen	988.501.200	100 persen	1.087.351.320
---	----	----	-----	--	---	------------	-------------	------------	---------------

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.16.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Total Pagu : 40.094.547.900

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	16		Kebudayaan						
2	16	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	10.756.010.790	100 %	11.831.611.869	
2	16	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	2.124.624.400	12 laporan	2.337.086.840	
2	16	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang izinnya terpelihara	12 laporan	28.355.900	12 laporan	31.191.490	
2	16	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 laporan	2.889.444.400	12 laporan	3.178.388.840	
2	16	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 laporan	412.515.000	12 laporan	453.766.500	
2	16	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	12 laporan	221.983.820	12 laporan	244.182.202	
2	16	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 laporan	334.659.000	12 laporan	368.124.900	
2	16	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 laporan	152.173.600	12 laporan	167.390.960	
2	16	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	164.198.870	12 laporan	180.618.757	
2	16	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	21.675.000	12 Bulan	23.842.500	
2	16	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 laporan	55.000.000	12 laporan	60.500.000	
2	16	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan bulanan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	241.450.000	12 laporan	265.595.000	
2	16	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan bulanan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	587.500.000	12 laporan	646.250.000	
2	16	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 laporan	900.000.000	12 laporan	990.000.000	
2	16	01	020 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa keamanan kantor	12 laporan	2.622.430.800	12 laporan	2.884.673.880	
2	16	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	90 %	2.754.732.570	90 %	3.030.205.827	
2	16	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	6 gedung	1.482.213.570	6 gedung	1.630.434.927	
2	16	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 laporan	852.159.000	12 laporan	937.374.900	
2	16	02	028 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 laporan	420.360.000	12 laporan	462.396.000	
2	16	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	212.346.000	100 %	233.580.600	
2	16	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	1 Kegiatan	212.346.000	1 Kegiatan	233.580.600	
2	16	08	Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase layanan data dan informasi	43.75 %	1.164.656.145	43.75 %	1.281.121.760	
2	16	08	001 Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disebarluaskan - Jumlah laporan bulanan penyebarluasan informasi pariwisata dan budaya melalui media	12 data 12 laporan	1.164.656.145	12 data 12 laporan	1.281.121.760	
2	16	19	Program pelindungan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	0.52 %	361.741.650	0.52 %	397.915.815	
2	16	19	001 Kegiatan Kajian nilai-nilai kebudayaan	- Jumlah dokumen kajian nilai-nilai kebudayaan	2 Dokumen	279.700.000	2 Dokumen	307.670.000	
2	16	19	002 Kegiatan pencatatan, penghimpunan dan penataan sistem informasi	- Jumlah database kebudayaan termutakhirkan	2 Database	82.041.650	2 Database	90.245.815	
2	16	20	Program Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	0.52 %	1.625.734.600	0.52 %	1.788.308.060	
2	16	20	001 Kegiatan pemberian apresiasi pada pelaku objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah budayawan mendapat apresiasi	15 Orang	691.457.600	15 Orang	760.603.360	
2	16	20	002 Kegiatan diskusi, seminar, sarasehan, diseminasi, dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah diskusi, seminar, sarasehan, diseminasi, dan sosialisasi objek pemajuan kebudayaan	8 kali	416.600.000	8 kali	458.260.000	
2	16	20	003 Kegiatan pelatihan bagi pelaku objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah kegiatan pelatihan	4 kali	180.579.000	4 kali	198.636.900	
2	16	20	004 Kegiatan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah kegiatan revitalisasi objek pemajuan kebudayaan	3 kali	337.098.000	3 kali	370.807.800	
2	16	21	Program pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Persentase sub objek pemajuan kebudayaan dimanfaatkan	0.52 %	12.699.716.000	0.52 %	13.969.687.600	
2	16	21	001 Kegiatan penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter serta pekeriti bangsa	- Jumlah penyebarluasan informasi kebudayaan	48 kali	9.793.250.000	48 kali	10.772.575.000	
2	16	21	002 Kegiatan pertgelaran kesenian dan pameran objek pemajuan kebudayaan	- Jumlah penyelenggaraan pertgelaran dan pameran	40 kali	2.308.500.000	40 kali	2.539.350.000	

2	16	21	003	Kegiatan pelindungan dan pengembangan kesenian	- Jumlah kegiatan pelindungan dan pengembangan kesenian	6 kali	597.966.000	6 kali	657.762.600
2	16	22		<b>Program pelestarian cagar budaya dan permuseuman</b>	Persentase cagar budaya memenuhi kriteria dilestarikan	<b>0.52 %</b>	<b>885.907.000</b>	<b>0.52 %</b>	<b>974.497.700</b>
2	16	22	001	Kegiatan pelindungan benda dan bangunan cagar budaya	- Jumlah kegiatan pelindungan benda dan bangunan cagar budaya	8 kali	414.677.000	8 kali	456.144.700
2	16	22	002	Kegiatan pengembangan benda dan bangunan cagar budaya dan permuseuman	- Jumlah kegiatan pengembangan benda dan bangunan cagar budaya	8 kali	252.136.000	8 kali	277.349.600
2	16	22	003	Kegiatan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya dan permuseuman	- Jumlah kegiatan pemanfaatan benda dan bangunan cagar budaya	8 kali	219.094.000	8 kali	241.003.400
3				<b>Urusan Pilihan</b>					
3	02			<b>Pariwisata</b>					
3	02	15		<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	Tingkat brand pariwisata kota bandung / Indeks Hubungan Brand dengan konsumen	<b>3.80 poin</b>	<b>2.653.097.000</b>	<b>3.80 poin</b>	<b>2.918.406.700</b>
3	02	15	014	Kegiatan promosi pariwisata	- Jumlah kegiatan promosi pariwisata	30 kali	1.946.440.000	30 kali	2.141.084.000
3	02	15	015	Kegiatan pengembangan kerjasama pemasaran	- Jumlah kegiatan joint promotion	4 kali	293.945.000	4 kali	323.339.500
3	02	15	016	Kegiatan analisa pasar pariwisata	- Jumlah dokumen kajian analisa pasar pariwisata	2 Dokumen	310.612.000	2 Dokumen	341.673.200
3	02	15	017	Kegiatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan pariwisata	- Jumlah sistem informasi pemasaran pariwisata termutakhirkan	1 Sistem	102.100.000	1 Sistem	112.310.000
3	02	19		<b>Program pembangunan dan pengembangan destinasi wisata</b>	Persentase ODTW dikembangkan	<b>24 %</b>	<b>1.722.588.090</b>	<b>24 %</b>	<b>1.894.846.899</b>
3	02	19	001	Kegiatan pengembangan amenitas, atraksi dan aksesibilitas kawasan / daya tarik pariwisata	- Jumlah kegiatan pengembangan amenitas, atraksi dan aksesibilitas objek daya tarik wisata	30 Kegiatan	1.470.808.130	30 Kegiatan	1.617.888.943
3	02	19	003	Kegiatan perumusan kebijakan kepariwisataan	- Jumlah dokumen kebijakan kepariwisataan	3 Dokumen	251.779.960	3 Dokumen	276.957.956
3	02	20		<b>Program pengembangan industri pariwisata</b>	Persentase jasa usaha pariwisata berstandar baik	<b>10.78 %</b>	<b>1.665.267.350</b>	<b>10.78 %</b>	<b>1.831.794.085</b>
3	02	20	001	Kegiatan pengembangan standar jasa usaha pariwisata	- Jumlah kegiatan pengembangan standarisasi jasa usaha pariwisata	6 Kegiatan	1.270.788.000	6 Kegiatan	1.397.866.800
3	02	20	002	Kegiatan pemberian apresiasi kepada pelaku jasa usaha pariwisata	- Jumlah jasa usaha pariwisata menerima apresiasi	6 pelaku usaha	394.479.350	6 pelaku usaha	433.927.285
3	02	21		<b>Program pengembangan kelembagaan pariwisata</b>	Persentase lembaga dan SDM Pariwisata meningkat kompetensinya	<b>1.94 %</b>	<b>518.717.000</b>	<b>1.94 %</b>	<b>570.588.700</b>
3	02	21	001	Kegiatan peningkatan masyarakat sadar wisata	- Jumlah kegiatan peningkatan sadarwisata	8 kegiatan	107.132.000	8 kegiatan	117.845.200
3	02	21	002	Kegiatan pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga pariwisata	- Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sdm dan lembaga pariwisata	4 kegiatan	411.585.000	4 kegiatan	452.743.500
3	02	22		<b>Program pengembangan kebijakan ekonomi kreatif</b>	Persentase rancangan kebijakan berbasis riset (evidence based policy) / Persentase hasil kajian yang dijadikan dasar penyusunan rancangan kebijakan	<b>62.5 %</b>	<b>448.008.678</b>	<b>62.5 %</b>	<b>492.809.546</b>
3	02	22	001	Kegiatan pengembangan database ekonomi kreatif	- Jumlah database ekraf termutakhirkan	2 Database	154.480.000	2 Database	169.928.000
3	02	22	002	Kegiatan perumusan kebijakan ekonomi kreatif	- Jumlah dokumen rumusan kebijakan ekonomi kreatif	1 Dokumen	293.528.678	1 Dokumen	322.881.546
3	02	23		<b>Program pengembangan ekosistem kreatif</b>	Persentase Aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	<b>62.5 %</b>	<b>1.986.838.000</b>	<b>62.5 %</b>	<b>2.185.521.800</b>
3	02	23	001	Kegiatan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	- Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pelaku ekraf	8 Kegiatan	292.998.000	8 Kegiatan	322.297.800
3	02	23	002	Kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi, dan sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	- Jumlah kegiatan pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi, dan sosialisasi bagi pelaku ekonomi kreatif	8 kali	1.064.910.000	8 kali	1.171.401.000
3	02	23	003	Kegiatan penyusunan dan pengembangan prototype kreatifitas tradisi	- Jumlah prototype kreatifitas tradisi	2 Jenis	203.630.000	2 Jenis	223.993.000
3	02	23	004	Kegiatan Pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi dan sosialisasi pengembangan kreatifitas tradisi	- Jumlah kegiatan Pendukung inkubasi, eksibisi, kompetisi dan sosialisasi pengembangan kreatifitas tradisi	8 Kegiatan	425.300.000	8 Kegiatan	467.830.000
3	02	24		<b>Program pengembangan infrastruktur terpadu ekonomi kreatif</b>	Persentase rumah / kampung kreatif / inkubasi / - co working space dan simpul kreatif dalam kategori berkembang	<b>6.67 %</b>	<b>639.187.027</b>	<b>6.67 %</b>	<b>703.105.730</b>
3	02	24	001	Kegiatan peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif;	- Jumlah kegiatan peningkatan dan perluasan kerjasama para pelaku ekraf	8 kegiatan	426.818.800	8 kegiatan	469.500.680
3	02	24	002	Kegiatan pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual	- Jumlah pengusaha dan pelaku ekrf terfasilitasi HAKI	200 Pelaku Usaha	212.368.227	200 Pelaku Usaha	233.605.050

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Total Pagu : 8.924.480.050

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 18</b>			<b>Kearsipan</b>				
<b>2 18 19</b>			<b>Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan</b>	Peningkatan Prosentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan kearsipan Secara Baku	<b>10 %</b>	<b>765.817.520</b>	<b>10 %</b> <b>842.399.272</b>
2 18 19 001			Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Dinamis	4 Dokumen	232.432.280	4 Dokumen 255.675.508
2 18 19 002			Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Arsip Statis	4 Dokumen	281.613.500	4 Dokumen 309.774.850
2 18 19 003			Kegiatan Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	- Jumlah Dokumen Pelestarian dan Publikasi Kearsipan	4 Dokumen	251.771.740	4 Dokumen 276.948.914
<b>2 18 20</b>			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan dan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	Peningkatan Prosentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku	<b>5.50 %</b>	<b>408.423.440</b>	<b>10 %</b> <b>449.265.784</b>
2 18 20 001			Kegiatan Kajian Pengembangan Kearsipan	- Jumlah Kajian tentang Kearsipan	1 Dokumen	125.505.000	1 Dokumen 138.055.500
2 18 20 002			Kegiatan Advokasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca	- Jumlah Advokasi dan Kerjasama Pembudayaan Kegemaran Membaca	3 laporan	150.963.000	3 laporan 166.059.300
2 18 20 003			Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan	- Jumlah SDM Perpustakaan yang Terbina - Jumlah SDM Kearsipan yang Terbina - Terlaksananya Kajian Budaya Baca di Kota Bandung	70 Orang 70 Orang 1 Dokumen	131.955.440	70 Orang 70 Orang 1 Dokumen 145.150.984
<b>2 18 21</b>			<b>Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan</b>	Peningkatan Prosentase Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Kearsipan Secara Baku	<b>5.50 %</b>	<b>271.609.600</b>	<b>10 %</b> <b>298.770.560</b>
2 18 21 001			Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan	- Terlaksananya pembangunan dan pengembangan sistem TI Perpustakaan dan Kearsipan	100 %	71.051.000	100 % 78.156.100
2 18 21 002			Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	- Terlaksananya pemeliharaan sistem jaringan perpustakaan dan kearsipan	8 Aplikasi	82.088.600	8 Aplikasi 90.297.460
2 18 21 003			Kegiatan Digitalisasi Data dan Informasi Perpustakaan dan Kearsipan	- Terlaksananya digitalisasi data dan informasi perpustakaan dan kearsipan	100 %	118.470.000	100 % 130.317.000
<b>2 17</b>			<b>Perpustakaan</b>				
<b>2 17 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>100 %</b>	<b>4.711.942.785</b>	<b>100 %</b> <b>5.183.137.063</b>
2 17 01 001			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	16.335.000	1 Dokumen 17.968.500
2 17 01 002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Dokumen	507.842.135	12 Dokumen 558.626.348
2 17 01 008			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jasa Kebersihan Kantor	12 Dokumen	783.564.430	12 Dokumen 861.920.873
2 17 01 009			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga	12 Dokumen	108.895.600	12 Dokumen 119.785.160
2 17 01 010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Alat Tulis Kantor	1 Dokumen	197.937.080	1 Dokumen 217.730.788
2 17 01 011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Dokumen	232.579.000	12 Dokumen 255.836.900
2 17 01 013			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Dokumen	320.178.540	3 Dokumen 352.196.394
2 17 01 015			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	122.932.000	12 Dokumen 135.225.200
2 17 01 017			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Makanan dan minuman	12 Dokumen	188.056.000	12 Dokumen 206.861.600
2 17 01 018			Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Dokumen	422.100.000	12 Dokumen 464.310.000
2 17 01 019			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jasa Pengemudi Kantor dan Tenaga Pendukung Administrasi Lainnya	12 Dokumen	1.141.966.200	12 Dokumen 1.256.162.820
2 17 01 020			Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jasa Pengamanan Kantor	4 Dokumen	669.556.800	4 Dokumen 736.512.480
<b>2 17 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>100 %</b>	<b>1.289.925.780</b>	<b>100 %</b> <b>1.418.918.358</b>
2 17 02 022			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Dokumen	454.319.580	1 Dokumen 499.751.538
2 17 02 024			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	23 Unit	835.606.200	23 Unit 919.166.820
<b>2 17 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	<b>100 %</b>	<b>140.937.300</b>	<b>100 %</b> <b>155.031.030</b>
2 17 03 002			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	60 Stel	140.937.300	60 Stel 155.031.030
<b>2 17 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Prosentase Pegawai yang Memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>283.987.100</b>	<b>100 %</b> <b>312.385.810</b>
2 17 05 004			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Terlaksananya Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Dokumen	174.987.100	1 Dokumen 192.485.810
2 17 05 005			Kegiatan Seminar dan Lokakarya	- Terlaksananya seminar dan lokakarya	4 Dokumen	109.000.000	4 Dokumen 119.900.000
<b>2 17 08</b>			<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	<b>100 %</b>	<b>74.758.000</b>	<b>100 %</b> <b>82.233.800</b>
2 17 08 001			Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Database terpadu dan sistem informasi perangkat daerah	12 laporan	74.758.000	12 laporan 82.233.800

2	17	18		<b>Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca</b>	Peningkatan Prosentase Pemustaka Pertahun	<b>5.50 %</b>	<b>977.078.525</b>	<b>5.50 %</b>	<b>1.074.786.378</b>
2	17	18	001	<i>Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka</i>	<i>- Jumlah Tersedianya Bahan Pustaka</i>	<i>8000 eksemplar</i>	<i>550.992.500</i>	<i>8000 eksemplar</i>	<i>606.091.750</i>
2	17	18	002	<i>Kegiatan Pelayanan Sirkulasi dan Referensi Perpustakaan</i>	<i>- Jumlah Dokumen Layanan Perpustakaan dan Jumlah Ruang Layanan Yang Terpelihara</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>216.211.025</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>237.832.128</i>
2	17	18	003	<i>Kegiatan Promosi dan Pembudayaan Minat Baca</i>	<i>- Jumlah Pelaksanaan Perlombaan dan Jumlah pelaksanaan Pameran</i>	<i>4 Kegiatan Lomba dan 3 Kegiatan Pameran Kegiatan</i>	<i>209.875.000</i>	<i>4 Kegiatan Lomba dan 3 Kegiatan Pameran Kegiatan</i>	<i>230.862.500</i>

# Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 3.06.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Total Pagu : 29.214.773.341

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>3</b>			<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>3 06</b>			<b>Perdagangan</b>				
<b>3 06 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>100 %</b>	<b>2.898.771.101</b>	<b>100 %</b>
3 06 01 002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	131.628.800	12 laporan
3 06 01 006			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan bulanan Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	12 laporan	23.796.900	12 laporan
3 06 01 008			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan bulanan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	292.632.000	12 laporan
3 06 01 009			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah laporan bulanan Peralatan Kerja yang diperbaiki	12 laporan	54.670.000	12 laporan
3 06 01 010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	12 laporan	122.969.000	12 laporan
3 06 01 011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan bulanan pengadaan Cetak dan Pengadaan	12 laporan	121.770.100	12 laporan
3 06 01 012			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 laporan	50.247.450	12 laporan
3 06 01 013			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	686.536.400	12 laporan
3 06 01 014			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	65.277.300	12 laporan
3 06 01 015			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	50.619.800	12 laporan
3 06 01 017			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan bulanan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan	94.275.500	12 laporan
3 06 01 018			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan	533.493.051	12 laporan
3 06 01 019			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	12 laporan	336.076.400	12 laporan
3 06 01 020			Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor	12 laporan	334.778.400	12 laporan
<b>3 06 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>1.589.752.710</b>	<b>100 %</b>
3 06 02 022			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 laporan	165.038.000	12 laporan
3 06 02 023			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Jumlah unit pemeliharaan mobil jabatan	12 Unit	816.652.320	12 Unit
3 06 02 024			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	25 Unit	243.075.000	25 Unit
3 06 02 042			Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 Unit	364.987.390	1 Unit
<b>3 06 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Tersedianya gedung kantor yang memadai	<b>1 gedung</b>	<b>10.721.364.360</b>	<b>1 gedung</b>
3 06 02 003			Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah pembangunan gedung kantor	1 gedung	10.721.364.360	1 gedung
<b>3 06 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>79.200.000</b>	<b>100 %</b>
3 06 03 002			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	105 Stel	79.200.000	105 Stel
<b>3 06 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>273.860.800</b>	<b>100 %</b>
3 06 05 004			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta Pembinaan Kinerja Aparatur	100 Org	273.860.800	100 Org
<b>3 06 08</b>			<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan data dan informasi	<b>100 %</b>	<b>196.519.100</b>	<b>100 %</b>
3 06 08 001			Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Jumlah laporan data dan informasi	1 laporan	196.519.100	1 laporan
<b>3 06 17</b>			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>	Nilai Ekspor Kota Bandung	<b>467 US\$ juta</b>	<b>1.531.220.500</b>	<b>467 US\$ juta</b>
3 06 17 008			Kegiatan Membangun Jaringan dengan Eksportir	- Jumlah jaringan usaha dengan eksportir	12 perusahaan	338.636.000	12 perusahaan
3 06 17 015			Kegiatan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar dan dalam negeri	- Jumlah Kerjasama Perdagangan Regional dan Luar Negeri	2 MoU	881.875.000	2 MoU
3 06 17 017			Kegiatan Pengembangan Peluang Pasar Luar Negeri	- Jumlah produk Siap Ekspor	5 produk	310.709.500	5 produk
<b>3 06 22</b>			<b>Program Pengembangan E-Commerce</b>	Nilai daya saing perdagangan e-commerce	<b>400 poin</b>	<b>246.040.000</b>	<b>400 poin</b>
3 06 22 001			Kegiatan Fasilitasi Pengembangan E-Commerce	- Jumlah pelaku usaha yang dibina lingkup e-Commerce	180 Pelaku Usaha	246.040.000	180 Pelaku Usaha
<b>3 06 23</b>			<b>Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri</b>	Nilai daya saing perdagangan	<b>450 poin</b>	<b>1.179.511.340</b>	<b>450 poin</b>
3 06 23 001			Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal	- Jumlah pelaku usaha yang dibina	125 pelaku usaha	305.230.400	125 pelaku usaha
3 06 23 002			Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Pedagang Pasar Rakyat	- Jumlah pedagang Pasar yang di bina	200 Pelaku Usaha	116.887.600	200 Pelaku Usaha



3	06	23	003	Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perdagangan serta Fasilitas Pembiayaan	- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sarana perdagangan - Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	25 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha	139.520.000	25 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha	153.472.000
3	06	23	003	Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	- Jumlah pelaku Usaha yang dipromosikan - Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan dengan toko modern	20 Pelaku Usaha 375 Pelaku Usaha	505.703.340	20 Pelaku Usaha 375 Pelaku Usaha	556.273.674
3	06	23	004	Kegiatan Pengembangan Usaha Bagi Pedagang Formal	- Jumlah penataan Tempat Usaha Pedagang Formal	105 Tempat	112.170.000	105 Tempat	123.387.000
3	06	24		<b>Program Standardisasi Kemetrologian</b>	Meningkatnya alat UTP yang terstandarisasi	<b>83 Nilai</b>	<b>1.346.606.175</b>	<b>120500 ALAT</b>	<b>1.481.266.793</b>
3	06	24	001	Kegiatan Operasionalisasi UPT Kemetrologian dan Pelayanan Tera/Tera Ulang	- Jumlah alat UTP yang ditera dan tera ulang	120500 ALAT	1.160.716.175	120500 ALAT	1.276.787.793
3	06	24	002	Kegiatan Pengawasan dan Pengamatan Kemetrologian	- Jumlah lokasi Pengawasan/ Pengamatan	96 lokasi	185.890.000	96 lokasi	204.479.000
3	06	25		<b>Program Peningkatan Distribusi Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	Tingkat Lonjakan Harga Barang Kebutuhan Pokok	<b>15 %</b>	<b>2.305.002.710</b>	<b>15 %</b>	<b>2.535.502.981</b>
3	06	25	001	Kegiatan Pemantauan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Operasi Pasar/Pasar Murah	- Jenis Komoditi Barang Kebutuhan Pokok yang di pantau dan Pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Murah	12 komoditi	2.113.002.850	12 komoditi	2.324.303.135
3	06	25	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Lingkup Distribusi Perdagangan	- Pembinaan pelaku usaha lingkup distribusi perdagangan	55 distributor	191.999.860	55 distributor	211.199.846
3	07			<b>Perindustrian</b>					
3	07	15		<b>Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>	Jumlah Industri Kecil Menengah Tersertifikasi	<b>362 IKM</b>	<b>829.758.000</b>	<b>362 IKM</b>	<b>912.733.800</b>
3	07	15	004	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standardisasi, Pengujian dan Kualitas	- Jumlah Industri Kecil Menengah yang tersertifikasi	362 IKM	631.750.000	362 IKM	694.925.000
3	07	15	007	Kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Industri	- Jumlah Industri Kecil Menengah yang mengikuti Seminar 4.0 - Diversifikasi (Penganekaragaman) Produk Industri	30 Org 50 Org	198.008.000	30 Org 50 Org	217.808.800
3	07	16		<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	Jumlah Industri Kecil Menengah yang meningkat daya saingnya	<b>280 IKM</b>	<b>4.251.840.910</b>	<b>280 IKM</b>	<b>4.677.025.001</b>
3	07	16	001	Kegiatan Fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	- Jumlah Industri Kecil Menengah yang mendapatkan fasilitas pendampingan diversifikasi produk - Tersusunnya Data Base Industri Kecil Menengah	50 Org 1 Dokumen	564.455.600	50 Org 1 Dokumen	620.901.160
3	07	16	012	Kegiatan Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia IKM	- Jumlah Pelaku Industri yang memiliki Sertifikasi Kompetensi - Jumlah pelaku Industri yang dibina	60 orang 450 orang	2.133.265.340	60 orang 450 orang	2.346.591.874
3	07	16	013	Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah dalam Meningkatkan Kemampuan Sistem Produksi	- Jumlah Industri Kecil Menengah yang memiliki peningkatan kemampuan sistem produksi	30 IKM	550.213.500	30 IKM	605.234.850
3	07	16	014	Kegiatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Industri Kecil Menengah	- Jumlah Industri Kecil Menengah yang dipromosikan	100 IKM	1.003.906.470	100 IKM	1.104.297.117
3	07	17		<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b>	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	<b>150 Pelaku Usaha</b>	<b>1.407.051.735</b>	<b>83 Nilai</b>	<b>1.547.756.909</b>
3	07	17	002	Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	- Industri Kecil Menengah yang dilayani dalam proses produksi	100 Pelaku Usaha	908.021.880	100 Pelaku Usaha	998.824.068
3	07	17	005	Kegiatan Pelatihan keterampilan industri kerajinan	- Pelaku Industri Kecil Menengah yang mengikuti diklat teknik proses produksi	600 Pelaku Usaha	499.029.855	600 Pelaku Usaha	548.932.841
3	07	22		<b>Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan</b>	Jumlah sentra industri yang meningkat daya saingnya	<b>4 Sentra</b>	<b>358.273.900</b>	<b>4 Sentra</b>	<b>394.101.290</b>
3	07	22	001	Kegiatan pengembangan usaha sentra industri	- Penyusunan Peraturan Wali Kota terkait keberadaan Sentra Industri - Penguatan SDM Industri Kecil Menengah - Pembinaan bagi sentra industri - Temu Bisnis/Bisnis Matching IKM Sentra Industri dengan Kadin dan Pengusaha	1 perwal 400 Org 4 Sentra 4 Sentra	358.273.900	1 perwal 400 Org 4 Sentra 4 Sentra	394.101.290

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Total Pagu : 14.486.901.668

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 01</b>			<b>Perencanaan</b>				
<b>4 01 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	<b>100 %</b>	<b>4.046.090.473</b>	<b>100 %</b>
4 01 01 002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 laporan	44.880.000	12 laporan	49.368.000
4 01 01 003			Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 laporan	220.000.000	12 laporan	242.000.000
4 01 01 010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 laporan	231.246.527	12 laporan	254.371.180
4 01 01 011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 laporan	322.477.500	12 laporan	354.725.250
4 01 01 012			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 laporan	35.032.103	12 laporan	38.535.313
4 01 01 014			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 laporan	135.590.206	12 laporan	149.149.227
4 01 01 015			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 laporan	125.372.500	12 laporan	137.909.750
4 01 01 017			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman 12 laporan	232.247.907	12 laporan	255.472.698
4 01 01 018			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 laporan	814.692.930	12 laporan	896.162.223
4 01 01 019			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran 12 laporan	1.884.550.800	12 laporan	2.073.005.880
<b>4 01 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>2.007.743.867</b>	<b>100 %</b>
4 01 02 010			Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan Meubelair 1 Paket	157.591.170	1 Paket	173.350.287
4 01 02 012			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Perlengkapan Peralatan Aparatur 1 Paket	159.076.280	1 Paket	174.983.908
4 01 02 022			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Bappeltbang 12 laporan	192.499.997	12 laporan	211.749.996
4 01 02 024			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas / operasional terpelihara 45 Unit	1.339.873.920	45 Unit	1.473.861.312
4 01 02 026			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12 laporan	109.202.500	12 laporan	120.122.750
4 01 02 029			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	- Jumlah Laporan Pemeliharaan rutin / berkala mebeulair 12 laporan	49.500.000	12 laporan	54.450.000
<b>4 01 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Aparatur	<b>100 %</b>	<b>86.212.500</b>	<b>100 %</b>
4 01 03 005			Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus 285 Stel	86.212.500	285 Stel	94.833.750
<b>4 01 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya	<b>100 %</b>	<b>316.690.000</b>	<b>100 %</b>
4 01 05 013			Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	- Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas 95 orang	316.690.000	95 orang	348.359.000
<b>4 01 19</b>			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya Terukur	<b>50 %</b>	<b>4.965.094.200</b>	<b>50 %</b>
4 01 19 008			Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	- Jumlah Dokumen RKPD Kota Bandung 1 Dokumen	172.425.000	1 Dokumen	189.667.500
4 01 19 009			Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	- Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kota 1 kali	864.000.000	1 kali	950.400.000
4 01 19 018			Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	- Jumlah Dokumen RKPD Perubahan Kota Bandung 1 Dokumen	136.515.000	1 Dokumen	150.166.500
4 01 19 037			Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	- Jumlah Dokumen KUA PPAS 1 Dokumen	152.174.600	1 Dokumen	167.392.060
4 01 19 038			Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	- Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan 1 Dokumen	116.974.850	1 Dokumen	128.672.335
4 01 19 041			Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung 1 Dokumen	259.399.590	1 Dokumen	285.339.549
4 01 19 042			Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung	- Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung 1 Dokumen	157.628.600	1 Dokumen	173.391.460
4 01 19 043			Perencanaan Sumber daya Keuangan APBD dan Non APBD	- Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD 1 Dokumen	90.648.800	1 Dokumen	99.713.680
4 01 19 046			Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Dokumen	430.990.000	2 Dokumen	474.089.000
4 01 19 047			Perencanaan Sarana dan Prasarana	- Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana 2 Dokumen	914.413.950	2 Dokumen	1.005.855.345

4	01	19	048	Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	3 kali	254.510.000	3 kali	279.961.000
4	01	19	054	Penyusunan Masterplan Pendidikan	- Jumlah Dokumen Masterplan Pendidikan	1 Dokumen	215.899.800	1 Dokumen	237.489.780
4	01	19	055	Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Dokumen	124.800.000	1 Dokumen	137.280.000
4	01	19	056	Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	- Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	123.800.000	1 Dokumen	136.180.000
4	01	19	057	Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	- Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	1 Dokumen	145.320.000	1 Dokumen	159.852.000
4	01	19	058	Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	- Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	266.004.760	1 Dokumen	292.605.236
4	01	19	059	Updating Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu	- Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu yang di update	1 aplikasi	244.959.250	1 aplikasi	269.455.175
4	01	19	060	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	- Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	1 Dokumen	81.830.000	1 Dokumen	90.013.000
4	01	19	061	Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	212.800.000	1 Dokumen	234.080.000
4	01	28		<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	Persentase Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti	<b>100 %</b>	<b>161.680.000</b>	<b>100 %</b>	<b>177.848.000</b>
4	01	28	005	Kegiatan Monitoring, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	- Jumlah PD yang dimonitoring dan dievaluasi Pelaksanaan APBD nya	60 PD	161.680.000	60 PD	177.848.000
4	01	29		<b>Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan</b>	Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan disusun tepat waktu	<b>100 %</b>	<b>501.536.180</b>	<b>100 %</b>	<b>551.689.798</b>
4	01	29	001	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Bandung	1 Dokumen	107.010.000	1 Dokumen	117.711.000
4	01	29	007	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	- Jumlah Dokumen LKPJ	1 Dokumen	394.526.180	1 Dokumen	433.978.798
4	01	30		<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	<b>100 %</b>	<b>407.137.328</b>	<b>100 %</b>	<b>447.851.061</b>
4	01	30	001	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	- Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	1 Kali	407.137.328	1 Kali	447.851.061
4	04			<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
4	04	16		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	Persentase Hasil Kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar Perumusan Kebijakan	<b>75 %</b>	<b>1.994.717.120</b>	<b>75 %</b>	<b>2.194.188.832</b>
4	04	16	040	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	- Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen	812.395.600	5 Dokumen	893.635.160
4	04	16	041	Kegiatan Koordinasi Kelitbangan	- Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan	5 laporan	97.564.000	5 laporan	107.320.400
4	04	16	042	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	- Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Inovasi dan Teknologi	4 Dokumen	589.540.760	4 Dokumen	648.494.836
4	04	16	043	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	- Jumlah Dokumen Penelitian Lingkup Sosial dan Pemerintahan	4 Dokumen	495.216.760	4 Dokumen	544.738.436

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Total Pagu : 14.782.091.490

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Usuran Penunjang</b>				
<b>4 02</b>			<b>Keuangan</b>				
<b>4 02 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	<b>100 %</b>	<b>3.178.250.060</b>	<b>100 %</b> <b>3.496.075.066</b>
4 02 01 002		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 laporan bulanan	644.379.120	12 laporan bulanan	708.817.032
4 02 01 003		Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kator	12 laporan	110.000.000	12 laporan	121.000.000
4 02 01 008		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 laporan	77.805.420	12 laporan	85.585.962
4 02 01 009		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki	1 pkt	130.050.000	1 pkt	143.055.000
4 02 01 010		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK	12 laporan	330.426.250	12 laporan	363.468.875
4 02 01 011		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah jenis pengadaan cetakan dan penggandaan	12 Bulan	249.742.900	12 Bulan	274.717.190
4 02 01 014		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan bulanan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	57.536.930	12 laporan	63.290.623
4 02 01 015		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah laporan bulanan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 laporan	44.990.000	12 laporan	49.489.000
4 02 01 017		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan bulanan penyediaan makan dan minuman	12 laporan	208.916.730	12 laporan	229.808.403
4 02 01 018		Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan bulanan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	450.000.000	12 laporan	495.000.000
4 02 01 019		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran	12 laporan	669.556.800	12 laporan	736.512.480
4 02 01 025		Kegiatan Penataan Dokumen Keuangan dan Aset	- Laporan bulanan penataan dokumen BPKA	12 laporan	204.845.910	12 laporan	225.330.501
<b>4 02 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>1.116.824.640</b>	<b>100 %</b>	<b>1.228.507.104</b>
4 02 02 012		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah laporan bulanan pengadaan perlengkapan peralatan aparatur	12 laporan	71.447.640	12 laporan	78.592.404
4 02 02 024		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan bulanan pemeliharaan kendaraan	12 laporan	1.045.377.000	12 laporan	1.149.914.700
<b>4 02 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>40.315.000</b>	<b>100 %</b>	<b>44.346.500</b>
4 02 03 002		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	109 x 2 Stel	40.315.000	109 x 2 Stel	44.346.500
<b>4 02 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Tingkat Disiplin Aparatur	<b>100 %</b>	<b>265.220.400</b>		<b>291.742.440</b>
4 02 03 007		Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur	- Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan disiplin dan kinerja aparatur	109 orang	265.220.400	109 orang	291.742.440
<b>4 02 08</b>		<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Perangkat Daerah</b>	Persentasi layanan data dan informasi	<b>100 %</b>	<b>226.197.400</b>	<b>100 %</b>	<b>248.817.140</b>
4 02 08 001		Pengembangan Database Terpadu dan Sistem Informasi Perangkat Daerah	- Data dan informasi perangkat daerah	1 Tahun	226.197.400	1 Tahun	248.817.140
<b>4 02 15</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBDP	<b>14 Dokumen</b>	<b>5.112.315.974</b>	<b>100 %</b>	<b>5.623.547.571</b>
4 02 15 001		Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja	- Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang Analisa Standar Belanja	1 Rakepwal	315.188.150	1 Rakepwal	346.706.965
4 02 15 002		Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	- Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang SSH	1 Rakepwal	785.572.400	1 Rakepwal	864.129.640
4 02 15 004		Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah rancangan keputusan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Rakepwal	212.474.627	1 Rakepwal	233.722.090
4 02 15 006		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Tentang APBD	- Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Penjabaran APBD	1 raperda	255.181.897	1 raperda	280.700.087
4 02 15 007		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	- Jumlah rancangan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD	1 Raperwal	204.354.950	1 Raperwal	224.790.445
4 02 15 009		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Jumlah rancangan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperwal	236.430.800	1 Raperwal	260.073.880
4 02 15 010		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 raperda	220.172.500	1 raperda	242.189.750
4 02 15 011		Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperwal	96.050.000	1 Raperwal	105.655.000
4 02 15 026		Implementasi sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah dokumen anggaran perangkat daerah	60 Dokumen	187.094.650	60 Dokumen	205.804.115
4 02 15 049		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan PPKD	- Jumlah Dokumen administrasi Hibah	1 Dokumen	21.500.000	1 Dokumen	23.650.000
4 02 15 054		Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Pendapatan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Tersedianya dokumen rekonsiliasi dan pelaporan realisasi pendapatan	14 Dokumen	56.225.000	14 Dokumen	61.847.500
4 02 15 057		Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	- Jumlah Dokumen Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Dokumen	118.593.600	12 Dokumen	130.452.960

4	02	15	064	Kegiatan Rekonsiliasi Dan Pelaporan Realisasi Belanja Bulanan, Triwulan Dan Semesteran	- Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Belanja.	14 Dokumen	69.484.250	14 Dokumen	76.432.675
4	02	15	089	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester Tingkat Kota	1 Dokumen	20.145.000	1 Dokumen	22.159.500
4	02	15	092	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pelaporan yang Terintegrasi dengan SIMDA Keuangan	- Tersedianya sistem aplikasi pengelolaan pelaporan yang terintegrasi dengan Simda Keuangan	30 Dokumen	112.500.000	30 Dokumen	123.750.000
4	02	15	093	Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan BLUD	- Jumlah dokumen pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD	1 Dokumen	140.406.250	1 Dokumen	154.446.875
4	02	15	094	Kegiatan Pengelolaan Belanja Transfer	- Dokumen realisasi penerimaan dana transfer pusat dan provinsi	8 Dokumen	330.604.650	8 Dokumen	363.665.115
4	02	15	095	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perbendaharaan	- Jumlah sistem informasi pelayanan perbendaharaan dikembangkan / dimutakhirkan	1 Aplikasi	275.384.650	1 Aplikasi	302.923.115
4	02	15	096	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Langsung (Belanja Modal)	- Rata-rata Penerbitan SP2D Belanja Langsung tepat waktu dan sesuai Perundang undangan	2 hari	545.024.900	2 hari	599.527.390
4	02	15	097	Kegiatan Pelayanan Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan (Belanja Operasi, dan Belanja Tidak Terduga)	- Rata - rata penerbitan SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan tepat waktu dan sesuai perundang - undangan	2 hari	662.559.300	2 hari	728.815.230
4	02	15	098	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	- Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD	1 raperda	247.368.400	1 raperda	272.105.240
4	02	21		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>	Pengamanan BMD Kota Bandung sesuai peraturan perundang-undangan	<b>21 %</b>	<b>4.842.968.016</b>	<b>30 Bidang Tanah</b>	<b>5.327.264.818</b>
4	02	21	001	Kegiatan Pelaporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah	- Updating Database Aset Pemerintah Kota Bandung; - Pencatatan dan Pelaporan Aset Perolehan TA 2020 & TA 2021.	60 Perangkat Daerah Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan -	473.635.528	60 Perangkat Daerah Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan -	520.999.081
4	02	21	002	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah	- Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan dan Pencatatatan BMD; dan - Penyusunan Perwal Pengelolaan BMD. - Optimalisasi SDM dan Sistem Informasi melalui Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan BMD pada Seluruh Perangkat Daerah;	1 Aplikasi 4 perwal 60 Perangkat Daerah	838.437.500	1 Aplikasi 4 perwal 60 Perangkat Daerah	922.281.250
4	02	21	003	Penataan dan Pengendalian Administrasi Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	- SK Penghapusan BMD - Dokumen Pedoman Teknis pengelolaan BMD - BA Mutasi dan penilaian BMD	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	490.079.730	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	539.087.703
4	02	21	004	Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Kota Bandung	- Terlaksananya pencatatan dan pelaporan barang persediaan perangkat daerah dan pemerintah kota bandung - Terlaksananya pengamanan fisik tanah berupa patok, pagar dan plang/papan informasi - Terlaksananya pengembangan aplikasi pencatatan dan pelaporan barang persediaan - Terlaksananya pembuatan / pengembangan aplikasi pengamanan tanah milik pemerintah kota bandung - Terlaksananya pengamanan hukum berupa perjanjian pengamanan tanah milik pemerintah kota bandung	60 Perangkat Daerah 30 Bidang Tanah 1 aplikasi 1 Aplikasi 5 lokasi Kecamatan	1.004.805.000	60 Perangkat Daerah 30 Bidang Tanah 1 aplikasi 1 Aplikasi 5 lokasi Kecamatan	1.105.285.500
4	02	21	005	Sertifikasi Tanah	- pendaftaran sertipikat tanah	600.000 M2	2.036.010.258	600.000 M2	2.239.611.284

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.02.03 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Total Pagu : 24.417.974.440

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3		4	5	6	7
4				Urusan Penunjang						
4	02			Keuangan						
4	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %		7.631.565.240		8.394.721.764
4	02	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan		142.409.500	12 Bulan	156.650.450
4	02	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	158 Unit		2.466.785.500	158 Unit	2.713.464.050
4	02	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		977.186.100	12 Bulan	1.074.904.710
4	02	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	12 laporan		1.078.322.630	12 laporan	1.186.154.893
4	02	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Pengadaan Cetakan dan Penggandaan	12 laporan		214.136.300	12 laporan	235.549.930
4	02	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 laporan		161.506.950	1 laporan	177.657.645
4	02	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 laporan		356.484.260	2 laporan	392.132.686
4	02	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan		46.083.400	12 laporan	50.691.740
4	02	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 laporan		27.264.000	12 laporan	29.990.400
4	02	01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 laporan		87.469.000	12 laporan	96.215.900
4	02	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 laporan		571.750.000	12 laporan	628.925.000
4	02	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan		1.000.000.000	12 laporan	1.100.000.000
4	02	01	020	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Pengamanan Kantor	12 Bulan		502.167.600	12 Bulan	552.384.360
4	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 %		6.062.506.700	100 %	6.668.757.370
4	02	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Jenis Pengadaan Mebeulair	3 Jenis		723.695.500	3 Jenis	796.065.050
4	02	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 laporan		1.155.000.000	1 laporan	1.270.500.000
4	02	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara	12 laporan		871.136.200	12 laporan	958.249.820
4	02	02	029	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	- Jumlah Laporan Mebeulair Terpelihara	12 laporan		75.075.000	12 laporan	82.582.500
4	02	02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 laporan		3.237.600.000	1 laporan	3.561.360.000
4	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100 %		195.000.000	100 %	214.500.000
4	02	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	300 Stel		195.000.000	300 Stel	214.500.000
4	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	100 %		607.500.000	100 %	668.250.000
4	02	05	002	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali		79.100.000	1 kali	87.010.000
4	02	05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12 laporan		330.400.000	12 laporan	363.440.000
4	02	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 kali		198.000.000	1 kali	217.800.000
4	02	18		Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	2522552659693 Rupiah		1.533.287.750	2522552659693 Rupiah	1.686.616.525
4	02	18	005	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah	- Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah	4 Dokumen		63.600.000	4 Dokumen	69.960.000
4	02	18	008	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah	- Jumlah Dokumen Kajian Pajak Reklame/PAT	1 Dokumen		246.862.700	1 Dokumen	271.548.970
4	02	18	009	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	- Jumlah Dokumen Kajian Pajak Bumi dan Bangunan	1 Dokumen		532.189.000	1 Dokumen	585.407.900
4	02	18	010	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	- Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ	4 laporan		250.252.000	4 laporan	275.277.200
4	02	18	012	Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah	- Jumlah Raperda/Raperwal/Rakepwal	1 Dokumen		153.362.700	1 Dokumen	168.698.970
4	02	18	013	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	- Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	4 Dokumen		177.098.350	4 Dokumen	194.808.185
4	02	18	014	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	- Jumlah Dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	4 Dokumen		109.923.000	4 Dokumen	120.915.300
4	02	20		Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	75 %		3.753.187.500	75 %	4.128.506.250

4	02	20	004	Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Surat Kabar</li> <li>- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Televisi</li> <li>- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Website</li> <li>- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Sosialisasi Tatap Muka</li> <li>- Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui Radio</li> </ul>	27 Tayang/Spot 10 Tayang/Spot 18 Paket 5 kali 9 Tayang/Spot	1.851.260.000	27 Tayang/Spot 10 Tayang/Spot 18 Paket 5 kali 9 Tayang/Spot	2.036.386.000
4	02	20	005	Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Pelayanan Pengaduan dan Penerbitan Surat Teguran	12 laporan	1.118.527.500	12 laporan	1.230.380.250
4	02	20	007	Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Penindakan Penunggak Pajak	12 laporan	760.200.000	12 laporan	836.220.000
4	02	20	008	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Pemeriksaan	12 laporan	23.200.000	12 laporan	25.520.000
4	02	21		<b>Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah</b>	Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah	<b>88.31 Nilai</b>	<b>4.601.804.750</b>	<b>88.31 Nilai</b>	<b>5.061.985.225</b>
4	02	21	001	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah</li> <li>- Jumlah Perencanaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah</li> </ul>	12 Aplikasi 1 aplikasi	4.027.388.840	12 Aplikasi 1 aplikasi	4.430.127.724
4	02	21	002	Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak	- Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak	2 Dokumen	142.865.000	2 Dokumen	157.151.500
4	02	21	003	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara	- Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara	4 laporan	84.136.620	4 laporan	92.550.282
4	02	21	004	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan	- Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan	4 laporan	91.265.000	4 laporan	100.391.500
4	02	21	005	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat	- Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat	4 laporan	87.208.950	4 laporan	95.929.845
4	02	21	006	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur	- Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur	4 laporan	79.839.600	4 laporan	87.823.560
4	02	21	007	Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah	- Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah	4 laporan	89.100.740	4 laporan	98.010.814
4	02	22		<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD non Pajak Daerah</b>	Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah	<b>88.31 Nilai</b>	<b>33.122.500</b>	<b>88.31 Nilai</b>	<b>36.434.750</b>
4	02	22	001	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah	12 laporan	33.122.500	12 laporan	36.434.750

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Total Pagu : 24.816.198.062

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Usuran Penunjang</b>				
<b>4 03</b>			<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>				
<b>4 03 01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	<b>3.195.771.983</b>		<b>3.515.349.181</b>
4 03 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Jasa Akses Internet Bulanan	12 Bulan	456.178.720	12 Bulan	501.796.592
4 03 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	30 kendaraan	19.186.200	30 kendaraan	21.104.820
4 03 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	394.194.800	12 Bulan	433.614.280
4 03 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jenis Peralatan kerja yang diperbaiki	14 jenis	154.382.500	14 jenis	169.820.750
4 03 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- alat tulis kantor	10 jenis	196.664.260	10 jenis	216.330.686
4 03 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jenis barang cetak dan penggandaan	17 jenis	512.921.040	17 jenis	564.213.144
4 03 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 jenis	6.526.850	10 jenis	7.179.535
4 03 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	23 jenis	575.221.130	23 jenis	632.743.243
4 03 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jenis Peralatan Rumah Tangga	37 jenis	75.918.900	37 jenis	83.510.790
4 03 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah bahan bacaan	11 jenis	32.196.000	11 jenis	35.415.600
4 03 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jenis Penyediaan makanan dan minuman	2 jenis	168.368.200	2 jenis	185.205.020
4 03 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah perjalanan dinas	75 laporan	604.013.383	75 laporan	664.414.721
<b>4 03 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	-	-	<b>2.948.186.280</b>		<b>3.243.004.908</b>
4 03 02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Mebeulair	9 Jenis	565.506.480	9 Jenis	622.057.128
4 03 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan	2 gedung	185.000.000	2 gedung	203.500.000
4 03 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Penyediaan bahan bakar minyak /pelumas kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4 - Jumlah service kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4	30 kendaraan 30 kendaraan	597.698.900	30 kendaraan 30 kendaraan	657.468.790
4 03 02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah gedung yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat	1 gedung	1.499.980.900	1 gedung	1.649.978.990
4 03 02	051	Kegiatan Penataan Arsip SKPD	- Jumlah Gedung (sewa)	1 gedung	100.000.000	1 gedung	110.000.000
<b>4 03 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	-	<b>83.875.000</b>		<b>92.262.500</b>
4 03 03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu	96 Stel	83.875.000	96 Stel	92.262.500
<b>4 03 04</b>		<b>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</b>	-	-	<b>256.494.320</b>		<b>282.143.752</b>
4 03 04	003	Kegiatan Pemindahan Tugas PNS	- Jumlah kegiatan rotasi/mutasi/purna tugas	12 kegiatan	256.494.320	12 kegiatan	282.143.752
<b>4 03 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	-	<b>231.690.200</b>		<b>254.859.220</b>
4 03 05	002	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 Kegiatan	61.979.800	4 Kegiatan	68.177.780
4 03 05	003	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah kegiatan bimbingan teknis	15 Kegiatan	45.000.000	15 Kegiatan	49.500.000
4 03 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Kegiatan	124.710.400	1 Kegiatan	137.181.440
<b>4 03 15</b>		<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	-	-	<b>380.396.000</b>		<b>418.435.600</b>
4 03 15	039	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Fungsional	- Presentase layanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan fungsional yang tepat waktu	100 persen	137.090.000	100 persen	150.799.000
4 03 15	040	Kegiatan Administrasi Jabatan dan Kepangkatan Jabatan Struktural dan Non Struktural	- Presentase layanan administrasi jabatan dan kepangkatan jabatan struktural dan nons truktural yang tepat waktu	100 persen	117.466.000	100 persen	129.212.600
4 03 15	041	Kegiatan Administrasi Mutasi Pemberhentian dan Pensiun	- Presentase layanan administrasi pemberhentian dan pensiun yang tepat waktu	100 persen	125.840.000	100 persen	138.424.000
<b>4 03 19</b>		<b>Program Perencanaan Kepegawaian</b>	-	-	<b>1.324.254.400</b>		<b>1.456.679.840</b>
4 03 19	001	Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan	- Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	75.665.000	1 Dokumen	83.231.500
4 03 19	002	Seleksi ASN untuk Penempatan Dalam Jabatan	- Evaluasi JPT untuk Mutasi 2020 - Seleksi JPT untuk 3 Jab Kosong krn Pensiun - Talent Pool Pejabat Administrator - Talent Pool Pejabat Pengawas - Seleksi PNS untuk kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 Kegiatan	346.136.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 Kegiatan	380.749.600
4 03 19	004	Evaluasi Jabatan	- Dokumen Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	46.170.000	1 Dokumen	50.787.000



4	03	19	005	Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PPPK	- Jumlah Penerimaan CPNS berdasarkan Formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari Pelamar Umum dan atau Tenaga Honorer - Jumlah Persiapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	1 Kegiatan 1 Kegiatan	715.983.400	1 Kegiatan 1 Kegiatan	787.581.740
4	03	19	006	Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas	- Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas untuk KP Periode April - Ujian Penyesuaian kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas untuk KP Periode Oktober	1 Kegiatan 1 Kegiatan	103.650.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan	114.015.000
4	03	19	007	Penyusunan Instrumen Perencanaan Kepegawaian	- Pemetaan Kualitas dan Kuantitas - Peta Jabatan - Dokumen Kebutuhan dan Formasi Jabatan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	36.650.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	40.315.000
4	03	20		<b>Program Pembinaan Kinerja dan Disiplin Aparatur</b>	-	-	<b>953.363.750</b>		<b>1.048.700.125</b>
4	03	20	001	kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	- Jumlah Kegiatan Pemberian penghargaan Bagi PNS berprestasi - Fasilitas KORPRI	2 Kegiatan 2 kegiatan	508.776.550	2 Kegiatan 2 kegiatan	559.654.205
4	03	20	002	Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	- Presentase Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	100 persen	182.797.200	100 persen	201.076.920
4	03	20	006	Kegiatan Evaluasi Kinerja	- Jumlah Dokumen Rekomendasi Perbaikan Kinerja dan Disiplin	1 Dokumen	261.790.000	1 Dokumen	287.969.000
4	03	22		<b>Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian</b>	-	-	<b>1.262.426.000</b>		<b>1.388.668.600</b>
4	03	22	002	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	- Jumlah pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi	9 Sistem	1.262.426.000	9 Sistem	1.388.668.600
4	03	23		<b>Program Pengembangan Assesment Center</b>	-	-	<b>581.544.600</b>		<b>639.699.060</b>
4	03	23	001	Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi	- Jumlah dokumen alat ukur Psikologi - Jumlah dokumen alat ukur uji kompetensi teknis	1 Dokumen 1 Dokumen	84.744.600	1 Dokumen 1 Dokumen	93.219.060
4	03	23	002	Kegiatan Penilaian kompetensi	- Jumlah kegiatan/orang penilaian kompetensi (sertifikasi kompetensi)	4 Kegiatan	496.800.000	4 Kegiatan	546.480.000
4	03	24		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah</b>	-	-	<b>13.598.195.529</b>		<b>14.958.015.082</b>
4	03	24	001	Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat	- Jumlah Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat - Jumlah Dokumen Evaluasi Diklat	1 Dokumen 1 Dokumen	119.575.000	1 Dokumen 1 Dokumen	131.532.500
4	03	24	002	Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	- Jumlah ASN yang mendapatkan bantuan tugas belajar	14 Orang	838.700.000	14 Orang	922.570.000
4	03	24	003	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional bagi PNS Daerah	5 orang	54.412.921	5 orang	59.854.213
4	03	24	004	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan sosio kultural bagi PNSD	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Sosiokultural	40 Orang	180.000.000	40 Orang	198.000.000
4	03	24	005	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	- Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat PIMPEMDAGRI - Jumlah ASN yang mengikuti Diklat kepemimpinan	8 Orang 104 Orang	2.415.607.100	8 Orang 104 Orang	2.657.167.810
4	03	24	006	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	- Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi	140 Orang	688.017.500	140 Orang	756.819.250
4	03	24	007	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS	- Jumlah PNS yang mengikuti diklat dasar CPPNS	909 Orang	9.301.883.008	909 Orang	10.232.071.309

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.02 Sekretariat Daerah

Total Pagu : 167.971.294.565

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2	3	4	5	6	7
<b>4</b>				<b>Urusan Penunjang</b>					
<b>4 05</b>				<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>					
<b>4 05 01</b>				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung	<b>12 laporan</b>	<b>101.381.583.525</b>		<b>111.519.741.878</b>
4 05 01 002				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	53.189.226.100	12 Bulan	58.508.148.710
4 05 01 003				Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	3.276.359.670	2 jenis	3.603.995.637
4 05 01 008				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah laporan jasa kebersihan kantor bulanan di lingkungan Balaikota, rumah dinas dan gedung KORPRI	12 laporan	9.696.445.370	12 laporan	10.666.089.907
4 05 01 009				Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah laporan peralatan kerja yang diperbaiki	1 laporan	355.871.500	1 laporan	391.458.650
4 05 01 010				Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			1.616.147.263		1.777.761.989
4 05 01 011				Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetak dan Pengadaan	1 laporan	2.746.892.940	1 laporan	3.021.582.234
4 05 01 012				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen instalasi listrik yang menunjang kerja aparatur	2 Paket	118.530.500	2 Paket	130.383.550
4 05 01 014				Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			180.377.050		198.414.755
4 05 01 015				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Jenis Bahan Bacaan	1 Tahun	411.787.400	1 Tahun	452.966.140
4 05 01 016				Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah penyediaan cenderamata / souvenir Pemkot Bandung	5 Paket	896.511.000	5 Paket	986.162.100
4 05 01 017				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	7.248.765.038	1 Tahun	7.973.641.542
4 05 01 018				Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 laporan	10.199.530.659	1 laporan	11.219.483.725
4 05 01 019				Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 laporan	2.852.493.435	12 laporan	3.137.742.779
4 05 01 020				Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah laporan jasa keamanan kantor bulanan di lingkungan Balaikota, rumah dinas dan gedung KORPRI	12 laporan	8.536.849.200	12 laporan	9.390.534.120
4 05 01 023				Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	1 Jasa Bulanan	55.796.400	1 Jasa Bulanan	61.376.040
<b>4 05 02</b>				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan aparatur	<b>100 %</b>	<b>27.322.680.711</b>		<b>30.054.948.782</b>
4 05 02 003				Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah lokasi pembangunan di lingkungan Balaikota	1 lokasi	225.000.000	1 lokasi	247.500.000
4 05 02 005				Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	100 %	3.791.962.400	100 %	4.171.158.640
4 05 02 008				Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Persentase pemenuhan peralatan di rumah jabatan	100 %	1.280.304.670	100 %	1.408.335.137
4 05 02 010				Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Persentase pemenuhan kebutuhan mebeulair	100 %	2.484.000.000	100 %	2.732.400.000
4 05 02 012				Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah laporan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	1 laporan	2.523.540.730	1 laporan	2.775.894.803
4 05 02 020				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	- Persentase pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan di rumah dinas yang dipelihara	75 %	4.350.000.000	75 %	4.785.000.000
4 05 02 022				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase pemenuhan Pemeliharaan fisik di lingkungan gedung kantor yang dipelihara	75 %	4.607.964.000	75 %	5.068.760.400
4 05 02 023				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Persentase pemenuhan Pemeliharaan mobil jabatan yang dipelihara	100 %	198.000.000	100 %	217.800.000
4 05 02 024				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang terpelihara	100 %	4.361.818.500	100 %	4.798.000.350
4 05 02 025				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			600.000.000		660.000.000
4 05 02 026				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah laporan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 laporan	1.050.090.411	2 laporan	1.155.099.452
4 05 02 029				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	- Persentase pemenuhan pemeliharaan mebeulair	100 %	100.000.000	100 %	110.000.000
4 05 02 046				Kegiatan Penataan Mekanikal Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas atau Jabatan	- Jumlah tempat untuk dilakukan penataan instalasi listrik di lingkungan Balaikota, rumah dinas Wali Kota, rumah dinas Wakil Wali Kota, rumah dinas sekda dan gedung KORPRI	5 lokasi	1.750.000.000	5 lokasi	1.925.000.000
<b>4 05 03</b>				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Meningkatnya Disiplin Aparatur	<b>100 %</b>	<b>1.325.308.100</b>		<b>1.457.838.910</b>
4 05 03 002				Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya di lingkup Sekretariat Daerah	700 Stel	1.245.308.100	700 Stel	1.369.838.910
4 05 03 007				Kegiatan Pembinaan Disiplin dan Kinerja Aparatur			80.000.000		88.000.000
<b>4 05 05</b>				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	<b>100 %</b>	<b>1.637.955.600</b>		<b>1.801.751.160</b>

4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan motivasi kerja di lingkup Setda	210 orang	1.637.955.600	210 orang	1.801.751.160
4	05	16		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/Departemen /Lembaga	<b>100 %</b>	<b>1.532.500.000</b>	<b>100 %</b>	<b>1.685.750.000</b>
4	05	16	002	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	- Terlaksananya Penerimaan Tamu Negara, Pemerintah/Departemen /Lembaga	1 Tahun	1.532.500.000	1 Tahun	1.685.750.000
4	05	24		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Terwujudnya produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<b>100 %</b>	<b>85.190.000</b>	<b>100 %</b>	<b>93.709.000</b>
4	05	24	012	Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron	4 Dokumen	85.190.000	4 Dokumen	93.709.000
4	05	37		<b>Program Pengadaan Barang Jasa Daerah</b>	-	-	<b>2.447.706.120</b>		<b>2.692.476.732</b>
4	05	37	001	Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	- Presentase tender yang difasilitasi LPSE - Jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan - Jumlah paket tender yang diselesaikan	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	811.393.200	100 persen 2 Kegiatan 3 poin 100 persen	892.532.520
4	05	37	002	Bandung Integrated Resources Manajemen Sistem (BIRMS)	- Jumlah Kegiatan sosialisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Indeks pelanggan yang menyatakan puas terhadap kinerja pengadaan - Persentase pengadaan langsung yang difasilitasi melalui BIRMS - Jumlah paket pengadaan langsung yang diselesaikan	2 Kegiatan 3 poin 100 persen 100 persen	570.456.480	2 Kegiatan 3 poin 100 persen 100 persen	627.502.128
4	05	37	003	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Jumlah kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung	4 Kegiatan	332.870.000	4 Kegiatan	366.157.000
4	05	37	004	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	- Rata-rata jumlah penyedia barang / jasa yang berpartisipasi dalam tender - Persentase jumlah paket tender pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung - Persentase jumlah penawaran yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis - persentase barang/jasa yang diselesaikan sesuai dengan kriteria kualitas kinerja atau spesifikasi kontrak - persentase pelanggan yang menyatakan puas terhadap pelayanan dari fungsi pengadaan - Cakupan layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Bandung	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	732.986.440	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	806.285.084
4	05	38		<b>Program Pengembangan Kebijakan Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah</b>	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Komponen Penataan Tatalaksana)	<b>4.20 Nilai</b>	<b>1.333.481.000</b>	<b>4.00 Nilai</b>	<b>1.466.829.100</b>
4	05	38	001	Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Sinovik - Jumlah Laporan Standar Operasional Prosedur - Jumlah Laporan Standar Pelayanan Publik	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	150.076.300	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	165.083.930
4	05	38	003	Penyelesaian Reformasi Birokrasi	- Dokumen Penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi dan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung	1 Dokumen	126.096.000	1 Dokumen	138.705.600
4	05	38	005	Fasilitasi Tim Pertimbangan Kebijakan Walikota Bandung	- Jumlah Laporan hasil telaahan	1 Dokumen	552.800.000	1 Dokumen	608.080.000
4	05	38	006	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan	1 Dokumen	330.547.400	1 Dokumen	363.602.140
4	05	38	007	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah	- Jumlah Raperwal Pedoman Ketatalaksanaan - Jumlah Rakepwal Pedoman Ketatalaksanaan	3 Ranperwal 5 Rakepwal	93.171.300	3 Ranperwal 5 Rakepwal	102.488.430
4	05	38	010	Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dan Analisis Beban Kerja	- Jumlah Perangkat Daerah yang tersusun Analisis Jabatan - Jumlah Perangkat Daerah yang di susun Analisis Beban Kerja	10 PD 10 Dokumen	80.790.000	10 PD 10 Dokumen	88.869.000
4	05	39		<b>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</b>	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung (Komponen Pelaporan Kinerja)	<b>12.7 Nilai</b>	<b>325.703.500</b>	<b>12.7 Nilai</b>	<b>358.273.850</b>
4	05	39	002	Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan PK Perubahan	- Jumlah Dokumen PK Kota/Setda 2019 dan PK Perubahan Kota/Setda Tahun 2019 - Jumlah dokumen Cascading PK Eselon 3 dan 4 Setda Tahun 2019 - Jumlah dokumen IKI Setda Tahun 2019 - Jumlah dokumen Rencana Aksi atas PK Setda Tahun 2019	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	75.691.200	4 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	83.260.320
4	05	39	007	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulanan dan Tahunan	- Jumlah Dokumen LKIP Triwulan dan Tahunan Kota dan Setda - Jumlah Aplikasi SAKIP terbangun/terpelihara/beroperasi	5 Dokumen 2 aplikasi	199.612.300	5 Dokumen 2 aplikasi	219.573.530
4	05	39	011	Kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen Renstra Setda Hasil Reviu - Jumlah dokumen RKT Setda dan Rencana Kerja Setda Tahun 2019 - Jumlah Dokumen Penetapan IKU Setda Tahun 2019	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	50.400.000	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	55.440.000
4	05	40		<b>Program Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	-	-	<b>442.137.750</b>		<b>486.351.525</b>
4	05	40	001	Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			303.565.750		333.922.325
4	05	40	002	Kegiatan Fasilitasi Pelaporan Standart Pelayanan Minimal			138.572.000		152.429.200
4	05	42		<b>Program Penataan Batas Daerah dan Batas Wilayah</b>	-	-	<b>221.006.875</b>		<b>243.107.563</b>

4	05	42	001	Fasilitasi dan Inventarisasi, Pemantauan dan Penegasan Batas Daerah dan Batas Wilayah			133.451.875		146.797.063
4	05	42	002	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Inventarisasi dan Identifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi			87.555.000		96.310.500
4	05	43		<b>Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah</b>	-	-	<b>2.332.600.250</b>		<b>2.565.860.275</b>
4	05	43	001	Pemantapan Inovasi Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan Kewilayahan			1.268.040.000		1.394.844.000
4	05	43	002	Pemantapan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah			617.414.000		679.155.400
4	05	43	004	Kegiatan Fasilitas Kinerja Pemerintahan Kewilayahan			447.146.250		491.860.875
4	05	45		<b>Program Peningkatan Desain dan Kualitas Pembangunan Daerah</b>	Kesesuaian Program dengan Realisasi Pembangunan	100 %	<b>1.029.529.500</b>	100 %	<b>1.132.482.450</b>
4	05	45	001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur	1 Dokumen	41.500.000	1 Dokumen	45.650.000
4	05	45	002	Kegiatan Fasilitas Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen pengendalian kualitas pembangunan hasil monitoring	1 Dokumen	171.350.000	1 Dokumen	188.485.000
4	05	45	004	Kegiatan Fasilitas Aplikasi TEPPRA	- Jumlah Dokumen Rencana Program Kegiatan Pembangunan - Jumlah Dokumen Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan	2 Dokumen 11 Dokumen	251.330.500	2 Dokumen 11 Dokumen	276.463.550
4	05	45	005	Penyusunan Administrasi Fisik dan Non Fisik	- Jumlah dokumen data sinkronisasi program dan desain pembangunan	1 Dokumen	182.949.000	1 Dokumen	201.243.900
4	05	45	006	Standar Operasional Desain Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen penyelenggaraan pengesahan desain - Jumlah dokumen penyelenggaraan kebijakan program dan desain pembangunan	1 Dokumen 1 Dokumen	382.400.000	1 Dokumen 1 Dokumen	420.640.000
4	05	46		<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</b>	-	-	<b>14.747.120.604</b>		<b>16.221.832.664</b>
4	05	46	001	Kegiatan Kemitraan Media dan Publikasi	- Jumlah Publikasi di Media Cetak, Elektronik dan Bandung Menjawab	210 Dokumen	8.956.132.204	210 Dokumen	9.851.745.424
4	05	46	002	Kegiatan Data dan Informasi	- Jumlah Media Grafis Infograpis dan videograpis yang di sampaikan melalui Media Sosial, kepada masyarakat dan Dokumen Sambutan - Cakupan Pelayanan Sambutan Tepat Waktu	450 Dokumen 100 %	4.049.268.400	450 Dokumen 100 %	4.454.195.240
4	05	46	003	Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	- Jumlah Press Rilis Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan	750 Dokumen	1.741.720.000	750 Dokumen	1.915.892.000
4	05	47		<b>Program Sosial Keagamaan</b>	Jumlah Kegiatan Bidang Sosial Keagamaan yang dilaksanakan	4 kegiatan	<b>1.800.270.000</b>	4 kegiatan	<b>1.980.297.000</b>
4	05	47	002	Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Guru Keagamaan	- Terlaksananya pembinaan guru keagamaan	500 Orang Kali	851.000.000	500 Orang Kali	936.100.000
4	05	47	024	Kegiatan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung	- Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Masjid pemerintah Kota Bandung dan terlaksananya Peringatan Hari Besar Islam di Masjid Al Ukhwwah dan Ar-Risallah	5 Kegiatan	549.180.000	5 Kegiatan	604.098.000
4	05	47	025	Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Keagamaan	- Jumlah laporan kegiatan	24 laporan	195.690.000	24 laporan	215.259.000
4	05	47	026	Kegiatan Penyusunan Kebijakan bidang sosial keagamaan	- Tersedianya Perda tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kota Bandung	1 Dokumen	204.400.000	1 Dokumen	224.840.000
4	05	50		<b>Program Pembangunan Produk Hukum Daerah</b>	Terwujudnya rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	100 %	<b>925.599.250</b>	100 %	<b>1.018.159.175</b>
4	05	50	002	Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	10 kegiatan	264.024.000	10 kegiatan	290.426.400
4	05	50	003	Legislasi Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah dokumen hasil sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah	12 raperda	135.589.000	12 raperda	149.147.900
4	05	50	009	Kegiatan Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah	4 Kegiatan	321.147.750	4 Kegiatan	353.262.525
4	05	50	010	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	- Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah - Jumlah dokumen hasil harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah	80 Rakepwal 20 Ranperwal	80.420.000	80 Rakepwal 20 Ranperwal	88.462.000
4	05	50	011	Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan RANHAM	- Jumlah laporan kegiatan fasilitas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi manusia (RANHAM)	4 Dokumen	65.302.250	4 Dokumen	71.832.475
4	05	50	012	Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum	- Jumlah Penanganan Perkara	20 perkara	59.116.250	20 perkara	65.027.875
4	05	57		<b>Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah</b>	-	-	<b>6.495.039.180</b>		<b>7.144.543.098</b>
4	05	57	001	Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	- Presentase Naskah Kerjasama yang di Implementasikan Lingkup dalam Negeri dan Luar Negeri	95 %	392.632.800	95 %	431.896.080
4	05	57	002	Kegiatan Fasilitas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)			237.367.200		261.103.920
4	05	57	003	Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri	- Presentase Naskah Kerjasama yang di Implementasikan Lingkup dalam Negeri dan Luar Negeri	95 %	5.865.039.180	95 %	6.451.543.098
4	05	58		<b>Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi</b>	Persentase realisasi program/agenda prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	85.71 %	<b>2.018.627.600</b>	85.71 %	<b>2.220.490.360</b>
4	05	58	001	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi	- Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui TJSL - Jumlah Perusahaan yang berkontribusi melalui sumbangan pihak ketiga	66 perusahaan 5 perusahaan	354.732.500	66 perusahaan 5 perusahaan	390.205.750

4	05	58	002	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota	- Jumlah dokumen rumusan dan implementasi kebijakan bidang ekonomi lingkup kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pengembangan daya saing produk unggulan daerah	1 Dokumen	410.861.500	1 Dokumen	451.947.650
4	05	58	003	Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan usaha daerah serta rekrutment direksi dan komisaris BUMD - Jumlah Regulasi Penugasan BUMD	5 Dokumen 1 Raperwal	985.254.100	5 Dokumen 1 Raperwal	1.083.779.510
4	05	58	004	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa	- Jumlah dokumen rumusan dan implementasi kebijakan tentang optimalisasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah; Optimalisasi tindak lanjut kerjasama antar daerah lingkup produksi dan distribusi serta sinkronisasi indikator makro ekonomi Kota Bandung	2 Dokumen	267.779.500	2 Dokumen	294.557.450
4	05	60		<b>Program Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</b>	Tersedianya Rancangan Kebijakan bidang Sosial Kemasyarakatan	<b>2 Dokumen</b>	<b>567.255.000</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>623.980.500</b>
4	05	60	001	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	- Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Masalah Prioritas dan Penanggulangan HIV/AIDS untuk meningkatkan Pemahaman dan Koordinasi anta Perangkat Daerah dalam Penanggulangan HIV/Aids	2 laporan	68.150.000	2 laporan	74.965.000
4	05	60	002	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Tim Pembina UKS Kota Bandung	- Terlaksananya Pembinaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (TP UKS/IM) Kota Bandung	1 laporan	313.800.000	1 laporan	345.180.000
4	05	60	003	Kegiatan Fasilitas Tindak Lanjut Peraturan Daerah Bidang Sosial Kemasyarakatan	- Terfasilitasinya Pelaksanaan Koordinasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota bidang Sosial Kemasyarakatan	2 laporan	79.180.000	2 laporan	87.098.000
4	05	60	004	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesra dan Kemasayarakatan	- Terfasilitasinya Kegiatan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Kota Bandung	3 laporan	106.125.000	3 laporan	116.737.500

Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : 4.05.03 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Total Pagu : 0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2	3	4	5	6	7

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Total Pagu : 48.957.232.988

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2			3	4	5	6	7
<b>4</b>				<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>				<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>9.023.100.378</b>	<b>9.925.410.416</b>
4 05 01 002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Bulanan	12 laporan	999.999.980	12 laporan	1.099.999.978
4 05 01 006			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Mobil Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah Motor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	28 Unit 61 Unit	79.500.000	28 Unit 61 Unit	87.450.000
4 05 01 007			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 laporan	498.300.000	12 laporan	548.130.000
4 05 01 008			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bulanan	12 laporan	1.500.000.000	12 laporan	1.650.000.000
4 05 01 010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	12 laporan	260.142.398	12 laporan	286.156.638
4 05 01 011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Item Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19 Item	299.948.000	19 Item	329.942.800
4 05 01 012			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 laporan	199.810.000	12 laporan	219.791.000
4 05 01 015			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Buku Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	41 Buku	147.600.000	41 Buku	162.360.000
4 05 01 017			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 laporan	900.000.000	12 laporan	990.000.000
4 05 01 018			Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 laporan	1.000.000.000	12 laporan	1.100.000.000
4 05 01 019			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran Bulanan	12 laporan	712.800.000	12 laporan	784.080.000
4 05 01 020			Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa pengamanan kantor	12 laporan	1.500.000.000	12 laporan	1.650.000.000
4 05 01 022			Kegiatan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Media Cetak dan Teknologi Informasi	12 laporan	800.000.000	12 laporan	880.000.000
4 05 01 024			Kegiatan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	- Jumlah Laporan Pelayanan Humas dan Pengaduan Masyarakat	12 laporan	125.000.000	12 laporan	137.500.000
<b>4 05 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>6.039.132.610</b>		<b>6.643.045.871</b>
4 05 02 005			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	1.968.880.000	4 Unit	2.165.768.000
4 05 02 006			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	- Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas - Jumlah Set Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas - Jumlah Lusin Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	273 Unit 11 set 28 lusin	285.130.560	273 Unit 11 set 28 lusin	313.643.616
4 05 02 007			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	65 Unit	146.315.920	65 Unit	160.947.512
4 05 02 010			Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Buah Pengadaan Mebeulair	103 Buah	198.966.130	103 Buah	218.862.743
4 05 02 020			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000
4 05 02 022			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 laporan	800.000.000	12 laporan	880.000.000
4 05 02 023			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4 Unit	500.000.000	4 Unit	550.000.000
4 05 02 024			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Terpelihara	61 Unit 28 Unit	1.200.000.000	61 Unit 28 Unit	1.320.000.000
4 05 02 027			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Bulanan	12 laporan	200.000.000	12 laporan	220.000.000
4 05 02 028			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Bulanan	12 laporan	499.840.000	12 laporan	549.824.000
4 05 02 029			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	- Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	80 Unit	40.000.000	80 Unit	44.000.000
<b>4 05 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>895.000.000</b>		<b>984.500.000</b>
4 05 05 003			Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 orang	535.000.000	85 orang	588.500.000
4 05 05 004			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Orang Pembinaan Kinerja Aparatur	60 orang	360.000.000	60 orang	396.000.000
<b>4 05 15</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada pimpinan dan anggota DPRD	<b>85 %</b>	<b>33.000.000.000</b>	<b>85 %</b>	<b>36.300.000.000</b>
4 05 15 001			Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	- Jumlah Raperda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 raperda	6.000.000.000	12 raperda	6.600.000.000
4 05 15 003			Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	- Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	8 kegiatan	5.000.000.000	8 kegiatan	5.500.000.000
4 05 15 004			Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	- Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	22 kegiatan	1.000.000.000	22 kegiatan	1.100.000.000

4	05	15	005	Kegiatan Reses	- Jumlah Putaran Reses	3 kegiatan	11.000.000.000	3 kegiatan	12.100.000.000
4	05	15	007	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	- Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	6 kegiatan	2.500.000.000	6 kegiatan	2.750.000.000
4	05	15	008	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	2.500.000.000	12 laporan	2.750.000.000
4	05	15	011	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	- Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri	50 kegiatan	5.000.000.000	50 kegiatan	5.500.000.000



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.05 Inspektorat

Total Pagu : 32.775.418.870

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2	3	4	5	6	7
4				Usuran Penunjang					
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya					
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya layanan admnistrasi perkantoran penunjang urusan	12 laporan	3.889.221.900		4.278.144.090
4	05	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	12.750.000	4 laporan	14.025.000
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	4 laporan	180.130.000	4 laporan	198.143.000
4	05	01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	4 Triwulan	239.808.800	4 Triwulan	263.789.680
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah biaya perizinan kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	1 Tahun	31.707.200	1 Tahun	34.877.920
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan Peralatan yang siap pakai	1 Tahun	53.355.000	1 Tahun	58.690.500
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pembelian alat tulis kantor	1 Tahun	219.984.600	1 Tahun	241.983.060
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	109.064.000	1 Tahun	119.970.400
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	29.392.800	1 Tahun	32.332.080
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah tersedianya alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan	1 Tahun	199.952.500	1 Tahun	219.947.750
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1 Tahun	40.566.000	1 Tahun	44.622.600
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			37.886.000		41.674.600
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			379.689.800		417.658.780
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			1.350.000.000		1.485.000.000
4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor			1.004.935.200		1.105.428.720
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur penunjang urusan	100 %	25.141.035.300		27.655.138.830
4	05	02	003	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Pembangunan Gedung Kantor Bertingkat Sederhana	1 Paket	24.000.000.000	1 Paket	26.400.000.000
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			150.000.000		165.000.000
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			991.035.300		1.090.138.830
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	100 %	407.065.800		447.772.380
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur			407.065.800		447.772.380
4	05	53		Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Tercapainya pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan	100 %	1.416.685.900	100 %	1.558.354.490
4	05	53	001	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	- Prosentase OPD yg di audit berdasarkan PKPT	100 %	255.000.000	100 %	280.500.000
4	05	53	003	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	5,24 % 11,31 %	365.365.000	5,24 % 11,31 %	401.901.500
4	05	53	004	Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	- Jumlah laporan hasil pengawasan yang di ekspose/laporan gelar pengawasan	1 laporan	324.524.950	1 laporan	356.977.445
4	05	53	005	Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan			471.795.950		518.975.545
4	05	54		Program dukungan Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi	-	-	1.135.665.650		1.249.232.215
4	05	54	001	Kegiatan dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi			875.614.150		963.175.565
4	05	54	002	Kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah			16.980.000		18.678.000
4	05	54	003	Kegiatan Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah daerah			243.071.500		267.378.650
4	05	55		Program peningkatan sistem pengawasan pemerintah daerah	Terpeliharanya sistem penunjang pengawasan	1 kegiatan	785.744.320	1 kegiatan	864.318.752
4	05	55	001	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			560.000.000		616.000.000
4	05	55	004	Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			144.134.000		158.547.400
4	05	55	005	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah			81.610.320		89.771.352

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Total Pagu : 10.960.235.830

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2		3		4	5	6	7
4				Urusan Penunjang							
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya							
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 laporan		3.446.098.430		3.790.708.273	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Jasa Bulanan		438.134.400	12 Jasa Bulanan	481.947.840	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan	12 Jasa Bulanan		1.036.096.000	12 Jasa Bulanan	1.139.705.600	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Laporan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 laporan		93.200.000	4 laporan	102.520.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK	1 laporan		50.704.000	1 laporan	55.774.400	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan Pengadaan Cetakan Dan Penggadaan Bulanan	12 laporan bulanan		170.300.000	12 laporan bulanan	187.330.000	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2 laporan		82.779.800	2 laporan	91.057.780	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga bulanan	12 laporan bulanan		31.489.400	12 laporan bulanan	34.638.340	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan bulanan	12 laporan bulanan		433.416.000	12 laporan bulanan	476.757.600	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	12 laporan bulanan		250.000.000	12 laporan bulanan	275.000.000	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	12 laporan bulanan		470.434.830	12 laporan bulanan	517.478.313	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Tenaga IT - Jumlah Tenaga Admnistrasi	1 orang bulan 1 orang bulan		85.200.000	1 orang bulan 1 orang bulan	93.720.000	
4	05	01	023	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- Jumlah Tenaga Kebersihan - Jumlah Tenaga Sopir	5 orang bulan 1 orang bulan		304.344.000	5 orang bulan 1 orang bulan	334.778.400	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 %		847.050.100	100 %	931.755.110	
4	05	02	005	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Roda 4 - Jumlah Roda 2	3 Unit 3 Unit		847.050.100	3 Unit 3 Unit	931.755.110	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 %		282.055.800		310.261.380	
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Laporan pengadaan Mebeuler	1 laporan		82.196.800	1 laporan	90.416.480	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Laporan Pemeliharaan Gedung	1 laporan		199.859.000	1 laporan	219.844.900	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100 %		34.072.500		37.479.750	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Stel		34.072.500	60 Stel	37.479.750	
4	05	59		Program Peningkatan Kesatuan Bangsa	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100 %		6.350.959.000	100 %	6.986.054.900	
4	05	59	001	Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	- Jumlah Rapat Koordinasi	12 Kegiatan		487.925.000	12 Kegiatan	536.717.500	
4	05	59	002	Kegiatan Pemantapan Empat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	- Jumlah Pendidikan Bela Negara	5 Kegiatan		1.876.312.000	5 Kegiatan	2.063.943.200	
4	05	59	003	Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila	- Jumlah Pembinaan Ideologi	4 Kegiatan		484.600.000	4 Kegiatan	533.060.000	
4	05	59	004	KegiatanPembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Komunitas	- Jumlah Pembinaan	4 Kegiatan		448.624.000	4 Kegiatan	493.486.400	
4	05	59	005	Kegiatan Pembinaan Politik bagi Masyarakat	- Jumlah Pembinaan	4 Kegiatan		490.128.000	4 Kegiatan	539.140.800	
4	05	59	006	Kegiatan Pengawasan dan Pendataan Orang Asingserta Lembaga Asing	- Jumlah Pengawasan dan Pendataan	4 Kegiatan		353.361.000	4 Kegiatan	388.697.100	
4	05	59	007	Kegiatan Pengendalian Ketahanan Ekonomi dan Nilai-nilai Budaya	- Jumlah Upaya Pengendalian Ekonomi - Jumlah Pembinaan Nilai-nilai Luhur Budaya Pemersatu Bangsa	2 Kegiatan 4 Kegiatan		503.152.000	2 Kegiatan 4 Kegiatan	553.467.200	
4	05	59	008	Kegiatan Penguatan Kerukunan Kehidupan Bermasyarakat	- Jumlah Pembinaan Kerukunan Hidup	4 Kegiatan		534.276.000	4 Kegiatan	587.703.600	
4	05	59	009	Kegiatan Penguatan Peran dan Komunikasi Masyarakat dalam Penanganan dan Penanggulangan Potensi Konflik	- Jumlah Pembinaan	8 Kegiatan		553.280.000	8 Kegiatan	608.608.000	
4	05	59	010	Kegiatan Penguatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	- Jumlah Rapat Koordinasi	12 Kegiatan		190.370.000	12 Kegiatan	209.407.000	
4	05	59	011	Kegiatan Penyuluhan, Pencegahan, Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	- Jumlah Penyuluhan	4 kegiatan		428.931.000	4 kegiatan	471.824.100	

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.07 Kecamatan Sukasari

Total Pagu : 10.738.703.424

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.193.650.549</b>	<b>1.313.015.604</b>
4 05 01 002		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan bulanan	317.597.476	12 laporan bulanan	349.357.224
4 05 01 006		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	61 Unit	14.847.400	61 Unit	16.332.140
4 05 01 008		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	3.600.000	12 Jasa Bulanan	3.960.000
4 05 01 009		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Unit Peralatan Kerja Diperbaiki yang Terealisasi	Unit	90.765.000	Unit	99.841.500
4 05 01 010		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan bulanan	47.687.700	12 laporan bulanan	52.456.470
4 05 01 011		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Bulanan Pengadaan Cetak dan Penggandaan yang Terealisasi	12 laporan bulanan	45.775.573	12 laporan bulanan	50.353.130
4 05 01 012		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terealisasi	12 laporan bulanan	12.350.000	12 laporan bulanan	13.585.000
4 05 01 013		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terealisasi	3 Unit	12.540.000	3 Unit	13.794.000
4 05 01 014		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Terealisasi	12 laporan bulanan	18.752.000	12 laporan bulanan	20.627.200
4 05 01 015		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Direalisasi	5 Jenis	14.484.000	5 Jenis	15.932.400
4 05 01 017		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Makanan dan Minuman Terealisasi	12 laporan bulanan	94.001.400	12 laporan bulanan	103.401.540
4 05 01 018		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Bulanan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 laporan bulanan	86.250.000	12 laporan bulanan	94.875.000
4 05 01 019		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	2 orang bulan	435.000.000	2 orang bulan	478.500.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Presentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>661.342.200</b>		<b>727.476.420</b>
4 05 02 022		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 gedung	170.000.000	1 gedung	187.000.000
4 05 02 024		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Terpelihara	16 Unit	491.342.200	16 Unit	540.476.420
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Presentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	<b>100 %</b>	<b>30.000.000</b>		<b>33.000.000</b>
4 05 03 002		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	60 Stel	30.000.000	60 Stel	33.000.000
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Presentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	<b>100 %</b>	<b>81.000.000</b>		<b>89.100.000</b>
4 05 05 004		Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 kegiatan	81.000.000	1 kegiatan	89.100.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Presentase Ruas Jalan, RTH dan Saluran Dalam Kondisi Baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>718.809.375</b>		<b>790.690.313</b>
1 03 42 014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	3100 meter	376.972.575	3100 meter	414.669.833
1 03 42 015		Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Jumlah Taman Terpelihara	5 lokasi	244.285.100	5 lokasi	268.713.610
1 03 42 016		Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	3100 M / Lari	97.551.700	3100 M / Lari	107.306.870
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	<b>100 %</b>	<b>1.117.354.907</b>		<b>1.229.090.398</b>
2 06 20 001		Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- IKM Layanan Kependudukan	80 Nilai	90.376.891	80 Nilai	99.414.580
2 06 20 002		Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT RW Terbina	100 %	1.026.978.016	100 %	1.129.675.818
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>		<b>3 RW</b>	<b>5.199.999.998</b>		<b>5.719.999.998</b>
2 07 26 001		Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah RW Unggul	RW	3.999.999.998	RW	4.399.999.998
2 07 26 002		Pemberdayaan lingkup PKK	- Presentase PKK Unggul	100 %	400.000.000	100 %	440.000.000

2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Presentase Karang Taruna Unggul	100 %	400.000.000	100 %	440.000.000
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Presentase LPM Unggul	100 %	400.000.000	100 %	440.000.000
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Presentase Peran Kelembagaan, Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>1.736.546.395</b>		<b>1.910.201.035</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah - Jumlah Koperasi Juara	1 Unit 1 Unit	50.869.700	1 Unit 1 Unit	55.956.670
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang Memiliki Siskamling Aktif	8 RW	912.953.151	8 RW	1.004.248.466
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif	91 Kader	453.365.719	91 Kader	498.702.291
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah Kelompok/Kader RW Siaga	1 Kelompok	295.521.425	1 Kelompok	325.073.568
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Kegiatan Musrebang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	23.836.400	1 kegiatan	26.220.040

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.08 Kecamatan Cidadak

Total Pagu : 9.285.067.872

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2		3		4	5	6	7
4				Urusan Penunjang							
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya							
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 laporan		990.222.560		1.089.244.816	
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan		127.706.890	12 laporan	140.477.579	
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraanyang dibayarkan jasa perizinannya	37 Unit		9.250.000	37 Unit	10.175.000	
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan		114.772.800	12 Jasa Bulanan	126.250.080	
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				15.250.000		16.775.000	
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan		34.059.800	12 laporan	37.465.780	
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	4 laporan		28.374.640	4 laporan	31.212.104	
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 laporan bulanan		8.114.800	12 laporan bulanan	8.926.280	
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	2 laporan		75.076.030	2 laporan	82.583.633	
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	5 laporan		21.582.200	5 laporan	23.740.420	
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan		16.468.000	12 laporan	18.114.800	
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 laporan		61.493.400	12 laporan	67.642.740	
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	8 laporan		81.000.000	8 laporan	89.100.000	
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan		397.074.000	12 laporan	436.781.400	
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %		785.102.790		863.613.069	
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit		175.899.800	1 Unit	193.489.780	
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	37 Unit		505.694.000	37 Unit	556.263.400	
4	05	02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				84.242.990		92.667.289	
4	05	02	045	Pembangunan sistem pelayanan dan database terpadu	- Jumlah pembuatan aplikasi / website	1 Dokumen		19.266.000	1 Dokumen	21.192.600	
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %		33.015.000		36.316.500	
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya terrealisasi	50 Stel		33.015.000	50 Stel	36.316.500	
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %		73.185.200		80.503.720	
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	50 orang		73.185.200	50 orang	80.503.720	
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		83,7 Nilai		531.311.092		584.442.201	
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	12 laporan		445.016.092	12 laporan	489.517.701	
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- luas RTH kecamatan terpelihara	200 meter		56.793.000	200 meter	62.472.300	
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	360 meter		29.502.000	360 meter	32.452.200	
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		100 %		925.932.000		1.018.525.200	
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	5 laporan		419.382.000	5 laporan	461.320.200	
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- laporan RW tepat waktu dan lengkap	100 %		506.550.000	100 %	557.205.000	
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		3 RW		4.523.190.730		4.975.509.803	
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	9 sub kegiatan		3.625.270.370	9 sub kegiatan	3.987.797.407	

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	10 sub kegiatan	299.409.350	10 sub kegiatan	329.350.285
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	10 sub kegiatan	298.865.950	10 sub kegiatan	328.752.545
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	9 sub kegiatan	299.645.060	9 sub kegiatan	329.609.566
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>1.423.108.500</b>		<b>1.565.419.350</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- pembentukan koperasi di tempat ibadah	101 Kelompok	37.555.300	101 Kelompok	41.310.830
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	6 RW	663.041.000	6 RW	729.345.100
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	50 Org	413.610.000	50 Org	454.971.000
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial			252.790.600		278.069.660
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	100 %	56.111.600	100 %	61.722.760

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.09 Kecamatan Sukajadi

Total Pagu : 14.297.647.879

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi	<b>12 laporan</b>	<b>1.455.840.989</b>	<b>1.601.425.088</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 laporan	216.350.230	12 laporan	237.985.253
4 05 01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah jasa peralatan kantor yang tersedia	12 laporan	2.473.900	12 laporan	2.721.290
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perijinannya	17 Unit	16.497.060	17 Unit	18.146.766
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 laporan	156.552.000	12 laporan	172.207.200
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	9 Unit	47.620.000	9 Unit	52.382.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terealisasi	2 Paket	120.067.489	2 Paket	132.074.238
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	2 jenis	79.845.090	2 jenis	87.829.599
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	6 jenis	12.035.920	6 jenis	13.239.512
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	6.050.000	2 Paket	6.655.000
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	2 jenis	40.503.000	2 jenis	44.553.300
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	129.846.300	12 laporan	142.830.930
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 laporan	100.000.000	2 laporan	110.000.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	528.000.000	12 laporan	580.800.000
<b>4 05 02</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>838.116.490</b>	<b>921.928.139</b>
4 05 02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- jumlah tersedianya meubelair	1 Paket	15.231.370	1 Paket	16.754.507
4 05 02	012	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Tersedianya Perlengkapan Peralatan Aparatur	1 Paket	244.996.660	1 Paket	269.496.326
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	135.609.460	1 Paket	149.170.406
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	14 Unit	442.279.000	14 Unit	486.506.900
<b>4 05 03</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>41.250.000</b>	<b>45.375.000</b>
4 05 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia untuk aparat	1 Paket	41.250.000	1 Paket	45.375.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>	<b>42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Prosentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>948.462.980</b>	<b>1.043.309.278</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	2000 meter	728.813.580	2000 meter	801.694.938
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- luas RTH kecamatan terpelihara	30 M2	150.000.000	30 M2	165.000.000
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	1.5 km	69.649.400	1.5 km	76.614.340
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>	<b>20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>100 %</b>	<b>1.504.581.600</b>	<b>1.655.039.760</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	12 laporan	4.681.600	12 laporan	5.149.760
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	30 RW	1.499.900.000	30 RW	1.649.890.000
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>	<b>26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Persentase Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>7.624.961.220</b>	<b>8.387.457.342</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	3 sub kegiatan	6.124.976.340	3 sub kegiatan	6.737.473.974
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	8 sub kegiatan	499.999.750	8 sub kegiatan	549.999.725
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	7 sub kegiatan	499.987.250	7 sub kegiatan	549.985.975
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	12 sub kegiatan	499.997.880	12 sub kegiatan	549.997.668

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kegiatan	1.884.434.600		2.072.878.060
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- pembentukan koperasi di tempat ibadah	1 Koperasi	11.440.000	1 Koperasi	12.584.000
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	11 RW	1.247.329.600	11 RW	1.372.062.560
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	625 Orang	95.015.000	625 Orang	104.516.500
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader RW siaga	1 RW	516.350.000	1 RW	567.985.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	50 orang	14.300.000	50 orang	15.730.000



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.10 Kecamatan Cicendo

Total Pagu : 16.366.532.891

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 laporan</b>	<b>1.409.705.845</b>		<b>1.550.676.430</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	205.132.800	12 laporan	225.646.080
4 05 01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	12 laporan	4.455.000	12 laporan	4.900.500
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	3 Unit	11.634.200	3 Unit	12.797.620
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	139.800.000	12 Jasa Bulanan	153.780.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	10 Unit	26.980.000	10 Unit	29.678.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	177.717.200	12 laporan	195.488.920
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	12 laporan	85.389.400	12 laporan	93.928.340
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	12 laporan	19.126.400	12 laporan	21.039.040
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.112.500		44.123.750
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	22.702.200	12 laporan	24.972.420
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terealisasi	12 laporan	81.077.260	12 laporan	89.184.986
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	10.578.885	12 laporan	11.636.774
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	585.000.000	12 laporan	643.500.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>669.808.000</b>		<b>736.788.800</b>
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	37 laporan	669.808.000	37 laporan	736.788.800
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>			<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.237.056.800</b>		<b>1.360.762.480</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	46250 meter	968.565.500	46250 meter	1.065.422.050
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	3500 m2	195.910.000	3500 m2	215.501.000
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	360 m2	72.581.300	360 m2	79.839.430
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>			<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>2.065.901.000</b>		<b>2.272.491.100</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	5 laporan	46.580.000	5 laporan	51.238.000
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Laporan RW tepat waktu dan lengkap	100 %	2.019.321.000	100 %	2.221.253.100
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>			<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>3 RW</b>	<b>8.785.066.396</b>		<b>9.663.573.036</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	104 sub kegiatan	6.985.093.606	104 sub kegiatan	7.683.602.967
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	51 sub kegiatan	599.999.770	51 sub kegiatan	659.999.747
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	32 sub kegiatan	599.999.860	32 sub kegiatan	659.999.846
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	34 sub kegiatan	599.973.160	34 sub kegiatan	659.970.476
<b>2 07 28</b>			<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>1 kegiatan</b>	<b>2.198.994.850</b>		<b>2.418.894.335</b>
2 07 28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Pembentukan koperasi di tempat ibadah	1 Kelompok	57.603.700	1 Kelompok	63.364.070
2 07 28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	75 %	1.315.459.550	75 %	1.447.005.505
2 07 28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	186 Kader	680.597.800	186 Kader	748.657.580

2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader RW siaga	6 kader/klp	86.688.700	6 kader/klp	95.357.570
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	1 laporan	58.645.100	1 laporan	64.509.610

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.11 Kecamatan Andir

Total Pagu : 15.695.013.366

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
4				Urusan Penunjang					
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya					
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi	12 laporan	1.430.425.350		1.573.467.885
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			106.489.600		117.138.560
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			12.155.400		13.370.940
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			120.836.800		132.920.480
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			36.130.000		39.743.000
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	6 laporan	102.132.300	6 laporan	112.345.530
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			58.798.200		64.678.020
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			12.195.500		13.415.050
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.580.750		31.438.825
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			34.631.800		38.094.980
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah jasa penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Jasa Bulanan	21.372.000	12 Jasa Bulanan	23.509.200
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	16 laporan	129.853.000	16 laporan	142.838.300
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			131.250.000		144.375.000
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 Jasa Bulanan	636.000.000	12 Jasa Bulanan	699.600.000
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	717.501.720		789.251.892
4	05	02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah jenis Pengadaan Mebeulair	5 Jenis	25.743.200	5 Jenis	28.317.520
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit	138.471.920	1 Unit	152.319.112
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			553.286.600		608.615.260
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100 %	33.330.000		36.663.000
4	05	03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah laporan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 laporan	33.330.000	1 laporan	36.663.000
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100 %	96.665.800		106.332.380
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah laporan kegiatan pembinaan aparatur	1 laporan	96.665.800	1 laporan	106.332.380
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	83,7 Nilai	1.094.964.165		1.204.460.581
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Panjang Drainase terpelihara	24000 meter	870.820.465	24000 meter	957.902.511
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan			160.783.400		176.861.740
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan			63.360.300		69.696.330
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100 %	1.776.447.500		1.954.092.250
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- IKM Layanan Kependudukan	81.6 IKM	24.725.000	81.6 IKM	27.197.500
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW			1.751.722.500		1.926.894.750
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan	Persentase tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kewilayahan	3 RW	8.422.683.831		9.264.952.214
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW			6.695.683.381		7.365.251.719
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK			579.272.200		637.199.420
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna			568.462.250		625.308.475
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM			579.266.000		637.192.600

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kegiatan	2.122.995.000		2.335.294.500
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan			56.815.000		62.496.500
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan			1.279.275.000		1.407.202.500
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			669.950.000		736.945.000
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial			62.600.000		68.860.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan			54.355.000		59.790.500

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.12 Kecamatan Coblong

Total Pagu : 19.926.330.621

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	tersedianya siskamling aktif	6 -	496.277.000	100 %	545.904.700
1	05	15	005 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	75 RW	496.277.000	75 RW	545.904.700
1	06		Sosial					
1	06	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	4 RW	274.039.960		301.443.956
1	06	33	001 Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan			274.039.960		301.443.956
4			Urusan Penunjang					
4	01		Perencanaan					
4	01	31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kelurahan	85 %	66.419.200		73.061.120
4	01	31	001 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	75 RW	66.419.200	75 RW	73.061.120
4	05		Fungsi Penunjang Lainnya					
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlayannya administrasi perkantoran	12 laporan	1.515.500.400		1.667.050.440
4	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			245.330.100		269.863.110
4	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	37 Unit	21.501.800	37 Unit	23.651.980
4	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			4.800.000		5.280.000
4	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			85.150.000		93.665.000
4	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			77.037.300		84.741.030
4	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			101.331.500		111.464.650
4	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			19.806.400		21.787.040
4	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	12 laporan	41.192.900	12 laporan	45.312.190
4	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			24.636.000		27.099.600
4	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			175.968.400		193.565.240
4	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 laporan	85.974.000	10 laporan	94.571.400
4	05	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pendukung	12 laporan	480.600.000	12 laporan	528.660.000
4	05	01	023 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi Kendaraan Operasional Kantor	- tersedianya petugas jasa kebersihan	36 orang bulan	152.172.000	36 orang bulan	167.389.200
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan kendaraan dinas Kecamatan & Kelurahan	100 %	690.862.000		759.948.200
4	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 laporan	25.110.000	1 laporan	27.621.000
4	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	35 kendaraan	665.752.000	35 kendaraan	732.327.200
4	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya PDH dan pakaian hari-hari tertentu karyawan	100 %	22.750.000		25.025.000
4	05	03	005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu - jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	60 set 56 Stel	22.750.000	60 set 56 Stel	25.025.000
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	persentase luas RTH dan panjang drainase kecamatan/kelurahan yang terpelihara	83,7 Nilai	1.903.658.821		2.094.024.703
1	03	42	014 Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan			1.556.042.100		1.711.646.310
1	03	42	015 Pemeliharaan RTH Kecamatan	- luas RTH kecamatan yang terpelihara	50 m2	195.008.521	50 m2	214.509.373
1	03	42	016 Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan			152.608.200		167.869.020
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2	06	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	100 %	3.398.666.900		3.738.533.590

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan			74.088.900		81.497.790
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW			3.324.578.000		3.657.035.800
<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>25</b>		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<b>1 RW</b>	<b>281.415.800</b>		<b>309.557.380</b>
2	07	25	001	Penguatan Kelembagaan Masyarakat	- jumlah fasilitasi kelembagaan PKK,LPM, Posyandu	12 laporan	281.415.800	12 laporan	309.557.380
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Jumlah Sub Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	<b>3 RW</b>	<b>11.171.239.140</b>		<b>12.288.363.054</b>
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW			9.372.384.190		10.309.622.609
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK			599.997.050		659.996.755
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna			599.863.500		659.849.850
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Tingkat Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan	100 %	598.994.400	100 %	658.893.840
<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b>					
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>25</b>		<b>Pemberdayaan KUMKM</b>	terbentuknya KUKM di kewilayahan	<b>10 UMKM</b>	<b>105.501.400</b>		<b>116.051.540</b>
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan			105.501.400		116.051.540

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.13 Kecamatan Bandung Wetan

Total Pagu : 9.866.098.521

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 05</b>			<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
<b>1 05 15</b>			<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	Jumlah RW yang Memiliki Siskamling dan Relawan Bencana	<b>6 -</b>	<b>951.810.800</b>	<b>1.046.991.880</b>
1 05 15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	36 RW	951.810.800	36 RW	1.046.991.880
<b>1 06</b>			<b>Sosial</b>				
<b>1 06 33</b>			<b>Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Ikut berperan Aktif dalam Kesejahteraan Sosial	<b>4 RW</b>	<b>254.876.420</b>	<b>280.364.062</b>
1 06 33	001	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba tk kota	16 Kader	254.876.420	16 Kader	280.364.062
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 01</b>			<b>Perencanaan</b>				
<b>4 01 31</b>			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	<b>85 %</b>	<b>64.302.500</b>	<b>70.732.750</b>
4 01 31	001	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	150 orang	64.302.500	150 orang	70.732.750
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.265.205.752</b>	<b>1.391.726.327</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	124.586.290	12 laporan	137.044.919
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa Perizinannya	29 Unit	10.001.200	29 Unit	11.001.320
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kelurahan Citarum - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	80,00 Nilai 12 Jasa Bulanan	3.000.000	80,00 Nilai 12 Jasa Bulanan	3.300.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Unit Peralatan Kerja yang di perbaiki	20 Unit	29.255.000	20 Unit	32.180.500
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- 1 Laporan	100 %	98.803.342	100 %	108.683.676
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Jenis Pengadaan Cetakan Dan Pengadaan	3 Jenis	38.280.650	3 Jenis	42.108.715
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- 1 Laporan	100 %	13.625.000	100 %	14.987.500
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	46.373.360	1 Dokumen	51.010.696
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 laporan	32.356.520	2 laporan	35.592.172
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peratutan Perundang-Undangan	12 Jasa Bulanan	8.808.000	12 Jasa Bulanan	9.688.800
4 05 01	016	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 laporan	20.044.250	2 laporan	22.048.675
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	4 laporan	95.182.940	4 laporan	104.701.234
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Tahun	37.500.000	1 Tahun	41.250.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	3 laporan	707.389.200	3 laporan	778.128.120
<b>4 05 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>467.890.373</b>	<b>514.679.410</b>
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	29 Unit	427.286.000	29 Unit	470.014.600
4 05 02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	1 gedung	40.604.373	1 gedung	44.664.810
<b>4 05 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	<b>100 %</b>	<b>25.932.500</b>	<b>28.525.750</b>
4 05 03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	41 Stel	25.932.500	41 Stel	28.525.750
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>			<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan Saluran dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>430.752.730</b>	<b>473.828.003</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase Kelurahan/Kecamatan terpelihara	1 laporan	252.199.240	1 laporan	277.419.164
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Pemeliharaan RTH Kecamatan	12 laporan	160.557.690	12 laporan	176.613.459
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang Kerb Jalan Terpelihara	12750 meter	17.995.800	12750 meter	19.795.380
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				

2	06			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
2	06	20		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>100 %</b>	<b>971.074.000</b>	<b>1.068.181.400</b>
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	1 Dokumen	19.603.000	21.563.300
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	8 RW	951.471.000	1.046.618.100
2	07			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
2	07	25		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 RW</b>	<b>107.376.500</b>	<b>118.114.150</b>
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- pokjanal, kader posyandu aktif	16 Kader	107.376.500	118.114.150
2	07	26		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>5.319.562.346</b>	<b>5.851.518.581</b>
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Pemberdayaan Lingkup RW	202 sub kegiatan	4.420.958.326	4.863.054.159
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Pemberdayaan lingkup PKK	14 sub kegiatan	288.749.150	317.624.065
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	14 sub kegiatan	314.531.040	345.984.144
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Sub Kegiatan	80 %	295.323.830	324.856.213
2	11			<b>Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b>				
2	11	25		<b>Pemberdayaan KUMKM</b>	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	<b>10 UMKM</b>	<b>7.314.600</b>	<b>8.046.060</b>
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	26 KUMKM	7.314.600	8.046.060



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.14 Kecamatan Sumur Bandung

Total Pagu : 10.688.347.187

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)		2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1 05</b>		<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>					
<b>1 05 15</b>		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>		<b>6 -</b>	<b>459.634.000</b>		<b>505.597.400</b>
1 05 15	005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Meningkatnya kondisi lingkungan yang tertib dan aman	16 RW	459.634.000	16 RW	505.597.400
<b>4</b>		<b>Urusan Penunjang</b>					
<b>4 05</b>		<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>					
<b>4 05 01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>12 laporan</b>	<b>947.671.550</b>		<b>1.042.438.705</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terpenuhinya biaya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	115.150.480	12 laporan	126.665.528
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai - tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional	31 Unit 31 Unit	19.000.000	31 Unit 31 Unit	20.900.000
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terciptanya suasana kerja yang nyaman	12 Jasa Bulanan	3.660.000	12 Jasa Bulanan	4.026.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	12 laporan	16.500.000	12 laporan	18.150.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	12 laporan	77.926.270	12 laporan	85.718.897
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	12 laporan	95.982.620	12 laporan	105.580.882
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Hasil pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	4 laporan	7.457.100	4 laporan	8.202.810
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tertatanya administrasi perkantoran	4 laporan	29.850.680	4 laporan	32.835.748
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Terciptanya suasana kerja yang nyaman	4 laporan	27.018.600	4 laporan	29.720.460
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Sebagai bahan informasi	4 laporan	19.567.000	4 laporan	21.523.700
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Lancarnya rapat-rapat	12 laporan	95.558.800	12 laporan	105.114.680
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi	5 laporan	50.000.000	5 laporan	55.000.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Pelaksanaan administrasi perkantoran menjadi lancar	12 laporan	390.000.000	12 laporan	429.000.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Jumlah unit bangunan terpelihara	<b>100 %</b>	<b>575.158.466</b>		<b>632.674.313</b>
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 Unit	105.738.466	1 Unit	116.312.313
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 laporan	469.420.000	12 laporan	516.362.000
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>27.500.000</b>		<b>30.250.000</b>
4 05 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	50 Stel	27.500.000	50 Stel	30.250.000
<b>1</b>		<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1 03</b>		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>		<b>83,7 Nilai</b>	<b>793.353.670</b>		<b>872.689.037</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan			654.532.900		719.986.190
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Terpeliharanya RTH	2000 M2	78.003.000	2000 M2	85.803.300
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Terciptanya lingkungan yang nyaman, indah, dan tertata	6025 M2	60.817.770	6025 M2	66.899.547
<b>2</b>		<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2 06</b>		<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>		<b>100 %</b>	<b>1.077.360.000</b>		<b>1.185.096.000</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	5 laporan	22.360.000	5 laporan	24.596.000
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Terwujudnya tertib administrasi tingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW	9 RW	1.055.000.000	9 RW	1.160.500.000
<b>2 07</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>2 07 25</b>		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>		<b>1 RW</b>	<b>127.570.000</b>		<b>140.327.000</b>
2 07 25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			127.570.000		140.327.000
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>		<b>3 RW</b>	<b>5.825.000.001</b>		<b>6.407.500.001</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW			4.625.000.000		5.087.500.000

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK			400.000.000		440.000.000
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna			400.000.001		440.000.001
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM			400.000.000		440.000.000
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>845.099.500</b>		<b>929.609.450</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Terfasilitasinya kegiatan ekonomi masyarakat	1 Kegiatan	20.012.000	1 Kegiatan	22.013.200
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Meningkatnya kondisi lingkungan yang tertib dan aman	4 RW	568.319.000	4 RW	625.150.900
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			210.000.000		231.000.000
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Terfasilitasinya pembinaan SDM Kader	3 Kelompok	34.400.000	3 Kelompok	37.840.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan			12.368.500		13.605.350
2	11			<b>Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b>					
2	11	25		<b>Pemberdayaan KUMKM</b>		<b>10 UMKM</b>	<b>10.000.000</b>		<b>11.000.000</b>
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Terfasilitasinya kegiatan ekonomi masyarakat	16 RW	10.000.000	16 RW	11.000.000

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.15 Kecamatan Cibeunying Kidul

Total Pagu : 22.088.730.013

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.337.681.170</b>	<b>1.471.449.287</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Jasa Bulanan	183.548.782	12 Jasa Bulanan	201.903.660
4 05 01	003	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	27.500.000	1 laporan	30.250.000
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	123 Unit	28.730.100	123 Unit	31.603.110
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	79.748.100	12 Jasa Bulanan	87.722.910
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	6 Unit	27.900.000	6 Unit	30.690.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang terrealisasi	24 Jenis	78.072.078	24 Jenis	85.879.286
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	2 Jenis	43.903.940	2 Jenis	48.294.334
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	4 Jenis	18.614.570	4 Jenis	20.476.027
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	2 Unit	110.803.940	2 Unit	121.884.334
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	11 Jenis	30.820.660	11 Jenis	33.902.726
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan bulanan	21.975.600	12 laporan bulanan	24.173.160
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	2 laporan	96.688.400	2 laporan	106.357.240
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 laporan	109.375.000	2 laporan	120.312.500
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan bulanan	480.000.000	12 laporan bulanan	528.000.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>992.624.523</b>		<b>1.091.886.975</b>
4 05 02	013	Kegiatan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	- Jumlah unit gedung yang didekorasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	55.000.000
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit	136.458.713	1 Unit	150.104.584
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	6 Unit	704.687.810	6 Unit	775.156.591
4 05 02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah gedung yang direhab	1 Unit	101.478.000	1 Unit	111.625.800
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>43.659.000</b>		<b>48.024.900</b>
4 05 03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- - Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	60 Stel	43.659.000	60 Stel	48.024.900
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan ASN yang mendapat pembinaan	<b>100 %</b>	<b>91.370.400</b>		<b>100.507.440</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 kegiatan	91.370.400	1 kegiatan	100.507.440
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Jumlah Ruas Jalan, Kerb dan RTH dibagi target	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.528.107.700</b>		<b>1.680.918.470</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Ruas Jalan Yang Terpelihara - Panjang drainase yang terpelihara	3000 meter 2500 meter	1.421.247.060	3000 meter 2500 meter	1.563.371.766
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Jumlah Taman Yang Dipelihara	11 Unit	45.056.000	11 Unit	49.561.600
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb yang terpelihara	350 meter	61.804.640	350 meter	67.985.104
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	<b>100 %</b>	<b>2.664.252.000</b>		<b>2.930.677.200</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- IKM Layanan Kependudukan	84.34 Nilai	43.036.000	84.34 Nilai	47.339.600
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT dan RW Terbina	100 persen	2.621.216.000	100 persen	2.883.337.600
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>12.636.916.300</b>		<b>13.900.607.930</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	73 sub kegiatan	10.845.494.100	73 sub kegiatan	11.930.043.510

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- % PKK Unggul	12 persen	596.454.600	12 persen	656.100.060
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	5 sub kegiatan	599.934.800	5 sub kegiatan	659.928.280
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup LPM	7 sub kegiatan	595.032.800	7 sub kegiatan	654.536.080
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>2.794.118.920</b>		<b>3.073.530.812</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah Koperasi di Tempat Ibadah - Jumlah Koperasi Juara	9 Koperasi 8 Koperasi	12.320.000	9 Koperasi 8 Koperasi	13.552.000
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	16 RW	1.843.212.820	16 RW	2.027.534.102
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW Berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	7 RW 7 Posyandu	837.327.600	7 RW 7 Posyandu	921.060.360
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah RW Siaga - Jumlah Kagana Kelurahan	58 RW 2 Kelompok	63.580.000	58 RW 2 Kelompok	69.938.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- 1 Kegiatan Musrenbang	1 Kegiatan	37.678.500	1 Kegiatan	41.446.350

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.16 Kecamatan Cibeunying Kaler

Total Pagu : 12.809.036.345

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi	<b>12 laporan</b>	<b>1.145.673.710</b>	<b>1.260.241.081</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 laporan	216.699.900	12 laporan	238.369.890
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			9.174.400		10.091.840
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			109.000.000		119.900.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			11.500.000		12.650.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan kegiatan penyediaan ATK	12 laporan	99.464.320	12 laporan	109.410.752
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	12 laporan	29.628.700	12 laporan	32.591.570
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			7.741.100		8.515.210
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			41.615.090		45.776.599
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.380.200		14.718.220
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	17.648.000	2 Jenis	19.412.800
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	112.072.000	12 laporan	123.279.200
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			33.750.000		37.125.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran			444.000.000		488.400.000
<b>4 05 02</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>373.509.700</b>		<b>410.860.670</b>
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	5 laporan	97.708.600	5 laporan	107.479.460
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	4 Unit	275.801.100	4 Unit	303.381.210
<b>4 05 03</b>	<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	<b>100 %</b>	<b>33.412.500</b>		<b>36.753.750</b>
4 05 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap	54 Orang	33.412.500	54 Orang	36.753.750
<b>4 05 05</b>	<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	<b>100 %</b>	<b>50.250.200</b>		<b>55.275.220</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur			50.250.200		55.275.220
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>	<b>03</b>		<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>	<b>42</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang Terpelihara	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.089.324.665</b>		<b>1.198.257.131</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	2342 meter	869.659.465	2342 meter	956.625.411
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan			178.659.400		196.525.340
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan			41.005.800		45.106.380
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>	<b>06</b>		<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>	<b>20</b>	<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>100 %</b>	<b>1.797.285.000</b>		<b>1.977.013.500</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	16 Jenis	421.507.000	16 Jenis	463.657.700
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	11 RW	1.375.778.000	11 RW	1.513.355.800
<b>2 07</b>	<b>07</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>	<b>26</b>	<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>6.601.659.590</b>		<b>7.261.825.549</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	11 RW	5.477.238.790	11 RW	6.024.962.669
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	1 Org	375.650.050	1 Org	413.215.055
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna	1 Org	375.231.850	1 Org	412.755.035
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	1 Org	373.538.900	1 Org	410.892.790

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kegiatan	1.717.920.980		1.889.713.078
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah pembentukan koperasi di tempat ibadah	1 Unit	16.134.000	1 Unit	17.747.400
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	12 RW	886.719.250	12 RW	975.391.175
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW berdaya	11 RW	408.929.000	11 RW	449.821.900
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader RW siaga - Jumlah Kagana kelurahan	15 RW 1 Org	383.068.730	15 RW 1 Org	421.375.603
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan			23.070.000		25.377.000

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.17 Kecamatan Astana Anyar

Total Pagu : 13.976.816.569

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
4			Urusan Penunjang						
4	05		Fungsi Penunjang Lainnya						
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 laporan	1.491.800.856		1.640.980.942	
4	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi, Air Dan Listrik	12 laporan	160.930.690	12 laporan	177.023.759	
4	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 laporan	11.195.600	12 laporan	12.315.160	
4	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 laporan	4.920.000	12 laporan	5.412.000	
4	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 laporan	40.400.000	12 laporan	44.440.000	
4	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- jumlah laporan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	146.506.033	12 laporan	161.156.636	
4	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 laporan	138.368.433	12 laporan	152.205.276	
4	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 laporan	20.726.300	12 laporan	22.798.930	
4	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	29.577.000	12 laporan	32.534.700	
4	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	27.291.000	12 laporan	30.020.100	
4	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 laporan	179.885.800	12 laporan	197.874.380	
4	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	7 laporan	120.000.000	7 laporan	132.000.000	
4	05	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran			612.000.000		673.200.000	
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	453.097.133		498.406.846	
4	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 laporan	83.333.933	12 laporan	91.667.326	
4	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	44 Unit	369.763.200	44 Unit	406.739.520	
4	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %	37.375.000		41.112.500	
4	05	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	12 laporan	37.375.000	12 laporan	41.112.500	
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		83,7 Nilai	689.565.700		758.522.270	
1	03	42	014 Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	12 laporan	621.836.100	12 laporan	684.019.710	
1	03	42	015 Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Jumlah Laporan Pemeliharaan RTH Kecamatan	12 laporan	22.239.000	12 laporan	24.462.900	
1	03	42	016 Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Jumlah Laporan Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	12 laporan	45.490.600	12 laporan	50.039.660	
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2	06	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		100 %	1.483.958.500		1.632.354.350	
2	06	20	001 Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Jumlah laporan Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	12 laporan	49.785.500	12 laporan	54.764.050	
2	06	20	002 Kegiatan Pembinaan RT RW	- jumlah RT RW yang mendapatkan Pembinaan	69 Orang	1.434.173.000	69 Orang	1.577.590.300	
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2	07	25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		1 RW	207.548.000		228.302.800	
2	07	25	002 Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan PKK, LPM, Karang Taruna	1 laporan	207.548.000	1 laporan	228.302.800	
2	07	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan		3 RW	7.664.506.480		8.430.957.128	
2	07	26	001 Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	45 sub kegiatan	5.863.640.780	45 sub kegiatan	6.450.004.858	
2	07	26	002 Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	5 sub kegiatan	600.000.300	5 sub kegiatan	660.000.330	
2	07	26	003 Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	5 sub kegiatan	600.000.000	5 sub kegiatan	660.000.000	

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	5 sub kegiatan	600.865.400	5 sub kegiatan	660.951.940
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>1.948.964.900</b>		<b>2.143.861.390</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUMKM Aktif di Wilayah Kecamatan / Kelurahan	4 KUMKM	27.716.000	4 KUMKM	30.487.600
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki Siskamling Aktif	2 RW	1.270.437.500	2 RW	1.397.481.250
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			3.116.000		3.427.600
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah RW Siaga - Jumlah kagana kelurahan	12 RW 2 Kelurahan	594.215.400	12 RW 2 Kelurahan	653.636.940
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	60 Orang	53.480.000	60 Orang	58.828.000



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.18 Kecamatan Bojongloa Kaler

Total Pagu : 14.119.699.225

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)				2	3	4	5	6	7
4				Urusan Penunjang					
4	05			Fungsi Penunjang Lainnya					
4	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 laporan	1.180.846.615		1.298.931.277
4	05	01	001	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Bulanan jasa surat menyurat	12 laporan	7.188.000	12 laporan	7.906.800
4	05	01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	160.114.800	12 laporan	176.126.280
4	05	01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	37 Unit	10.898.800	37 Unit	11.988.680
4	05	01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	176.729.470	12 Jasa Bulanan	194.402.417
4	05	01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki	Unit	12.000.000	Unit	13.200.000
4	05	01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	63.809.530	12 laporan	70.190.483
4	05	01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			64.268.180		70.694.998
4	05	01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 laporan	7.230.400	12 laporan	7.953.440
4	05	01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	14.055.000	12 laporan	15.460.500
4	05	01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 laporan	740.500	12 laporan	814.550
4	05	01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	9.798.000	12 laporan	10.777.800
4	05	01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	12 laporan	147.586.200	12 laporan	162.344.820
4	05	01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	77.427.735	12 laporan	85.170.509
4	05	01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	429.000.000	12 laporan	471.900.000
4	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	846.238.370		930.862.207
4	05	02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit	157.214.370	1 Unit	172.935.807
4	05	02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	37 Unit	658.477.200	37 Unit	724.324.920
4	05	02	049	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana			30.546.800		33.601.480
4	05	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %	36.300.000		39.930.000
4	05	03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50 Stel	36.300.000	50 Stel	39.930.000
4	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	56.100.000		61.710.000
4	05	05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	1 kegiatan	56.100.000	1 kegiatan	61.710.000
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	03			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	03	42		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	83,7 Nilai	983.130.810		1.081.443.891
1	03	42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Ruas Jalan yang terpelihara - panjang drainase terpelihara	3500 meter 3500 meter	878.034.610	3500 meter 3500 meter	965.838.071
1	03	42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Jumlah Taman terpelihara	2 Buah	31.323.000	2 Buah	34.455.300
1	03	42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb jalan yang terpeliharaan	17800 meter	73.773.200	17800 meter	81.150.520
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	06			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	100 %	1.723.088.000		1.895.396.800
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- IKM Layanan Kependudukan	83,7 Nilai	8.610.000	83,7 Nilai	9.471.000
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT RW Terbina	100 %	1.714.478.000	100 %	1.885.925.800
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		3 RW	7.359.099.740		8.095.009.714
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah RW Unggul	%	5.865.046.900	%	6.451.551.590
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- % PKK Unggul	%	498.293.520	%	548.122.872

2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- % Karang Taruna Unggul	%	495.966.800	%	545.563.480
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	3 sub kegiatan	499.792.520	3 sub kegiatan	549.771.772
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>1.934.895.690</b>		<b>2.128.385.259</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah - Jumlah Koperasi Juara	Koperasi 0 Koperasi	16.160.000	Koperasi 0 Koperasi	17.776.000
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	Buah	1.040.821.990	Buah	1.144.904.189
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	RW 0 Posyandu	831.483.700	RW 0 Posyandu	914.632.070
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah RW siaga - Jumlah Kagana kelurahan	RW 0 Kelompok	22.680.000	RW 0 Kelompok	24.948.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah Kegiatan musrenbang	1 kegiatan	23.750.000	1 kegiatan	26.125.000

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.19 Kecamatan Bojongloa Kidul

Total Pagu : 15.389.518.693

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>					
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>					
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi	<b>12 laporan</b>	<b>1.832.164.633</b>		<b>2.015.381.096</b>
4 05 01	002		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	207.044.500	12 laporan	227.748.950
4 05 01	003		Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.909.380		26.300.318
4 05 01	008		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Penyediaan Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	4.800.000	12 Jasa Bulanan	5.280.000
4 05 01	009		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit Peralatan Kerja yang diperbaiki	2 Unit	51.000.000	2 Unit	56.100.000
4 05 01	010		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	4 laporan	116.093.800	4 laporan	127.703.180
4 05 01	011		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	4 laporan	49.112.270	4 laporan	54.023.497
4 05 01	012		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 laporan	18.669.300	4 laporan	20.536.230
4 05 01	013		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			65.650.110		72.215.121
4 05 01	014		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 laporan	30.262.500	4 laporan	33.288.750
4 05 01	015		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	35.918.600	12 laporan	39.510.460
4 05 01	017		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman	4 laporan	215.479.173	4 laporan	237.027.090
4 05 01	018		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 laporan	140.000.000	4 laporan	154.000.000
4 05 01	019		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	874.225.000	12 laporan	961.647.500
<b>4 05 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>1.176.540.000</b>		<b>1.294.194.000</b>
4 05 02	012		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur			141.547.400		155.702.140
4 05 02	022		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit	340.000.000	1 Unit	374.000.000
4 05 02	024		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	15 Unit	694.992.600	15 Unit	764.491.860
<b>4 05 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Prosentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>42.100.000</b>		<b>46.310.000</b>
4 05 03	002		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terrealisasi	65 Stel	34.500.000	65 Stel	37.950.000
4 05 03	003		Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			7.600.000		8.360.000
<b>4 05 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Cakupan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>104.950.000</b>		<b>115.445.000</b>
4 05 05	004		Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	65 orang	104.950.000	65 orang	115.445.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
<b>1 03 42</b>			<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>2.013.045.160</b>		<b>2.214.349.676</b>
1 03 42	014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang drainase terpelihara	5900 m2	1.813.103.160	5900 m2	1.994.413.476
1 03 42	015		Pemeliharaan RTH Kecamatan			99.988.700		109.987.570
1 03 42	016		Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	15000 M2	99.953.300	15000 M2	109.948.630
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
<b>2 06 20</b>			<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	<b>100 %</b>	<b>540.373.500</b>		<b>594.410.850</b>
2 06 20	001		Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar normatif pelayanan lengkap	12 laporan	413.642.500	12 laporan	455.006.750
2 06 20	002		Kegiatan Pembinaan RT RW	- Laporan RW tepat waktu dan lengkap	25 RW	126.731.000	25 RW	139.404.100
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>2 07 26</b>			<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>7.300.000.000</b>		<b>8.030.000.000</b>
2 07 26	001		Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	15 sub kegiatan	5.500.000.000	15 sub kegiatan	6.050.000.000

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	10 sub kegiatan	600.000.000	10 sub kegiatan	660.000.000
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	10 sub kegiatan	600.000.000	10 sub kegiatan	660.000.000
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	10 sub kegiatan	600.000.000	10 sub kegiatan	660.000.000
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>2.380.345.400</b>		<b>2.618.379.940</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Pembentukan koperasi di tempat ibadah	4 Kelompok	69.976.800	4 Kelompok	76.974.480
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	6 RW	1.403.092.000	6 RW	1.543.401.200
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	4 Kelompok	335.158.000	4 Kelompok	368.673.800
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jml kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	8 Posyandu	484.524.000	8 Posyandu	532.976.400
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	11 RW	87.594.600	11 RW	96.354.060

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.20 Kecamatan Babakan Ciparay

Total Pagu : 16.552.633.854

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2			3	4	5	6	7
<b>4</b>				<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 01</b>				<b>Perencanaan</b>				
<b>4 01 31</b>				<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>85 %</b>	<b>7.475.000</b>		<b>8.222.500</b>
4 01 31	001			Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan		7.475.000		8.222.500
<b>4 05</b>				<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 laporan</b>	<b>2.019.217.687</b>		<b>2.221.139.456</b>
4 05 01	002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		234.846.000		258.330.600
4 05 01	006			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		21.144.000		23.258.400
4 05 01	008			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		156.972.000		172.669.200
4 05 01	009			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		50.900.000		55.990.000
4 05 01	010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		148.278.087		163.105.896
4 05 01	011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		183.771.200		202.148.320
4 05 01	012			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		34.045.200		37.449.720
4 05 01	013			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		122.776.800		135.054.480
4 05 01	014			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		43.059.000		47.364.900
4 05 01	015			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		43.044.000		47.348.400
4 05 01	017			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		159.131.400		175.044.540
4 05 01	018			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		131.250.000		144.375.000
4 05 01	019			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran		690.000.000		759.000.000
<b>4 05 02</b>				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>728.607.200</b>		<b>801.467.920</b>
4 05 02	010			Kegiatan Pengadaan Mebeulair		19.691.200		21.660.320
4 05 02	022			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		50.000.000		55.000.000
4 05 02	024			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		658.916.000		724.807.600
<b>4 05 03</b>				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>37.950.000</b>		<b>41.745.000</b>
4 05 03	002			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		37.950.000		41.745.000
<b>4 05 05</b>				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>70.000.000</b>		<b>77.000.000</b>
4 05 05	004			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur		70.000.000		77.000.000
<b>1</b>				<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>				<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>				<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>83,7 Nilai</b>	<b>838.249.712</b>		<b>922.074.684</b>
1 03 42	014			Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Ruas Jalan dan Drainase yang terpelihara	768.144.712	150 meter	844.959.184
1 03 42	015			Pemeliharaan RTH Kecamatan		30.510.000		33.561.000
1 03 42	016			Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan		39.595.000		43.554.500
<b>2</b>				<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>				<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>				<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.734.038.000</b>		<b>1.907.441.800</b>
2 06 20	001			Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- IKM	51.950.000	80.5 Nilai	57.145.000
2 06 20	002			Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT RW Terbina	1.682.088.000	100 %	1.850.296.800
<b>2 07</b>				<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>				<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>3 RW</b>	<b>8.583.468.675</b>		<b>9.441.815.543</b>
2 07 26	001			Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah RW Unggul	6.830.336.275	9 RW	7.513.369.903

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK			599.002.700		658.902.970
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna			563.108.150		619.418.965
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM			591.021.550		650.123.705
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>2.533.627.580</b>		<b>2.786.990.338</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan			75.531.000		83.084.100
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	5 RT/RW	1.318.154.580	5 RT/RW	1.449.970.038
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			503.523.000		553.875.300
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial			603.384.000		663.722.400
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan			33.035.000		36.338.500

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.21 Kecamatan Bandung Kulon

Total Pagu : 20.977.036.596

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
4			Urusan Penunjang						
4	05		Fungsi Penunjang Lainnya						
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 laporan	1.887.117.378		2.075.829.116	
4	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	212.812.228	12 laporan	234.093.451	
4	05	01	003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	5.500.000	12 laporan	6.050.000	
4	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya - Jumlah Unit Kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya	3 Unit 3 Unit	23.035.200	3 Unit 3 Unit	25.338.720	
4	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	6.660.000	12 Jasa Bulanan	7.326.000	
4	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 laporan	51.910.000	12 laporan	57.101.000	
4	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	143.903.780	12 laporan	158.294.158	
4	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 laporan	49.349.570	12 laporan	54.284.527	
4	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	3 laporan	27.051.200	3 laporan	29.756.320	
4	05	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	112.157.600	2 jenis	123.373.360	
4	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	4 laporan	45.909.800	4 laporan	50.500.780	
4	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	15.664.000	12 laporan	17.230.400	
4	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman Terealisasi	12 laporan	112.820.000	12 laporan	124.102.000	
4	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	50.000.000	12 laporan	55.000.000	
4	05	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	1.030.344.000	12 laporan	1.133.378.400	
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana apaatur dalam kondisi baik	100 %	1.305.899.113		1.436.489.024	
4	05	02	010 Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	5 Jenis	125.369.950	5 Jenis	137.906.945	
4	05	02	012 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur yang terrealisasi	2 unit	53.417.633	2 unit	58.759.396	
4	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit	262.566.930	1 Unit	288.823.623	
4	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Dinas Terpelihara	5 Unit	809.544.600	5 Unit	890.499.060	
4	05	02	042 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor			55.000.000		60.500.000	
4	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	100 %	67.250.000		73.975.000	
4	05	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya terrealisasi	80 Stel	63.250.000	80 Stel	69.575.000	
4	05	03	005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu terrealisasi	80 Stel	4.000.000	80 Stel	4.400.000	
4	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100 %	86.007.000		94.607.700	
4	05	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	1 Paket	86.007.000	1 Paket	94.607.700	
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Persentase Minimal Ruas Jalan, RTH dan Saluran Dalam Kondisi Baik	83,7 Nilai	1.714.192.073		1.885.611.280	
1	03	42	014 Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	2000 Luas/M2	1.702.762.073	2000 Luas/M2	1.873.038.280	
1	03	42	015 Pemeliharaan RTH Kecamatan	- luas RTH kecamatan terpelihara	3500 M2	5.540.000	3500 M2	6.094.000	
1	03	42	016 Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	3500 M2	5.890.000	3500 M2	6.479.000	
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2	06	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100 %	2.422.465.000		2.664.711.500	

2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	3 laporan	326.285.000	3 laporan	358.913.500
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW			2.096.180.000		2.305.798.000
<b>2</b>	<b>07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>10.638.542.532</b>		<b>11.702.396.785</b>
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	8 sub kegiatan	8.249.436.232	8 sub kegiatan	9.074.379.855
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	4 Dokumen	799.003.850	4 Dokumen	878.904.235
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah Sub KegiatanPemberdayaan Lingkup Karang Taruna	9 sub kegiatan	791.021.550	9 sub kegiatan	870.123.705
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	15 sub kegiatan	799.080.900	15 sub kegiatan	878.988.990
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>28</b>		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat Dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>2.855.563.500</b>		<b>3.141.119.850</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Pembentukan koperasi di tempat ibadah	1 Kelompok	65.070.000	1 Kelompok	71.577.000
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	8 RW	1.703.415.000	8 RW	1.873.756.500
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	25 orang	106.223.000	25 orang	116.845.300
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader RW siaga	1 Kelompok	909.110.000	1 Kelompok	1.000.021.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	2 laporan	71.745.500	2 laporan	78.920.050



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.22 Kecamatan Regol

Total Pagu : 17.302.655.535

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
4			Usuran Penunjang						
4	05		Fungsi Penunjang Lainnya						
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 laporan	1.923.719.805		2.116.091.786	
4	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	260.397.700	12 Bulan	286.437.470	
4	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			17.337.830		19.071.613	
4	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	165.372.000	12 Jasa Bulanan	181.909.200	
4	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 laporan	69.310.000	12 laporan	76.241.000	
4	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	141.455.400	12 laporan	155.600.940	
4	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 laporan	95.782.775	12 laporan	105.361.053	
4	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 laporan	29.905.500	1 laporan	32.896.050	
4	05	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			177.664.900		195.431.390	
4	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	36.494.100	12 laporan	40.143.510	
4	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	12.829.000	12 laporan	14.111.900	
4	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 laporan	227.170.600	12 laporan	249.887.660	
4	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			150.000.000		165.000.000	
4	05	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	540.000.000	12 laporan	594.000.000	
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	1.135.999.060		1.249.598.966	
4	05	02	010 Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Kegiatan Pengadaan Mebeulair	1 Jenis	50.973.260	1 Jenis	56.070.586	
4	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Unit	193.813.800	2 Unit	213.195.180	
4	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			647.344.000		712.078.400	
4	05	02	042 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah gedung yang direhab	1 Unit	243.868.000	1 Unit	268.254.800	
4	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100 %	23.625.000		25.987.500	
4	05	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya	66 Stel	23.625.000	66 Stel	25.987.500	
4	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100 %	73.732.000		81.105.200	
4	05	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	66 orang	73.732.000	66 orang	81.105.200	
1			Usuran Wajib Pelayanan Dasar						
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum		83,7 Nilai	821.329.430		903.462.373	
1	03	42	014 Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	1500 m2	558.997.430	1500 m2	614.897.173	
1	03	42	015 Pemeliharaan RTH Kecamatan			150.000.000		165.000.000	
1	03	42	016 Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan			112.332.000		123.565.200	
2			Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2	06	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		100 %	1.951.239.200		2.146.363.120	
2	06	20	001 Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan			206.786.400		227.465.040	
2	06	20	002 Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	9 RW	1.744.452.800	9 RW	1.918.898.080	
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2	07	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan		3 RW	9.234.767.640		10.158.244.404	
2	07	26	001 Pemberdayaan Lingkup RW			7.170.443.740		7.887.488.114	
2	07	26	002 Pemberdayaan lingkup PKK	- Pemberdayaan Lingkup PKK	35 sub kegiatan	685.192.900	35 sub kegiatan	753.712.190	
2	07	26	003 Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	17 sub kegiatan	690.640.800	17 sub kegiatan	759.704.880	

2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM			688.490.200		757.339.220
2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan		1 kegiatan	2.138.243.400		2.352.067.740
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan			15.295.000		16.824.500
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	7 RW	1.405.995.000	7 RW	1.546.594.500
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			139.350.900		153.285.990
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	99 orang	526.292.000	99 orang	578.921.200
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan			51.310.500		56.441.550

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.23 Kecamatan Lengkong

Total Pagu : 18.239.006.689

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 05</b>			<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>				
<b>1 05 15</b>			<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>6 -</b>	<b>1.299.870.090</b>		<b>1.429.857.099</b>
1 05 15 005			Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan		1.299.870.090		1.429.857.099
<b>1 06</b>			<b>Sosial</b>				
<b>1 06 33</b>			<b>Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>4 RW</b>	<b>616.176.000</b>		<b>677.793.600</b>
1 06 33 001			Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan		616.176.000		677.793.600
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 01</b>			<b>Perencanaan</b>				
<b>4 01 31</b>			<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>85 %</b>	<b>103.341.000</b>		<b>113.675.100</b>
4 01 31 001			Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan		103.341.000		113.675.100
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>12 laporan</b>	<b>1.587.028.125</b>		<b>1.745.730.938</b>
4 05 01 002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		252.314.400		277.545.840
4 05 01 006			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		28.303.800		31.134.180
4 05 01 008			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		163.143.500		179.457.850
4 05 01 009			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		26.915.000		29.606.500
4 05 01 010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		141.733.300		155.906.630
4 05 01 011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		65.610.250		72.171.275
4 05 01 012			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		22.479.700		24.727.670
4 05 01 013			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		62.499.200		68.749.120
4 05 01 014			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		37.949.800		41.744.780
4 05 01 015			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		31.526.700		34.679.370
4 05 01 017			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		257.903.500		283.693.850
4 05 01 018			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		140.000.000		154.000.000
4 05 01 019			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran		356.648.975		392.313.873
<b>4 05 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>811.652.800</b>		<b>892.818.080</b>
4 05 02 012			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur		39.142.100		43.056.310
4 05 02 022			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		140.749.700		154.824.670
4 05 02 024			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		600.011.000		660.012.100
4 05 02 026			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		31.750.000		34.925.000
<b>4 05 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>97.575.092</b>		<b>107.332.601</b>
4 05 05 004			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur		97.575.092		107.332.601
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>			<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.383.626.500</b>		<b>1.521.989.150</b>
1 03 42 014			Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan		1.343.835.800		1.478.219.380
1 03 42 015			Pemeliharaan RTH Kecamatan		39.790.700		43.769.770
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>			<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>1.850.778.300</b>		<b>2.035.856.130</b>
2 06 20 001			Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan		107.849.100		118.634.010

2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW			1.742.929.200		1.917.222.120
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		1 RW	276.534.000		304.187.400
2	07	25	005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			276.534.000		304.187.400
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		3 RW	10.146.217.382		11.160.839.120
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW			8.078.268.382		8.886.095.220
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK			689.663.500		758.629.850
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna			688.200.800		757.020.880
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM			690.084.700		759.093.170
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM		10 UMKM	66.207.400		72.828.140
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan			66.207.400		72.828.140

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.24 Kecamatan Batununggal

Total Pagu : 22.419.063.919

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>2.736.965.900</b>	<b>3.010.662.490</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	12 Jasa Bulanan	335.968.300	12 Jasa Bulanan	369.565.130
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Unit Kendaraan Yang dibayarkan jasa perijinannya	6 Unit	27.148.200	6 Unit	29.863.020
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			7.200.000		7.920.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Unit Peralatan Kerja Yang Diperbaiki	19 Unit	101.696.400	19 Unit	111.866.040
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Penyediaan ATK	4 laporan	205.390.200	4 laporan	225.929.220
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			109.035.250		119.938.775
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	4 laporan	34.635.500	4 laporan	38.099.050
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 laporan	318.349.650	5 laporan	350.184.615
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	41.050.200	12 laporan	45.155.220
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	4 laporan	131.494.000	4 laporan	144.643.400
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman	2 laporan	408.374.200	2 laporan	449.211.620
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			200.000.000		220.000.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran			816.624.000		898.286.400
<b>4 05 02</b>	<b>02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasana dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>863.106.819</b>		<b>949.417.501</b>
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 gedung	235.475.919	1 gedung	259.023.511
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas operasional terpelihara	19 Unit	597.630.900	19 Unit	657.393.990
4 05 02	026	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			30.000.000		33.000.000
<b>4 05 03</b>	<b>03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Prasarana	<b>100 %</b>	<b>40.000.000</b>		<b>44.000.000</b>
4 05 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	1 laporan	40.000.000	1 laporan	44.000.000
<b>4 05 05</b>	<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>100.000.000</b>		<b>110.000.000</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah laporan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 laporan	100.000.000	1 laporan	110.000.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>	<b>42</b>	<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.466.307.096</b>		<b>1.612.937.806</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase Kelurahan/Kecamatan Terpelihara	1 laporan	1.332.601.096	1 laporan	1.465.861.206
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH Kecamatan Terpelihara	500 M2	21.369.000	500 M2	23.505.900
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panja Kerb Jalan Terpelihara	1 laporan	112.337.000	1 laporan	123.570.700
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>	<b>20</b>	<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	<b>100 %</b>	<b>2.608.619.800</b>		<b>2.869.481.780</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	7 jenis	59.174.000	7 jenis	65.091.400
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW yang mendapatkan Pembinaan	58 orang	2.549.445.800	58 orang	2.804.390.380
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>	<b>26</b>	<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>12.775.713.200</b>		<b>14.053.284.520</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	14 sub kegiatan	10.376.035.900	14 sub kegiatan	11.413.639.490
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	8 sub kegiatan	800.114.100	8 sub kegiatan	880.125.510
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	16 sub kegiatan	799.864.200	16 sub kegiatan	879.850.620
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	10 sub kegiatan	799.699.000	10 sub kegiatan	879.668.900

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Peran Kelembagaan dan Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1 kegiatan	1.828.351.104		2.011.186.214
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan			63.235.000		69.558.500
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah rata-rata RW yang memiliki Siskamling aktif dan Relawan Bencana	11 RW	808.465.104	11 RW	889.311.614
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader Pemberdayaan Kewilayahan Aktif	48 orang	396.406.000	48 orang	436.046.600
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah Kelompok/Kader/Lembaga yang mengikuti lomba tk. kota	12 Kelompok	489.505.000	12 Kelompok	538.455.500
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	1 laporan	70.740.000	1 laporan	77.814.000

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.25 Kecamatan Ujungberung

Total Pagu : 15.768.957.185

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.348.173.105</b>	<b>1.482.990.416</b>
4 05 01 002		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 laporan	179.006.100	12 laporan	196.906.710
4 05 01 006		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	39 Unit	14.050.000	39 Unit	15.455.000
4 05 01 008		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Laporan Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 laporan bulanan	34.500.000	12 laporan bulanan	37.950.000
4 05 01 009		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Unit Alat Kerja yang di perbaiki	4 Unit	42.450.000	4 Unit	46.695.000
4 05 01 010		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Laporan Bulanan Alat Tulis Kantor	12 laporan bulanan	149.179.810	12 laporan bulanan	164.097.791
4 05 01 011		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah Laporan penyediaan Cetak dan Penggandaan	12 laporan	87.984.995	12 laporan	96.783.495
4 05 01 012		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 laporan	17.530.100	4 laporan	19.283.110
4 05 01 013		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			37.859.360		41.645.296
4 05 01 014		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Laporan Bulanan Alat Tulis Kantor - Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9 laporan 6 laporan	60.862.740	9 laporan 6 laporan	66.949.014
4 05 01 015		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			16.347.600		17.982.360
4 05 01 017		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 laporan	150.402.400	12 laporan	165.442.640
4 05 01 018		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 laporan	75.000.000	5 laporan	82.500.000
4 05 01 019		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	483.000.000	12 laporan	531.300.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana Prasarana aparatur dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>956.563.400</b>		<b>1.052.219.740</b>
4 05 02 010		Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Dokumen Pengadaan Mebeulair	1 Dokumen	106.020.640	1 Dokumen	116.622.704
4 05 02 012		Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	- Jumlah Dokumen Pengadaan perlengkapan apratur	1 Dokumen	176.049.280	1 Dokumen	193.654.208
4 05 02 022		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah laporan pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 laporan	175.327.080	1 laporan	192.859.788
4 05 02 024		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	39 Unit	499.166.400	39 Unit	549.083.040
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>85.494.750</b>		<b>94.044.225</b>
4 05 03 005		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	75 Stel	85.494.750	75 Stel	94.044.225
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	<b>100 %</b>	<b>95.770.400</b>		<b>105.347.440</b>
4 05 05 004		Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 kegiatan	95.770.400	1 kegiatan	105.347.440
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Prosentase Minimal Ruas Jalan, Kerb, RTH dan Saluran dalam Kondisi Terpelihara	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.585.007.250</b>		<b>1.743.507.975</b>
1 03 42 014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- panjang drainase terpelihara - Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	0 meter 0 meter	1.528.874.000	0 meter 0 meter	1.681.761.400
1 03 42 015		Pemeliharaan RTH Kecamatan			12.400.000		13.640.000
1 03 42 016		Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb jalan terpelihara	675 M2	43.733.250	675 M2	48.106.575
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	<b>100 %</b>	<b>1.555.673.700</b>		<b>1.711.241.070</b>
2 06 20 001		Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- IKM Layanan Kependudukan	83,2 Nilai	28.637.000	83,2 Nilai	31.500.700
2 06 20 002		Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT RW Terbina	100 %	1.527.036.700	100 %	1.679.740.370
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>8.489.467.150</b>		<b>9.338.413.865</b>
2 07 26 001		Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah RW Unggul	0 RW	7.201.200.390	0 RW	7.921.320.429

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Persentase PKK Unggul	0 %	433.821.200	0 %	477.203.320
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Persentase Karang Taruna Unggul	0 %	462.275.470	0 %	508.503.017
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Persentase LPM Unggul	0 %	392.170.090	0 %	431.387.099
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>1.652.807.430</b>		<b>1.818.088.173</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan			10.690.000		11.759.000
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah siskamling aktif di tiap RW	9 -	984.589.230	9 -	1.083.048.153
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	0 RW 0 Posyandu	95.228.500	0 RW 0 Posyandu	104.751.350
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah RW siaga - Jumlah Kagana kelurahan	0 RW 0 Kelompok	540.824.700	0 RW 0 Kelompok	594.907.170
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah Kegiatan musrenbang	1 Kegiatan	21.475.000	1 Kegiatan	23.622.500



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.26 Kecamatan Kiaracondong

Total Pagu : 22.234.950.069

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>					
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>					
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	<b>12 laporan</b>	<b>1.875.807.665</b>		<b>2.063.388.432</b>
4 05 01 002			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan bulanan komunikasi, air dan listrik	12 laporan	196.632.400	12 laporan	216.295.640
4 05 01 006			Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	13 Unit	24.634.310	13 Unit	27.097.741
4 05 01 008			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	12 Jasa Bulanan	180.408.000	12 Jasa Bulanan	198.448.800
4 05 01 009			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang diperbaiki terselesaikan	7 Unit	67.416.500	7 Unit	74.158.150
4 05 01 010			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan penyediaan ATK	2 laporan	162.785.650	2 laporan	179.064.215
4 05 01 011			Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	12 laporan	131.197.675	12 laporan	144.317.443
4 05 01 012			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang terealisasi	2 laporan	22.576.950	2 laporan	24.834.645
4 05 01 013			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	0 laporan	18.587.800	0 laporan	20.446.580
4 05 01 014			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga yang terealisasi	2 laporan	25.143.780	2 laporan	27.658.158
4 05 01 015			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan yang terealisasi	4 laporan	33.871.600	4 laporan	37.258.760
4 05 01 017			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman yang terealisasi	12 laporan	175.753.000	12 laporan	193.328.300
4 05 01 018			Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan kordinasi dan konsultasi keluar daerah	0 laporan	85.000.000	0 laporan	93.500.000
4 05 01 019			Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	12 laporan	751.800.000	12 laporan	826.980.000
<b>4 05 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Kiaracondong	<b>100 %</b>	<b>683.677.300</b>		<b>752.045.030</b>
4 05 02 022			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	0 Unit	26.459.100	0 Unit	29.105.010
4 05 02 024			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	16 Unit	657.218.200	16 Unit	722.940.020
<b>4 05 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Kiaracondong	<b>100 %</b>	<b>33.000.000</b>		<b>36.300.000</b>
4 05 03 002			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Jenis	33.000.000	1 Jenis	36.300.000
<b>4 05 05</b>			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Kiaracondong	<b>100 %</b>	<b>75.000.000</b>		<b>82.500.000</b>
4 05 05 004			Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah paket kegiatan pembinaan kinerja aparatur	1 Paket	75.000.000	1 Paket	82.500.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
<b>1 03 42</b>			<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase Keluruhan Unggul	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.691.080.020</b>		<b>1.860.188.022</b>
1 03 42 014			Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang drainase terpelihara	5600 meter	1.490.602.450	5600 meter	1.639.662.695
1 03 42 015			Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH Kecamatan terpelihara	420 m2	157.255.820	420 m2	172.981.402
1 03 42 016			Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb bahu jalan terpelihara	700 meter	43.221.750	700 meter	47.543.925
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
<b>2 06 20</b>			<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kiaracondong	<b>100 %</b>	<b>2.723.494.200</b>		<b>2.995.843.620</b>
2 06 20 001			Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar nominatif pelayanan lengkap	100.00 %	78.694.200	100.00 %	86.563.620
2 06 20 002			Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapat pembinaan	12 RW	2.644.800.000	12 RW	2.909.280.000
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>2 07 26</b>			<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>12.420.653.164</b>		<b>13.662.718.481</b>
2 07 26 001			Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	48 sub kegiatan	10.621.980.304	48 sub kegiatan	11.684.178.335
2 07 26 002			Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	4 sub kegiatan	600.250.200	4 sub kegiatan	660.275.220

2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	5 sub kegiatan	599.945.300	5 sub kegiatan	659.939.830
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	3 sub kegiatan	598.477.360	3 sub kegiatan	658.325.096
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase Kelurahan Unggul	<b>1 kegiatan</b>	<b>2.732.237.720</b>		<b>3.005.461.492</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah	1 Kelompok	28.975.600	1 Kelompok	31.873.160
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	9 RW	1.649.944.420	9 RW	1.814.938.862
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah kader pemberdayaan kewilayahan aktif	16 orang	274.054.200	16 orang	301.459.620
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	1 Kelompok	751.571.000	1 Kelompok	826.728.100
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan			27.692.500		30.461.750

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.27 Kecamatan Arcamanik

Total Pagu : 13.813.944.674

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.276.964.950</b>	<b>1.404.661.445</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	101.259.200	100 %	111.385.120
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			18.234.500		20.057.950
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	137.760.000	100 %	151.536.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			82.250.000		90.475.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	98.403.200	100 %	108.243.520
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			74.712.850		82.184.135
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	39.973.300	100 %	43.970.630
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	113.025.600	100 %	124.328.160
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 %	39.354.800	100 % 100 %	43.290.280
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10.974.000	100 %	12.071.400
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	105.017.500	100 %	115.519.250
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			90.000.000		99.000.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran			366.000.000		402.600.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>632.075.584</b>		<b>695.283.142</b>
4 05 02	010	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- - Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	% 100 %	61.752.984	% 100 %	67.928.282
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100 %	109.810.600	100 %	120.791.660
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Persentase sarana dan prasana aparatur dalam kondisi baik	100 %	423.012.000	100 %	465.313.200
4 05 02	042	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	37.500.000	100 %	41.250.000
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>44.988.000</b>		<b>49.486.800</b>
4 05 03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100 %	44.988.000	100 %	49.486.800
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>61.886.800</b>		<b>68.075.480</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Persentase pembinaan kinerja aparatur	100 %	61.886.800	100 %	68.075.480
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>		<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.241.558.749</b>		<b>1.365.714.624</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondsi baik	100 %	1.090.759.630	100 %	1.199.835.593
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondsi baik	100 %	136.141.119	100 %	149.755.231
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	100 %	14.658.000	100 %	16.123.800
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>		<b>100 %</b>	<b>1.406.977.250</b>		<b>1.547.674.975</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Inndeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 Nilai	63.654.250	80 Nilai	70.019.675
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	1.343.323.000	80 %	1.477.655.300
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>		<b>3 RW</b>	<b>7.574.616.066</b>		<b>8.332.077.673</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- - Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	% 79 %	6.374.745.016	% 79 %	7.012.219.518
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	75 %	399.987.600	75 %	439.986.360

2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	79 %	399.894.550	79 %	439.884.005
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	79 %	399.988.900	79 %	439.987.790
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>		<b>1 kegiatan</b>	<b>1.574.877.275</b>		<b>1.732.365.003</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	75 %	49.719.375	75 %	54.691.313
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	75 %	911.493.900	75 %	1.002.643.290
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	75 %	175.806.000	75 %	193.386.600
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial			423.443.000		465.787.300
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	75 %	14.415.000	75 %	15.856.500

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.28 Kecamatan Cibiru

Total Pagu : 14.060.689.049

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.359.147.600</b>	<b>1.495.062.360</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Jasa Bulanan	171.750.525	12 Jasa Bulanan	188.925.578
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	39 Unit	21.324.900	39 Unit	23.457.390
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	75.600.000	12 Jasa Bulanan	83.160.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	8 Unit	42.300.000	8 Unit	46.530.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	6 laporan	124.091.200	6 laporan	136.500.320
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	12 laporan	108.821.200	12 laporan	119.703.320
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	1 laporan	24.390.550	1 laporan	26.829.605
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	1 laporan	44.540.800	1 laporan	48.994.880
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	2 laporan	37.450.425	2 laporan	41.195.468
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	12.368.000	12 laporan	13.604.800
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terealisasi	8 laporan	185.710.000	8 laporan	204.281.000
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	11 laporan	80.000.000	11 laporan	88.000.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 Jasa Bulanan	430.800.000	12 Jasa Bulanan	473.880.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>513.612.000</b>		<b>564.973.200</b>
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional terpelihara	39 Unit	513.612.000	39 Unit	564.973.200
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>27.603.125</b>		<b>30.363.438</b>
4 05 03	005	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	55 Stel	27.603.125	55 Stel	30.363.438
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>74.606.000</b>		<b>82.066.600</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Kegiatan	74.606.000	1 Kegiatan	82.066.600
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>876.894.915</b>		<b>964.584.407</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	12 M2	684.267.965	12 M2	752.694.762
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luas RTH kecamatan terpelihara	12554 M2	163.795.400	12554 M2	180.174.940
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	890 M2	28.831.550	890 M2	31.714.705
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>100 %</b>	<b>1.475.764.600</b>		<b>1.623.341.060</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	8 laporan	74.133.600	8 laporan	81.546.960
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	53 RW	1.401.631.000	53 RW	1.541.794.100
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>7.760.001.059</b>		<b>8.536.001.165</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	65 sub kegiatan	6.560.003.109	65 sub kegiatan	7.216.003.420
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	12 sub kegiatan	399.998.100	12 sub kegiatan	439.997.910
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	10 sub kegiatan	399.999.900	10 sub kegiatan	439.999.890
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	6 sub kegiatan	399.999.950	6 sub kegiatan	439.999.945

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kegiatan	1.973.059.750		2.170.365.725
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- jumlah koperasi di tempat ibadah	4 Koperasi	73.906.000	4 Koperasi	81.296.600
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	14 RW	1.224.090.000	14 RW	1.346.499.000
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	375 orang	575.178.000	375 orang	632.695.800
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader RW siaga	17 Kelompok	69.899.000	17 Kelompok	76.888.900
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	100 orang	29.986.750	100 orang	32.985.425

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.29 Kecamatan Antapani

Total Pagu : 15.693.213.990

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 -	1.237.052.600		1.360.757.860	
1	05	15	005 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	24 RW	1.237.052.600	24 RW	1.360.757.860	
1	06		Sosial						
1	06	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Prosentase lembaga kesejahteraan sosial yang berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	4 RW	502.541.500		552.795.650	
1	06	33	001 Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/kader RW siaga	1 orang	502.541.500	1 orang	552.795.650	
4			Urusan Penunjang						
4	01		Perencanaan						
4	01	31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan pembangunan di tingkat Kecamatan dan keluarahan	85 %	48.967.750		53.864.525	
4	01	31	001 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	30 orang	48.967.750	30 orang	53.864.525	
4	05		Fungsi Penunjang Lainnya						
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 laporan	1.387.377.600		1.526.115.360	
4	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Jasa Bulanan	330.120.400	12 Jasa Bulanan	363.132.440	
4	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraanyang dibayarkan jasa perizinannya	45 Unit	10.508.000	45 Unit	11.558.800	
4	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	3.600.000	12 Jasa Bulanan	3.960.000	
4	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	19 Unit	24.799.200	19 Unit	27.279.120	
4	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	144.293.600	12 laporan	158.722.960	
4	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 laporan	96.230.300	12 laporan	105.853.330	
4	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	2 laporan	29.038.100	2 laporan	31.941.910	
4	05	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	1 laporan	44.824.500	1 laporan	49.306.950	
4	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 laporan	44.414.500	12 laporan	48.855.950	
4	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	13.976.000	12 laporan	15.373.600	
4	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 laporan	210.573.000	12 laporan	231.630.300	
4	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 laporan	75.000.000	4 laporan	82.500.000	
4	05	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	360.000.000	12 laporan	396.000.000	
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	100 %	719.701.850		791.672.035	
4	05	02	010 Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Mebeulair	4 Jenis	68.582.250	4 Jenis	75.440.475	
4	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 laporan	128.609.600	1 laporan	141.470.560	
4	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	36 Unit	462.510.000	36 Unit	508.761.000	
4	05	02	026 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 laporan	60.000.000	1 laporan	66.000.000	
4	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	100 %	39.380.000		43.318.000	
4	05	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	54 Stel	39.380.000	54 Stel	43.318.000	
4	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	49.792.600		54.771.860	
4	05	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	1 Paket	49.792.600	1 Paket	54.771.860	
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

1	03	42		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.118.797.150</b>		<b>1.230.676.865</b>
1	03	42	014	<i>Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan</i>	- Panjang Drainase terpelihara	1500 meter	1.013.399.650	1500 meter	1.114.739.615
1	03	42	015	<i>Pemeliharaan RTH Kecamatan</i>	- Luas RTH kecamatan terpelihara	120 m2	77.706.260	120 m2	85.476.886
1	03	42	016	<i>Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan</i>			27.691.240		30.460.364
2				<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
2	06			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
2	06	20		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Cakupan Pelayanan administrasi kependudukan	<b>100 %</b>	<b>1.691.596.000</b>		<b>1.860.755.600</b>
2	06	20	001	<i>Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan</i>	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	5 laporan	69.968.000	5 laporan	76.964.800
2	06	20	002	<i>Kegiatan Pembinaan RT RW</i>	- Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	100 %	1.621.628.000	100 %	1.783.790.800
2	07			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
2	07	25		<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 RW</b>	<b>135.832.200</b>		<b>149.415.420</b>
2	07	25	005	<i>Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan</i>	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	85 orang	135.832.200	85 orang	149.415.420
2	07	26		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>8.738.464.540</b>		<b>9.612.310.994</b>
2	07	26	001	<i>Pemberdayaan Lingkup RW</i>	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	36 sub kegiatan	7.556.708.570	36 sub kegiatan	8.312.379.427
2	07	26	002	<i>Pemberdayaan lingkup PKK</i>	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	8 sub kegiatan	399.746.200	8 sub kegiatan	439.720.820
2	07	26	003	<i>Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna</i>	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	9 sub kegiatan	395.872.700	9 sub kegiatan	435.459.970
2	07	26	004	<i>Pemberdayaan Lingkup LPM</i>	- Jumlah Sub KegiatanP emberdayaan Lingkup LPM	7 sub kegiatan	386.137.070	7 sub kegiatan	424.750.777
2	11			<b>Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</b>					
2	11	25		<b>Pemberdayaan KUMKM</b>	Persentase Koperasi dan UKM Aktif	<b>10 UMKM</b>	<b>23.710.200</b>		<b>26.081.220</b>
2	11	25	001	<i>Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan</i>	- pembentukan koperasi di tempat ibadah	22 Kelompok	23.710.200	22 Kelompok	26.081.220



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.30 Kecamatan Rancasari

Total Pagu : 14.461.004.019

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	05		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	05	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6 -	1.275.000.100		1.402.500.110	
1	05	15	005 Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	25 RW	1.275.000.100	25 RW	1.402.500.110
1	06		Sosial					
1	06	33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	4 RW	464.438.000		510.881.800	
1	06	33	001 Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	- Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	6 Kader	464.438.000	6 Kader	510.881.800
4			Urusan Penunjang					
4	01		Perencanaan					
4	01	31	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	85 %	28.374.000		31.211.400	
4	01	31	001 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	1 laporan	28.374.000	1 laporan	31.211.400
4	05		Fungsi Penunjang Lainnya					
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 laporan	2.000.701.770		2.200.771.947	
4	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	269.120.000	12 laporan	296.032.000
4	05	01	003 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000		33.000.000
4	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			30.411.800		33.452.980
4	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	192.815.000	12 Jasa Bulanan	212.096.500
4	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			95.500.000		105.050.000
4	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor			226.986.260		249.684.886
4	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 laporan	60.696.650	12 laporan	66.766.315
4	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			16.704.140		18.374.554
4	05	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.586.140		28.144.754
4	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 laporan	35.178.120	12 laporan	38.695.932
4	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	8.412.000	12 laporan	9.253.200
4	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 laporan	187.291.660	12 laporan	206.020.826
4	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	90.000.000	12 laporan	99.000.000
4	05	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran			732.000.000		805.200.000
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	594.642.710		654.106.981	
4	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit	74.986.450	1 Unit	82.485.095
4	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	12 Unit	519.656.260	12 Unit	571.621.886
4	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	38.500.000		42.350.000	
4	05	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	- Jumlah pakaian dinas berserta kelengkapannya terrealisasi	60 Stel	38.500.000	60 Stel	42.350.000
4	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	75.000.000		82.500.000	
4	05	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah peserta kegiatan pembinaan aparatur	60 Org	75.000.000	60 Org	82.500.000
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar					
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	83,7 Nilai	992.816.940		1.092.098.634	
1	03	42	014 Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara	46250 meter	992.816.940	46250 meter	1.092.098.634
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

2	06	20		Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan		100 %	1.785.600.000		1.964.160.000
2	06	20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan			213.000.000		234.300.000
2	06	20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT dan RW yang mendapatkan pembinaan	52 RW	1.572.600.000	52 RW	1.729.860.000
2	07			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2	07	25		Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat		1 RW	157.516.600		173.268.260
2	07	25	002	Penguatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	185 Org	157.516.600	185 Org	173.268.260
2	07	26		Program Pemberdayaan Kewilayahan		3 RW	7.031.886.899		7.735.075.589
2	07	26	001	Pemberdayaan Lingkup RW			5.942.096.099		6.536.305.709
2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	52 sub kegiatan	397.500.000	52 sub kegiatan	437.250.000
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna			382.955.800		421.251.380
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM			309.335.000		340.268.500
2	11			Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah					
2	11	25		Pemberdayaan KUMKM		10 UMKM	16.527.000		18.179.700
2	11	25	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- jumlah koperasi di tempat ibadah	4 Koperasi	16.527.000	4 Koperasi	18.179.700

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.31 Kecamatan Buahbatu

Total Pagu : 15.257.308.790

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.550.763.935</b>	<b>1.705.840.329</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 kegiatan	121.636.800	12 kegiatan	133.800.480
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	105 Unit	29.957.000	105 Unit	32.952.700
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			154.572.000		170.029.200
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Jasa Bulanan	55.695.000	12 Jasa Bulanan	61.264.500
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah kegiatan penyediaan ATK	12 Kegiatan	150.666.795	12 Kegiatan	165.733.475
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan	12 kegiatan	113.362.200	12 kegiatan	124.698.420
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan	12 Bulan	18.660.200	12 Bulan	20.526.220
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kantor	12 Bulan	103.082.340	12 Bulan	113.390.574
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	64.621.800	12 Bulan	71.083.980
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah jenis bahan bacaan	15 Jenis	23.104.000	15 Jenis	25.414.400
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	188.212.600	12 Bulan	207.033.860
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	125.000.000	12 Bulan	137.500.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung	12 kegiatan	402.193.200	12 kegiatan	442.412.520
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>586.610.050</b>		<b>645.271.055</b>
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	1 Paket	167.710.050	1 Paket	184.481.055
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100 %	418.900.000	100 %	460.790.000
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai	<b>100 %</b>	<b>35.200.000</b>		<b>38.720.000</b>
4 05 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lengkap	60 bh	35.200.000	60 bh	38.720.000
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>60.000.000</b>		<b>66.000.000</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah kegiatan pembinaan kinerja aparatur	1 Paket	60.000.000	1 Paket	66.000.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase Minimal Ruas Jalan dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.595.209.960</b>		<b>1.754.730.956</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Luasan Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	12 Jasa Bulanan	1.171.174.100	12 Jasa Bulanan	1.288.291.510
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Luasan RTH kecamatan terpelihara	12 M2	204.022.760	12 M2	224.425.036
1 03 42	016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	1000 M2	220.013.100	1000 M2	242.014.410
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	<b>100 %</b>	<b>1.778.774.600</b>		<b>1.956.652.060</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	78 Nilai	50.517.000	78 Nilai	55.568.700
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	7 RW	1.728.257.600	7 RW	1.901.083.360
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Persentase Hasil Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>8.074.941.445</b>		<b>8.882.435.589</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup RW	38 sub kegiatan	6.874.953.245	38 sub kegiatan	7.562.448.569
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	32 sub kegiatan	399.999.900	32 sub kegiatan	439.999.890
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	91 sub kegiatan	399.992.000	91 sub kegiatan	439.991.200
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup LPM	68 sub kegiatan	399.996.300	68 sub kegiatan	439.995.930
<b>2 07 28</b>		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>1.575.808.800</b>		<b>1.733.389.680</b>

2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah pembentukan koperasi di tempat ibadah	133 UMKM	30.000.000	133 UMKM	33.000.000
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	12 Jasa Bulanan	978.813.000	12 Jasa Bulanan	1.076.694.300
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan			128.070.800		140.877.880
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader RW siaga	77 %	413.500.000	77 %	454.850.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan	200 orang	25.425.000	200 orang	27.967.500

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.32 Kecamatan Bandung Kidul

Total Pagu : 11.343.613.370

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<b>12 laporan</b>	<b>1.513.273.650</b>	<b>1.664.601.015</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	153.066.930	12 laporan	168.373.623
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Laporan Unit kendaraannya dibayarkan jasa perijinannya	12 laporan	12.607.200	12 laporan	13.867.920
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah jasa bulanan kebersihan kantor	12 Bulan	3.600.000	12 Bulan	3.960.000
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah Unit Peralatan Kerja yang diperbaiki yang terealisasi	12 laporan	29.680.000	12 laporan	32.648.000
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan alat tulis kantor	12 laporan	84.366.900	12 laporan	92.803.590
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 laporan	111.305.200	12 laporan	122.435.720
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang terealisasi	12 laporan	15.032.750	12 laporan	16.536.025
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	12 laporan	329.000.260	12 laporan	361.900.286
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 laporan	18.845.610	12 laporan	20.730.171
4 05 01	015	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 laporan	15.890.000	12 laporan	17.479.000
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Laporan Penyediaan Makanan dan Minuman yang terealisasi	12 laporan	179.154.800	12 laporan	197.070.280
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Laporan Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 laporan	120.000.000	1 laporan	132.000.000
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	440.724.000	12 laporan	484.796.400
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>789.252.810</b>		<b>868.178.091</b>
4 05 02	022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 laporan	208.520.810	1 laporan	229.372.891
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Laporan unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	12 laporan	580.732.000	12 laporan	638.805.200
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>74.340.000</b>		<b>81.774.000</b>
4 05 03	002	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Laporan unit kendaraan dinas/operasional terpelihara	12 laporan	74.340.000	12 laporan	81.774.000
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>100 %</b>	<b>81.180.560</b>		<b>89.298.616</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah laporan kegiatan pembinaan aparatur	1 laporan	81.180.560	1 laporan	89.298.616
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Panjang Drainase Kecamatan dan Kelurahan Terpelihara	<b>83,7 Nilai</b>	<b>796.157.400</b>		<b>875.773.140</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang drainase terpelihara	12 laporan	796.157.400	12 laporan	875.773.140
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	<b>100 %</b>	<b>1.025.779.400</b>		<b>1.128.357.340</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan			56.339.400		61.973.340
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapat kanPembinaan	12 laporan	969.440.000	12 laporan	1.066.384.000
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Jumlah RW Unggul	<b>3 RW</b>	<b>5.376.405.100</b>		<b>5.914.045.610</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	100 sub kegiatan	4.185.126.150	100 sub kegiatan	4.603.638.765
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan Pemberdayaan lingkup PKK	51 sub kegiatan	396.568.250	51 sub kegiatan	436.225.075
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	32 sub kegiatan	399.335.400	32 sub kegiatan	439.268.940
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	34 sub kegiatan	395.375.300	34 sub kegiatan	434.912.830

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 Kegiatan Musrenbang	1 kegiatan	1.687.224.450		1.855.946.895
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUMKM aktif di wilayah kelurahan	1 Kelompok	18.064.000	1 Kelompok	19.870.400
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	7 RW	973.834.500	7 RW	1.071.217.950
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan aktif	50 orang	499.952.000	50 orang	549.947.200
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader/lembaga yang mengikuti lomba tk kota	1 Kelompok	151.286.000	1 Kelompok	166.414.600
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan	50 orang	44.087.950	50 orang	48.496.745

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.33 Kecamatan Gedebage

Total Pagu : 12.390.793.288

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.333.668.578</b>	<b>1.467.035.436</b>
4 05 01	002	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi dan listrik	100 %	212.093.500	100 %	233.302.850
4 05 01	006	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	100 %	16.375.500	100 %	18.013.050
4 05 01	008	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	100 %	91.155.300	100 %	100.270.830
4 05 01	009	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah kegiatan jasa perbaikan	100 %	16.809.200	100 %	18.490.120
4 05 01	010	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah kegiatan pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	80.608.864	100 %	88.669.750
4 05 01	011	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	100 %	61.308.700	100 %	67.439.570
4 05 01	012	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			9.182.145		10.100.360
4 05 01	013	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6.674.500		7.341.950
4 05 01	014	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah kegiatan pengadaan penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	21.784.150	100 %	23.962.565
4 05 01	017	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	100 %	75.932.900	100 %	83.526.190
4 05 01	018	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	70.243.819	100 %	77.268.201
4 05 01	019	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung	100 %	671.500.000	100 %	738.650.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	<b>100 %</b>	<b>442.049.000</b>		<b>486.253.900</b>
4 05 02	024	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	100 %	442.049.000	100 %	486.253.900
<b>4 05 05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	<b>100 %</b>	<b>65.000.000</b>		<b>71.500.000</b>
4 05 05	004	Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur			65.000.000		71.500.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase minimal ruas jalan, RTH dan saluran dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.395.353.000</b>		<b>1.534.888.300</b>
1 03 42	014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Luasan Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	400 meter	1.385.838.200	400 meter	1.524.422.020
1 03 42	015	Pemeliharaan RTH Kecamatan			9.514.800		10.466.280
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>100 %</b>	<b>1.654.546.350</b>		<b>1.820.000.985</b>
2 06 20	001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	81.5 Nilai	29.846.350	81.5 Nilai	32.830.985
2 06 20	002	Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	8 RW	1.624.700.000	8 RW	1.787.170.000
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>6.303.602.560</b>		<b>6.933.962.816</b>
2 07 26	001	Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan	24 sub kegiatan	5.103.804.660	24 sub kegiatan	5.614.185.126
2 07 26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan	6 sub kegiatan	399.848.800	6 sub kegiatan	439.833.680
2 07 26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	9 sub kegiatan	399.964.900	9 sub kegiatan	439.961.390
2 07 26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan	2 sub kegiatan	399.984.200	2 sub kegiatan	439.982.620
<b>2 07 28</b>		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>1.196.573.800</b>		<b>1.316.231.180</b>
2 07 28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	2 Bulan	27.325.000	2 Bulan	30.057.500
2 07 28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif dan relawan bencana	30 RW	391.930.000	30 RW	431.123.000
2 07 28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	85 Orang	86.840.000	85 Orang	95.524.000
2 07 28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah kelompok/kader/lembaga yg mengikuti lomba Tk. kota	6 Kelompok	670.478.800	6 Kelompok	737.526.680

2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan			20.000.000		22.000.000
---	----	----	-----	--	--	--	------------	--	------------



**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.34 Kecamatan Panyileukan

Total Pagu : 11.105.271.659

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2	3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>					
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>					
<b>4 05 01</b>	<b>01</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi	<b>12 laporan</b>	<b>807.862.614</b>		<b>888.648.875</b>
4 05 01	002		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			204.606.760		225.067.436
4 05 01	006		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	37 Unit	15.739.200	37 Unit	17.313.120
4 05 01	008		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			154.572.000		170.029.200
4 05 01	009		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			9.480.000		10.428.000
4 05 01	010		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	6 jenis	49.323.910	6 jenis	54.256.301
4 05 01	011		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5.126.424		5.639.066
4 05 01	012		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			2.608.250		2.869.075
4 05 01	013		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			21.595.420		23.754.962
4 05 01	014		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.486.650		2.735.315
4 05 01	015		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			6.780.000		7.458.000
4 05 01	017		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman			5.544.000		6.098.400
4 05 01	019		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis Perkantoran	12 laporan	330.000.000	12 laporan	363.000.000
<b>4 05 02</b>			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Prosentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>651.761.670</b>		<b>716.937.837</b>
4 05 02	003		Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	1 m2	4.828.230	1 m2	5.311.053
4 05 02	005		Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1 Unit	1.430.000	1 Unit	1.573.000
4 05 02	010		Kegiatan Pengadaan Mebeulair	- Jumlah Pengadaan Mebeuleir	1 Buah	408.980	1 Buah	449.878
4 05 02	022		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			43.184.460		47.502.906
4 05 02	024		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37 Unit	601.910.000	37 Unit	662.101.000
<b>4 05 03</b>			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>149.930</b>		<b>164.923</b>
4 05 03	002		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	1 Buah	43.670	1 Buah	48.037
4 05 03	005		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	3 Buah	106.260	3 Buah	116.886
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
<b>1 03 42</b>			<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	NProsentase Minimal Ruas Jalan dan Saluran dalam Kondisi Bersih	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.291.734.665</b>		<b>1.420.908.132</b>
1 03 42	014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- panjang drainase terpelihara - Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	12539 meter 10000 meter	1.125.394.385	12539 meter 10000 meter	1.237.933.824
1 03 42	015		Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Panjang Ruas Jalan Terpelihara	44 lokasi	163.188.780	44 lokasi	179.507.658
1 03 42	016		Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb jalan yang terpeliharan	0 m	3.151.500	0 m	3.466.650
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
<b>2 06 20</b>			<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>100 %</b>	<b>911.825.000</b>		<b>1.003.007.500</b>
2 06 20	001		Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- BACA	1 Dokumen	11.685.000	1 Dokumen	12.853.500
2 06 20	002		Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT RW Terbina	100 %	900.140.000	100 %	990.154.000
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>2 07 26</b>			<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>5.824.676.380</b>		<b>6.407.144.018</b>
2 07 26	001		Pemberdayaan Lingkup RW	- Persentase RW Unggul	50 %	4.624.676.530	50 %	5.087.144.183
2 07 26	002		Pemberdayaan lingkup PKK	- persentase PKK Unggul	60 %	400.000.000	60 %	440.000.000
2 07 26	003		Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Persentase Karang Taruna Unggul	60 %	400.000.000	60 %	440.000.000
2 07 26	004		Pemberdayaan Lingkup LPM	- Cakupan LPM Unggul	60 %	399.999.850	60 %	439.999.835

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kegiatan	1.617.261.400		1.778.987.540
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah - Jumlah Koperasi Juara	3 Koperasi 4 Koperasi	11.069.000	3 Koperasi 4 Koperasi	12.175.900
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	4 RW	1.230.000.000	4 RW	1.353.000.000
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	4 RW 6 RW	320.913.000	4 RW 6 RW	353.004.300
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial			36.060.000		39.666.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Kegiatan musrenbang	1 kegiatan	19.219.400	1 kegiatan	21.141.340

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.35 Kecamatan Cinambo

Total Pagu : 15.240.757.050

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)			2		3	4	5	6	7
4			Urusan Penunjang						
4	05		Fungsi Penunjang Lainnya						
4	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 laporan	1.302.024.040	100 %	1.432.226.444	
4	05	01	002 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	158.401.600	12 laporan	174.241.760	
4	05	01	006 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraanyang dibayarkan jasa perizinannya	24 Unit	9.358.000	24 Unit	10.293.800	
4	05	01	008 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 Jasa Bulanan	3.600.000	12 Jasa Bulanan	3.960.000	
4	05	01	009 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terealisasi	6 Unit	23.750.000	6 Unit	26.125.000	
4	05	01	010 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan	98.301.600	12 laporan	108.131.760	
4	05	01	011 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terealisasi	12 laporan	66.805.000	12 laporan	73.485.500	
4	05	01	012 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terealisasi	12 laporan	19.830.000	12 laporan	21.813.000	
4	05	01	013 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	12 laporan	179.981.440	12 laporan	197.979.584	
4	05	01	014 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terealisasi	12 laporan	45.587.800	12 laporan	50.146.580	
4	05	01	015 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan	13.824.000	12 laporan	15.206.400	
4	05	01	017 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 laporan	197.584.600	12 laporan	217.343.060	
4	05	01	018 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah laporan kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	125.000.000	12 laporan	137.500.000	
4	05	01	019 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan	360.000.000	12 laporan	396.000.000	
4	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	6.799.500.500	100 %	7.479.450.550	
4	05	02	003 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor			6.096.800.000		6.706.480.000	
4	05	02	022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Yang terpelihara	1 gedung	228.017.500	1 gedung	250.819.250	
4	05	02	024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional terpelihara	38 kendaraan	443.788.000	38 kendaraan	488.166.800	
4	05	02	042 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung yang direhab	1 gedung	30.895.000	1 gedung	33.984.500	
4	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin aparatur	100 %	66.000.000	100 %	72.600.000	
4	05	03	002 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60 Stel	66.000.000	60 Stel	72.600.000	
4	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	61.886.800	100 %	68.075.480	
4	05	05	004 Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur	60 orang	61.886.800	60 orang	68.075.480	
1			Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	03	42	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum	Prosentase minimal ruas jalan dan saluran dalam kondisi bersih	83,7 Nilai	731.897.150	76 %	805.086.865	
1	03	42	014 Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	- Panjang Drainase terpelihara - Panjang Ruas Jalan yang terpelihara	50 M / Lari meter	658.043.700	50 M / Lari meter	723.848.070	
1	03	42	015 Pemeliharaan RTH Kecamatan	- Jumlah Taman terpelihara	5 Tempat	20.058.500	5 Tempat	22.064.350	
1	03	42	016 Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	- Panjang kerb terpelihara	4000 meter	53.794.950	4000 meter	59.174.445	
2			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2	06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2	06	20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	100 %	597.528.500	82,5 Nilai	657.281.350	
2	06	20	001 Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- IKM Layanan Kependudukan	82.5 Nilai	28.885.000	82.5 Nilai	31.773.500	
2	06	20	002 Kegiatan Pembinaan RT RW	- Cakupan RT RW Terbina	100 %	568.643.500	100 %	625.507.850	
2	07		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
2	07	26	Program Pemberdayaan Kewilayahan	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	3 RW	4.235.956.360	82 %	4.659.551.996	
2	07	26	001 Pemberdayaan Lingkup RW	- Jumlah RW Unggul	RW	3.096.955.100	RW	3.406.650.610	

2	07	26	002	Pemberdayaan lingkup PKK	- Prosentase PKK Unggul	%	398.206.800	%	438.027.480
2	07	26	003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Prosentase Karang Taruna Unggul	%	392.440.000	%	431.684.000
2	07	26	004	Pemberdayaan Lingkup LPM	- Prosentase LPM Unggul	%	348.354.460	%	383.189.906
2	07	28		<b>Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	<b>1 kegiatan</b>	<b>1.445.963.700</b>	<b>75 %</b>	<b>1.590.560.070</b>
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- Jumlah koperasi di tempat ibadah - Jumlah Koperasi Juara	1 Koperasi 1 Koperasi	40.249.000	1 Koperasi 1 Koperasi	44.273.900
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	3 RW	875.601.000	3 RW	963.161.100
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah RW Berdaya - Jumlah Posyandu Purnama	RW Posyandu	396.867.700	RW Posyandu	436.554.470
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial	- Jumlah RW siaga - Jumlah Kagana kelurahan	RW Kelompok	83.600.000	RW Kelompok	91.960.000
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah Kegiatan Musrenbang	1 kegiatan	49.646.000	1 kegiatan	54.610.600

**Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bandung tahun 2020**

Nama Perangkat Daerah : 4.05.36 Kecamatan Mandalajati

Total Pagu : 14.334.255.970

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
(1)	2		3	4	5	6	7
<b>4</b>			<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>4 05</b>			<b>Fungsi Penunjang Lainnya</b>				
<b>4 05 01</b>			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>12 laporan</b>	<b>1.433.394.300</b>	<b>1.576.733.730</b>
4 05 01 002		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan bulanan	158.125.400	12 laporan bulanan	173.937.940
4 05 01 006		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perizinannya	7 Unit	12.236.900	7 Unit	13.460.590
4 05 01 008		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Jasa Bulanan Kebersihan Kantor	12 laporan bulanan	159.314.000	12 laporan bulanan	175.245.400
4 05 01 009		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jumlah unit peralatan kerja yang di perbaiki yang terrealisasi	12 laporan bulanan	82.425.000	12 laporan bulanan	90.667.500
4 05 01 010		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 laporan bulanan	88.768.900	12 laporan bulanan	97.645.790
4 05 01 011		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jumlah laporan penyediaan cetakan dan penggandaan yang terrealisasi	12 laporan bulanan	50.094.720	12 laporan bulanan	55.104.192
4 05 01 012		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang terrealisasi	12 laporan bulanan	40.351.300	12 laporan bulanan	44.386.430
4 05 01 013		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terrealisasi	12 laporan bulanan	95.205.480	12 laporan bulanan	104.726.028
4 05 01 014		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang terrealisasi	12 laporan bulanan	25.762.100	12 laporan bulanan	28.338.310
4 05 01 015		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 laporan bulanan	7.852.000	12 laporan bulanan	8.637.200
4 05 01 017		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman terrealisasi	12 laporan bulanan	80.081.000	12 laporan bulanan	88.089.100
4 05 01 018		Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			75.000.000		82.500.000
4 05 01 019		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	- Jumlah laporan jasa bulanan pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	12 laporan bulanan	414.177.500	12 laporan bulanan	455.595.250
4 05 01 020		Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor			144.000.000		158.400.000
<b>4 05 02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Peresentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik	<b>100 %</b>	<b>758.252.100</b>		<b>834.077.310</b>
4 05 02 022		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah unit bangunan terpelihara	1 Unit	241.147.200	1 Unit	265.261.920
4 05 02 024		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	17 Unit	517.104.900	17 Unit	568.815.390
<b>4 05 03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase pemenuhan prasarana kedisiplinan pegawai	<b>100 %</b>	<b>33.000.000</b>		<b>36.300.000</b>
4 05 03 005		Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang terealisasi	-	33.000.000	-	36.300.000
<b>1</b>			<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>				
<b>1 03</b>			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>1 03 42</b>		<b>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Persentase minimal ruas jalan dalam kondisi baik	<b>83,7 Nilai</b>	<b>1.125.791.000</b>		<b>1.238.370.100</b>
1 03 42 014		Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan			1.007.780.500		1.108.558.550
1 03 42 015		Pemeliharaan RTH Kecamatan	- luas RTH kecamatan terpelihara	5000 M2/tahun	118.010.500	5000 M2/tahun	129.811.550
<b>2</b>			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>				
<b>2 06</b>			<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>				
<b>2 06 20</b>		<b>Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	<b>100 %</b>	<b>1.691.154.000</b>		<b>1.860.269.400</b>
2 06 20 001		Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	- Daftar Nominatif Pelayanan Lengkap	12 laporan bulanan	245.454.000	12 laporan bulanan	269.999.400
2 06 20 002		Kegiatan Pembinaan RT RW	- Jumlah RT RW mendapatkan pembinaan	72 orang	1.445.700.000	72 orang	1.590.270.000
<b>2 07</b>			<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>				
<b>2 07 26</b>		<b>Program Pemberdayaan Kewilayahan</b>	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	<b>3 RW</b>	<b>7.811.752.170</b>		<b>8.592.927.387</b>
2 07 26 001		Pemberdayaan Lingkup RW	- Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	36 sub kegiatan	6.611.717.770	36 sub kegiatan	7.272.889.547
2 07 26 002		Pemberdayaan lingkup PKK	- Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Lingkup PKK	21 sub kegiatan	400.111.300	21 sub kegiatan	440.122.430
2 07 26 003		Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	- Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup Karang Taruna	18 sub kegiatan	400.054.000	18 sub kegiatan	440.059.400
2 07 26 004		Pemberdayaan Lingkup LPM	- Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan lingkup LPM	21 sub kegiatan	399.869.100	21 sub kegiatan	439.856.010

2	07	28		Program Peningkatan Peran Kelembagaan, masyarakat, keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peran kelembagaan dan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 kegiatan	1.480.912.400		1.629.003.640
2	07	28	001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	- jumlah koperasi di tempat ibadah	1 Koperasi	14.781.000	1 Koperasi	16.259.100
2	07	28	002	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	- Jumlah RW yang memiliki siskamling aktif	11 RW	638.348.000	11 RW	702.182.800
2	07	28	003	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat Kewilayahan	- Jumlah Kader pemberdayaan kewilayahan Aktif	161 laporan bulanan	662.698.000	161 laporan bulanan	728.967.800
2	07	28	004	Kegiatan peningkatan SDM Kader kesejahteraan sosial			127.593.000		140.352.300
2	07	28	005	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kewilayahan	- Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan	200 Orang Kali	37.492.400	200 Orang Kali	41.241.640